

# CAKRAWALA PENDIDIKAN

Didedikasikan kepada:

**Dr. Setijadi, M.A.**

Penyunting:

**Paulina Pannen, dkk.**



PUSAT PENERBITAN  
UNIVERSITAS TERBUKA  
Oktober 2002

# CAKRAWALA PENDIDIKAN



Didedikasikan kepada:

**Dr. Setijadi, M. A.**

Penyunting:

**Paulina Pannen, dkk.**



PUSAT PENERBITAN  
UNIVERSITAS TERBUKA  
OKTOBER 2002

Hak Cipta ©  
pada Pusat Penerbitan Universitas Terbuka  
Kotak Pos 6666 – Jakarta 10001  
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini  
dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit

Cetakan pertama, Desember 1999  
Cetakan kedua, Oktober 2002

#### Tim Penyunting

1. Paulina Pannen
2. Asmawi Zainul
3. Bambang Sutjiatmo
4. Durri Andriani
5. Ida Malati Sadjati
6. I.G.A.K. Wardani
7. Noehi Nasoetion
8. Subagjo
9. Susy Puspitasari
10. Tian Belawati
11. Trini Prastati
12. Udin S. Winataputra

#### Tim Teknis

1. Zairulsyah
2. Rumitir Sitompul
3. Audry Tarore

Desain Cover:  
Heroe Noegroho

370

CAK CAKRAWALA PENDIDIKAN :Buku Lustrum UT/  
penyunting Paulina Pannen [et.al] - Jakarta:  
Universitas Terbuka, 2002  
426p.:ill.;22 cm

ISBN: 979-689-390-8

I. Pannen, Paulina



# CAKRAWALA PENDIDIKAN

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	v
Pendahuluan .....	ix
 <b>Bab I : Pendidikan Tinggi: Menyongsong Masa Depan</b>	
1. Kemutlakan Peralihan Pradigma Universitas Masa Depan: Referensi Negara Sedang Berkembang .....	3
<i>Winarno Surakhmad</i>	
2. Pendidikan Setelah Era Orde Baru .....	28
<i>Aria Djalil</i>	
3. Problematika dan Strategi Pendidikan di Indonesia Dalam Era Pasca Modernisasi .....	43
<i>Agus Joko Purwanto</i>	
4. Pendidikan Tinggi untuk Milenium Ketiga .....	60
<i>Conny R. Semiawan &amp; Tian Belawati</i>	
5. Implikasi Penetapan PTN sebagai Badan Hukum Milik Negara Dari Perspektif Psikologi Sosial .....	74
<i>Conny R. Semiawan</i>	
 <b>Bab II : Pendidikan dan Pembelajaran</b>	
6. Teknologi Pendidikan: Hakikat, Desain, Media, dan Strategi Penyampaian .....	85
<i>Atwi Suparman, dkk</i>	
7. Teknologi Pendidikan: Difusi & Implementasi, Manajemen, Evaluasi, dan Aplikasi di Berbagai Sektor .....	116
<i>Atwi Suparman, dkk</i>	
8. Karakteristik Dasar Proses Belajar .....	149
<i>Bambang Sutjiatmo</i>	

---

9.	Pembelajaran Yang Berfokus Pada Peserta Didik: Konsep dan Prasyarat Implementasi .....	157
	<i>Aris Pongtuluran &amp; Arlinah Imam Rahardjo</i>	
10.	Interaktivitas Dalam Proses Belajar Mengajar Pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh Melalui Media .....	170
	<i>Dewi Padmo Putri</i>	
11.	Menumbuhkan Dan Memelihara Motivasi: Suatu Upaya Untuk Mempertinggi Persistensi Mahasiswa .....	183
	<i>Siti Julaeha</i>	
12.	Pendidikan Terbuka: Menunggu Reformasi Pola Pikir Mendasar .....	200
	<i>Tian Belawati</i>	
13.	Universitas Terbuka: Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tinggi di Indonesia .....	210
	<i>Nuraini Soleiman</i>	
14.	Pelembagaan Upaya Pengendalian Mutu Akademik di Perguruan Tinggi .....	234
	<i>Subagjo</i>	

### **Bab III: Pengembangan Pendidikan**

15.	Pendidikan Luar Biasa: Profil, Harapan, dan Tantangan .....	253
	<i>I.G.A.K. Wardani</i>	
16.	Pendidikan Orang Dewasa .....	270
	<i>Tisnowati Tamat</i>	
17.	Bimbingan dan Konseling: Penegak Dimensi-Dimensi Pendidikan .....	292
	<i>Prayitno</i>	
18.	Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar .....	310
	<i>Tisnowati Tamat</i>	

---

#### **Bab IV: Evaluasi Dalam Pendidikan**

19. Evaluasi Pendidikan: Khususnya Pendidikan Tinggi di Indonesia ..... 331  
*Siti Rasmunah*
20. Model Evaluasi “Context, Input, Process, Product (CIPP)” untuk Institusi Penyelenggara Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh ..... 343  
*Durri Andriani*
21. Evaluasi Diri dan Dampaknya Bagi Mahasiswa ..... 354  
*Toeti Soekamto*

#### **Bab V : Pendidikan Bidang Ilmu**

22. Perkembangan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Program Kurikuler ..... 365  
*Udin S. Winataputra*
23. Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia: Perkembangan dan Prospeknya ..... 397  
*Nuril Huda*

**Biodata Setijadi .....413**

**Biodata Penulis .....417**

---

## **KATA PENGANTAR**

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Mengingat peran sentral pendidikan ini, tidak aneh jika banyak bermunculan pemikiran tentang pendidikan. Sebagian pemikiran ini dituangkan dalam tulisan dan sebagian lagi baru sempat diutarakan dalam kata-kata. Pemikiran tertulis belum semuanya didokumentasikan dengan baik.

UT melihat perlunya mendokumentasikan pemikiran tentang pendidikan. Dengan dokumentasi yang baik, pemikiran akan dapat dibaca, didiskusikan, dan mungkin juga diterapkan oleh lebih banyak pemerhati. Di samping itu, dengan dokumentasi yang baik, pemikiran tersebut akan dapat dicermati para pemikir pendidikan dari masa ke masa.

Untuk itu, dan dengan memanfaatkan momen ulang tahun ke 70 salah seorang pendiri UT, Dr. Setijadi, UT menerbitkan dua buah buku tentang pendidikan. Buku pertama yang telah diterbitkan pada bulan September 1999, lebih difokuskan pada pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sementara itu, buku ini yang merupakan buku kedua, ditujukan untuk mendokumentasikan pemikiran di bidang pendidikan yang lebih luas. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi pendidikan tinggi menyongsong masa depan, pendidikan dan pembelajaran, pengembangan pendidikan, evaluasi dalam pendidikan, dan juga pendidikan bidang ilmu.

Seperti buku pertama, buku ini ditulis oleh para rekan, dan "murid" Dr. Setijadi, serta pengelola UT. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis atas partisipasinya dalam mengisi buku ini. Terima kasih saya sampaikan juga kepada para penyunting buku ini. Di samping itu, tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengetik dan penata letak buku ini.

Saya berharap agar buku ini, bersama buku pertama, dapat menjadi catatan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 6 Desember 1999

Bambang Sutjiatmo  
Rektor Universitas Terbuka

## ***PENDAHULUAN***

---

## **PENDAHULUAN**

### Tim Penyunting

Dari masa ke masa, berbagai persoalan pendidikan muncul silih berganti. Terlebih lagi saat ini, ketika pendidikan di Indonesia menghadapi masa yang paling kritis, yaitu masa peralihan abad, dengan segala perubahan yang dibawa seiring dengan peralihan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan proses pendidikan di Indonesia pada umumnya, dan menimbulkan serangkaian tantangan yang perlu dijawab.

Buku ini merupakan serangkaian pemikiran yang dituliskan oleh berbagai kalangan di dunia pendidikan yang bercerita tentang kesiapan dan strategi pendidikan tinggi di Indonesia menyongsong berbagai perubahan yang sedang terjadi secara global di segala bidang, termasuk di dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, buku ini juga menyajikan beragam opini maupun hasil kajian terhadap situasi dan teori-teori dalam bidang pembelajaran, pengembangan pendidikan, evaluasi pendidikan, dan pendidikan khusus bidang ilmu.

Buku ini ditulis sebagai ungkapan rasa cinta. Pertama-tama, karya-karya yang terkumpul dalam buku ini mengungkapkan rasa cinta yang mendalam dari masing-masing penulis – sebagai pengamat pendidikan, praktisi pendidikan, atau pemimpin dalam dunia pendidikan – terhadap bidang pendidikan, yang telah digeluti, diamati, maupun dijalankan beberapa waktu lamanya. Di samping itu, 23 artikel dalam buku ini ditulis sebagai ungkapan rasa cinta dan kagum yang amat dalam terhadap Dr. Setijadi, salah seorang pemimpin pendidikan dan praktisi pendidikan di Indonesia. Ke 23 artikel tersebut ditulis oleh sahabat, rekan dan murid Dr. Setijadi selama beliau berkarya dalam dunia pendidikan di tanah air.

Di samping itu, buku ini ditulis dengan tujuan untuk mendokumentasikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dalam

---

dunia pendidikan dari pengamat pendidikan, praktisi dan pemimpin pendidikan. Buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dunia pendidikan di Indonesia.

### **Sistematika Buku**

Buku ini berisi 23 artikel yang dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu 1) Pendidikan Tinggi dalam Menyongsong Masa Depan, 2) Pendidikan dan Pembelajaran, 3) Pengembangan Pendidikan, 4) Evaluasi dalam Pendidikan, dan 5) Pendidikan khusus untuk bidang ilmu.

Dalam bagian satu, ada lima artikel yang berfokus pada kesiapan dan strategi yang perlu diperhatikan oleh institusi pendidikan tinggi dalam menyikapi perubahan yang terjadi secara internal maupun eksternal, ancaman serta tantangan yang muncul seiring dengan perubahan tersebut, serta kualitas pendidikan tinggi. Artikel-artikel dalam bagian satu ini lebih banyak merupakan tinjauan makro terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Jika bagian satu bersifat sangat makro, maka bagian dua bersifat sangat mikro. Artikel-artikel dalam bagian dua ini berfokus pada pembelajaran, suatu proses inti yang harus terjadi dalam sebuah pendidikan. Beragam komponen pembelajaran yang memperoleh perhatian pada bagian dua ini meliputi teknologi pembelajaran, sistem dan karakteristik pembelajaran, motivasi peserta didik, pemanfaatan media, serta pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Tinjauan dan pembahasan dalam artikel-artikel tersebut dilandaskan pada kajian empiris maupun kajian teoritis.

Bagian tiga menyajikan empat artikel tentang pengembangan pendidikan, terutama dalam hal pendidikan luar biasa, pendidikan orang dewasa, bimbingan dan konseling, serta pendidikan jasmani. Sementara itu, evaluasi dalam pendidikan dibahas secara khusus dalam bagian empat. Evaluasi seringkali merupakan kata yang selalu didengung-dengungkan, namun jarang sekali dilakukan/diimplementasikan. Pandangan tentang evaluasi pendidikan secara makro maupun mikro terdapat dalam tiga artikel pada bagian empat.

---

Bagian lima menyajikan khusus pembahasan tentang perkembangan pendidikan bidang ilmu, khususnya dalam hal ini ialah bidang ilmu pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia. Masalah yang dihadapi masing-masing bidang ilmu untuk berkembang dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah beragam, sehingga menuntut penyelesaian masalah yang beragam dan fleksibel pula.

Buku yang sarat dengan kupasan beragam permasalahan dalam bidang pendidikan di Indonesia pada umumnya, diharapkan dapat memicu pemikiran-pemikiran tentang upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Pada akhirnya, buku ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

***BAB I***

***PENDIDIKAN TINGGI:***

***MENYONGSONG MASA DEPAN***

# 1. KEMUTLAKAN PERALIHAN PARADIGMA UNIVERSITAS MASA DEPAN: REFERENSI NEGARA SEDANG BERKEMBANG\*)

---

---

Winarno Surakhmad

## Universitas Bukan Segalanya

Universitas bukanlah konsekuensi logis pendidikan menengah. Artinya, tidak otomatis, bahkan tidak mutlak, bahwa setiap orang lulus pendidikan menengah harus mengikuti pendidikan universitas untuk mendapatkan "kebulatan" pendidikan. Bahwa tingkat universitas adalah "lebih tinggi" dari tingkat pendidikan dasar dan menengah, telah diterima masyarakat tanpa pernah bertanya: 'Lebih tinggi di dalam hal apa!' Dari segi falsafah pengembangan manusia seutuhnya, pandangan kita tentang nilai universitas tidak boleh hanya didasarkan atas perbedaan tingkat atau kedudukan lembaga tersebut terhadap lembaga-lembaga lainnya. Tidak tepat kita berpendapat, misalnya, bahwa pendidikan di dalam keluarga adalah pendidikan yang jauh lebih *rendah* dibandingkan dengan 'pendidikan' (kalau istilah ini tepat!) di universitas, hanya karena universitas adalah institusi pendidikan dalam urutan posisi yang terakhir. Apakah memang betul bahwa pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam taman asuhan, pendidikan di sekolah dasar dan menengah (harus) lebih rendah daripada pendidikan universitas?

---

\* Sebagian substansi tulisan ini, dengan judul yang sama, telah diuraikan di dalam forum:

1. Studium Generale / Kuliah Umum, Universitas Bandung Raya, Bandung, 18 September 1999
2. Seminar/Lokakarya FIP dan JIP IKIP se Indonesia, Yogyakarta, 5-7 Oktober 1999

Bahwa kehadiran universitas itu terwujud sesudah sekolah menengah, belum cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa karenanya maka pendidikan universitas – dari sudut pandang pengembangan hakikat manusia seutuhnya – harus lebih baik dari pendidikan-pendidikan yang sebelumnya. Bahwa universitas adalah lembaga tahap terakhir untuk secara lebih intensif dan terarah menghasilkan ilmuwan, pemikir, dan pemimpin masa depan di dalam berbagai bidang, juga belum dapat menjadi alasan menyimpulkan adanya *superioritas* kependidikan universitas. Bukan pada saat seseorang memasuki universitas, baru dimulai usaha pengembangan potensi manusia untuk berkembang secara utuh. Proses ini telah terjadi lama *sebelum* seseorang memasuki tingkat universitas. Proses belajar berpikir, proses belajar mengenal masalah, belajar mengambil keputusan, belajar bernalar tentang hal yang benar dan yang salah, berakhlak untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, telah diaktualisasikan semenjak seseorang anak dilahirkan, dan berlanjut *dengan* atau *tanpa* universitas. Singkatnya, universitas bukanlah lembaga yang pertama, dan juga bukan lembaga satu-satunya, yang dapat *mengklaim* sebagai lembaga pendidikan.

Jadi pada hakikatnya universitas tidak dapat dan tidak boleh berpretensi menjadi sebuah kekuatan tunggal di dalam intervensi kependidikan. Andai katapun ada di antara kita yang berkeras untuk memandang universitas secara *das Sollen* sebagai lembaga “puncak” yang merupakan titik kulminasi pendidikan, masih patut dipertanyakan bagaimana universitas “puncak” tersebut di dalam realitas, sebagai *das Sein*.

Kalau pendidikan adalah proses *normatif* (bukan sekadar proses *teknis*!) yang berhubungan langsung dengan penumbuhan rasa kagum manusia terhadap keagungan khaliknya; kalau ia adalah nilai yang berkaitan dengan pengembangan potensi manusia sebagai insan yang mandiri lahir dan batin; kalau pendidikan adalah kekuatan yang memerdekakan manusia, yang memperkuat moral dan akhlaknya, dan memperkuat daya nalarnya; kalau pendidikan memberdayakan manusia untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi; kalau, singkatnya, pendidikan adalah proses *normatif* yang *memanusiakan manusia*, maka apakah beralasan bagi

universitas untuk berkata bahwa *das Sein* memang adalah perwujudan *das Sollen*, kalau diketahui bahwa nilai-nilai kemanusiaan tersebut di dalam realitas terdesak oleh perhatian universitas yang terfokus hanya pada aspek *kognitif* manusia, dan bahwa nilai-nilai yang lain terabaikan oleh program pengembangan ilmu dan teknologi, yang seakan-akan *tidak* berkaitan dengan keimanan dan kebudayaan. Singkatnya, dengan realitas itu, pendidikan di universitas bukan (dan belum) segala-galanya, dan ini berlaku mungkin pada semua universitas di tanah air.

### **Universitas dan Sumber Daya Manusia**

Sejak diterbitkannya hasil studi intensif mengenai hubungan sumber daya manusia dan pembangunan yang dilakukan di berbagai negara sekitar 1965 (Harbison dan Myers), para pengelola universitas menjadi semakin yakin bahwa jelas ada *korelasi yang positif* antara pendidikan (tinggi) dengan keberhasilan pembangunan. Sejak itu pula, para pengelola, terutama dari negara-negara yang baru mulai berkembang, berbicara mengenai kebutuhan yang mendesak akan perlunya universitas sebagai tempat melatih, mengajar, atau mendidik sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi, yang diperlukan sebagai dinamisator di dalam pembangunan: sebagai ilmuan yang cangguh, sebagai pemikir yang tajam, sebagai penemu yang handal, sebagai pemimpin yang tangguh, dan sebagai apa jugapun yang dipikirkan (diharapkan) menjadi kekuatan pembangunan. Maka, di negara-negara yang baru berkembang itu, menjadilah universitas sebagai sebuah *simbol* kemajuan. Logikanya sederhana: universitas adalah pabrik tenaga terdidik; makin banyak universitas, makin banyak lulusan; dan makin banyak lulusan, makin banyak tenaga terdidik; bukankah tenaga itulah yang teramat dibutuhkan di dalam pembangunan?

Tetapi logika itu baru sebahagian dari kisah perkembangan perguruan tinggi. Bahagian yang lain adalah kisah realitas yang *negatif*, yang menggambarkan begitu banyaknya kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi sehingga kehendak untuk menjadikan universitas sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia tidak dapat berjalan mulus. Ketiadaan pengalaman

menyebabkan para pengelola pemerintahan seperti tidak seberapa menyadari bahwa untuk merealisasikan kehendak tersebut pertama-tama diperlukan modal pengelola universitas yang professional, berpengalaman, dan berwawasan luas ke depan. Pada banyak negara muda, modal dasar ini tidak ada, sehingga terpaksa universitas dikelola sebisa-bisanya, semampunya, bahkan *seada-adanya*.

Modal kedua adalah modal biaya dan infrastruktur, yang juga tidak pernah mencukupi. Akibat logis yang terjadi adalah kondisi negatif yang sangat menyedihkan: dengan sumber belajar – terutama perpustakaan yang up-to-date – yang sangat terbatas, dengan laboratorium yang terbatas, dengan biaya penelitian yang terbatas, dengan tenaga dosen yang terbatas, baik kuantitas maupun kualitas, negara-negara muda yang kurang modal itu terpaksa *berkompromi* dengan sesuatu yang tidak boleh dikompromikan: *berkompromi dengan kualitas*. Prestasi apa yang dapat kita jabarkan dari output universitas yang demikian? Pengamatan sekilas memberikan kesan bahwa walaupun lulusan universitas di Indonesia umumnya masih dapat berharap akan terpakai di dalam negeri, pada umumnya daya saing mereka di luar, dalam konteks ASEAN sekalipun, sangat rendah. Pasar kerja ASEAN tampak kurang terbuka bagi mereka. Kalau pengamatan ini betul, maka pertanyaan yang cukup berat dihadapkan kepada pengelola universitas ialah apakah arti dan implikasi realitas ini di dalam menumbuhkan daya persaingan global. Membiarkan kondisi negatif tersebut berkelanjutan – *dengan dalih apapun* – adalah membiarkan Indonesia menjadi bangsa yang tersingkirkan. Ini akan semakin menjadi kenyataan apabila persaingan global di pasar bebas (bidang apapun) telah berlangsung *in full swing*.

Karena itu, sebenarnya sangat mudah dipahami mengapa usaha mengembangkan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh tangguh sebagai yang diharapkan, tidak dapat dicapai hanya dengan *semangat* asal mendirikan universitas, bahkan tidak dengan *tekad* mendirikan universitas sebanyak-banyaknya sekalipun. Universitas adalah sebuah lembaga pembangunan yang karena mempunyai peranan spesifik, memerlukan pengelolaan *professional*, yang tidak mudah dipahami oleh mereka yang

bersinggungan dengan universitas hanya secara okasional, atau insidental. Keterbatasan *kemampuan*, yang seringkali bergabung dengan keterbatasan *kemauan*, menyebabkan peran dan persyaratan khusus itu terdesak ke samping. Sebagai gantinya, yang menonjol justru adalah konsiderans lain, dengan motivasi yang berbeda-beda, yang umumnya tidak seberapa relevan dengan aspirasi pengembangan sumber daya manusia terdidik untuk pembangunan. Ada yang dominan bermotif politik, atau motif kedaerahan, profit komersial, agama, dan lain-lain. Universitas tidak perlu khawatir kehabisan peminat, sedikitnya dilihat dari sudut kebutuhan *menampung* lulusan sekolah menengah, yang dalam pada itu memang tidak mudah terserap di dalam dunia kerja. Tanpa *exposure kependidikan* yang tepat, lulusan universitas serupa itu mudah merasa telah memiliki bekal ilmu yang tinggi dan mencukupi, walaupun sesungguhnya jauh dari itu. Tetapi, apa lagi yang dapat dilakukan: bukankah mereka telah menjadi sarjana tersekolah, lulusan universitas, yang dikukuhkan dengan berbagai gelar kesarjanaaan? Inilah kemudian yang menjadi satu petunjuk terjadinya *inflasi* hasil universitas, semakin bertambah di dalam kuantitas dan semakin berkurang di dalam kualitas.

Negara yang berpenduduk sebesar Indonesia, yang tingkat pertumbuhan penduduknya masih relatif tinggi dibandingkan dengan kemampuan menanganinya, akan menghasilkan lulusan sekolah menengah yang setiap tahunnya menjadi semakin bertambah. Bagi enterprenur *opportunistis* yang tidak hirau mengenai kepentingan pembangunan, realitas ini menjadi pasar bisnis yang menguntungkan. Tidak adanya sikap positif mereka yang menghargai kualitas menyebabkan banyak universitas didirikan terutama (atau semata-mata?) dengan konsiderans *bisnis* yang menguntungkan. Tetapi dari segi kepentingan pembangunan, umumnya ini adalah langkah *kontra produktif* yang, selain sangat merugikan, juga sangat berbahaya: para mahasiswa yang diberi kesan telah mendapat pendidikan yang terbaik, akan lulus dengan perasaan demikian, dan tanpa sadar, sering menuntut perlakuan yang setimpal. Sayangnya, masyarakatpun, tanpa kritis, memenuhi tuntutan itu! Ekse yang lebih ekstrim sudah mulai tampak: dengan adanya program-program *peraman* – yang dipulas dengan berbagai terminologi yang menyesatkan -- yang memungkinkan

seseorang memperoleh *gelar* (bukan *ilmu!*) dalam waktu antara enam atau tiga bulan (bahkan konon juga dalam seminggu) melalui beberapa 'perkuliahan' akhir minggu, menyebabkan pasaran kerja mulai *dicemari* oleh sarjana-sarjana peraman. Ekses selanjutnya akan tampak di dalam kompetensi aktual hasil peraman tersebut. Karena dikukuhkan, masyarakat terkelabui. Pembangunan masa depan yang dipercayakan kepada mereka yang tidak kompeten, jelas menghadapi bahaya. Tetapi, sering kita putus asa: siapa lagi yang peduli?

Bukan hasil-hasil serupa itu yang ditemukan oleh Harbison dan Myers. Bertolak dari kesimpulan bahwa lembaga pendidikan tinggi yang memang didesain secara professional, dan dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi, memang telah ternyata bahwa korelasi antara pendidikan tinggi yang berkualitas, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan dengan proses pembangunan yang berhasil dengan kualitas tinggi, bukan hanya positif, tetapi juga tinggi. Dengan perkataan lain, mutu sumber daya manusia pembangunan berkorelasi dengan kualitas universitas, *bukan dengan kuantitas*. Indikator-indikator empiris seperti ini harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah dan para pengelola di dalam merumuskan strategi baru pengembangan sumber daya manusia terdidik melalui universitas. Universitas yang "berani" (sebenarnya bukan bukan soal keberanian, tetapi lebih merupakan soal kesadaran) memberikan penghargaan tertinggi dan pelayanan terbaik kepada tenaga-tenaga akademik, adalah universitas yang pada akhirnya akan menuai hasil yang terbaik, dari sudut kualitas.

Pengalaman beberapa negara yang semula memiliki sumber kekayaan alam yang terbatas -- mungkin jauh lebih terbatas dari kekayaan tanah air kita --, yang kemudian berkembang sebagai negara yang maju, *pertama-tama* disebabkan oleh perkembangan sumber daya manusia yang kapabel untuk mengolah sumber alam. Dengan manusia yang terdidik, produktivitas akan meningkat, dan dari situ lahir mata rantai yang pada akhirnya membuahakan kemajuan; kemampuan yang tinggi memungkinkan produktivitas yang tinggi; produktivitas yang tinggi memberikan keuntungan yang tinggi, yang memungkinkan investasi yang lebih tinggi, yang

memungkinkan pengembangan sumber daya semakin tinggi, yang mampu berproduksi semakin tinggi, dan melahirkan kemajuan yang lebih tinggi lagi. Mata rantai kemajuan seperti itu tidak mungkin terjadi di negara-negara yang tidak memiliki sumber daya manusia terdidik. Sumber daya manusia yang terdidik, jelasnya, adalah *potensi* dasar pembangunan; tetapi sumber daya manusia yang tidak terdidik adalah *beban* semata-mata. Beban yang sangat berat.

### **Universitas Menghadapi Dilemma**

Mendirikan universitas yang berkualitas bukan usaha yang mudah, dan usaha itu menjadi lebih tidak mudah bagi negara muda yang belum memiliki tradisi keilmuan, kemapanan ekonomi, kemantapan politik, kestabilan sosial dan – ini sangat penting – kekuatan profesional. Ini perlu membuat kita mempertimbangkan untung rugi mendirikan universitas dalam jumlah yang besar. Di satu pihak, dorongan (dengan motivasi apapun) untuk mendirikan sebanyak mungkin universitas dapat digunakan sebagai petunjuk 'kemajuan' masyarakat. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu sebab mengapa pemerintah tingkat propinsi menilai sangat perlu mendirikan universitas di setiap propinsi. Mungkin dengan pertimbangan yang sama, berbagai kekuatan swasta juga mendirikan universitas, walaupun kemudian ternyata bahwa setelah universitas didirikan, umumnya universitas tersebut, sebagai lembaga penampungan, tidak lepas dari kehidupan yang merana. Di dalam kondisi serupa itu, tanpa tenaga profesional yang cukup, tanpa pusat sumber belajar (terutama perpustakaan) yang *terkini*, tanpa laboratorium yang modern, cukup mengherankan, universitas tersebut masih terus bisa berproduksi. Pengelolaan hanya berarti mempertahankan keberadaan universitas, atau sekadar untuk mencegah universitas dari kebangkrutan. Universitas serupa ini jauh lebih banyak mudaratnya, dibanding manfaatnya.

Jadi di lain pihak, gejala menjamurnya universitas dapat berarti kerugian, apabila universitas hanya menjadi lembaga *penampung*, bukan lembaga *perintis* perkembangan potensi ilmu dan teknologi. Universitas seringkali juga menghadapi situasi dilemmatis di dalam

menetapkan sejauh mana lembaga tersebut harus puas hanya sebagai lembaga *konsumen* ilmu – yang adakalanya mengkonsumsi ilmu yang sudah kadaluwarsa --, sejauh mana lembaga *committed* dan *kapabel* tampil sebagai *produsen*. Indonesia yang menetapkan bahwa fungsi universitas harus merupakan kesatuan dan perwujudan *tiga fungsi utama*, yang implisit dan eksplisit menekankan, di antaranya, pada fungsi *penghasil* ilmu, pada umumnya hanya mampu mewujudkan satu fungsi secara agak teratur: fungsi mengajar. Itupun terlaksana di dalam kondisi dan dengan metodologi yang kurang menggembirakan; banyak ilmuan yang berkepakaran tinggi tetapi kurang mampu memahami tugasnya sebagai manajer pembelajaran. Penelitian sangat jarang dilakukan, dan hasil dari penelitian yang sudah jarang itu, tidak jelas dampaknya; di antaranya sangat mungkin terjadi karena penelitian lebih sering dikendalikan oleh tenaga akademik yang kurang mampu, dan tidak jarang dilaksanakan untuk sekadar memenuhi persyaratan formal. Pengabdian masyarakat banyak berbentuk 'aktivitas lepas' yang tidak lebih dari kerja bakti; aktivitas pengabdian tidak eksplisit didesain berkaitan langsung dengan pengembangan kemampuan mahasiswa sebagai calon ilmuwan. Komponen penelitian seringkali berbentuk sekadar sebagai rangkaian formal pengamatan dan penulisan, yang sedikit sekali, kalau ada, memberikan sumbangan baru pada perkembangan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan.

Usaha pemerintah untuk mendorong kemajuan internal universitas dengan jalan mengadakan badan akreditasi, dapat dimengerti, tetapi penanganan seperti ini dapat diterima tidak lebih sebagai sebuah *necessary evil*. Idealnya, akreditasi hendaknya datang dari bawah, sebagai perwujudan tumbuhnya kesadaran dan kemauan universitas sendiri untuk membenahi diri dan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat umumnya, perkembangan ilmu dan teknologi khususnya. Pengakuan sebenarnya mengenai mutu sebuah universitas ditentukan pertama oleh komunitas ilmiah dan masyarakat pengguna, bukan oleh administrasi pemerintah. Tetapi ketiadaan dua jenis modal dasar yang diperlukan di dalam tubuh perguruan tinggi, manusia terdidik dan dana yang mencukupi, terpaksa melahirkan pendekatan akreditasi dari atas, karena tanda-tanda telah lahirnya kekuatan internal universitas masih juga

belum kelihatan. Maka dunia universitas, terutama swasta, sampai hari ini masih harus berjuang untuk dapat melampaui tingkat perkembangan tertentu. Kalau pada mulanya hanya ada 3, sekarang kita mengenal 4 tahap 'perkembangan': terdaftar, diakui, disamakan, dan *terakreditasi*. Tidak adakah jalan lain?

Jalan tersebut pasti ada. Tetapi alternatif mana yang terbuka, dan mana yang terbaik, sebahagian besar bergantung dari dunia universitas sendiri. Sebagian pengelola universitas berpendirian bahwa tidak tepat memberlakukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan pertumbuhan universitas, terutama terhadap universitas yang masih muda, secara *rigid*. Pada dasarnya, ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah pengelakan untuk dihadapkan pada persyaratan kualitas. Bahwa ada universitas muda yang belum memiliki segenap jenis perlengkapan dan modal yang diperlukan, dapat dipahami apabila proses dan outputnya masih terbatas. Tetapi ini tidak boleh diartikan bahwa universitas muda dapat diterima sebagai universitas yang "tidak dipermasalahan" jika memberikan hasil di bawah standar yang diharapkan. Dengan kata lain, tidak ada satu alasanpun, bagi universitas yang manapun, untuk merasa berhak memberikan output *sub-standard*. Sebab kalau demikian, kapan lagi kita dapat mengharapkan output yang baik setelah sebuah universitas bertahun-tahun hanya melahirkan output yang kurang bermutu?

Situasi lain, dan baru, yang sedang berkembang sekarang ini adalah konsekuensi *desentralisasi* pemerintahan. Dengan desentralisasi, maka problematik pendidikan berubah menjadi pengembangan pendidikan yang berbasis *masyarakat*, bukan lagi pendidikan yang dikelola dari pusat. Dengan problematik itu, masalah yang dikemukakan terdahulu (setiap propinsi beraspirasi mempunyai universitas kebanggaan), menjadi tidak relevan, dan diganti dengan masalah lain di tingkat kabupaten. Perlukah kelak setiap Dati II atau Kotamadya mempunyai universitas kebanggaan masing-masing? Di sinipun dapat timbul dilemma, kecuali kalau kita kembalikan permasalahan kepada intinya: untuk apa kita perlu mempunyai universitas?

Sambil mengembangkan sistem pendidikan baru, yakni pendidikan yang berbasis masyarakat, di mana sekarang sebaiknya

kedudukan universitas sebagai lembaga terkuat di dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkemahiran di dalam ilmu dan teknologi? *Universitas berwawasan kabupaten, propinsi, nasional, atau global? Atau semuanya sekaligus?* Dalam hubungan ini mungkin relevan untuk dipermasalahkan mengapa di masa lalu setiap propinsi seakan-akan *harus* mempunyai 'universitas propinsi' sendiri. Apakah ini sentimen kedaerahan, atau rasionalitas persatuan nasional? Mengapa di masa lalu universitas yang ada di Ambon, bukan yang ada di Bandung, yang *harus* dinamai Universitas Pattimura; yang ada di Ujung Pandang, bukan yang berada di Banjarmasin, yang *harus* bernama Universitas Hasanuddin; yang ada di Yogyakarta, bukan yang di Padang, yang *berhak* bernama Universitas Gajah Mada?. Kecuali di dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang bersifat universal, di mana kepentingan-kepentingan nasional dan regional yang harus menjadi tanggung jawab universitas?

### **Menyikapi Tahun 2020 dan Sesudahnya**

Antara sekarang dan 25 tahun pertama di dalam Abad 21, kita akan menghadapi berbagai peristiwa dunia yang diramalkan akan memberi dampak yang kuat pada kehidupan bangsa-bangsa di dunia, dengan intensitas dan implikasi yang berbeda. Di dalam masa ini, kemampuan pendidikan nasional akan diuji secara terbuka dan menyeluruh, baik dari dalam maupun dari luar. Bangsa-bangsa maju, yang sudah siap berlaga di dalam pertarungan kesejagatan, akan menjadi pemain aktif dan *agresif*, sedangkan bangsa yang baru atau sedang berkembang (Indonesia termasuk kategori ini) mungkin terpaksa memainkan peran pasif dan *defensif*. Rentak pertarungan dan aturan persaingan global tidak mustahil ditentukan oleh pemain yang terkuat, sehingga pemain yang lemah hanya menerima tersisihkan dan menerima berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan. Inilah sebuah konsekuensi logis yang akan muncul apabila pendidikan tidak mampu memberdayakan bangsa untuk bertarung secara objektif dan terbuka di arena internasional. Banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya, yang sudah waktunya *harus* melangkahkan kaki memasuki masa depan, sebenarnya masih *jauh dari siap*.

Pada Abad 21 diramalkan akan timbul beberapa sifat yang akan sangat mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia, dan yang akan menimpa kehidupan generasi muda dengan intensif. Secara sangat umum, sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akan terjadi perubahan yang besar di dalam hampir semua bidang kehidupan, dan bahwa perubahan tersebut akan berlangsung semakin hari semakin terakselerasi.
2. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengambil posisi yang sentral yang langsung mempengaruhi bukan saja gaya hidup manusia sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai seni, moral dan agama.
3. Pertarungan dan persaingan hidup antara bangsa-bangsa tidak akan terbatas di bidang ekonomi saja, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, termasuk bidang budaya dan ideologi.
4. Karena pengaruh ilmu dan teknologi, nilai-nilai moral dan agama akan langsung tertantang, dan bukan mustahil akan timbul sistem nilai yang berbeda dari apa yang dikenal sampai saat ini.

Tidak ada sebuah bangsa yang sedang berkembang yang dapat bertahan menghadapi perubahan dan pengaruh tersebut apabila bangsa itu tidak menyiapkan diri, karena bagaimanapun, negara-negara maju, pada saat memulai start memasuki tahun 2000, telah lebih antisipatif, proaktif, dan karenanya telah lebih dahulu siap; mereka telah berada di dalam kondisi yang jauh lebih menguntungkan.

Pada pertengahan abad ini, jumlah anak didik di negara maju tidak sampai mencapai sebesar 35%, sedangkan di negara yang sedang berkembang, pada saat yang sama, terdapat anak didik dengan jumlah yang hampir dua kali lipat (66%); di dalam angka yang absolut, jumlah keseluruhan anak didik pada masa itu lebih kurang sebesar 2.5 biliun! Dua puluh lima tahun kemudian, pada negara maju didapati penurunan (25%) sedangkan pada negara yang sedang berkembang justru terjadi kenaikan (75%); dalam jumlah absolut, jumlah anak sudah mencapai 4.0 biliun. Diramalkan bahwa ketika kita memasuki hari pertama Abad 21, ketika jumlah anak

didik keseluruhannya sudah mencapai 6.2 bilion, gambaran akan menjadi semakin berubah; diramalkan bahwa akan ada sebesar 20% saja anak didik yang memerlukan penanganan di dunia maju, sedangkan di dunia yang sedang berkembang jumlah akan membengkak sampai 80%. Di dalam kuantitas saja, jumlah sebesar itu jelas akan menjadi beban yang berat.

Memang, jumlah tenaga pengajar juga bertambah dari tahun ke tahun. Antara tahun 1965-1980, tercatat penambahan guru di negara maju sebesar 11% untuk tingkat pendidikan dasar, 39% untuk pendidikan menengah, dan 12% untuk pendidikan tinggi. Di negara yang sedang berkembang, dalam kurun waktu yang sama, penambahan guru berturut-turut adalah 96% untuk pendidikan dasar, 161% untuk pendidikan menengah, dan 332% (!) untuk pendidikan tinggi. Tetapi yang tidak kurang penting untuk dicermati ialah kenyataan bahwa di negara maju terjadi kenaikan anggaran biaya pendidikan untuk setiap anak. Pada tahun 1970 tersedia US\$ 1350 per anak, dan pada tahun 1980 naik menjadi US\$ 2250. Di negara yang sedang berkembang, pada tahun 1970, biaya pendidikan per anak tersedia hanya US\$ 80, dan jumlah yang kecil itu menjadi semakin kecil setiap tahun. Dengan kenyataan itu, jelas bahwa para perancang pendidikan menghadapi lagi kesulitan di dalam menentukan penggunaan dana; pada saat uang yang tersedia begitu sedikit, anak didik semakin banyak, dan masalah sosial semakin rumit, semakin banyak juga masalah kependidikan yang muncul; hampir semua masalah tersebut memerlukan prioritas penanganan. Karenanya, memilih alternatif yang terbaik, menjadi proses pengambilan keputusan yang sangat sukar. Padahal, pada saat yang sama kita harus menyiapkan generasi anak didik menjadi generasi yang tangguh.

Ketika Asian Free Trade Association (AFTA), pada tahun 2003 menjadi kenyataan, bagi kita berarti bahwa batas-batas gerak dunia perdagangan yang intensif, bahkan yang mungkin agresif, akan semakin kabur; dan langsung atau tidak langsung, gejala ini pasti berdampak di dalam perkembangan universitas. Tetapi sampai saat ini, sangat sulit untuk menemukan universitas mana, di luar fakultas non-ekonomi, yang memasukkan program kerjasama regional seperti AFTA dan Asia Pacific Economic

Cooperation (APEC) pada tahun 2020, serta yang bersifat global seperti dalam konteks World Trade Organization (WTO), sebagai motivasi persiapan generasi muda memasuki era tersebut. Bahkan dalam berbagai kerjasama segitiga pertumbuhan, di mana Indonesia langsung terlibat (IMT, IMB, IMP, IAP, dan IMS) program pertumbuhan serupa ini tidak diolah sebagai bahagian dari studi pembangunan masa depan. Program kurikuler lembaga pendidikan tinggi hampir-hampir tidak menjamah persoalan serupa itu, dan tetap terpaku pada *'ilmu-ilmu'* tradisional yang dibakukan. Universitas pada umumnya, sampai saat ini, seperti tidak peka mengenai berbagai perkembangan sekelilingnya, yang menyangkut kepentingan bangsa di masa depan.

### **Reformasi Pendidikan: Reformasi Holistik**

Jepang pernah mengenal reformasi yang fundamental, yang tercatat di dalam sejarah sebagai *Restorasi Meiji*. Dalam bahasa reformasi kita sekarang, di Jepang telah berlaku perubahan paradigma, dari paradigma masa lalu yang sangat dipengaruhi nilai-nilai tradisi, menuju ke paradigma yang lebih terbuka, yang memungkinkan terjadinya perubahan, yang berarti memungkinkan terjadinya kemajuan. Pada masa itu, mayoritas sumber daya manusia yang terlibat di dalam proses pembangunan adalah mereka yang hanya berpendidikan rendah. Mereka yang berpendidikan menengah, apalagi yang berpendidikan universitas, berjumlah sangat sedikit. Ketika kemudian telah tampak bahwa pembangunan di Jepang mulai menjadi sangat dinamis dan produktif, ternyata di dalam sektor pendidikan, Jepang telah menempuh strategi *menghilangkan* tenaga-tenaga pembangunan yang hanya berpendidikan rendah, dan secara sangat signifikan *memperbesar* jumlah tenaga yang berpendidikan menengah, tetapi tidak pada tingkat universitas.

Tenaga terdidik yang berhasil menggerakkan proses kemajuan di Jepang ternyata hanya sebagian kecil yang melalui tingkat pendidikan tinggi. Kenaikan jumlah angkatan pembangunan yang terdidik pada tingkat universiter terjadi tidak seberapa tinggi, dan itu sajapun ternyata telah mampu menempatkan citra Jepang pada kedudukan yang disegani bangsa-bangsa lain. Kalau studi

Harbison dan Myers menunjukkan korelasi yang tinggi antara tingkat pendidikan dengan keberhasilan pembangunan, Jepang memberikan sebuah pengalaman yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak perlu diartikan sebagai keharusan mendidik sebanyak mungkin orang untuk mencapai tingkat sekolah yang tertinggi. Setidak-tidaknya, itulah yang terjadi pada saat peralihan menuju kemajuan Jepang.

Dengan mengabaikan berbagai hal yang spesifik, Jepang yang jelas berbeda dari kondisi Indonesia dalam sejarah, budaya, politik dan ekonomi, makna pengalaman Jepang segera sesudah *Restorasi Meiji*, mungkin berguna untuk dicermati, sedikitnya di dalam tahap-tahap awal atau tahap transisi reformasi. Kita, misalnya, dapat mempermasalahkan komposisi pendidikan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk satu atau dua generasi mendatang, dengan memperhitungkan berbagai situasi dan kondisi yang sedang berkembang: apakah reformasi fundamental pada saat ini memang mempersyaratkan adanya lulusan universitas yang lebih banyak dibanding dengan tenaga-tenaga pembangunan dengan dasar pendidikan menengah; alternatif mana yang lebih efektif dan efisien; apa yang akan, harus, dan dapat dicapai dengan tersedianya tenaga-tenaga terdidik tingkat universitas.

Selanjutnya, meskipun penting untuk memperhatikan agar proses belajar dan mengajar di tingkat universitas berlangsung secara efektif dan efisien, meskipun penting untuk memperjuangkan tambahan biaya untuk mendanai kegiatan penyelidikan ilmiah, dan meskipun penting untuk mendapatkan tenaga-tenaga pengelola pembelajaran di dalam operasionalisasi universitas, pada saat ini kita *harus kembali memusatkan perhatian kepada hal-hal yang bersifat lebih mendasar*. Persoalan universitas pada tingkat *institusional* perlu mengutamakan kejelasan persoalan pada tingkat *konsepsional*, karena di dalam krisis yang melanda bangsa ini sekarang telah mencuat realitas bahwa persoalan pendidikan tidak hanya sebatas persoalan *mikroskopik*, melainkan justru pada soal-soal *makroskopik*. Karenanya, di dalam mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas universitas, pandangan kita pada saat ini tidak dapat dibatasi menjadi pandangan *universitas-sentris*; di dalam memahami persoalan

pendidikan secara makroskopik, masalah universitas hanyalah *bahagian* dari sebuah *Gestalt* permasalahan pendidikan yang besar.

Perbaikan mutu pembelajaran di tingkat universitas, misalnya, banyak berkaitan dengan mutu pembelajaran di tingkat dasar dan menengah. Universitas seringkali hanya memberikan komentar dan penilaian yang kurang kepada prestasi tingkat pendidikan menengah, kemudian segera berpaling "menangani" masalah tersebut melalui berbagai *built-in mechanisms*, seperti program saringan, matrikulasi, pendidikan tambahan, program remedial intensif, dengan varian dan nama yang berbeda-beda, yang semuanya dilakukan *oleh* universitas, di *dalam* tubuh universitas, dan khusus *untuk* kepentingan universitas. Semuanya, karena pengaruh pandangan yang *universitas-sentris*.

Pandangan yang lebih holistik akan merangsang universitas mencurahkan perhatian dan mengulurkan tangan untuk sedikitnya turut meningkatkan mutu pendidikan menengah, pendidikan yang diharapkan menjadi *basis* pendidikan tinggi. Implikasinya akan lain. Begitu juga kemanfaatannya. Dengan ringkas, peningkatan mutu yang dikehendaki di tingkat universitas adalah bahagian dari dan terkait dengan peningkatan mutu sektor pendidikan dalam arti yang lebih luas. Hal ini berlaku umum. Artinya, kita tidak dapat memikirkan perbaikan mutu pendidikan dengan jalan menanganinya secara partial; bahkan, kita tidak dapat memulai reformasi pendidikan secara mendasar tanpa mengaitkannya dengan dan bersumber dari keseluruhan realitas kehidupan. Alasannya sangat jelas: pendidikan yang kita bicarakan adalah pendidikan yang menyangkut kehidupan yang luas: dari dan untuk kehidupan seluruh bangsa!

### **Peralihan Paradigma, atau ... Menunggu Krisis Baru?**

Di dalam perjalanan sejarah pendidikan bangsa ini, dasar *ideologis* pendidikan, sejak pertengahan hingga menjelang akhir Abad 20, tidak pernah berubah. Di dalam konstitusi dengan jelas tertera aspirasi kemajuan melalui pendidikan untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Di dalam konstitusi yang sama, pandangan *kultur antropologi* tidak pernah berubah: manusia dipandang

sebagai insan atau *manusia seutuhnya*. Namun, di dalam rentang waktu sesingkat itu, perlahan-lahan tetapi pasti, ternyata terjadi juga perubahan yang sangat mendasar. Perubahan terjadi tidak di dalam rumusan formalnya, tetapi di dalam *penafsiran* dan *perlakuan* para penanggungjawab dan pelaku pendidikan, -- disadari atau tidak, dipahami atau tidak, disengaja atau tidak --, terhadap makna dan tujuan pendidikan.

Ambillah pendidikan politik sebagai misal, yang bersumber dari seperangkat nilai kehidupan sebagai yang terangkum di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar, yang kemudian dipersempit menjadi pendidikan Pancasila, yang dipersempit lagi menjadi P-4. Tanpa mengubah perangkat nilai yang kemudian dikenal sebagai nilai-nilai Pancasila dan dengan niat yang baik sekalipun, tetapi dengan pemahaman pedagogis yang tidak benar, semakin hari semakin terasa betapa menjeratnya pendekatan 'pendidikan' politik tersebut. Manusia sudah tidak diperlukan untuk bergairah *berpikir*, apalagi *berpikir kritis*, karena segala sesuatu di dalam P-4 sudah dipikirkan dan diracik oleh pemerintah menjadi sejumlah "butir" dari sebuah ideologi yang sakti, yang cukup dihafalkan saja. Yang terjadi sebagai akibat dari pendekatan yang salah ini ialah bahwa warga negara *direduksi* kedudukannya menjadi manusia *penghafal* (butir-butir), bukan manusia *pemikir* (ideologi). Bukti-bukti kekuatan ideologi dikemukakan dari dan terbatas pada peristiwa sejarah tertentu, yang berarti bahwa rangkaian pembuktian empiris hanya *terpaku di masa lalu*. Dengan sikap yang terpaku di masa lalu, pendidikan politik tersebut menjadi pendidikan yang tertutup, jauh dari sifat terbuka dan kontekstual. Dan itu *memasung* akal manusia. Tidak terbuka peluang untuk memasalahkan kekuatan Pancasila menghadapi masa depan, sebuah masa yang nanti akan menjadi masa yang diaruhi oleh generasi muda setelah generasi tua berlalu. Alasan ketertutupan itu sangat sederhana (tetapi sekaligus sangat berbahaya): karena 'buku pintar' pemerintah telah menggariskan begitu, maka tidak ada lagi ruang untuk menjadi kreatif. Dengan paradigma pendidikan yang demikian, maka bukan saja manusia tidak dianjurkan berpikir, tetapi juga bahwa berpikir itu *berbahaya!* *Ergo*: pencerdasan kehidupan bangsa, berakhir sebagai pembodohan.

Hari ini, ternyata krisis tidak hanya membawa bala semata-mata. Krisis membawa juga *hikmah*. Dengan krisis yang begitu intensif, dan yang telah memutar balik pola-pola kehidupan yang dicoba ditata melalui pendekatan masa lalu, maka apa yang semula hanya dirasa-rasakan dan diduga secara samar-samar, diperkirakan secara intuitif, atau bahkan dicurigai, kini menjadi jelas semuanya di mata masyarakat luas. Dan dengan demikian, maka himbauan untuk menggulirkan sebuah reformasi yang lebih mendasar, tidak ditanggapi masyarakat sebagai himbauan yang berlebihan. Sebaliknya, himbauan itu disikapi sebagai sebuah *kemutlakan*. Di dalam dunia pendidikan, di mana dunia universitas diharapkan berperan secara sangat menentukan, reformasipun sudah tidak dapat ditangguhkan. Paradigma pendidikan masa lalu harus secara radikal diganti dengan paradigma baru, yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai peralihan dari pandangan yang berkiblat kepada (kepentingan) masa lalu ke pandangan yang terarah kepada (eksistensi) masa depan.

Secara lebih rinci, *peralihan* paradigma pendidikan yang berorientasi kepada masa lalu ke paradigma pendidikan masa depan, antara lain berarti:

1. peralihan dari pendidikan yang mengutamakan nilai kehidupan budaya feodal aristokrasi ke pendidikan yang menggalakkan kehidupan nilai budaya demokrasi;
2. peralihan pendidikan yang memihak pada kepentingan penguasa dan kekuasaan ke pendidikan yang mengutamakan kepentingan kerakyatan;
3. peralihan pengelolaan pendidikan yang terpusat secara sentral kepada pengelolaan pendidikan yang berbasis kekuatan masyarakat;
4. peralihan sikap kependidikan yang mengutamakan keseragaman, ke sikap pendidikan yang menghargai keberagaman;
5. peralihan pola manajemen pendidikan yang memupuk ketergantungan masyarakat, ke pola manajemen pendidikan yang mengutamakan kemandirian;

6. peralihan dari pendidikan yang mengkondisi masyarakat takluk pada gaya pemerintahan melalui kebijaksanaan (penguasa), ke pendidikan yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya keteraturan dan kepastian hukum;
7. peralihan dari metodologi pendidikan yang mengutamakan pengawetan dan konformisme nilai-nilai usang yang disakralkan, ke metodologi pendidikan yang merintis pengembangan ilmu dan pemanfaatan teknologi;
8. peralihan dari pandangan kependidikan yang lebih banyak bersifat pelaksanaan kewajiban, ke pandangan yang mendidik dan menyadarkan warga negara mengenai hak-hak azasi manusia;
9. peralihan dari orientasi pendidikan yang mengutamakan pelestarian dan keseimbangan dari sudut kepentingan politik, ke orientasi pendidikan yang mengutamakan perubahan, pertumbuhan, dan kemajuan;
10. peralihan dari sikap kependidikan yang konformistik, memasung, dan punitif, ke sikap pendidikan yang motivatif, merangsang dan menghargai kreativitas dan inovasi;
11. peralihan dari pandangan pendidikan yang tertutup, isolasionistik, terpola (dibakukan), ke pandangan yang merangsang kerjasama secara terbuka dan fleksibel; serta
12. peralihan dari pola dan program kurikuler yang statik, skolastik, tradisional, ke pola dan program kurikuler yang dinamis, riil, dan kontekstual.

Daftar ini dapat diperpanjang karena memang masih banyak segi pendidikan masa lalu yang perlu dikaji dan disempurnakan, diubah, atau diganti dengan paradigma pendidikan yang diyakini akan lebih berorientasi ke masa depan. Kini adalah masa yang paling tepat, dan juga paling mungkin, untuk mengadakan usaha *peralihan* paradigma. Ketidakpekaan dan kegagalan kita semua untuk bersama-sama menggulirkan reformasi tersebut, akan mempersulit terjadinya perubahan-perubahan yang cukup mendasar di masa depan. Kecuali mungkin, kalau kita memilih menunggu saja sampai sebuah lagi krisis menimpa bangsa ini. Tetapi ini sama sekali bukan jaminan, karena pada saat itu, kemungkinan perjalanan sejarah

akan menjadi lain sekali, jauh di luar yang dapat dibayangkan sekarang.

### **Tridarma Universitas: Sebuah Misi atau Mimpi?**

Satu sifat yang mungkin menjadi pembeda utama antara universitas terkemuka yang telah mapan di berbagai negara maju dengan universitas di Indonesia pada umumnya yang masih mencari-cari bentuk adalah bahwa pada universitas-universitas besar terjadi aktivitas kajian ilmiah yang sangat intensif, khususnya di dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi yang *baru*. Dari universitas besar itu senantiasa lahir berbagai teori-teori *baru*, ilmu-ilmu *baru*, eksperimentasi ilmiah, pengembangan dan pengujian metode-metode *baru*, serta produksi teknologi *mutakhir*. Komponen aktivitas ilmiah di dalam universitas tersebut adalah komponen yang penting, atau mungkin yang terpenting; setidaknya dilihat dari tingkat prioritasnya, kadang-kadang dari tingkat kerahasiaannya, dari keterlibatan ilmuan-ilmuan besar dari berbagai negara, dan selalu didukung oleh dana serta kemudahan lainnya yang besar. Beberapa universitas serupa itu, karena menempatkan aktivitas penelitian pada tingkat yang (ter)tinggi, mungkin dapat disebut sebagai 'research university', dibandingkan dengan sifat universitas di Indonesia yang didominasi oleh kegiatan belajar-mengajar, yang menjadikan universitas kita lebih merupakan 'teaching university'.

Di dalam research university, tidak jarang terjadi bahwa hasil-hasil research itulah yang kemudian disalurkan menjadi bahan pengajaran, sedangkan di dalam teaching university, pengajaran berlaku hampir-hampir (atau kebanyakan seluruhnya) terjadi tanpa input dari research; bahkan juga tanpa hubungan apapun dengan research. Di sini, kedudukan penelitian berada pada tingkat terendah. Staf *akademik*, bagi universitas ini, adalah staf *pengajar* saja. Mereka hanya mengajar dan mengajar. Waktu, biaya, dan kesempatan, seringkali menjadi kendala yang dikemukakan oleh staf pengajar untuk tidak terlibat di dalam aktivitas penelitian. Tetapi sangat mungkin bahwa alasan sebenarnya adalah bahwa di satu pihak *policy universitas* yang menjadi penghambat, dan di lain pihak – sangat penting – staf pengajar sesungguhnya *tidak*

berkemampuan mengadakan penelitian. Karena itu, di dalam aktivitas mengajar, mereka hanya menjadi pemakai ilmu, bukan penghasil ilmu. Bahaya laten (aktual?) yang dapat terjadi di sini ialah apabila staf pengajar yang hanya mengonsumsi ilmu, tanpa sadar hanya mengonsumsi ilmu-ilmu yang bukan saja sudah terlewat usang, tetapi juga sudah tidak relevan, bahkan mungkin sudah salah!

Sejarah perkembangan universitas di Indonesia, pada hakikatnya memang bukan sejarah pengembangan ilmu, tetapi lebih tepat dilihat sebagai sejarah *pengawetan* ilmu. Kecuali tidak ada ilmu-ilmu baru yang lahir, ilmu-ilmu (dari luar) yang sudah ada sajalah yang dipertahankan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Di negara-negara Barat, kita dapat menemukan paralelisme antara perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru dengan aktivitas penelitian dan eksperimen ilmiah yang terjadi di dalam universitas; kita bahkan dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan modernisasi masyarakat sangat dibantu oleh, dan juga bersumber dari, ilmu-ilmu yang dikembangkan di universitas, atau melalui kerjasama dengan universitas. Tidak demikian halnya dengan Indonesia. Sejak kurang lebih tiga dekade yang lalu, sampai sekarang, ketika pertumbuhan universitas mulai memperlihatkan peningkatan yang signifikan, pertumbuhan tersebut patut dicatat sebagai pertumbuhan kuantitas saja; tidak berarti apa-apa di dalam peningkatan kualitas. Mungkin tidak terlalu mencari-cari apabila dipertanyakan mengapa, ketika universitas di Indonesia sudah sebegitu banyak meluluskan sarjana, tidak muncul-muncul juga pemikir-pemikir handal di dalam mengatasi dampak krisis yang terjadi dewasa ini. *Conflict resolution*, misalnya, sebagaimana yang diperagakan oleh pelaku politik di arena nasional, tidak menggambarkan kekuatan bernalar rasional, untuk tidak menyebutnya ilmiah. Adakah ini sebagai petunjuk tidak adanya kualitas yang bernas di kalangan sarjana dan 'pemikir' tersebut? Sejauh mana universitas ikut bertanggungjawab?

Kalau pertanyaan serupa itu dinilai kurang relevan, atau kalau jawabannya memang tidak kita ketahui, sedikit-dikitnya, kondisi ini mengharuskan kita untuk melihat kembali persoalan peningkatan

performance universitas untuk keperluan hari ini, dan lebih-lebih lagi untuk keperluan masa depan. Sejalan dengan makin bertambahnya jumlah universitas, memang telah tumbuh pemikiran bahwa universitas harus mewujudkan diri di dalam tiga sifat kegiatan: pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketiga buah sifat aktivitas itu – *tridarma* – bahkan telah dirumuskan sebagai kebijaksanaan pemerintah: universitas berfungsi sebagai lembaga penyebar pengetahuan (pengajaran), sebagai lembaga pengembang pengetahuan (penelitian), dan sebagai lembaga penerap pengetahuan (pengabdian). Konsep ini, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, tampaknya memang sangat diperlukan. Tetapi, di dalam realitas, konsep ini tidak banyak mendorong universitas sebagai lembaga penghasil ilmu. *Tridarma*, ibarat sebuah segitiga yang seyogianya berbentuk segitiga *sama sisi*, di dalam wujudnya lebih banyak sebagai segitiga sama kaki, dengan garis alas (pengajaran) yang sangat panjang. Akibat yang serius dari kondisi ini ialah bahwa Indonesia masih tetap sangat tergantung pada ilmu dari luar, dan masyarakat masih tetap tidak cukup menikmati kehadiran universitas. Dengan singkat: universitas tidak berhasil di dalam missinya! Yang terjadi ialah bahwa di dalam setiap sudut dari konfigurasi segi tiga tersebut terdapat sebuah titik kecil yang menggambarkan ketiga buah darma. Yang seharusnya ialah bahwa ketiga buah titik tersebut ditumbuhkan masing-masing menjadi lingkaran yang besar, yang bukan saja saling menyentuh, tetapi saling bertindih. Gambaran ini melambangkan terintegrasinya fungsi *tridharma* sebagai *satu* sinergi, bukan sebagai tiga unsur lepas.

### **Universitas: Sebuah Akibat, Sekaligus Sebab**

Peran positif universitas di dalam pembangunan masih terlalu sedikit, apalagi dibandingkan dengan *harapan* yang ditumpahkan kepadanya. Jumlah universitas — dan lulusannya — yang makin bertambah banyak, tidak memperlihatkan dampak langsung yang positif di dalam proses pembangunan. Pandangan yang menampik universitas sebagai *menara gading*, tidak mampu menggeser universitas dari posisi tersebut; gambaran universitas sebagai menara gading masih terlalu kuat, dan terus berlanjut di dalam praktek.

Sistem yang berkembang, disengaja atau tidak, di dalam pendidikan keserjanaan, sering kali terlalu menekankan pada penguasaan ilmu yang berlebihan tanpa melihat relevansinya. Bila misalnya, ilmu ekonomi dikembangkan sebagai ilmu semata-mata, yang lebih tertarik di dalam ilmu itu sendiri daripada hubungannya dengan realitas, maka ia tidak akan sensitif terhadap fakta-fakta masyarakat yang hidup di dalam serba keterbatasan. Ilmu ekonomi semacam itu lebih tertumpu kepada perbandingan teori-teori yang terlepas dari konteks kehidupan. Begitu juga misalnya dengan ilmu hukum, yang diajarkan sebagai ilmu yang tidak berhati. Salah satu akibat yang dapat timbul dari pendekatan semacam itu adalah bahwa ketika masyarakat tiba-tiba menghadapi krisis ekonomi, atau krisis hukum, maka ilmu tersebut sama sekali tidak berkemampuan untuk memberikan jawaban yang diperlukan. Keadaan yang serupa ini, *mutatis mutandis*, telah berlaku di banyak bidang ilmu, di banyak universitas di Indonesia. Penilaian masyarakat bahwa ekonomi pembangunan masih kurang bersifat ekonomi kerakyatan pada dasarnya sebenarnya berarti bahwa ilmu ekonomi tersebut masih tergolong ilmu menara gading. Ilmu hukum yang hanya terfokus pada ilmunya, dan bukan pada manusianya, melahirkan ilmu yang mati! Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain.

Salah satu faktor yang mungkin menjadi sebab dari pendekatan ini berkaitan dengan tradisi lama yang hanya menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari negara-negara lain, terutama yang telah maju, seakan-akan ilmu-ilmu tersebut sepenuhnya bersifat *transferabel*. Pendekatan semacam ini tidak mengindahkan kenyataan bahwa perkembangan dan kemanfaatan sesuatu ilmu, seperti juga dengan perkembangan dan kemanfaatan teknologi, tidak dapat terlepas dari budaya yang *melahirkannya* di satu pihak dan budaya yang *dilayaninya* di lain pihak. *Universalisme* ilmu pengetahuan tidak boleh diartikan sebagai sifat yang memungkinkan sesuatu ilmu digunakan di dalam situasi yang bagaimanapun dan dengan tujuan apapun. *Universalisme* ilmu hendaknya diartikan terbatas pada prinsip-prinsip utama yang menjadi hakikat dan struktur ilmu tersebut. Prinsip-prinsip semacam itu terbatas jumlahnya; yang banyak adalah segi-segi praktis, atau kontekstual, yang membuat

sebuah ilmu tidak dapat sepenuhnya menjadi mutlak dan universal, dan tidak dapat sepenuhnya tidak memihak.

Sejak Indonesia mulai dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda lebih kurang 400 tahun yang lalu, beberapa universitas besar di Eropa telah berhasil tumbuh sebagai lembaga penghasil ilmu. Di Indonesia, sesudah kemerdekaan, universitas telah memperlihatkan hasil yang cukup banyak, terutama diukur dari kuantitas output. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi yang selama bertahun-tahun menghadang kemajuan di Indonesia hampir-hampir *tidak tersentuh* oleh ilmu-ilmu yang dikembangkan. Bahkan sampai saat ini masih dapat disimpulkan bahwa secara umum universitas di Indonesia masih terlalu bergantung pada ilmu, teknologi, dan model-model dari Barat. Ketergantungan itu jelas menghambat universitas di dalam mengembangkan potensinya menjadi *titik tumbuh* bagi pembangunan bangsa dan negara. Hasil yang sedikit pun ternyata masih banyak berwarna menara gading yang bersemboyan *ilmu untuk ilmu*, dan kurang berhasil tampil sebagai ilmu yang menyentuh *inti* persoalan kehidupan masyarakat umumnya, lapisan masyarakat terpuruk khususnya. Universitas telah gagal mengembangkan ilmu untuk menangani kemiskinan, untuk mengatasi keterbelakangan, ketertutupan, feodalisme, dan seribu satu hal, yang (sudah) tidak populer di negara Barat. Seakan-akan universitas di Indonesia, hidup bukan untuk Indonesia!

Karena itu peralihan paradigma universitas di dalam masa ini harus menghasilkan suatu tingkat kemandirian yang menuntut universitas sedikitnya harus mampu:

1. menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk pengembangan ilmu dan teknologi;
2. menghasilkan sumber daya manusia yang committed untuk mengolah potensi-potensi pembangunan, baik yang berbentuk sumber alam maupun yang memerlukan pengolahan lanjut;
3. menghasilkan sumber daya manusia yang ahli meningkatkan produktivitas, modal, dan investasi, termasuk investasi di dalam rangka peningkatan produktivitas universitas; serta

4. mendidik sumber daya manusia yang peka dan termotivasi untuk mengadakan penerapan ilmu dan teknologi demi kepentingan pembangunan.

Dengan strategi seperti itu maka universitas sebagai hasil (akibat) perkembangan masyarakat yang diabdinya, sekaligus dapat tumbuh menjadi faktor penyebab, *faktor pembeda*, kemajuan. Kehadiran universitas harus merupakan faktor penentu. Kehadirannya adalah karena tugasnya yang strategis tersebut, bukan karena alasan lain.

### **Daftar Pustaka**

- Development Education and "Cultural Globalization"*. (1996). Keynote Paper, Seminar on Education and Global Development, ISESCO, Brunei.
- Some Practical Issues in Managing Educational Development*. (1997). Malaysia. ASEMAL.
- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Globalisasi Perdagangan Bebas*. (1997). Konvensi Nasional: Agenda Nasional Menghadapi Tahun 2003. Universitas Lampung, Lampung: CIDES.
- Problematik Budaya Melayu Abad Ke-21: Proyeksi dari Sudut Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (1997). Brunei: Kongres Melayu Brunei Abad Ke-21. Brunei: Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
- Menggapai Tahun 2000 dan Sesudahnya*. (1998). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan.
- Reorientasi Pendidikan Menjelang Abad Ke-21: Sebuah Keharusan*. (1998). Brunei: Persatuan Buruh Nasional.
- Mempersiapkan Generasi Muda Indonesia Memasuki Seribu Besok*. (1998). Brunei – Jakarta: Yayasan Al-Ghazali.
- Agenda Strategis Reformasi Pembangunan Melalui Pendidikan*. (1999). Jakarta: FORDIK.

- Will Tomorrow Be Tomorrow?* (1999, Juni). Keynote, Lustrum IKIP Jakarta.
- Pendidikan Berbasis Masyarakat.* (1999, April). Jakarta: Yayasan Al-Ghazali.
- Pendidosaaurus: Lawan Utama Profesionalisme Guru.* (1999, Mei). Jakarta: PGRI.
- Apa dan Mengapa Reformasi Pendidikan.* (1999, Juli). Anyer: PGRI – Education International.
- Me-Reposisi Profesi Pendidikan.* (1999, Juni). Jakarta: FORMOPPI. (1999, Agustus). Universitas Negeri Makasar, Ujung Pandang, Agustus 1999.
- Reformasi Pendidikan: Posisi Perguruan Tinggi.* (1999, Agustus). Ujung Pandang: Lembaga Administrasi Negara – Universitas Hasanuddin,
- Peralihan Paradigma pendidikan Kontemporer.* (1999, September) Jakarta: Makalah Kunci Pendidikan, Konges Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS).

## 2. PENDIDIKAN SETELAH ERA ORDE BARU

---

---

Aria Djali

### **Pendahuluan**

Desakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di suatu negeri tidak dapat lagi diartikan sebagai pertanda karena negeri itu tergolong negeri yang sedang berkembang. Di negara-negara yang maju dan bahkan sangat maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Australia desakan seperti itu juga terus terjadi. Desakan yang amat kuat itu muncul akibat perubahan dan perkembangan di seluruh sektor kehidupan seperti sektor industri, perdagangan, sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Perubahan ini dapat dikatakan bersifat abadi, karena terjadi berkelanjutan hampir tanpa henti, dan juga bersifat mengglobal, karena berlangsung mulai dari satuan kawasan terkecil atau lokal hingga ke satuan yang lebih besar: nasional, regional, dan internasional.

Pergaulan regional dan internasional yang semakin mengglobal, menuntut sebuah negara agar lebih siap dan mampu untuk **bersaing** dan sekaligus juga untuk **bekerjasama** dengan negara-negara lainnya. Dalam perspektif seperti ini, maka pendidikan tidak lagi semata-mata dinilai sebagai kekuatan untuk mencerdaskan setiap warga di negeri itu.

Pendidikan dituntut agar tidak lagi terbatas pada "inward looking", (mencerdaskan, membudayakan dan mempersatukan bangsa) tetapi semakin dituntut agar berdimensi "outward looking" (mampu bersaing dan bekerjasama di kalangan masyarakat regional dan internasional).

Saat ini semakin diakui bahwa pendidikan adalah sebagai “a fundamental driving force” bagi **pertumbuhan ekonomi**. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Zhou Nanzhao, Vice President China National Institute of Educational Research (1996): “... *economic reconstruction must rely on education while education must serve economic reconstruction*”. Premis ini menguatkan perlunya pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Kebijakan dan program pendidikan harus terkait dengan upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi warganya.

Berakhirnya “perang dingin”, mengakhiri pula keterpencilan satu negara dari negara-negara lainnya. Keadaan ini membuka peluang “**mutual scrutiny**” yang semakin besar. Apa yang terjadi di suatu negara tidak lagi dapat disembunyikan oleh negara itu. Suatu negara dengan mudah menjadi sumber penelitian atau kritikan oleh negara lain, jika di negara itu terjadi praktek-praktek yang menyimpang dari prinsip-prinsip **demokratis** dan **hak azasi manusia**. Akibat tumbuhnya semangat “mutual scrutiny”, maka motto “right or wrong” tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana adanya. Jika ternyata itu salah, maka kewajiban bagi negara itu untuk membuatnya benar. Bila sudah benar, maka kewajiban dari negara itu untuk menjaganya agar tetap benar.

Perkembangan dalam pergaulan dunia internasional yang dilandasi semangat “mutual scrutiny” itu, menguatkan perlunya kebijakan pendidikan untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan demokratis dan demokratisasi pendidikan, serta mengakomodasikan konsep dan praktek yang terkandung dalam “Hak Azasi Manusia” (HAM). Pendidikan dengan demikian harus menjadi salah satu faktor penentu untuk tumbuhnya sebuah negara yang demokratis, yang menempatkan HAM dan HEM (Hukum, Etika dan Moral) sebagai kekuatan supremasi dalam bernegara dan bermasyarakat. Dunia pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi muda yang menjadikan asas ketulusan (sincerity), kejujuran (honesty) dan kepatutan (fair-go) sebagai penuntun dalam bersikap dan bertindak, baik atas dasar kepentingan pribadinya, keluarganya, golongannya dan negaranya. Ke tiga perangkat sikap ini sangat diperlukan agar kemampuan

untuk bersaing dan bekerjasama, sebagaimana di sampaikan di atas, menghasilkan sesuatu yang konstruktif.

Hak untuk menggunakan "mutual scrutiny" hanya dapat berimbang jika warga dari negara itu mempunyai informasi yang cukup mengenai negerinya dan negeri di luar negerinya sendiri, dan kemudian menggunakan informasi itu untuk menumbuhkan sikap **toleransi** dan **saling pengertian** antar negara.

Hak untuk menggunakan "mutual scrutiny" secara berimbang, menuntut perlunya pembaharuan pendidikan yang mampu mendorong berkembangnya **kemampuan berkomunikasi**, menguasai isi komunikasi, serta **teknologi informasi**.

### **Tantangan Pendidikan di Indonesia**

Apa yang disampaikan dalam bagian pendahuluan, merupakan serangkaian tantangan umum yang juga dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Menghadapi dunia yang semakin menglobal, maka dua kemampuan inti yaitu kemampuan untuk bersaing dan bekerjasama hendaknya menjadi agenda pendidikan kita yang sangat penting. Kedua kemampuan ini mengarahkan kita untuk mencari metodologi dan bentuk yang lebih inovatif agar ranah pendidikan yang selama ini kita pegang yaitu ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif menjadi lebih fungsional untuk mendorong tumbuh-kembangnya kemampuan bersaing dan bekerjasama bagi lulusan kita yang akan datang.

Ke dua kemampuan besar ini harus dikait-serasikan dengan upaya untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan bangsa dan rakyat kita dalam tatatan kehidupan yang demokratis dimana hukum, etika, moral serta hak asasi manusia berfungsi sebagai kekuatan supremasi.

Dunia pendidikan kita boleh dikatakan secara terus-menerus mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan kita sendiri. Hampir semua lini pendidikan menjadi sasaran kritikan. Namun porsi yang paling banyak mendapat perhatian adalah aspek pembentukan kinerja non-kognitif seperti pengembangan sikap kreatif, inovatif, tekad untuk bekerja keras, jujur, tulus dan "fair".

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pakar, pengamat, pemegang wewenang kependidikan serta praktisi pendidikan yang ada di Indonesia, berikut ini penulis hanya mengutip beberapa kritikan dan himbauan yang dilontarkan oleh sejumlah pengamat dan pakar pendidikan kita.

Romo Mangun Wijaya misalnya, (Kompas 13 Maret 1998) menghimbau pemerintah agar pendidikan kita diarahkan untuk menumbuh-kembangkan kegairahan jiwa eksplorasi, kreasi-inovasi, budi pekerti, iman/taqwa dan ketangkasan mengolah kehidupan nyata murid. Begitu pula Mochtar Buchori, mengungkapkan keprihatinannya dengan mengatakan bahwa pendidikan kita telah mematikan kemandirian dan kebebasan anak.

Mengenai betapa kurang relevannya pendidikan kita dengan kehidupan nyata terungkap juga dari pendapat Mar'ie Muhammad dan lain-lain, ketika diadakan diskusi di Universitas Paramadina Mulya. Kwik Kian Gie misalnya mengatakan (Kompas 22 Juni 1998): "Tuhan sangat murah hati kepada bangsa kita, karena tanahnya luas, kekayaan alamnya melimpah, dan iklimnya nyaman. Bila kita mampu menggarap pertanian, perkebunan, dan hasil-hasil laut, potensi untuk memakmurkan bangsa cukup besar".

Ungkapan Kwik Kian Gie itu, memang tidak ditujukan langsung pada sistem pendidikan. Ungkapan itu hendaknya ditafsirkan agar sistem pendidikan kita di masa depan mampu menghasilkan lulusan yang cekatan dalam membaca dan memanfaatkan sumber alamnya sendiri, dan kemudian memberikan *nilai tambah* terhadap berbagai sumber alam itu, sehingga mendapatkan manfaat ekonomis yang maksimal bagi dirinya dan masyarakat. Produk yang sarat dengan nilai tambah banyak tergantung kepada kemampuan kita dalam bersaing dan bekerjasama. Kalau cita-cita ini terwujud, maka kebutuhan sandang dan pangan, serta bahan baku industri tidak akan banyak lagi tergantung pada dunia luar.

Apa yang dilontarkan oleh Romo Mangun dan Mochtar Buchori, Mar'ie Muhammad, Kwik Gian Kie, boleh dikatakan merangkum semua kritikan dan harapan yang pernah dialamatkan pada dunia pendidikan kita. Kemampuan besar dan inti yaitu bersaing dan

bekerjasama mengandung semua elemen dalam ranah pendidikan yang disebutkan oleh orang-orang seperti Romo Mangun, Mochtar Buchori dan lain-lain. Dengan kedua kemampuan inti itulah bangsa kita ini dapat **“survive dan revive”**.

Dengan demikian semua ranah pendidikan yang selama ini kita anut harus diberikan dinamika baru dengan menerapkan asas fungsional sehingga efektif untuk menumbuh-kembangkan kemampuan bersaing dan bekerjasama, dalam rangka menghasilkan produk ekonomis dan kesejahteraan rakyat.

Untuk memperkaya dan saling melengkapi wawasan mengenai tantangan pendidikan yang kita hadapi, berikut ini dikemukakan kembali konsep pendidikan sebagaimana ditengarai oleh Jacques Delors, Chairman of the Unesco International Commission on Education for the 21th Century.

Dalam laporannya yang terkenal dengan **“Delor Report”**, ia menekankan empat konsep pendidikan yang seharusnya menjadi pilar pembelajaran. Konsep itu adalah: 1) **learning to know** yang menekankan pentingnya makna **learning how to learn**; 2) **learning to do** yang menekankan makna pentingnya mengembangkan kemampuan untuk menghadapi situasi atau masalah yang beragam dan berubah-ubah; 3) **learning to live together** yang menekankan makna pentingnya memahami orang lain, sejarah mereka, tradisi dan budaya mereka, sehingga mampu hidup berdampingan dan berinteraksi secara “fair” dan damai; dan 4) **learning to be** yang menekankan makna pentingnya mengembangkan potensi manusia secara penuh. Pilar ke empat itu dapat ditegakkan dengan cara memberikan peluang yang lebih besar kepada peserta didik untuk berlatih menjadi **insan yang independen dan mampu memberikan “judgement”** yang bertanggungjawab.

### **Pembaharuan Pendidikan: darimana mulainya?**

Begitu luasnya cakupan bidang pendidikan dan begitu kompleksnya permasalahan yang harus dipecahkan, maka darimanapun kita ingin memulai gerakan perbaikannya, agaknya dapat dibenarkan karena selalu tersedia alasannya. Namun dengan premis seperti ini, dapat pula mengakibatkan upaya

perubahan dan perbaikan yang dilakukan menjadi tidak efektif dan efisien. Pepatah tua yang berbunyi: *“Too many cooks spoil the broth, many hands make light work”*, agaknya dapat kita pakai sebagai peringatan dan pertimbangan dalam menentukan strategi pembaharuan.

Upaya pembaharuan dan perbaikan selama PJP I sesungguhnya cukup banyak yang telah dilakukan. Namun ada kesan bahwa penanganannya tidak terkordinasikan dengan baik. Tidak hanya karena terlalu banyak juru masak pendidikan, tetapi juga terlalu banyak juru belanja bahan masakan yang ikut berperan dan bahkan terkesan ikut campur. Ditambah dengan belum teraplikasikannya asas kolaborasi (kooperasi, koordinasi, komunikasi dan komitmen) dengan baik, maka kita selalu kekurangan tangan untuk meringankan pekerjaan pembaharuan dan perbaikan pendidikan.

Kekurangan kita secara faktual memang ada. Salah satu yang sering dikeluhkan adalah kurangnya dana yang dialokasikan untuk keperluan pendidikan. Lepas dari faktor karena negeri kita belum kaya, namun kecilnya dana yang dialokasikan bagi pendidikan kita dapat pula diartikan betapa kurang kuatnya komitmen dan determinasi kita untuk “berhasil”. Entah berapa sering kita disodori data alokasi dana pendidikan di negeri lain, khususnya negara tetangga kita yang bergabung dalam ASEAN, untuk mengingatkan kita betapa kurang berimbangannya antara dana yang dialokasikan dengan tuntutan misi yang harus diselesaikan oleh pendidikan kita. Singapura misalnya dijuluki sebagai “one of the countries most determined to succeed”. Negeri ini sejak lama telah mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanjanya untuk sektor pendidikan, setiap tahun. Pada tahun 1965 GNP Singapura baru mencapai \$970 juta. Setelah 31 tahun, berkat perhatiannya yang sangat besar dan konsisten terhadap dana pendidikan, maka GNP mereka meningkat hampir 24 kali lipat, menjadi \$23 milyar.

Peningkatan GNP Singapura, jelas-jelas adalah karena kualitas sumber daya manusia mereka yang handal; bukan karena sumber alam mereka. Singapura bukanlah sebuah negara yang kaya dengan sumber alam.

Kelemahan ini diperburuk lagi dengan belum terfokusnya arah, strategi dan implementasi pembaharuan pendidikan kita. Kita, agaknya terlalu terpasung dengan pendekatan konvensional. Simak saja pembaharuan pendidikan yang telah berkali-kali kita lakukan selama ini: selalu atau hampir selalu diidentikkan dengan pergantian kurikulum. Kita percaya, jika kurikulum itu diperbaiki, maka akan terjadi peristiwa "trickle down effects" mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan hingga dengan sekolah. Dalam kenyataannya, setelah kita melakukan beberapa kali revisi dan penggantian kurikulum, mutu pendidikan kita belum menunjukkan perbaikan. Baik itu ditinjau dari tuntutan kriteria internal seperti nilai EBTA dan EBANAS, UMPTN, daya serap materi pelajaran, maupun kriteria eksternal seperti keterpakaian lulusan oleh sektor industri, usaha dan perdagangan, serta kewiraswastaan.

Dengan pernyataan itu, tidak berarti penulis mengatakan bahwa perbaikan dan pergantian kurikulum bukan bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu internal dan eksternal pendidikan. Yang ingin penulis tekankan adalah, dengan segala keterbatasan sumber yang sedang dan mungkin masih akan kita hadapi beberapa tahun ke depan: 1) apakah perubahan itu harus selalu dimulai dari kurikulum?; 2) mengapa kita tidak menggunakan pendekatan prioritas, "ambeg pramaarta", yaitu mulai dengan bagian dimana sebagian besar penyebab rendahnya mutu pendidikan itu berasal; dan 3) memulainya dengan bagian yang menjadi "critical mass" untuk mendorong terciptanya pertumbuhan yang bercirikan "snow-balling" bagi pemecahan masalah berikutnya?

Pengalaman kita menunjukkan, memulai perbaikan dengan revisi dan pergantian kurikulum telah mengundang kegiatan yang besar dan beragam. Begitu besar dan beragamnya, sehingga mengundang pula biaya yang besar. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya praktek inefisiensi dan inefektivitas. Sayangnya lagi, sebagian besar kegiatan dan praktek itu terjadi pada lapisan yang jauh dan bahkan adakalanya tidak menyentuh dunia sekolah.

Memperbaharui kurikulum pada umumnya bukan hanya sebatas memperbaiki buku kurikulumnya. Hal ini akan segera merembet pada banyak aspek yang terkait akibat perubahan itu. Puluhan dan

mungkin ratusan proyek yang dimunculkan, yang antara lain berhubungan dengan pekerjaan cetak mencetak, tatar-menatar, lokakarya, pertemuan konsultasi dan konsolidasi, pembelian alat, evaluasi dan penelitian, uji coba, dan sebagainya... yang tentu saja menguras tenaga, pikiran dan dana yang besar, serta menyita waktu berkepanjangan yang tidak perlu. *Jika kita cermati secara tulus, pendekatan proyek yang dianut selama ini, lebih banyak mengundang keceriaan, kemeriahan atau hiruk-pikuk pihak-pihak yang jauh dari dan bahkan bukan pelaku pendidikan yang sebenarnya. Keceriaan, sebaliknya, jarang turun pada sasaran dan pelaku pendidikan yang berada diujung tombak, yaitu sekolah, kelas, kepala sekolah, guru dan murid.*

Pembaharuan pendidikan kita ibarat riuh-rendahnya lalu lintas air di Sungai Kapuas; menggejolakkan permukaan air dan menghantarkan riak dan buihnya ketepian sungai sepanjang siang dan malam hari. Namun samasekali tidak menghantarkan getaran dan sentuhan yang berarti bagi penghuni dan benda yang ada di bawah permukaannya.

Sebagian langkah dalam pembaharuan pendidikan yang pernah kita tempuh di masa lalu, mengingatkan penulis tentang cerita seorang yang sedang mabuk. Suatu malam yang kelam, ia kehilangan sebuah mata uang logam yang sangat bernilai historis baginya. Koin itu sesungguhnya terjatuh di kawasan yang tidak berlampu. Ketika sadar koinnya itu hilang, dengan sibuknya ia mencari koin itu di tempat yang terang-benderang, di bawah lampu jalanan (walaupun dalam hatinya ia menduga koin itu terjatuh di tempat yang kelam). Tentu saja ia tak akan pernah bersua dengan koinnya yang bernilai sejarah itu.

Sarah Delamon, mengibaratkan rahasia pendidikan itu bak sebuah "black box" bagi sebuah pesawat terbang. Kalau ingin tahu mengapa sebuah pesawat terbang mengalami kecelakaan, maka salah satu sumber informasi yang amat penting adalah yang tersimpan dalam kotak hitam tersebut. Identik dengan itu, kalau ingin mengetahui mengapa mutu pendidikan rendah, maka sebagian besar rahasianya berada di sekolah dan ruang kelas. Menurut Delamon, sekolah dan kelas adalah kotak hitamnya pesawat pendidikan.

Dan .... disitu pulalah koin berharga itu telah terjatuh.

Jika Delamon benar, maka kurikulum yang selalu menjadi sasaran dan bahkan terkesan menjadi kambing hitam, dan mungkin pula menjadi alat "pembenaran", boleh jadi tidak termasuk dalam kotak hitam tersebut. Tetapi mengapa kurikulum? Jawabannya adalah, mungkin karena kurikulum itulah yang mudah diketemukan. Mengapa bukan kotak hitam? Jawabannya adalah, mungkin karena gelap dan kelam, terlalu kecil dan rinci. Bukankah menurut pepatah tua "the devil is in the details?" Siapa pula yang senang beroperasi di tempat yang gelap, kelam, kadang menakutkan, terlalu kecil, dan ... belum tentu menguntungkan?

Ketika penulis masih di Balitbangdikbud dan kemudian dialih-tugaskan ke Universitas Terbuka, sebagian besar tugas penulis adalah melakukan riset kependidikan. Penulis juga berkesempatan untuk mengkaji ulang dan membaca sejumlah laporan penelitian yang berbasiskan sekolah dan kelas.

Ada tiga variabel yang acapkali dan konsisten dilaporkan. Variabel itu adalah: 1) *ALT (Active Learning Time)*; 2) *enthusiasm*; dan 3) *support system*. Ketiga variabel ini hampir dapat kita ibaratkan dengan tiga koin yang sedang hilang di tengah hutan, di malam yang kelam.

Walaupun mungkin masih bersifat hipotetis dan spekulatif, sebagian terbesar kelemahan pendekatan pembaharuan pendidikan kita terletak pada sistem pendukungnya.

Model sistem pendukung pendidikan kita ibarat sebuah kerucut terbalik; bagian dasarnya yang besar berada di atas, sedangkan bagian ujungnya yang lancip berada di bawah. Akibatnya, sistem pendukung pendidikan kita menjadi tidak normal dan labil. Hampir seluruh keputusan yang menyangkut kebijakan, program, dana, sarana dan prasarana, serta personel menumpuk di atas, akibat sistem kita yang sentralistis. Ditambah dengan tali-temali dan jaring-jaring birokrasi serta sejumlah pertautan kepentingan yang sempit, mengakibatkan kucuran ke bawah yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh sekolah, kelas, kepala sekolah, guru dan murid untuk upaya perbaikan pendidikan hampir tidak ada artinya. *Dengan sistem pendukung kerucut terbalik itu mengakibatkan jumlah, intensitas dan mutu "active learning time" dan entusiasme*

*para pelaku pendidikan (kepala sekolah, guru dan murid) dapat melorot pada nadir yang samasekali tidak kuasa mengangkat mutu pendidikan.*

Ibarat dalam sebuah tim sepak bola yang tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari klubnya, penontonnya dan dermawannya, bagaimana mungkin seorang pelatih dan para pemainnya dapat bermain "all-out"?

### **Desentralisasi dan otonomi pendidikan**

Kita perlu yakin bahwa pendidikan di negeri kita dapat kita angkat ke jenjang yang cukup layak. Dengan dua kata kunci yang semakin gencar dilontarkan di era reformasi, hemat penulis akan mampu menjadikan wajah pendidikan kita lebih cantik.

Kata pertama adalah pemberdayaan atau "**empowerment**" sebagaimana pernah diungkapkan oleh mantan Mendikbud, Prof.Dr.Juwono Sudarsono. Dengan konsep pemberdayaan ini sedikitnya dua hal yang ingin diperkuat dan direalisasikan, yaitu memberikan wewenang yang cukup besar dan sekaligus juga memberikan dukungan yang bersifat finansial dan non finansial secara layak dan berimbang kepada para pelaku dan peserta pendidikan pada tingkat sekolah dan kelas.

Semangat pemberdayaan menjadi amat pas jika dikawinkan dengan kata kedua, yaitu **desentralisasi** atau otonomi daerah sebagaimana sering kita dengar akhir-akhir ini. Dengan desentralisasi pendidikan itu kita harapkan dapat mendorong pemberdayaan sekolah, kelas, kepala sekolah, guru dan murid secara berdaya dan berhasil guna. Dengan desentralisasi dan otonomi itu kita berharap mampu mengubah bentuk sistem pendukung pendidikan dari kerucut terbalik menjadi kerucut yang normal. Dengan model pendukung kerucut normal itu, akan kita saksikan beralihnya penumpukan kewenangan, sarana, prasarana dan dana dari pusat ke daerah, kemudian mengalir ke sekolah, ruang kelas, kepala sekolah, guru dan murid tanpa blokade yang dibuat-buat. Pihak-pihak inilah yang paling wajar mendapatkan dukungan yang lebih besar dan wajar, karena di sinilah sesungguhnya terdapat "black box" pendidikan. Kepada merekalah

kita percayakan untuk mengungkapkan rahasia mutu pendidikan. Dengan dukungan seperti itulah, baru dapat kita harapkan peningkatan "ALT" dan antusiasme guru guna meningkatkan mutu pendidikan.

### **Mengapa Desentralisasi?**

Harapan yang diletakkan pada desentralisasi dan otonomi daerah sungguh amat menjanjikan. Tentu saja kata desentralisasi tidak serta-merta menjadi "panacea" atau obat mujarab untuk membangun sistem pendukung pendidikan dengan krucut normal.

Sebagaimana diingatkan oleh Prof.Dr. Santoso S. Hamidjojo (Media Indonesia - On Line, 25 Agustus 1999), prinsip utama otonomi daerah di ranah pendidikan harus mengacu pada kepentingan dengan titik tumpu peserta didik dan rakyat. Aturan mainnya harus jelas, bukan sekedar desentralisasi tanpa sentralisasi.

Besarnya harapan yang digantungkan pada desentralisasi untuk mengubah wajah Indonesia, termasuk wajah pendidikan kita dapat juga disimak dari ceramah Prof.Dr.Ryaas Rasyid pada Rakernas Depdikbud, Mei 1999. Isi ceramah itu penulis sarikan sebagai berikut.

*"Era globalisasi akan mengubah pola interaksi antara manusia, manusia dengan organisasi, dan antar organisasi. Kompetensi tidak dapat lagi dibendung oleh pemerintah pusat dalam derajat yang tinggi. Individu dan organisasi akan memutuskan banyak hal atas dasar kepentingan hidup atau mati. Individu dan organisasi dituntut untuk hidup secara kreatif, responsif dan inovatif. **Kreatif** agar mencari cara terbaik untuk "survive". **Responsif** agar individu dan organisasi mendapatkan sumber daya terbaik. **Inovatif** agar individu dan organisasi bertindak secara lebih efektif dan efisien. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi kreatif, responsif dan inovatif dengan cara memberdayakan individu dan organisasi masyarakat. Cara yang terbaik untuk pemberdayaan itu adalah dengan menciptakan sistem yang mendorong individu dan masyarakat untuk berani mengambil keputusan secara*

*mandiri dan bukan sebaliknya. Karena itu, desentralisasi kewenangan pemerintah merupakan pilihan yang tepat dan harus, sehingga pemerintah pusat dapat lebih berkonsentrasi pada upaya meningkatkan daya saing dan kerjasama dikancah pergaulan internasional dan globalisasi”.*

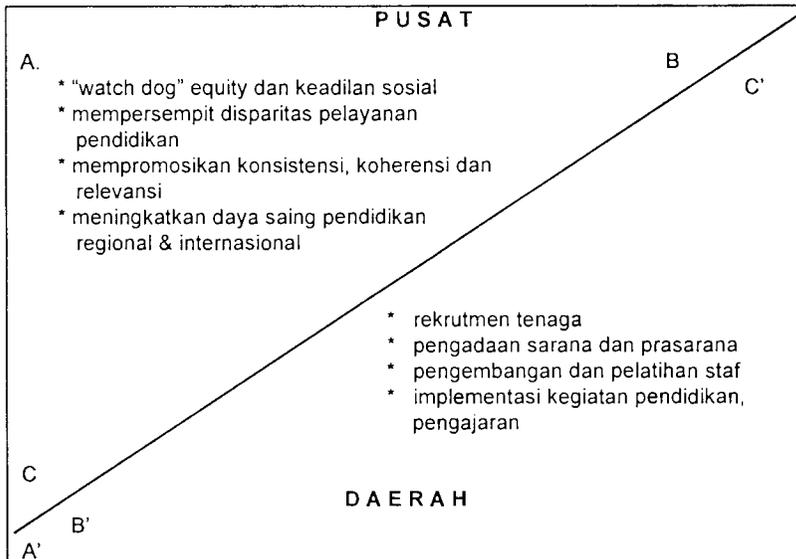
### **Bagaimana Garis Besar Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan?**

Makna garis besar desentralisasi, sesungguhnya adalah tidak lebih dari kehendak untuk memperjelas pembagian wewenang: yaitu wewenang mana yang tetap berada di pusat, mana yang harus diserahkan ke daerah, dan mana pula yang ditangani secara kooperatif, koordinatif, dan konsultatif antara pusat dan daerah.

Berikut ini penulis menawarkan sebuah segitiga kembar desentralisasi pendidikan.

Segitiga ini hanya menggambarkan isu pokok desentralisasi.

#### **SEGITIGA KEMBAR DESENTRALISASI PENDIDIKAN**



Segitiga *ABC* dan *A'B'C'* *masing-masing* menggambarkan kawasan, keluasan, kedalaman dan bentuk wewenang *pusat* dan *daerah*. Sudut *A* dan *A'* masing-masing menggambarkan kewenangan pusat dan daerah yang relatif *independen*. Sudut *B'C* menggambarkan, dalam *menyusun kebijakan strategis daerah*, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Sedangkan sudut *BC'* menggambarkan, dalam *merumuskan kebijakan strategis pusat*, pemerintah pusat perlu mengikutsertakan pemerintah daerah. Sudut *BC'* juga menggambarkan kemungkinan adanya proses *dekonsentrasi*, yaitu adanya pelimpahan sebagian wewenang pusat kepada daerah. Segitiga kembar itu secara filosofis ingin menggambarkan bahwa antara pemerintah pusat dan daerah adalah "two in one". Walaupun masing-masing mempunyai kewenangan yang relatif independen, namun keduanya masih dalam bentuk dan terikat dengan asas kesatuan dan persatuan.

### **Bagaimana aplikasinya dalam bidang pendidikan?**

Secara garis besar, wewenang pemerintah pusat hendaknya terfokus pada upaya untuk menjaga terlaksananya asas "*equity dan keadilan sosial*", yaitu keadilan untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara. Dalam praktek, jika misalnya terjadi kesenjangan pendidikan yang besar, baik dalam akses maupun mutu, maka pemerintah pusat bertanggung-jawab untuk mempersempit disparitas itu. Upaya itu antara lain menyalurkan dana penyeimbang, mengirimkan tenaga ahli atau bantuan teknis lainnya yang diperlukan oleh daerah tersebut.

Pemerintah pusat juga harus bertanggung-jawab untuk mempromosikan *konsistensi*, *koherensi* dan *relevansi* pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang bercirikan dan berkepentingan nasional tetap menonjol, tanpa menghambat daerah untuk mengetengahkan ciri daerah mereka masing-masing.

Pemerintah pusat juga harus berupaya untuk meningkatkan *daya saing pendidikan Indonesia di kancah globalisasi* melalui kerjasama bilateral, regional, dan internasional.

Pemerintah daerah harus diberikan wewenang yang lebih luas dan beragam namun juga lebih teknis dan spesifik, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan jenjang persekolahan (jenjang pendidikan tinggi sebaiknya lebih banyak menjadi wewenang dan tanggung-jawab pemerintah pusat). Kewenangan itu terutama dalam merekrut tenaga pengajar dan staf, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dan pelatihan staf, serta implementasi kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Perlu dicatat, semua kewenangan itu haruslah dikaitkan dengan niat untuk memperbesar dukungan pada sekolah, kelas, kepala sekolah, guru dan murid. Dengan demikian, terjadilah proses pendidikan dan pembelajaran pada tingkat sekolah dan kelas secara lebih efektif dan efisien.

***Kerjasama pusat dan daerah*** terutama diperlukan dalam melakukan ***fungsi kontrol kualitas***. Dalam pengembangan kurikulum misalnya, pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam mengembangkan "Curriculum Statements dan Profiles" atau "CSP". Selanjutnya daerah menggunakan "CSP" itu untuk menjabarkannya menjadi "curriculum in action", yang lebih kontekstual dengan daerahnya. Murid-murid perlu mengenal daerahnya dengan baik melalui pelajaran sejarah dan geografi lokal, olahraga, seni dan budaya daerah, serta obyek pariwisata di daerah itu. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan akan tumbuh kemampuan untuk mengenal dan menggali potensi daerah. Kreativitas untuk membaca dan memanfaatkan peluang serta memberikan "nilai tambah" terhadap kekayaan daerah juga dapat berkembang dengan baik.

Untuk bidang studi yang bersifat universal seperti matematika, sains dan bahasa, termasuk bahasa Inggris, dapat dikembangkan secara nasional.

Untuk menjaga mutu pendidikan secara nasional, maka pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam mengembangkan sistem, prosedur dan penilaian pendidikan. Dengan demikian kewenangan pusat dan daerah dapat berinteraksi secara berkesinambungan, melalui proses dialog dan kompromi yang serasi, kritis, tetapi juga produktif dan konstruktif.

### **Daftar Pustaka**

- Delamont, S. (1976). *Interaction In The Classroom*. London: Methuen.
- Delor, J. (1995). *Delor Report*. UNESCO.
- Hamidjojo, S.S. (1999, 25 Agustus). *Sulit dilaksanakan, Implementasi Otonomi Perguruan Tinggi*. Media Indonesia, hal. 19.
- Mangunwidjaja, R dan Muchtar, (1998, 13 Maret). *Permohonan Kepada Calon Menteri Departemen P dan K (Saat ini Teoritis Semua Warga Negara)*. Kompas, hal 4.
- Muhammad, dan Kwik, (1998, 22 Juni). *Suatu Kemungkinan Skenario Hari Depan*. Kompas.
- Nanzho, Z. (1996, 9-14 September). *Recent Development of Education in China: Implications of Globalism For China – Australia Cooperation in Education*. Paper presented in Education Victoria Education Seminar. Victoria – Canada.
- Rasyid, R. (1999, 17-19 Mei). *Kebijakan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Implikasinya bagi Upaya Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Melalui Pendidikan*. Makalah, disampaikan dalam Rakernas Depdikbud, Jakarta.

### **3. PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM ERA PASCA MODERNISASI (SUATU KAJIAN KEBIJAKAN)**

---

---

Agus Joko Purwanto

#### **Pendahuluan**

Masa depan yang gemilang adalah impian setiap bangsa. Masa depan gemilang hanya dapat dibangun oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Perubahan lingkungan yang semakin cepat dan acak telah memaksa orang untuk memikirkan kembali validitas dan reliabilitas paradigma berpikirnya. Perubahan lingkungan yang cepat memerlukan kecepatan dalam berpikir dan bertindak serta kolaborasi untuk menghadapi perubahan tersebut. Manusia dituntut untuk memiliki pikiran yang terbuka, adaptif, dan reflektif dalam menghadapi millenium ketiga.

Ada tiga tantangan besar yang ada di depan kita, yaitu:

**Pertama**, tantangan untuk secara terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan nilai tambah.

**Kedua**, semakin hilangnya batas-batas negara terutama batas politik dan ekonomi.

**Ketiga**, munculnya dominasi Ilmu dan teknologi oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. (Tjiptoherijanto, 1996)

Ketiga tantangan tersebut berupa tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berasal dari dalam diri manusia Indonesia, berupa perlunya meningkatkan kompetensi agar mampu melakukan transformasi. Tantangan eksternal berupa munculnya dominasi iptek.

Satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan tersebut hanyalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia umumnya sebagian besar dilakukan melalui lembaga pendidikan. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk berdialog untuk memperoleh suatu wawasan dan visi ke depan tentang bagaimana sebaiknya pendidikan nasional dikelola untuk menyongsong millenium ketiga.

Tulisan ini disajikan dalam beberapa sub bahasan. Pada bagian pertama dibahas tentang karakteristik *post capitalist society*. Pembahasan *post capitalist society* sengaja diberikan porsi yang lebih dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang pengaruh pemikiran postmodernisme dalam masyarakat. Bahasan selanjutnya berkisar pada tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia dan beberapa pemikiran untuk mengatasinya. Akhirnya tulisan ini ditutup dengan sebuah kesimpulan.

### **Karakteristik Masyarakat Pasca Kapitalis**

Akhir abad ke-20 ini ditandai dengan perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan. Ada tiga perubahan besar yaitu perubahan ekonomi yang ditandai oleh runtuhnya kapitalisme, perubahan sosial yang ditandai oleh munculnya post modernisme<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Kapitalisme dalam perjalanannya juga mengadopsi sosialisme. Kapitalisme dibangun di atas kerangka landasan rasionalitas dan monolinearitas. Postmodernisme menolak monolinearitas. Postmodernisme tidak menolak modernisme secara keseluruhan. Postmodernisme dengan konsep dekontruksi (dari Derrida) dan *genealogi* dari Michael Foucault mempertanyakan kemampuan modernisme dalam menjawab perkembangan sistem kehidupan manusia. Dekonstruksi merupakan suatu strategi untuk memeriksa sejauh mana struktur-struktur yang terbentuk itu dimapankan batas-batasnya dan ditunggalakan pengertiannya

Sementara genealogi menawarkan suatu cara penafsiran yang fleksibel dan relativistis. Postmodernisme menawarkan semangat keterbukaan, kebebasan, dan fleksibilitas dalam melihat berbagai fenomena.

Sementara itu Hacht mengemukakan postmodernisme berusaha mengganti tema-tema modernisme seperti generalisasi dengan

dan ada perubahan pola hubungan kemanusiaan ke arah neo humanisme yang muncul dalam tema-tema seperti desentralisasi, otonomi individu, dan harmoni. (Lamerick dan Cunnington; 1993). Menurut Castells, perubahan ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, produksi, dan transportasi. Selanjutnya perkembangan tersebut mendorong munculnya organisasi yang lebih fleksibel, terdesentralisasi dan adanya jaringan. Di samping itu terjadi pula peningkatan individualisasi dan keanekaragaman hubungan kerja. Akhirnya masyarakat distruktur kedalam dua kutub yang berlawanan yaitu *the Net* dan *the Self*. Kelompok sosial dan individu menjadi saling asing, dan fragmentasi ini semakin lama-semakin besar. Akhirnya terjadi perubahan pola komunikasi. Kegiatan masyarakat berkisar pada kegiatan memproduksi, memproses, dan mengirimkan informasi, sebab informasi telah menjadi sumber produktivitas dan kekuasaan. Informasi dan pengetahuan telah menjadi bagian penting dalam masyarakat. Masyarakat yang demikian oleh Castells diberi nama masyarakat informasional (Castells;1997a), oleh Peter F. Drucker diberi nama Masyarakat Pasca Kapitalis atau masyarakat berpengetahuan (Drucker; 1997).

Ciri Masyarakat Pasca Kapitalis antara lain adalah adanya pengetahuan, digitalisasi, virtualisasi, molekularisasi, integrasi dan antar jaringan (*internetworking*), disintermediasi, globalisasi, inovasi, dan semakin kaburnya jarak antara produsen dengan konsumen (Tapscott;1996). Dalam bahasa yang berbeda juga dikemukakan oleh Peter F. Drucker (Drucker; 1997), (Crawford;1991), (Savage;1990).

Castells menambahkan bahwa Teori Klasik Pasca Industrialisme mengkombinasikan tiga hal dasar yaitu pengetahuan, jasa, dan berkembang pesatnya jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan

---

fragmentalisme, kebenaran dan satu cara terbaik dengan relativitas, dan, adanya keraguan bahwa ilmu dan teknologi akan menuntun kepada kesejahteraan manusia. Sementara itu Syauckani menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan seperti desentralisasi, subkultur, pasca industri, liberalisme, dan diskontinuitas sebenarnya adalah tema-tema postmodernisme. (*diadaptasi dari Dewanto dalam Kalam, 1994, Hadiwinata, 1994, Assyaukanie, 1994, dan Hacth; 1997*)

dengan manajerial, profesional dan teknik. (Castells;1997a.). Jenis-jenis pekerjaan ini menekankan pentingnya komponen pengetahuan, sains, dan keahlian. (Castells;1997a.).

Crawford (1991) menjelaskan secara lebih rinci ciri-ciri masyarakat pasca kapitalis yaitu:

PARADIGMA	SISTEM SOSIAL	SISTEM EKONOMI
<p><b>Pengetahuan dasar:</b> Elektronik kuantum, biologi molekul, ilmu lingkungan.</p> <p><b>Ide-ide Pokok:</b> Manusia dipandang melakukan transformasi dan pertumbuhan secara berkesinambungan (berpikir dengan menggunakan keseluruhan otak); Sistem nilai menekankan pada otonomi individu dalam masyarakat yang terdesentralisasi.</p> <p>Nilai-nilai feminisme akan menjadi dominan</p>	<p><b>Nilai-nilai sosial:</b> Menekankan pada keanekaragaman, persamaan dan individualisme.</p> <p><b>Pendidikan:</b> Semakin terindividualisasi (<i>individualized</i>) dan berkelanjutan.</p>	<p>Ekonomi global yang terintegrasi yang memusatkan kegiatan ekonomi pada penyediaan layanan jasa-jasa yang berpengetahuan (<i>knowledge services</i>).</p> <p>Pemisahan produsen dan konsumen semakin kabur. Kegiatan ekonomi semakin terpusat pada usaha berskala kecil yang dihubungkan dengan organisasi jaringan.</p> <p>Sumber daya utama adalah <i>human capital</i></p>

Pada masyarakat pasca kapitalis telah terjadi pergeseran cara pengorganisasian pekerjaan dan pergeseran kondisi/sifat pekerjaan (*nature of work*) . Pekerjaan akan diorganisir pada tim-tim kecil (*molecularization*) yang dihubungkan dengan jaringan (*integration*), terjadi penguatan peranan individu dalam organisasi, (Tapscott;1996) dengan sumber daya utamanya adalah pengetahuan, informasi, kepemilikan intelektual, dan pengalaman (Stewart;1997).

Dari berbagai pendapat tersebut jika disimpulkan maka ciri mendasar dari masyarakat pasca kapitalis adalah penekanan pada peranan individu dan pengakuan akan kemampuan individu dalam melakukan transformasi dan pertumbuhan secara berkelanjutan.

Selanjutnya individu tersebut akan memproduksi pengetahuan dan kemudian membangun jaringan dengan individu lainnya sampai akhirnya terbangun suatu jaringan antar kelompok.

### **Apa Dampak Perubahan tersebut Terhadap Kehidupan Manusia?**

Perubahan-perubahan tersebut telah meningkatkan kompleksitas lingkungan. Variabel-variabel yang mempengaruhi lingkungan bertambah banyak dan semakin rumit hubungannya. Pola-pola berpikir linear dan semata-mata mengandalkan logika sudah kurang relevan lagi. Untuk memahami perubahan yang semakin kompleks, rumit, dan cepat diperlukan suatu pergeseran paradigma (*metanoia*) dalam berpikir (Senge, 1990). Pergeseran ini diperlukan sebab paradigma modernisme sudah kurang relevan lagi untuk memandang perkembangan dunia yang semakin acak dan cepat.

### **Tantangan Dunia Pendidikan**

Perubahan elemen-elemen lingkungan yang berlangsung dengan cepat menyebabkan informasi cepat menjadi tidak relevan. Hal ini berdampak besar pada sektor pendidikan. Keterampilan-keterampilan yang diajarkan kepada peserta didik dengan cepat akan ketinggalan jaman, karena kurang mampu lagi digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sementara itu perubahan lingkungan menjadi semakin sulit diprediksi arahnya. Ini menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan. Pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek teknis, cara berpikir yang sistematis dan hanya bergerak pada level konkrit perlu diberikan muatan tambahan yang lebih bernuansa postmodernisme yang menekankan pada keterampilan berpikir acak, reflektif, dan bebas.

Beberapa karya yang pernah menjadi masterpiece seperti Emotional Intelligent, The Fifth Discipline, Leadership and The NewScience, The Seven Habits of The Highly Effective People, Intellectual Capital dan Empire of The Mind dapat disebut sebagai sebagian karya yang telah membukakan suatu cara pandang baru terhadap lingkungan. Ide dasar dari pemikiran tersebut adalah

diperlukan keterlibatan emosi dan intuisi yang lebih besar dalam memandang dunia. Mereka berupaya menjelaskan pentingnya lebih memfungsikan otak kanan yang memiliki kemampuan berpikir secara acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik. Realitas masa kini tidak cukup hanya dihadapi dengan akal saja tetapi juga perlu didampingi oleh potensi manusia yang lain yang tersimpan di belahan otak kanan (DePorter dan Hernacki, 1999). Lebih lanjut Porter dan Hernacki menyatakan bahwa cara belajar perlu didekonstruksi. Hal mendasar yang perlu ditekankan adalah bukan pada belajar itu sendiri tetapi pada belajar bagaimana cara belajar (*learning how to learn*). Tujuannya adalah untuk memberikan bekal agar para peserta didik memiliki kemampuan yang cukup dalam menyerap informasi, mengolah dan membuat keputusan secara mandiri.

### **Tantangan Bagi Indonesia**

Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi perubahan lingkungan yang begitu cepat dan semakin sulit diramalkan?. Mampukah kebijakan pendidikan di Indonesia mengantarkan masyarakat memasuki millenium ketiga?

Jika kemampuan dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi digunakan sebagai ukuran nampaknya kebijakan pendidikan yang dilaksanakan selama Orde Baru kurang menunjukkan hasil yang menggembirakan. Lulusan SMP, SMA dan Perguruan tinggi kurang mampu diserap oleh pasar tenaga kerja. Kecenderungan *oversupply* ini terjadi dari tahun ke tahun dengan tingkat kesenjangan antara penawaran dan permintaan yang semakin melebar. Kemudian data tentang perbandingan penawaran dan permintaan lulusan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

PROYEKSI PENAWARAN DAN PERMINTAAN LULUSAN  
UNIVERSITAS TAHUN 1994/95-1998/99

Disiplin ilmu	Penawaran	Permintaan	Selisih (%)
Humaniora	41.663	12.992	69
Ilmu-ilmu sosial	435.689	144.871	67
Hukum	226.618	40.125	80
Ilmu-ilmu Murni	5.563	263.795	-97
Pertanian dan kehutanan	27.721	92.129	-70
Komunikasi massa	6.253	2.347	60

Sumber : Prijono, dalam Baker dkk. 1999, hal.168.

Sementara itu Mastuhu (1997) mencatat beberapa hal tentang kemampuan SDM Indonesia :

- Kemampuan penguasaan Iptek pada penduduk usia 22 tahun adalah 0,5%.(sebagai bandingan Taiwan 4,2%, Korea 6%, dan Jepang 6%).
- Peringkat Ketahanan SDM Indonesia (menurut *Human Development Index*) adalah 102, jauh di bawah yang rata-rata indeks negara-negara Asia lainnya (35-53).
- Tingkat produktivitas, 1985-1995 untuk ASEAN adalah Indonesia \$1,751; Singapura \$10.960; Malaysia \$2.905, Thailand \$3.527, Philipina\$2.326.
- Menurut hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa 40% tenaga kerja tidak memiliki keahlian sebagaimana yang diharapkan.
- Tingkat kompetisi SDM Indonesia di Asia menempati urutan ke 33. (*World Competitive Record*, dalam Tilaar, 1997)

Lebih lanjut Mastuhu (1997) mengemukakan bahwa problem lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah:

- Masih adanya dualisme sistem pendidikan, yang membagi pendidikan menjadi dua jalur misalnya pendidikan umum dengan pendidikan agama, pendidikan tradisional dengan pendidikan modern.
- Pendidikan Indonesia terkesan lebih menekankan pada bobot pelatihan dibandingkan dengan bobot akademisnya. Akibatnya peserta didik kurang dirangsang untuk memahami metodologi baik metodologi ilmu maupun metodologi penelitian sehingga terkesan mereka hanya menjadi "penghafal" saja.
- Penekanan pada hasil bukan proses, kurang menghargai etika, norma dan etos kerja. Mastuhu.
- Hal lain yang tidak kalah peliknya adalah adanya berbagai bentuk penyeragaman, baik berupa kurikulum, pakaian, metode pendidikan, dan budaya sekolah. Metode penyeragaman ini telah mengingkari kebhinekaan etnis dan budaya Indonesia.

Menyongsong millenium ketiga yang tinggal beberapa saat lagi nampaknya ada tugas berat yang harus dilaksanakan oleh dunia pendidikan Indonesia, yaitu menyiapkan SDM untuk memasuki millenium ketiga yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan millenium kedua. Masalah besar lainnya adalah bahwa mulai tahun 2003 Indonesia memasuki era perdagangan bebas ASEAN (AFTA/Asean Free Trade Area), kemudian pada tahun 2020 sudah diberlakukan *Asia Pacific Economics Community (APEC)*.

Dengan asumsi bahwa tugas pendidikan adalah menciptakan SDM agar lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya maka ada sejumlah persoalan besar yang perlu dipecahkan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain:

- Meningkatkan kualitas lulusan;
- Menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja;
- Meningkatkan keterjangkauan pendidikan.

## Meningkatkan Kualitas Lulusan

Sebagaimana layaknya sebuah program sosial, keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari kondisi lingkungan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Agar program-program pendidikan dapat berjalan dengan baik tidak cukup hanya dengan menciptakan program pendidikan yang baik, namun diperlukan pula suatu strategi *Community Empowerment (CE)*. Tujuan dari CE adalah untuk lebih memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap formulasi, implementasi, dan evaluasi program-program pendidikan.

Cara-cara yang dapat digunakan untuk melakukan CE adalah:

- ❑ Membentuk *community governance bodies*, yang akan mengontrol arah kebijakan dunia pendidikan.
- ❑ Melakukan *collaborative planning*, dengan mengizinkan para konstituens (misalnya : guru, orang tua, dunia usaha, LSM) untuk bergabung dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan pendidikan.
- ❑ Membentuk *community investment funds*, tujuannya adalah untuk mengontrol penggunaan dana-dana publik yang dialokasikan di sektor pendidikan.
- ❑ *Community-government partnerships* yang merupakan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menentukan tujuan dan cara pencapaiannya secara bersama-sama.
- ❑ *Community-based Regulation and Compliance* yang bertujuan untuk menggeser fungsi-fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan dari pemerintah ke masyarakat.

Secara internal diperlukan pula strategi *organizational empowerment* dan *employee empowerment*.

Dengan adanya *employee*, *organizational* dan *community empowerment* berarti ada keseimbangan antara faktor-faktor internal dan eksternal dalam memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan. *Community*

*empowerment* adalah tindakan yang paling sulit namun merupakan faktor yang paling menentukan.

Perpaduan dari ketiga strategi tersebut akan menimbulkan sinergi, karena dari sisi politik, dana, akademik, maupun manajemen pelaksanaan programnya telah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk berperan serta secara aktif. Praktek-praktek yang berlangsung sampai saat ini, strategi *community empowerment* kurang memperoleh perhatian. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan strategi *community empowerment* malahan memiliki eksekusi yang kearah yang kurang diharapkan. Pelibatan dunia usaha dalam bentuk *partnership* dengan dunia pendidikan terkesan basa-basi, lalu pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) kurang mampu menyentuh suara mayoritas orang tua murid. POMG seolah-olah hanya alat sekolah untuk melegitimasi keputusan sekolah.

Salah satu contoh kebijakan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan adalah PP No.61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. PP ini memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mengelola lembaganya secara otonom, baik dari segi pendanaan, akademik, maupun pengelolaannya. Pelaksanaan PP ini akan kurang efektif jika tidak diikuti dengan adanya suatu policy yang mengatur tatanan kelembagaan yang melibatkan masyarakat dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN). PTN sebagai lembaga publik harus memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif didalamnya, sehingga misi PTN sebagai perguruan tinggi yang mengemban misi politik tidak akan dikalahkan oleh logika-logika ekonomi.

Pada level mikro, di samping peningkatan kualitas tenaga pengajar, hal yang tidak kalah penting adalah penyempurnaan kurikulum.

Arah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu mengikuti:

- ❑ Perubahan demografi;
- ❑ Inovasi teknologi;
- ❑ Inovasi sosial;
- ❑ Pergeseran nilai budaya;
- ❑ Pergeseran ekologi; dan
- ❑ Pergeseran ide dan informasi. (*United Nation Development Program* seperti dikutip oleh Ibrahim dalam Rahardjo (ed), 1997).

Perpaduan antara kurikulum, tenaga pengajar, proses belajar, dan teknologi pendidikan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pada masa mendatang diharapkan lulusan lembaga pendidikan memiliki :

- ❑ Kemampuan untuk melakukan transformasi;
- ❑ Kemampuan metodologis;
- ❑ Keterampilan sosial;
- ❑ Kesepakatan terhadap sejarah;
- ❑ Kemampuan dan kesadaran yang kritis;
- ❑ Imaginasi (refleksi) dan pandangan ke depan. (Diadaptasi dari Ibrahim 1997).

Menurut (DePorter dan Hernacki, 1999), kurikulum yang mampu mendorong keterampilan logis dan intuitif adalah kurikulum yang merupakan kombinasi dari tiga unsur yaitu keterampilan akademis, prestasi fisik dan keterampilan dalam hidup.

Dengan demikian kualitas lulusan yang tinggi hanya dapat dihasilkan oleh adanya integrasi yang terpadu antara kekuatan kurikulum, tenaga pengajar, institusi penyelenggara dan masyarakat sebagai konstituens. Dengan demikian pemerintah perlu mengurangi peranannya dan lebih memberikan kesempatan kepada sekolah dan masyarakat untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhannya sendiri.

## **Menyeimbangkan Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja**

Berdasarkan data yang disajikan oleh Prijono, nampak bahwa terdapat ketidakseimbangan yang cukup ekstrim, baik dari sisi penawaran maupun permintaan, antara berbagai disiplin ilmu. Keseimbangan penawaran dan permintaan ini dalam jangka pendek dapat dicapai dengan menggunakan mekanisme pasar, terutama untuk lembaga-lembaga swasta. Artinya, lembaga-lembaga tersebut akan menambah atau mengurangi program studinya berdasarkan permintaan pasar. Namun, hal ini lebih sulit dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan milik negara, sebab lembaga-lembaga pendidikan milik negara memiliki misi yang berbeda. Mekanisme pasar kurang mampu digunakan untuk memprediksi kebutuhan jangka panjang dan dalam skala global. Oleh sebab itu dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan, negara (pemerintah) tidak dapat semata-mata menggunakan mekanisme pasar sebagai bahan pertimbangan utama. Kebijakan pendidikan terkait erat dengan kebutuhan SDM jangka panjang dan strategi pembangunan nasional, sehingga pengkajian atas faktor-faktor yang terkait dengan pendidikan perlu dilakukan.

Hal lain yang berkaitan dengan kesenjangan penawaran dan permintaan adalah faktor geografis dan demografis Indonesia yang cukup beragam. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah walaupun masih banyak kritikan, namun telah memberikan landasan yang lebih besar bagi daerah untuk melakukan otonomi, termasuk otonomi dalam mengelola pendidikan.

Otonomi yang lebih luas ini akan memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengembangkan "*core competence*" daerahnya yang diwujudkan dengan membuka program studi-program studi yang berkaitan langsung dengan kondisi daerahnya. Misalnya lembaga-lembaga pendidikan di Maluku diarahkan agar mereka memiliki kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan kelautan, lalu di Kalimantan berusaha untuk mengembangkan kompetensi di bidang kehutanan dan sebagainya. Jika dijumlahkan secara nasional maka akan terbentuk *one village one product*. Konsep ini

tentunya akan menjadi suatu sinergi dalam meraih daya saing secara internasional.

### **Meningkatkan Keterjangkauan Pendidikan**

Dalam tulisan ini keterjangkauan (*accessible*) dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana sebuah program pendidikan memungkinkan untuk diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Kemungkinan ini dapat dilihat dari segi biaya, jarak geografis, teknologi, waktu dan usia. Tugas pemerintah adalah menyediakan program-program pendidikan yang dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.

Jika menggunakan logika ekonomi pasar, maka tugas pemerintah adalah menyediakan layanan pendidikan yang tidak disediakan oleh swasta. Oleh sebab itu tugas pemerintah adalah menyediakan layanan pendidikan yang seharusnya ada namun secara ekonomis tidak menguntungkan, sehingga lembaga swasta akan menghindarinya. Kelemahan dari logika ekonomi pasar adalah pada kualitas, karena pendidikan memerlukan investasi yang besar, ada kemungkinan pemerintah hanya akan memberikan anggaran yang minimal untuk bidang pendidikan. Akibatnya adalah kualitas lulusan sekolah-sekolah milik negara akan terabaikan.

Logika kedua adalah logika *entrepreneur*. Pemerintah akan mendirikan sekolah negeri, namun sekolah tersebut kemudian dikompetisikan langsung dengan pesaing-pesaingnya yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga swasta. Secara kelembagaan ini akan mendorong para pengelola dan organisasi sekolah negeri untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan program-program pendidikannya.

Namun kedua strategi tersebut harus didukung oleh penyediaan dana yang cukup dari pemerintah dan swasta. Kredit-kredit pendidikan yang sifatnya *soft loan* perlu dipikirkan kembali. Pemerintah perlu mendorong lembaga-lembaga swasta untuk memberikan bea siswa kepada siswa yang berprestasi tinggi. Di samping itu program bea siswa yang sekarang sudah berjalan perlu diperluas lagi.

Keterjangkauan jarak geografis, teknologi, waktu dan usia dapat diatasi dengan teknologi.

Pendidikan yang semakin terindividualisasi (*individualized*) dan berkelanjutan akan mendorong orang untuk terus belajar. Sekolah bukan lagi terminal belajar, sekolah hanyalah merupakan "halte" dalam mengembangkan budaya akademis. Perubahan yang cepat di lingkungan luar dan lingkungan kerja akan menuntut keterampilan tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sehingga tuntutan untuk kembali menuntut ilmu akan semakin tinggi. Program-program kelas malam dan ekstension yang saat ini banyak dibuka adalah bukti bahwa sekolah hanyalah merupakan "halte", bukan terminal. Sehingga akan diperlukan halte-halte baru selanjutnya untuk menambah pengetahuan baik pengetahuan praktis maupun pengetahuan akademis. Untuk itu penggunaan dan pengembangan teknologi (komunikasi, metode belajar mengajar, komputer) untuk mengembangkan pendidikan perlu dilakukan.

Teknologi dapat juga digunakan untuk melakukan kolaborasi dengan institusi-institusi lain baik didalam maupun di luar negeri. Strategi kolaborasi ini perlu ditempuh untuk memberikan akses kepada pengelola lembaga dan peserta didik agar memiliki pergaulan akademis secara nasional maupun internasional. Tujuan utamanya tetap, yaitu meraih keunggulan global.

### **Kesimpulan**

Perubahan lingkungan yang semakin cepat dan acak kurang dapat ditanggapi dengan pola pikir yang logis, sekuensial, linear dan rasional. Kekurangan ini berusaha dilengkapi dengan memperbaiki sistem pendidikan yang lebih melatih belahan otak kanan yang memiliki kemampuan berpikir secara acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik.

Persoalan bagi Indonesia adalah keberagaman yang begitu tinggi antara daerah satu dengan daerah lain. Namun pemberian otonomi daerah yang lebih besar diharapkan mampu menjembatani keberagaman tersebut. Diharapkan daerah dapat menciptakan program-program pendidikan yang mampu menggali *core competence* daerah. Strategi yang dapat ditempuh agar program-

program tersebut berhasil adalah dengan melakukan *employee, organizational, dan community empowerment*. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas lulusan, keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta peningkatan daya jangkau pendidikan.

### **Daftar Pustaka**

- Baker, W. (et.al), (1999). *Indonesia The Challenge of Change*. Jakarta/ Singapore: Kerjasama CSIS dan Institute of Southeast Asian Studies.
- Barton, D.L. (1995). *Wellsprings of Knowledge; Building and Sustaining the Sources of Innovation*. Massachusetts: Harvard Bussines School Press.
- Castells, M. (1996). *The Information Age, Economy, Society and Culture (Vol.1): The Rise of Network Society*. Oxford: Blackwell Pub.
- Castells, M. (1996). *The Information Age, Economy, Society and Culture (Vol. 2):The Power of Identity*. Oxford: Blackwell Pub.
- DePorter, dan Hernacki, M. (1999). *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung: Kaifa.
- Drucker, P.F. (1997). *Masyarakat Pasca Kapitalis*, Bandung: Angkasa.
- Dubois,D.D.(ed). (1998). *The Competency Case Book; Twelve Studies in Competency-Based Performance Improvement*. Amherst MA.
- Fahey, L.and Randall,RM.,(ed). (1998). *Learning From the Future: Competitive Foresight Scenarios*. Toronto: John Wiley and Sons.
- Goleman, D. (1996). *Emotional Intelligence*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hammer,M., and Staton,SA. (1996). *The Reengineering Revolution Handbook*, London: Harper Collins Publishers.

- Hatch, M.J. (1997). *Organization Theory Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives*. New York: Oxford University Press.
- Hendry, J., J.G., and Newton, J. (1993). *Strategic Thinking: Leadership and The Management of Change*. West Sussex: John Wiley and Sons.
- Hesselbein, F., Goldsmith, M., and Bechard, R. (ed). (1997). *The Organization of The Future*. San Fransisco: Joe- Bass Pub.
- Hope, J. and Hope, T. (1997). *Competing in The Third Wave, The Ten Key Management Issues of the Information Age*. Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Limerick, D. and Cunnington, B. (1993). *Managing The New Organisation: A Blueprint for Networks and Strategic Alliances*. West Chatswood NSW: Bussiness and Profesional Publishing.
- Marquardt, M. and Reynolds A. (1994). *The Global Learning Organization*. New York: Richard D. Irwin Inc.
- Naisbitt, J. (1994). *Global Paradox* (terj). Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create The Dynamics Of Innovation*. New York: Oxford University Press.
- O'Connor, J. and McDermonnt, I. (1997). *The Art Of System Thinking: Essential Skills For Creativity and Problem Solving*. London: Thorson.
- Osborne, D. and Plastrick, P. (1997). *Banishing Bureaucracy, The Five Strategies for Reinventing Government*. Reading: Addison-Wesley.
- Pedler, M., Burgoyne, J., and Boydell, T. (1991). *The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development*. Berkshire: McGraw-Hill Book Comp. Europe.
- Peters, T. (1987). *Thriving on Chaos: Handbook for A Management Revolution*. New York: Harper Collins Publshers.

- Tjiptoherijanto. (1996). *Perubahan Kependudukan Menyongsong Abad-21*. Jakarta: FE-UI.
- Rahardjo, (ed). (1997). *Keluar dari Kemelut*. Jakarta: Intermedia.
- Richard, C. (1991). *In The Era Of Human Capital: The Emergence Of Talent, Intelligence, And Knowledge As The World Wide Economic Force And What It Means To Managers And Investors*. Harper Collins Publishers Inc.
- Savage, CM. (1990). *5<sup>th</sup> Generation Management: Integrating Enterprises through Human Networking*. USA: Digital Press.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art & Practice The Learning Organization*. New York: Currency Doubleday.
- Senge. PM.(et.al). (1995). *The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization*. London: Nicholas Brealey.
- Stewart, T.A. (1997). *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. London: Nicolas Breadley Publishing.
- Tapscott,D. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in The Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- Tilaar, H.A.R. (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Grasindo.
- Waitley, D. (1996). *Kerajaan Pikiran*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Wheatley. M.J. (1994). *Kepemimpinan dalam Dunia Baru* (terj). Jakarta: Abadi Tandır.

### **Majalah/Peraturan**

- Forum No.15 Juli 1999
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah.

## **4. PENDIDIKAN TINGGI UNTUK MILENIUM KETIGA**

---

Conny Semiawan & Tian Belawati

### **Revolusi Teknologi Informasi dan Komunitas Global**

Seiring dengan pergeseran tatanan masyarakat dari era industri ke era pasca industri dalam empat dekade terakhir, akhir milenium kedua ini ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, yang telah menjadikan dunia seperti tidak terbatas. Tatanan masyarakat yang biasanya tertutup oleh batas-batas fisik wilayah berubah menjadi tatanan komunitas global. Standar kualitas kehidupan di suatu masyarakat dengan cepat terdifusi ke masyarakat lain, dan dengan sendirinya melahirkan tuntutan-tuntutan baru bagi pencapaiannya.

Revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah meningkatkan percepatan laju segala aspek kehidupan dengan berlipat ganda. Semua sektor dipacu untuk saling mendahului dalam inovasi, karena apa yang menjadi keunggulan hari ini besok menjadi sesuatu yang belum tentu punya arti. Dampak yang paling nyata adalah pada dunia ekonomi dan bisnis. Derasnya arus informasi menjadikan kompetisi di segala bidang menjadi sangat tajam. Setiap unsur pelaku bisnis dituntut untuk selalu menciptakan inovasi atau produk baru yang secara pasti menuntut keterampilan baru pada sumberdaya manusianya. Keahlian atau keterampilan yang hari ini dibutuhkan dunia kerja, besok mungkin sudah digantikan oleh komputer.

*Today's production methods, communication technologies, perceptions of problems and problem solving strategies can be overdue and obsolete tomorrow (Bardmann & Franzpotter dalam Peters, 1999, hal. 5).*

Demikian pula, proses globalisasi yang mengakibatkan restrukturisasi dunia disertai banjir informasi ini telah berdampak pula terhadap kehidupan nyata. Persaingan tenaga kerja dengan keahlian yang sama tidak lagi terbatas pada sumberdaya manusia yang ada di daerah yang sama, tapi datang dari segala penjuru dunia. Kita adalah bagian dari masyarakat informasi (*information based society*).

*Information based society* ini memberikan peluang kepada setiap individu untuk berpartisipasi (*participation opportunities*) dan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat berkontribusi terhadap perkembangan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Hal ini bukan saja mencakup kesempatan sekolah, melainkan juga bekerja, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, serta melindungi lingkungannya. Peluang berpartisipasi juga memiliki rentangan perangkat dan situasi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, serta antara satu tempat dan lembaga dengan tempat dan lembaga lain. Sehingga pertanyaan bagi dunia pendidikan adalah: komponen serta kemampuan apa yang dipersyaratkan untuk dapat bertahan dan produktif dalam masyarakat seperti itu?

### **Kemampuan manusia yang dipersyaratkan**

Pengembangan kemampuan manusia atau *Human Capacity Development (HCD)* adalah hasil interaksi antarindividu dan masyarakat yang memiliki peluang berpartisipasi. Perkembangan kemampuan manusia terkait erat dengan peluang berpartisipasi karena mewakili perangkat masukan (*set of input*) yang menumbuh-kembangkan kemampuan manusia. Ini dapat diartikan sebagai keseluruhan peluang partisipasi yang dapat diraih oleh individu dan masyarakat, dan bahkan dapat menciptakan peluang partisipasi baru yang bermakna bagi orang lain. Artinya, peluang terkait secara khusus dengan konteks tertentu (*context specific*) seperti dengan masalah jenis kelamin, rakyat di daerah terpencil,

dan rakyat miskin yang memiliki kendala partisipasi. Sementara itu, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terus menerus mempengaruhi situasi yang makin meluas dan tidak lengkap. Karena kondisi yang berubah terus menerus, maka diperlukan bukan saja pemahaman, tetapi juga tindakan dan refleksi (*action and reflection*) terhadap tuntutan zaman. Ciri-ciri fleksibilitas, keterbukaan, berpikir kreatif, berpikir kritis, keprigelan (*dexterity*) yang bersifat kompleks namun cermat (yang terkait dengan media informasi yang semakin canggih), kepekaan dan kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta kemampuan kerjasama antarmanusia adalah tuntutan terhadap sekolah-sekolah, terutama perguruan tinggi untuk dapat dikembangkan.

Namun, diakui ataupun tidak, sistem pendidikan kita baik di tingkat sekolah dasar dan menengah maupun PT, justru tidak selalu mempersiapkan kompetensi kognitif maupun afektif yang diperlukan untuk hidup dalam peradaban global seperti diisyaratkan di atas. Sebagai contoh, kurikulum sekolah sarat dengan isi yang mengajarkan:

- a. prinsip dan keterampilan teoretis yang bersifat umum yang tidak selalu *transferable*, sedangkan dalam kenyataan global diperlukan bentuk kompetensi yang bersifat *situation-specific* (Levinger dalam Semiawan, 1999). Kemampuan beradaptasi mengandung pengertian "transfer komponen identik" dari situasi lama ke situasi baru, atau dari situasi kelas ke situasi kehidupan nyata.
- b. penguasaan materi tuntas (*mastery*) secara individual, sedangkan tugas-tugas dalam dunia kerja (mental maupun fisik) menuntut kerja sama, serta pembagian tugas dan tanggung jawab bersama (*sharing assignment and responsibility*).
- c. pengembangan pikiran yang kurang memanfaatkan alat pikir (*tool-less thought*), padahal pekerjaan luar sekolah mengandalkan peralatan kognitif (*cognitive tools*) (Levinger dalam Semiawan, 1999).

- d. berpikir simbolik, sedangkan aktivitas mental dalam kaitan dengan kehidupan nyata menuntut keterlibatan langsung dengan objek dan situasi.

Meskipun demikian, isu-isu tersebut sebaiknya tidak dipandang secara hitam kontra putih, melainkan sebaiknya disorot dari perspektif tuntutan masa depan. Oleh karena itu, kekurangsesuaian antara tuntutan hidup dalam *information based society* yang menjadi ciri dari peradaban abad 21 dengan hari ini, menuntut perubahan strategi pendidikan yang mencakup pengalihan pengetahuan *lintas* konteks, *lintas disiplin*, dan *lintas perangkat*.

### **Teori Pemberdayaan Otak dan Intelegensia Jamak**

Perkembangan dalam *neuroscience* telah mempengaruhi psikologi belajar dan kognisi manusia. *Neuroscience* yang mempelajari otak manusia, mengibaratkan otak manusia seperti sebuah komputer (bukan sama dengan komputer). Otak menerima input melalui persepsi, menyimpannya dalam memori, memprosesnya melalui pikiran, dan berbuat mengadakan keputusan (Leahey, et. al dalam Semiawan, 1999). Namun demikian, dalam banyak hal otak jauh berbeda dari komputer. Bila komputer memiliki suatu unit berpikir tunggal yang kuat, yaitu *chip* yang melaksanakan semua perhitungan komputer, otak memiliki banyak unit sederhana yang disebut *neuron* yang karena berbagai kegiatan yang sifatnya kolektif, menjadikan kita *intelligent*. Berbeda juga dari komputer yang dibentuk dan diprogram oleh yang mengelolanya, otak manusia menjadikan manusia belajar aktif dan spontan. Belajar dan perkembangan merupakan dua sisi dari satu *coin*, karena perkembangan terjadi sebagai akibat belajar.

Lebih jauh, *neuroscience* juga telah memberikan informasi bahwa fungsi belahan otak kiri terutama terkait dengan persepsi kognitif, logis, linear, algoritmis; sedangkan belahan otak kanan lebih mengacu pada pengamatan yang holistik, imajinatif dan kreatif. Siler (dalam Semiawan, 1999) membandingkan fungsi otak dalam *neuroscience* ini dengan konfigurasi energi dalam nuklir. Bila kedua belahan otak menyatu (*nuclear fusion*), maka *unity* tersebut

menjadikan belahan otak kanan berfungsi, sedangkan bila kedua belahan otak membelah (*nuclear fission*) dan terjadi *disunity*, belahan otak kiri berfungsi, dan ini terjadi dalam 1/10 mil per detik. Di samping itu, manusia aktif juga mengalami *peak-experience*, bila minatnya tersulut untuk menjelajahi dunianya. *Peak experience* yang disertai getaran emosional ini adalah berfungsinya kreativitas dalam kehidupan mental manusia. Untuk itu memang perlu perubahan strategi belajar yang dapat menggerakkan berfungsinya kedua belahan otak yang memiliki implikasi terhadap sistem maupun terhadap pola belajar individu, karena akan menggerakkan otak dan seluruh pribadi manusia dari dalam (*from within*).

Seiring dengan perkembangan dalam *neuroscience* yang memberikan peluang untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan otak, Semiawan (1999) mengutip teori Howard Gardner tentang inteligensia jamak (*multiple intelligence* atau MI), yang bermula dari 7 kemudian menjadi 8 dimensi inteligensi, yang berfungsi sangat kontekstual. Kedelapan jenis inteligensi yang menunjukkan kompetensi intelektual yang berbeda-beda tersebut adalah (1) **Inteligensi Verbal Linguistik**, yaitu kemampuan untuk membaca, menulis dan berkomunikasi; (2) **Inteligensi Logis-Matematis**, yaitu kemampuan untuk berpikir logis, sistematis, dan menghitung; (3) **Inteligensi Visual-Spatial**, yaitu kemampuan untuk berpikir melalui gambar, memvisualisasi hasil masa depan, mengimajinasikan sesuatu dengan penglihatan; (4) **Inteligensi Musikal-rhythmical**, yaitu kemampuan untuk mengkomposisikan musik, menyanyi dan menghargai musik, memiliki kepekaan untuk irama; (5) **Inteligensi Kinestetis Badaniah**, yaitu kemampuan untuk menggunakan badan secara terampil, mengatasi masalah, menghasilkan prestasi seperti para atlit; (6) **Inteligensi Interpersonal Sosial**, yaitu kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain, memiliki empati dan pengertian, menghayati motivasi dan tujuan seseorang; (7) **Inteligensi Intrapersonal**, yaitu kemampuan untuk analisa diri dan refleksi dan kemampuan untuk menilai keberhasilan orang lain, memahami diri, seperti ahli filsafat dan konselor; serta (8) **Inteligensi Natural**, yang ditambahkan Gardner pada tahun 1996, yaitu kemampuan mengenal kembali flora dan fauna dan mencintai alam, seperti dalam ilmu biologi.

Sementara itu, walaupun istilah kecerdasan emosional (*emotional quotient* atau EQ) sudah mulai memasyarakat, pada waktu ini IQ masih merupakan angka yang banyak diukur untuk berbagai keperluan. IQ yang diukur melalui suatu *overall single score*, yaitu skor umum tunggal, mungkin memang merupakan peramal baik untuk mengestimasi kemajuan sekolah karena pendidikan formal terutama menggunakan kemampuan verbal linguistik dan logis-matematis yang memang adalah penting dalam zaman serba teknologi. Tetapi inteligensi lainnya tidak atau kurang diperhatikan, yang memberi konotasi bahwa tidak seluruh kemampuan otak dimanfaatkan. Padahal, eskalasi maupun akselerasi dalam belajar pada setiap jenjang usia, terutama pada usia seseorang berada di perguruan tinggi, menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan secara optimal menuntut penggunaan kemampuan otak secara maksimal sekaligus, melalui kombinasi unik semua inteligensia tersebut.

Karena kehidupan intelektual adalah ekspresi dari *human intelligence*, maka perkembangan otak, organisasi dan fungsinya, jangan hanya dilihat dari produk dan kinerjanya melainkan juga dari proses dan strukturnya. Penelitian menunjukkan (Mecker dalam Semiawan, 1999) bahwa otak tidak tumbuh dan berkembang saja, tetapi mengorganisasikan dirinya. Konsep organisasi neurologi adalah kunci memahami inteligensi manusia sebagai kemampuan yang terus menerus menumbuhkan kemampuan baru. Inteligensi mencakup pemahaman terhadap berbagai stimuli yang terintegrasikan dalam informasi yang sudah ada atau menggunakan informasi sedemikian rupa sehingga meningkatkan kompleksitas pemahaman, integrasi dan aplikasinya. Dalam memunculkan berbagai kemampuan baru yang tadinya bersifat tersirat menjadi tersurat, tersintesakan berbagai kemampuan tersebut pada taraf mental yang lebih tinggi dan melalui berbagai saluran jamak yang beragam (*multichannel*).

Dengan pengetahuan mengenai fungsi kerja otak dan perkembangan teori inteligensi manusia tersebut, hal yang menjadi persoalan adalah : bagaimana kita dapat mengoptimalkan kinerja otak untuk 'mengeluarkan' semua potensi inteligensi dalam diri peserta didik, terutama di perguruan tinggi?

## Implikasi Terhadap Perguruan Tinggi

### **Kontekstualisasi Kurikulum dan Otonomi Akademik**

Perguruan tinggi (PT) merupakan suatu lembaga pendidikan yang berfungsi ganda. Seperti lembaga pendidikan lainnya, selain untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik, PT juga mempunyai fungsi untuk menguatkan dan mengembangkan tradisi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Artinya, upaya pengembangan sumberdaya manusia melalui transfer ilmu pengetahuan harus selalu diselaraskan dengan konteks di mana proses pembelajaran terjadi. Secara teoretis, hal ini sudah dilaksanakan melalui keseimbangan pelaksanaan Tridarma PT. Namun pada prakteknya, belum secara optimal dilakukan.

Upaya pengoptimalan fungsi kerja otak harus dilakukan dengan memberikan berbagai stimuli untuk merangsang bekerjanya belahan otak kiri dan otak kanan secara sinergis, sehingga akan menghasilkan *peak experience*. *Peak experiences* yang disertai getaran emosional akan menyulut berfungsinya kreativitas dalam kehidupan mental manusia, dan mengoptimalkan pengembangan *multiple intelligences*. Keragaman stimuli tercipta dari integrasi ilmu pengetahuan dengan aplikasi kontekstual. Oleh karena itu, kurikulum harus kaya dengan substansi yang aplikatif.

Kurikulum juga merupakan suatu perjanjian (kontrak) sosial antara PT dengan masyarakat (terutama masyarakat industri), suatu janji yang tersirat untuk menukarkan pengetahuan dengan dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Perjanjian tersebut tidak pernah bersifat statis, sebab masyarakat berubah karena manusia berubah. Oleh karena itu, PT harus mengubah kurikulum, cara pembelajaran, ragam fungsi layanan, dan bahkan mengubah konsep pendidikannya untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat pemakainya. Dengan demikian akan ada pengertian yang terus menerus terjadi antara masyarakat dan PT yang dapat diibaratkan suatu *trade-off* yang mempunyai kerugian dan keuntungan. Artinya: PT bukan lembaga pendidikan tinggi yang bermuka manusia, melainkan esensinya adalah **manusiawi**, karena PT mendidik, mengajar, yang mencakup seluruh aktivitas metoda intelektual dan proses berpikir, serta bersosialisasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa PT saat ini masih belum bebas 100% dalam menentukan kurikulum akademiknya. Padahal kurikulum yang adaptif hanya dapat dibuat apabila PT memiliki otonomi akademik yang luas. Otonomi akademik akan melahirkan kreativitas dalam perancangan kegiatan akademik dan akan meningkatkan keterkaitan ilmu pengetahuan dengan konteks aplikasinya.

### ***Kurikulum Transdisipliner dan Modus Pendidikan Terbuka***

Perkembangan teknologi merupakan hasil integrasi perkembangan berbagai disiplin ilmu. Demikian pula, problema dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan pada tatanan masyarakat abad 21 memerlukan pendekatan yang multidisiplin. Fenomena ini menuntut manusia untuk menguasai tumpang tindih berbagai bidang ilmu, untuk menjadi spesialis yang juga generalis. Transfer komponen-komponen identik dari dua bidang pengetahuan yang berbeda, berarti belajar menemukan kembali struktur pengetahuan tertentu dalam konteks yang berbeda yang dapat disarikan untuk tujuan tertentu atau untuk mengatasi masalah tertentu. Artinya, selain identitas kognitif satu disiplin yang harus dikuasai, diperlukan juga kemampuan untuk bekerja berdasarkan modus transdisipliner. Ini juga berarti menekankan lagi pentingnya belajar bekerja sama dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, dan yang memiliki pengalaman dan keterampilan yang berbeda, untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang transdisipliner menuntut perubahan sistem pendidikan. Metamorfose yang akan harus dialami oleh PT pada umumnya, khususnya di negara berkembang dan terutama di Indonesia, terkait dengan dua isu utama, yaitu: kualitas dan akses. Kualitas terkait dengan substansi kurikulum yang fleksibel sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan setiap orang. Kenyataan menunjukkan bahwa alam tidak bersifat egalitarian karena setiap orang dilahirkan dengan berbeda potensi intelektual, talenta, minat dan jasmani serta dibesarkan pula dalam lingkungan yang berbeda fisik, biologis, kultural maupun ekonomi, yang memunculkan berbagai potensi

yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, setiap orang seharusnya dimungkinkan untuk merakit kurikulum belajarnya sendiri sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ini berarti, proses belajar mengajar harus mencari kemungkinan di antara berbagai jenis saluran jamak (*multi channel*) *neuron* otak yang dapat "membuka" kemampuan tersebut dengan kemungkinan jamak (*multi chance*) pula.

Di samping itu, modus kerja yang baru yang terkait dengan produksi pengetahuan baru seperti diuraikan menuntut agar batas-batas antar berbagai bidang disiplin (transdisiplin) menjadi lebih fleksibel, tidak lagi terlalu ketat (Nowotny dalam Semiawan, 1999). Artinya, kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi baru terkait erat dengan keterampilan seseorang menghadapi berbagai disiplin yang berbeda dan menggunakan kemampuan berpikir tinggi. Ini juga berarti peningkatan keterampilan dan sikap untuk dapat dan mau menambah pengetahuan serta penyesuaian diri terhadap tantangan situasi yang terus menerus berubah.

Akses terkait dengan penyediaan sumber belajar bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dampak signifikan dari produksi dan distribusi pengetahuan yang berkenaan dengan pasaran *continuing education* yang dilandasi oleh masyarakat belajar (*learning society*), dan yang menganut prinsip belajar sepanjang hayat, adalah meluasnya pelayanan pendidikan melalui *mass education*. Cepatnya perubahan menuntut disiapkannya *retraining* berbagai bidang, di samping pendidikan formal yang biasa berlaku untuk pengembangan ilmu. Artinya, sekali lagi, adalah perlunya dikembangkan sistem pendidikan yang lebih terbuka. Sistem pendidikan yang lebih terbuka seperti melalui penerapan sistem belajar jarak jauh (*distance learning*) merupakan alternatif yang perlu terus diaplikasikan. Dengan demikian akses terhadap pendidikan tinggi dapat disediakan untuk populasi sasaran yang berasal dari segmen yang berbeda, sehingga seluruh potensi dapat berkontribusi pada penyiapan sumberdaya manusia yang siap berkompetisi di era global. Kesiapan belajar masyarakat banyak akan meningkatkan kemampuan para pekerja untuk memberi respon yang sesuai terhadap perubahan teknologi yang

cepat terjadi dan menjadi bahan masukan yang berharga terhadap pasar yang sangat kompetitif.

### ***Pendekatan Pembelajaran: Process-Oriented***

Perkembangan fenomena sosial ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan pergeseran tuntutan pada kemampuan sumberdaya manusia. Tuntutan tersebut sangat signifikan, baik dari aspek tuntutan pada kecepatan beradaptasi pada perubahan maupun dari aspek kemampuan untuk bersaing secara global. Untuk itu diperlukan refokus dalam proses pembelajaran, dari *product-oriented* menjadi *process-oriented*.

Proses pembelajaran yang banyak diturunkan dari paradigma *behaviorism* yang secara umum diterapkan pada sistem pendidikan nasional saat ini, menekankan pada pencapaian produk. *Competence* dalam paradigma ini didefinisikan sebagai kompetensi yang dapat didemonstrasikan dan diukur, dan bagaimana proses pencapaian produk tersebut tidak ditekankan sebagai sesuatu yang harus diukur (Reber dalam Belawati, 1992). Pada prakteknya di Indonesia, penerapan konsep kompetensi dalam paradigma ini telah melahirkan sistem pembelajaran yang kering, yang tidak memicu *neuron* dalam otak manusia untuk bekerja secara kolektif dan melahirkan kreativitas.

Kemampuan manusia global yang dituntut adalah kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya pada berbagai konteks dan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemampuan ini merupakan integrasi kemampuan melakukan analisis, bertukar pikiran, berdiskusi, mendengarkan, dan menyampaikan buah pikiran secara sistematis. Dengan kata lain, kompetensi yang diperlukan adalah dalam arti luas, yaitu kemampuan untuk memahami lingkungannya sehingga dapat berfungsi secara produktif dalam masyarakat (Wolman dalam Belawati, 1992). Pencapaian kompetensi ini memerlukan eksploitasi semua jenis inteligensia yang dikemukakan Gardner, yang merupakan sintesa inteligensia pada taraf mental yang lebih tinggi dan melalui berbagai saluran jamak yang beragam (*multi channel*). Ini semua hanya dapat dihasilkan dari suatu proses

pembelajaran aktif yang menekankan pada proses berpikir untuk menghasilkan produk, atau yang *process-oriented*. Pendekatan *process-oriented* pada pembelajaran akan mengembangkan kemampuan untuk belajar dan untuk menemukan (*how to learn and to discover*) atau akan memupuk kemampuan individual menjadi *self-directed learner*, yaitu *learner* yang dapat :

*...take the initiative, with or without help of others, in diagnosing [his/her] learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes (Knowles dalam Langenbach, 1988, hal. 163-164).*

### **Otonomi, Akreditasi, dan Jaringan Perguruan Tinggi**

Secara terintegrasi, kontekstualisasi kurikulum yang dibarengi dengan fleksibilitas perancangan kurikulum individu dan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses, akan meningkatkan kualitas lulusan PT. Tampaknya hal ini telah dicermati oleh pemerintah saat ini. PP nomor 61 tahun 1999 mengenai otonomi PT dikeluarkan di antaranya untuk memberikan keleluasaan kepada PT untuk mengatur dirinya sendiri, baik pada pengaturan akademik maupun administrasinya. Dengan otonomi ini PT diharapkan dapat lebih responsif terhadap pola kebutuhan masyarakat, dan dapat lebih efisien dalam mengelola program-program pendidikannya. Keinginan pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi relevansi dan efisiensi juga diimbangi dengan keinginan untuk menjamin kualitas pendidikan. Siapakah yang harus mengawasi kualitas ini?

Dengan otonomi, kontrak sosial antara PT dengan masyarakat menjadi semakin langsung. Jika penjagaan kualitas PT selama ini seolah-olah menjadi tanggung jawab pemerintah, maka dengan otonomi, masyarakat menjadi penilai langsung. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, sebagai hasil dari masyarakat belajar (*learning society*), PT akan dituntut untuk selalu melakukan evaluasi diri yang berkesinambungan. Evaluasi diri ini yang akan menentukan eksistensinya, karena jika tidak, akan ditinggalkan

oleh masyarakat penggunanya. Dalam proses seperti ini, kualitas pendidikan akan selalu terjaga. Dengan demikian, posisi pemerintah dalam hubungan PT-masyarakat ini menjadi eksternal. Walaupun demikian, otonomi PT dan evaluasi diri yang dilakukannya tidak terlepas dari pantauan pemerintah selaku pihak yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan bangsa. Namun, fungsi pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional PT atau BAN-PT dalam melakukan akreditasi PT seharusnya terutama bersifat konfirmatoris semata.

Selain itu, untuk menjaga dan meningkatkan sinergi nasional dalam mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia, maka perlu diadakan jaringan organisasi PT. Sumber belajar seharusnya tidak terkonsentrasikan di pusat, tetapi juga tidak tersebar di unit-unit utama, karena aset, pengetahuan dan kompetensi PT tersebar di seluruh lembaga pada berbagai lokasi. Tidak semua unit penyelenggara pendidikan tinggi beroperasi dalam suatu interaksi yang memiliki kesamaan lingkungan dan sumber. Masing-masing mempunyai berbagai peran berbeda. Integrasi dari kesemuanya itu berjalan bila ada kesamaan nilai (*shared values*) dan standar, komunikasi horisontal, serta sosialisasi nilai.

Pembentukan jaringan PT terutama dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan empat jenis kapital input proses pendidikan, yaitu: kapital fisik, kapital sumberdaya manusia, kapital informasi, dan kapital keuangan. Peranan pemerintah dalam menyeimbangkan pembagian keempat jenis kapital ini kepada seluruh komponen sistem pendidikan sangat vital. Sistem akreditasi sebagai konfirmasi hasil evaluasi diri PT harus melihat dan menjamin bahwa paradigma pemanfaatan bersama sumberdaya sudah dipahami dan dilaksanakan oleh PT.

Mekanisme penjagaan kualitas yang ditekankan pada evaluasi internal dan kemudian dikonfirmasi secara eksternal, akan meningkatkan kesempatan terciptanya proses kreatif PT. Sedangkan jaringan PT akan meningkatkan kesempatan kepada individu yang terlibat dalam proses pendidikan untuk saling berinteraksi, berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman, serta berdebat secara intensif. Proses komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan PT dan antara PT yang satu dengan lainnya

akan memperkaya substansi pembelajaran, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan proses kerja kognitif *civitas academica* PT.

## **Penutup**

Revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan percepatan laju segala aspek kehidupan dengan berlipat ganda. Perubahan yang serba cepat ini telah melahirkan tuntutan-tuntutan baru yang berimplikasi pada tuntutan perubahan sistem pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Kemampuan sumberdaya manusia yang dipersyaratkan pada era milenium ketiga ini adalah manusia spesialis yang generalis yang mampu bekerja efektif dalam keberagaman konteks dan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin.

Penemuan dalam bidang *neuroscience* dan teori kecerdasan memperlihatkan bahwa manusia mempunyai potensi inteligensia jamak yang dapat dilatih melalui proses pendidikan. Upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan fungsi kerja otak dan penggalian inteligensi manusia dapat dilakukan dengan perancangan kurikulum pendidikan yang kontekstual, fleksibel, serta dengan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses. Perancangan sistem pendidikan dengan memperhatikan hal-hal tersebut akan menjadikan kontrak sosial antara masyarakat dengan PT menjadi langsung dan tanpa perantara. Oleh karena itu, kualitas pendidikan akan terjaga dengan sendirinya melalui proses evaluasi diri PT yang dipandu oleh tuntutan masyarakat. Peran penjaminan kualitas oleh pemerintah dalam keadaan seperti itu menjadi eksternal dan lebih bersifat konfirmatori.

## **Daftar Pustaka**

- Belawati, T. (1992). *Defining Competence for Adults*. Makalah seminar yang tidak dipublikasikan, Department of Adult Education, University of British Columbia, British Columbia, Kanada.
- Langenbach, M. (1988). *Curriculum models in adult education*. Malabar, Florida: Robert E. Krieger Publishing.

- Peters, O. (1999). The university of the future - pedagogical perspectives. *Proceeding of the 19<sup>th</sup> World Conference on Open Learning and Distance Education*, Vienna, June 20-24.
- Semiawan, C. (1999). *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*. Jakarta: Grafindo.

## **5. IMPLIKASI PENETAPAN PTN SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL**

---

Conny R. Semiawan

### **Pendahuluan**

Sejak dikeluarkannya PP 60, tahun 1999 dan PP 61, tahun 1999 menggantikan PP 30, tahun 1989, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah ditetapkan sebagai Badan Hukum yang bersifat nirlaba (PP 61, tahun 1999, Bab II, pasal 2). Perubahan ini mempunyai banyak implikasi, salah satunya adalah implikasi psikologis sosial. Untuk dapat melihat hal ini, kita tidak dapat melepaskan keseluruhan kondisi psikologi sosial di dalam masyarakat yang sedang mengalami gejala yang luar biasa. Berbagai perspektif baru yang salah satunya adalah perspektif psikologi sosial dengan implikasinya. Sementara itu, dunia global pun mengalami peralihan yang menuntut manusia di planet ini menyadari perjalanan yang harus ditempuh di masa yang akan datang.

Tulisan ini membahas dampak transformasi global terhadap kehidupan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat terpelajar, terutama kehidupan dalam sistem perguruan tinggi.

### **Titik Berangkat dan Titik Tiba**

Kurun waktu milenium ke 3 dari proses kehidupan manusia telah diambang pintu. Kurang dari setahun yang akan datang, umat manusia di planet bumi ini akan memasuki abad ke 21, yang bukan saja merupakan abad baru, melainkan juga mencerminkan peradaban baru. Restrukturisasi dunia, yang terutama ditandai oleh berbagai perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan aspek kehidupan lain, mempengaruhi setiap manusia, baik laki-laki,

perempuan, anak di negara berkembang maupun di negara maju. Indonesia juga akan terkena oleh restrukturisasi global dunia yang sedang berlangsung meskipun kita sedang mengalami krisis moneter.

Awalnya, tujuan perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Sejalan dengan perkembangan informasi, perguruan tinggi kini juga bertujuan mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional. Secara global Indonesia kini mengalami proses transisi untuk menuju ke arah terbentuknya masyarakat madani yang lebih demokratis, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Proses transisi itu sejalan pula dengan kecenderungan internasional pada milenium ketiga ini, yang menghendaki penerapan nilai-nilai universal sebagai salah satu prasyarat untuk dapat bersaing dalam masyarakat dunia, di samping peningkatan kemampuan sumber daya manusia (TOR, SEMNAS 1999).

Isu kritis ini membangkitkan masalah yang amat kompleks dan tantangan berat bagi bangsa Indonesia. Masalah dan tantangan itu bukan saja harus tertuju pada proses pemulihan ekonomi, tetapi juga proses akselerasi pembangunan sektor lainnya. **Kesadaran** yang mendalam akan masalah kritis ini menjadi ambang persyaratan yang merupakan titik awal (TT = Point of Departure), dalam ikhtiar untuk menuju pada cita-cita bangsa. Tanpa menutup mata akan adanya kemungkinan isu-isu kritis yang lain yang menyertai ikhtiar ini, kontribusi sektor pendidikan terhadap pembangunan kehidupan bangsa melalui pencerdasannya adalah suatu niat yang bersumber dari refleksi yang mendalam (*a deep inner reflection*) dari kekuatan kehidupan berbangsa.

Setiap insan manusia Indonesia bercita-cita mencapai masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, peralihan sentralisasi menjadi desentralisasi, serta peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa dalam konteks kemajemukan suku dan budaya. Visi serta kecenderungan ini tidak terlepas dari konteks peradaban dunia yang harmonis yang telah melampaui batas-batas nasional.

Peradaban global mencakup era agraris (gelombang ke 1), era industri (gelombang ke 2), dan era informatika (gelombang ke 3), dan era respiritualisasi masyarakat (gelombang ke 4), (Mayerand, 1996). Visi yang dikedepankan dalam era ke empat ini adalah **refleksi bathin yang mendalam**, yang merupakan respiritualisasi masyarakat.

Ternyata juga bahwa wawasan dunia berubah, bukan rasio dan logika saja yang menjadi landasan intelektual, melainkan inspirasi, kreativitas, moral dan intuisi. Apabila era industri (gelombang 2) dan era informasi (gelombang 3) disertai oleh kecenderungan materialistis, konsumtif dan persaingan yang kurang sehat, karena bertujuan menaklukkan "musuh bersaing" sampai KO (knock out), maka persaingan global kini sering dibarengi kerja sama (cooperation), suatu *competition* yang dalam berusaha mencapai keunggulan kompetitif, juga tidak lagi mentolerir keserakahan (greediness). Pertanyaan utama yang harus dijawab bukan lagi: apakah kita mampu menaklukkan musuh pesaing, melainkan apakah kita mampu memenuhi kebutuhan klien/peserta didik kita? Bukan pertanyaan, apakah mampu mendapatkan keuntungan yang bisa memperkaya kita sampai tujuh turunan, melainkan pertanyaan yang berbunyi apakah kita mampu menciptakan nilai-nilai baru? (*are we creating new values?*).

## **Reposisi dan Reaktualisasi Pendidikan Nasional**

### ***Reposisi***

Di samping transisi perguruan tinggi menuju ke kemandirian, disadari bahwa revolusi ilmu dan teknologi (IPTEK) juga akan mempengaruhi perangkat lingkungan kerja maupun sistem persekolahan. Demikian pula berbagai jenis pekerjaan dan kemampuan terkait yang adalah produk tambahan revolusi IPTEK,

akan menunjuk pada ciri maupun kontent, yang perubahannya jauh lebih tajam dan cepat dari perubahan-perubahan sebelumnya. Komputer, satelit komunikasi, fasilitas, transport serta banjir informasi akan menjadi ciri dari peradaban baru. Lingkungan yang mengembangkan *information driven environment* akan menuntut infrastruktur yang berbeda pula. Mobilitas dari semua komponen tersebut, terutama akan menjadi ciri dari masyarakat di masa yang akan datang. Ini berarti, bahwa tuntutan masa depan yang dipersyaratkan mengandung arti pemahaman serta kesiapan untuk menjadi bagian dari *an information based society*. Apakah artinya itu? Keterampilan mental apakah yang terutama menjadi tugas pendidikan yang diperlukan untuk itu? Indikator utama dari *intellectual shift* harus menandai sistem kependidikan melalui identifikasi kebutuhan populasi beragam untuk dipenuhi berdasarkan berbagai aset yang kita miliki. Namun selain itu tuntutan akuntabilitas (keterandalan) dari tugas-tugas yang dibebankan kepada pelaksana pendidikan dan mereka yang kita layani, untuk mewujudkan kemandirian itu harus juga mulai ditanamkan secara lugas dalam kehidupan ini. *Co-creating* nilai-nilai baru yang menandai ciri-ciri transisional dan keberlangsungan (*sustainability*) serta perkembangan fisik dan mental peserta didik serta pelaksana pendidikan untuk membawa keseimbangan kembali kepada yang kini masih banyak ditandai oleh kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan, harus menjadi ciri utama sistem pendidikan kita.

Sistem pendidikan adalah sub sistem dalam seluruh spektrum kehidupan sosial, yang tidak dapat berjalan sendiri tanpa ditunjang oleh *a strong political will* dalam melaksanakan agenda ini. Oleh karena itu, sementara pendidikan berikhtiar secara bertahap dan terfokus agar subyek didik berkembang menjadi individu yang **mandiri**, yang mampu **beradaptasi** terhadap perubahan cepat yang terjadi di dunia, dalam rangka pemberdayaan generasi muda menatap masa depan dan respiritualisasi terhadap TT atau POD bangsa ini mulai merasuk dalam seluruh dimensi kehidupan kita, perguruan tinggi juga sedang "berjuang" pada ikhtiar beradaptasi dalam pelayanan berbagai "stake holder" sekaligus mewujudkan kemandirian, suatu konsekuensi dari ditetapkannya PTN menuju BHMN.

### **Reaktualisasi Pendidikan Nasional**

Apabila visi menjadi acuan tentang **apa** yang harus dicapai, maka misi berbicara tentang **bagaimana** mencapainya. Hal ini berkenaan dengan interpretasinya secara konkrit tentang tindakan yang akan diambil untuk mencapainya.

Kemampuan manusia yang bagaimana yang harus diwujudkan dalam menginkorporasikan dampak psikologi sosial dari penetapan PTN sebagai badan hukum. Apakah yang harus dilakukan dalam mewujudkan kemampuan manusia menjawab perubahan status PTN menjadi BUMN dalam konteks peralihan seluruh masyarakat.

Paradigma baru PT mengisyaratkan bahwa pembahasan ini mencakup juga sistem rekrutmen, penggajian dan kepegangannya, pola pemasukan dan pengelolaan keuangan yang mengarah pada swadana, sementara harus tetap berpegang pada prinsip nirlaba, serta persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan perubahan status tersebut.

Kemandirian dari pengelolaan PT dalam mencapai otonomi dan pada gilirannya kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan cepat ini secara cepat pula menuntut prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai PT yang menjadi BUMN yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas, memenuhi standar minimum kelayakan finansial dan melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas. Keterandalan (*accountability*), yang merupakan indikator kemandirian adalah prasyarat utama dalam menempuh perjalanan tersebut.

Untuk itu PT harus mengadakan suatu evaluasi diri, mengkaji kekuatan dan kelemahannya (*SWOT analysis*). Dalam evaluasi diri itu perlu dipenuhi 4 indikator utama yaitu mencakup: aset fisik (seberapa besar tanah, gedung dan prasarana) yang menjamin (*accountable*) kelangsungan PT (*sustainable*); aset dana: struktur pemasukan dan pengeluaran yang menunjuk pada indikator *accountability* dan *sustainability* juga, serta aset kekayaan informasi (*on-campus interconnectivity*, e-mail, internet, dsb) dan kekayaan aset SDM. Tuntutan keterampilan mental bagi SDM adalah persoalan yang kritis

Tuntutan kemampuan manusia yang mencakup keterampilan mental untuk dapat menghadapi masyarakat yang akan datang mengisyaratkan **keterwujudan kemampuan manusia sepanjang hayat** yang berhak dan mampu memilih berbagai perannya dalam meraih berbagai peluang partisipasi, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang tua, maupun sebagai pekerja dan konsumen, yaitu suatu perkembangan yang arah dan sasarannya terutama terjadi dari dalam, namun harus disulut untuk mencapai keterwujudannya (aktualisasinya), sebab pada hakekatnya manusia memiliki suatu kemampuan yang tidak terhingga (*unlimited capacity*) untuk belajar dan berkembang. Penyulutan minat ini terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Dan untuk itu kualitas belajar harus ditingkatkan agar hal tersebut bisa terjadi *Student Active Learning* menjadi prasyarat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

### **Penutup**

Apabila era industri dan informasi seperti tadi dikatakan, disertai oleh kecenderungan materialistis, konsumtif dan persaingan yang kurang sehat karena bertujuan menaklukkan "musuh bersaing", maka persaingan global kini seharusnya dibarengi kerja sama (*cooperation*), suatu *competition* yang tidak lagi mentolerir keserakahan (*greediness*), suatu tendensi moral yang menyertai perkembangan. Bukan lagi hal-hal yang primordial harus menjadi ciri reformasi ini, karena kita beranjak dari *a deep inner reflection*. Dengan demikian sistem pendidikan harus mempunyai kekuatan mengubah *Zeitgeist* (semangat zaman) masyarakat Indonesia.

*Shift mind set* berakar dari kesadaran yang mendalam bahwa bila keseimbangan (*balance*) antara kaya-miskin, punya-tak punya, tidak diupayakan, maka akhirnya berakibat malapetaka juga. Untuk itu perlu perubahan struktur dan pola kehidupan yang ditandai oleh revitalisasi dan demokrasi dalam arti politis dan ekonomi yang harus diimplementasikan secara luas dan arif, tidak terkecuali juga dalam sistem Pendidikan Tinggi yang mengalami suatu perubahan fundamental. Reaktualisasi yang bersumber dari refleksi yang mendalam (*a deep inner reflection*) dalam kehidupan berbangsa, ditandai oleh *an authority from within*.

### Daftar Pustaka

- Good, T. & Brophy, J. (1990). *Educational Psychology*, New York: Longman.
- Horvath, a. (1989). Globalisation of Education in Eastern Europe. *Prospects*, Vol 20 no. 2. Paris: Unesco.
- Koestler, A. (1971). The Act of Creation, dalam Rawlinton, *Berpikir Kreatif dan Brainstorming*, Surabaya: Erlangga Press.
- Lipman, M. (1991). *Thinking in Education*. London: Cambridge University Press.
- Levinger, B. (1996). *Critical transitions: Human Capacity Development Across The Lifespan*. New York: Education Development Center, Inc.
- Maynard et al. (1997). *The Fourth Wave*. London, New York: Wiley.
- Semiawan, C. (1997). *Perspektif Pendidikan Anak Berbakat*. Jakarta: Grasindo.
- Semiawan, C. (1998). *Laporan Konsultan Domestik, Komponen B, Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bank Dunia – IBRD Loan.
- Semiawan, C. (1998). *Reformasi Dalam Bidang Pendidikan*. Seminar Dies Natalis IKIP Jakarta, Jakarta.
- Semiawan, C. (1998). *Beberapa Catatan Ditinjau Dari Segi Pendidikan Untuk Naskah Awal: Dengan Semangat Persatuan dan Kesatuan Kita Tingkatkan Gerakan Nasional Cinta Tanah Air*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sekolah Susreg XXV Sesko ABRI, Jakarta.
- Semiawan, C. (1999). *Reformasi Pendidikan di Tingkat Dasar dan Menengah di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Sarasehan Pendidikan YPI Al Muhajirien Jakapermai, Jakarta.
- Semiawan, C., et. al.. (1987). *Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah*. (edisi ke 2). Jakarta: P.T. Gramedia.

Siler, T. (1990), *Breaking the Mind Barrier*. USA: Simon & Scuster.

Taylor, B. E. dan Massy, W. F. (1996). *Strategic Indicators for Higher Education*. New York: Peterson's Princeton.

## ***BAB II***

# ***PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN***

## **6. TEKNOLOGI PENDIDIKAN : HAKIKAT, DESAIN, MEDIA, DAN STRATEGI PENYAMPAIAN**

---

---

Atwi Suparman, Marisa, Paulina Pannen,  
Benny Pribadi dan Dina Mustafa

Tulisan ini membahas teknologi pendidikan<sup>1</sup> sebagai teori dan penerapannya dalam praktek pemecahan masalah pendidikan secara umum di dunia dan di tanah air. Karena luasnya ruang lingkup pembahasan, maka tulisan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama meliputi hakikat teknologi pendidikan, desain instruksional, pemanfaatan media, dan strategi penyampaian materi pembelajaran. Bagian kedua meliputi pembahasan tentang difusi dan implementasi teknologi pendidikan, manajemen, evaluasi, serta aplikasi teknologi pendidikan di berbagai sektor.

### **Hakikat Teknologi Pendidikan**

#### ***Konsep dan Bidang***

Teknologi pendidikan sebagai suatu konsep dan bidang mulai dikenal dalam pendidikan pada tahun 1960. Sejak saat itu, berbagai definisi tentang teknologi pendidikan secara silih berganti

---

<sup>1</sup> Istilah teknologi pendidikan dalam hal ini digunakan sebagai bagian dari bidang ilmu pendidikan. Pada prakteknya, istilah ini seringkali disamakan dengan istilah teknologi instruksional atau teknologi pembelajaran, walaupun beberapa ahli menyatakan bahwa ruang lingkup teknologi pendidikan lebih luas daripada teknologi instruksional. Dalam tulisan ini, istilah teknologi pendidikan memiliki arti yang sama dengan teknologi instruksional.

dikembangkan oleh para ahli dalam bidang ini. Sampai sekarang, tidak ada kesepakatan yang universal tentang apa yang disebut dengan konsep dan bidang teknologi pendidikan. Berbagai definisi dikembangkan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini berdasarkan lingkup bidang yang mereka hadapi.

Berikut adalah beberapa definisi teknologi pendidikan yang mewakili berbagai kepentingan penggunaannya, antara lain:

- a) Teknologi pendidikan berkaitan erat dengan keseluruhan metodologi dan serangkaian teknik yang digunakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran (Cleary, et.al, 1976).
- b) Teknologi pendidikan melibatkan sistem, teknik, dan alat untuk meningkatkan kualitas proses belajar manusia.....Ada empat ciri yang menyertainya, yaitu: definisi tujuan yang harus dicapai oleh siswa; aplikasi prinsip-prinsip belajar ke dalam analisis dan penstrukturan dari mata pelajaran yang akan diajarkan; pemilihan dan penggunaan media yang layak untuk mengajarkan materi; dan penggunaan metode penilaian kinerja siswa untuk menilai efektivitas dari mata pelajaran dan bahan belajarnya (Collier, et.al. 1971:16 dalam Anglin;1991:4).

Bila kita lihat lagi pada tahun 1960 yang merupakan masa awal perkembangan teknologi pendidikan nampaklah bahwa bidang ini lebih dikenal sebagai bidang yang memanfaatkan media audiovisual untuk pendidikan (Eraut, 1994).

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang melandasinya, maka bidang teknologi pendidikan pada waktu itu lebih dikenal sebagai bidang yang sangat berorientasi pada teknologi. Maka muncullah sebutan-sebutan seperti "pembelajaran melalui audiovisual", "media pendidikan", "sumber belajar" dan "komunikasi pendidikan" (AECT, 1977).

Pembelajaran melalui audiovisual dikembangkan berdasarkan konsep menggunakan bahan-bahan visual untuk memberikan gambaran konkrit tentang materi-materi pelajaran yang abstrak. Konsep inipun hingga kini masih dianggap relevan. Salah satu kelemahan utama yang muncul dari pembelajaran melalui audiovisual ini adalah lebih dipentingkannya faktor produk

audiovisual itu sendiri ketimbang faktor desain, pengembangan, produksi, evaluasi dan manajemen produk tersebut. Kelemahannya yang lain adalah bahan-bahan audiovisual lebih dipandang sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan secara utuh oleh si belajar. Dari sini, maka kerangka konsep teknologi pendidikan bergeser menuju pemikiran pembelajaran sebagai suatu proses komunikasi (Berlo, 1960). Dalam hal ini pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan melalui berbagai saluran. Di sini terlihat bahwa pembelajaran tidak hanya semata-mata terkait dengan materi yang akan disampaikan tetapi juga berhubungan erat dengan komponen sumber materi, saluran maupun penerima materi pembelajaran.

Sejalan dengan pengaruh komunikasi dalam pembelajaran, muncul pula perkembangan lain yang saat ini menjadi kerangka konsep teknologi pendidikan yaitu konsep pendekatan sistem (Finn, 1961). Ia mengemukakan bahwa konsep sistem dalam teknologi pendidikan adalah konsep untuk memadukan pembelajaran massal dan individual dengan pembelajaran konvensional menjadi sistem instruksional yang utuh.

Lumsdaine (1964), membedakan konsep teknologi pendidikan dari dua sisi. **Sisi pertama**, teknologi pendidikan merupakan penerapan ilmu dan teknologi ke dalam rancangan perangkat pembelajaran. Hal ini amat berkaitan dengan penggunaan perangkat audiovisual dalam pendidikan. **Sisi kedua**, dalam teknologi pendidikan, berkaitan dengan penerapan ilmu tingkah laku (*behavioral sciences*) untuk menghasilkan teknologi yang berhubungan dengan belajar, muncullah berbagai teori tentang pembelajaran, termasuk didalamnya *programmed learning*.

Setelah lebih dari dua dasawarsa bidang ini digunakan, maka muncullah suatu kerangka pemikiran baru tentang apa yang disebut teknologi pendidikan. AECT (1977), mencoba merumuskan kembali konsep teknologi pendidikan yang bersifat lebih menyeluruh. Perumusan kembali landasan konseptual teknologi pendidikan tetap tidak terlepas dari nuansa teknologi yang memang merupakan cikal bakal lahirnya bidang teknologi pendidikan.

Perbedaannya yang mendasar terletak pada asumsi yang digunakan yaitu (a) keterpaduan orientasi, (b) berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang, (c) berorientasi pada proses, (d) berorientasi pada teori serta (e) konsisten dengan keadaan pendidikan dan masyarakat baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.

### ***Teknologi Pendidikan Dari Masa Ke Masa***

Sebagai suatu bidang, teknologi pendidikan mulai diakui keberadaannya dalam periode 1967-1972. Orang-orang yang bekerja dalam bidang ini boleh berbangga hati karena pekerjaannya sebagai "ahli teknologi pendidikan" yang mempunyai cakupan luas dalam semua sektor pendidikan.

Dukungan resmi pertama untuk bidang teknologi pendidikan terjadi pada tahun 1967 dengan didirikannya *The United Kingdom of the National Council for Educational Technology*, dan *Department of Audiovisual Instruction of the National Education Association for Educational Communications and Technology* pada tahun 1970. Semakin lama, lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam bidang teknologi pendidikan semakin banyak, misalnya; munculnya *National Center For Educational Technology* yang merupakan bagian dari *National Institute Of Education*.

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi pendidikan, maka semakin terasa pula kebutuhan akan adanya definisi untuk bidang ini. Salah satu definisi yang komprehensif dikemukakan dalam AECT (1973) yang memperlihatkan keunikan bidang teknologi pendidikan yang tercermin dari tiga konsep utamanya yaitu: penggunaan berbagai jenis sumber belajar, penekanan pada belajar individual dan personal, serta penggunaan pendekatan sistem.

Penggunaan berbagai jenis sumber belajar sebenarnya merupakan perluasan istilah terdahulu yang kerap kali digunakan untuk menggambarkan bidang teknologi pendidikan yaitu "bahan-bahan audio visual". Istilah sumber belajar nampaknya lebih tepat digunakan dalam konteks ini karena istilah ini sesungguhnya merujuk kepada "bahan-bahan audiovisual, lingkungan pembelajaran (seperti sekolah), dan nara sumber".

Belajar individual sebagai salah satu keunikan dalam bidang teknologi pendidikan dipicu oleh belajar terprogram yang sudah muncul lebih dahulu. Di sini, individu yang belajar diberikan tugas-tugas yang sangat terstruktur, harus melewati urutan-urutan yang telah ditetapkan serta menyelesaikan serangkaian tes hasil belajar.

Konsep utama ketiga yang dikemukakan dalam definisi AECT adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini awalnya lebih banyak digunakan di kalangan militer dan dunia industri dimana seringkali muncul kondisi kerja yang bersifat "manusia-mesin". Pendekatan sistem dalam hal ini sangat berguna terutama untuk menyusun perencanaan yang terkoordinasi antara pemilihan personil, pelatihan dan rancangan peralatan. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, pendekatan sistem ini perlu digunakan dalam membuat keputusan tentang penggunaan mesin-mesin dan bahan-bahan sebagai alat bantu dalam pendidikan. Perencanaan ini seyogyanya dilakukan pada saat pengembangan kurikulum dari suatu program, bukan pada tahap pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Beragamnya definisi tentang bidang teknologi pendidikan telah diperkirakan oleh Gentry dan Csete (1991) di mana mereka menyatakan bahwa masalah perumusan definisi ini masih akan berlanjut di era tahun 90-an.

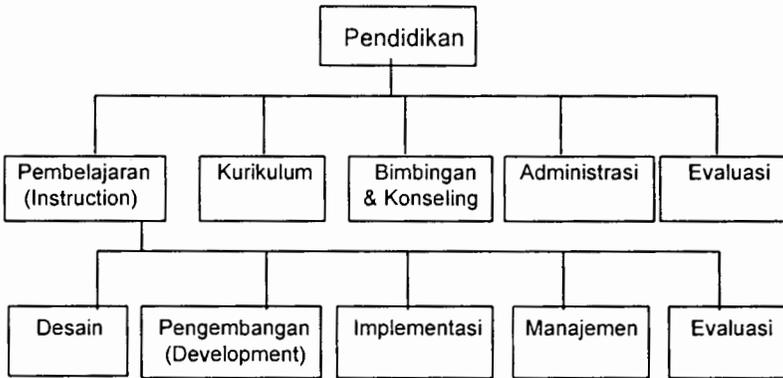
Ini antara lain dibuktikan oleh Seels dan Richey yang mengemukakan satu definisi terbaru dalam bidang teknologi instruksional (perlu dicatat bahwa istilah teknologi pendidikan dan teknologi instruksional seringkali digunakan secara bergantian karena kedua istilah ini dianggap "sama"). Seels dan Richey (1994) memberikan definisi teknologi instruksional sebagai berikut: "teknologi instruksional merupakan teori dan praktek dari desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen dan evaluasi proses dan sumber-sumber untuk belajar". Definisi ini juga dimaksudkan untuk melingkupi keseluruhan dimensi teori dan praktek bidang teknologi instruksional. Tetapi nampaknya, Seels dan Richey masih tetap menggunakan pijakan teori lama (yang dikembangkan dari AECT) sambil mengakomodasikan perkembangan baru dari penerapan teknologi instruksional di lapangan.

## **Desain Instruksional**

Desain instruksional merupakan salah satu ranah dalam bidang teknologi instruksional. Desain instruksional adalah kegiatan yang berupaya untuk memahami dan meningkatkan kualitas satu aspek pendidikan, yaitu proses instruksional – atau dikenal sebagai proses pembelajaran. Sebagaimana tujuan suatu proses desain pada umumnya, yaitu untuk merancang alat/cara yang paling baik untuk mencapai tujuan, maka desain instruksional merupakan proses perancangan metode instruksional yang paling optimal untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan, terutama dalam hal penguasaan pengetahuan dan keterampilan dari satu bidang ilmu tertentu oleh sekelompok siswa tertentu. Kegiatan desain instruksional merupakan kegiatan profesional yang dilakukan oleh guru, dosen, atau ahli desain instruksional. Hasil dari kegiatan desain instruksional adalah sebuah cetak biru tentang proses instruksional yang diharapkan terjadi. Cetak biru tersebut merupakan resep bagi praktisi instruksional dalam menjalankan proses instruksional berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, materi yang disajikan, kelompok siswa yang belajar, dan situasi instruksional yang dapat diciptakan.

Di sisi lain, desain instruksional merupakan suatu bagian disiplin ilmu yang mengkaji berbagai cara, strategi, dan keterampilan yang berkenaan dengan beragam metode instruksional, kombinasi yang optimal dari beragam metode tsb., serta situasi dan kondisi yang memungkinkan metode tsb. diterapkan secara optimal. Menurut Reigeluth (1983) desain instruksional merupakan disiplin ilmu yang berperan sebagai jembatan antara teori belajar dan praktek pendidikan. Desain instruksional melandaskan segala asumsi, teori, dan prakteknya pada teori belajar dan kebutuhan dari praktek pendidikan, kemudian desain yang dibuat dicoba untuk diterapkan, lalu dinilai (validasi) efektivitas dan efisiensinya sebagai masukan bagi perancangan proses instruksional berikutnya. Dengan karakteristiknya ini, desain instruksional seringkali dikenal sebagai proses pembuatan resep, yaitu resep untuk menjalankan proses instruksional.

Kedudukan desain instruksional dalam teknologi instruksional dan dalam bidang pendidikan, secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1.



(Diadaptasi dari Reigeluth, 1983)

Gambar 1

## Pengertian

Secara umum, desain instruksional merupakan proses untuk meningkatkan kualitas instruksional. Atwi Suparman (1996) menyatakan bahwa desain instruksional merupakan suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan bahan dan strategi instruksional, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan instruksional. Sementara itu Reigeluth (1983) menyatakan bahwa desain instruksional meliputi upaya untuk memahami masalah, memperbaiki, dan menerapkan metode instruksional untuk perbaikan proses instruksional.

Banyak pakar teknologi instruksional menggunakan istilah desain instruksional dan pengembangan instruksional dengan arti yang berbeda-beda dan atau tumpang tindih. Association of Educational Communication and Technology, Amerika Serikat (Seels & Richey, 1994) membatasi pengertian desain instruksional pada kegiatan

perencanaan instruksional baik secara mikro maupun secara makro. Pada skala makro, desain instruksional meliputi perancangan strategis dan prosedur dalam program akademik dan kurikulum program studi. Sementara pada skala mikro, desain instruksional meliputi perancangan strategis dan prosedur dalam mata kuliah atau paket belajar. Sementara itu, pengembangan instruksional merupakan kegiatan lanjutan dari desain instruksional, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan upaya pemahaman, peningkatan, dan penerapan metode untuk menciptakan suatu proses instruksional. Pengembangan instruksional, sebagai kegiatan profesional, dapat dianalogikan seperti proses pembangunan sebuah gedung dari cetak biru yang dihasilkan seorang arsitek. Cetak biru dalam hal ini adalah resep yang dihasilkan dari proses desain instruksional. Arsitek adalah ahli desain instruksional. Proses pembangunan gedung adalah proses perwujudan resep menjadi sumber belajar yang dapat digunakan dalam suatu kegiatan instruksional. Hasil dari pengembangan instruksional merupakan sumber belajar, seperti bahan ajar, kontrak perkuliahan, GBPP dan atau SAP yang siap digunakan (seperti gedung yang siap dipakai).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa desain instruksional merupakan proses untuk:

- a. menganalisis apa yang harus disajikan/dipelajari oleh siswa
- b. menentukan metode dan strategi instruksional untuk penyajian
- c. melakukan uji coba dan perbaikan
- d. mengevaluasi hasil belajar siswa.

Walaupun demikian, desain instruksional berfokus pada proses perancangan dan penciptaan kondisi belajar, bukan hanya pada kelengkapan komponen belajar. Dengan fokus tersebut, maka ada empat hal yang menjadi perhatian utama ranah desain instruksional, yaitu desain sistem instruksional, desain pesan, strategi instruksional, dan karakteristik siswa.

**Desain sistem instruksional (DSI)** merupakan prosedur yang sistematis dalam menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. DSI merupakan prosedur yang linear dan mempersyaratkan konsistensi serta kecermatan yang tinggi. DSI memiliki karakteristik yang

mengharuskan semua tahapan diselesaikan dengan benar dan baik untuk menjadi “checking point” antar tahapan.

**Desain pesan** merupakan perencanaan untuk manipulasi bentuk fisik suatu pesan. Desain pesan meliputi prinsip perhatian, persepsi, dan retensi yang disebabkan karena kekhususan dari bentuk fisik pesan agar terjadi proses komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Prinsip desain pesan akan berbeda tergantung pada jenis media – statis, dinamis, atau kombinasi, dan pada tujuan pesan yang disampaikan – misalnya pembentukan sikap atau pemahaman konsep, pengembangan keterampilan belajar, atau hanya untuk mengingat saja.

**Strategi instruksional** merupakan prinsip-prinsip dalam pemilihan dan pemilahan urutan pengalaman belajar dalam satu proses instruksional. Strategi instruksional berkaitan erat dengan situasi belajar yang sering digambarkan sebagai model instruksional. Model instruksional dan strategi instruksional yang diperlukan dalam menjalankan suatu model akan sangat berbeda tergantung pada situasi belajar, struktur materi yang disampaikan, dan tujuan instruksional yang diinginkan. Teori tentang strategi instruksional meliputi situasi belajar – belajar situasional, belajar induktif, dan komponen proses instruksional – motivasi dan elaborasi.

**Karakteristik siswa** merupakan tahap-tahap dalam pengalaman konkret siswa yang berdampak terhadap efektivitas suatu proses belajar. Melalui penelaahan karakteristik siswa, maka dapat dirancang pengalaman belajar yang perlu ada dalam suatu proses instruksional. Karakteristik siswa berdampak terhadap komponen instruksional yang ada dalam kategori strategi instruksional, juga terhadap situasi atau konteks dan materi yang disajikan.

### **Landasan Teori**

Desain instruksional merupakan ranah teknologi instruksional yang sangat kuat didukung oleh hasil penelitian. Dibandingkan dengan ranah-ranah yang lain, maka ranah desain instruksional sangat menonjol karena kayanya ranah tsb. akan landasan teori maupun praktis. Semua prinsip maupun prosedur dalam desain instruksional merupakan hasil dari kajian empiris secara

tradisional, maupun kajian alternatif yang bersifat kualitatif. Walaupun beragam hasil penelitian memberikan perspektif yang berbeda-beda terhadap desain instruksional, ada beberapa aliran pemikiran yang menjadi acuan dan landasan bagi desain instruksional, yaitu *general systems theory*, teori psikologi, teori instruksional, dan teori komunikasi.

**General systems theory** mempengaruhi desain sistem instruksional melalui premis dasar logika deduktif, praktek-praktek yang sudah diujicoba, dan hasil-hasil pembuktian penerapan. Di samping itu, desain instruksional sangat kuat bersandar pada bidang ilmu **psikologi** belajar, yaitu teori belajar dan teori psikologi. Secara tradisional, teori belajar behaviorisme mempunyai pengaruh kuat terhadap desain instruksional. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu psikologi, teori belajar kognitif dan pendekatan konstruktivisme mulai terasa pengaruhnya terhadap desain instruksional.

Sementara itu, **teori instruksional** terutama berfokus kepada interaksi beragam komponen instruksional dalam proses perancangan suatu pengalaman belajar, misalnya komponen materi yang akan disajikan, klasifikasi keterampilan yang dicapai dalam belajar, media instruksional, metode instruksional, umpan balik, serta penguatan. Sedangkan **teori komunikasi** memberikan landasan proses dialogis yang terjadi dalam suatu proses instruksional. Dalam komunikasi, proses dialogis dapat digambarkan sebagai proses pengiriman pesan dari pengirim melalui media tertentu kepada penerima, kemudian penerima pesan akan memberikan umpan balik bagi pengirim pesan. Proses ini terjadi berulang-ulang. Keberhasilan proses terletak pada manipulasi stimulus atau pesan oleh pengirim pesan, karakteristik media, kesiapan penerima pesan, serta kualitas umpan balik. Proses yang sama terjadi dalam proses instruksional.

Desain instruksional sendiri merupakan teori – seperangkat prinsip-prinsip yang menjelaskan beragam metode instruksional yang dapat digunakan untuk beragam situasi instruksional dalam mencapai beragam tujuan. Dalam hal ini, desain instruksional terdiri dari dua variabel utama, yaitu tujuan instruksional dan kondisi instruksional. Tujuan instruksional menjelaskan hasil yang

ingin dicapai melalui proses instruksional, meliputi efektivitas dan efisiensi proses instruksional, serta aspek kualitas proses instruksional berdasarkan persepsi siswa (kepuasan, kemenarikan, dll.). Sementara kondisi instruksional terdiri dari beberapa aspek yang menjadi persyaratan intrinsik bagi proses instruksional untuk dapat berjalan dengan baik dan berhasil, yaitu karakteristik dan perilaku siswa, jenjang pencapaian belajar yang diharapkan, lingkungan belajar, sarana dan prasarana belajar, serta sumber belajar.

Desain instruksional berkembang sejalan dengan perkembangan praktis dan teori dalam bidang desain instruksional sendiri, maupun perkembangan teknologi informasi, serta perkembangan teori-teori lain yang mempengaruhinya. Dalam era globalisasi ini, perubahan dalam dunia bisnis menunjukkan arah dari proses produksi masal menjadi produksi berdasarkan kebutuhan pengguna, perubahan dalam dunia pemasaran menjelaskan strategi pemasaran masal yang sudah digantikan dengan strategi segmentasi pasar (*targeting*). Seiring dengan hal tsb. proses pendidikan pun berubah dari pendidikan masal menjadi pendidikan yang lebih "*personalized*" atau "*individualized*" berdasarkan kebutuhan siswa. Sementara itu, cara-cara kreatif dan inovatif serta beragam alat yang dapat membantu proses instruksional semakin banyak, sehingga ahli desain instruksional, guru, dan dosen, memiliki keleluasaan untuk memilih beragam cara dan alat yang dapat digunakan untuk memberikan pembelajaran yang lebih "*personalized*" dan "*individualized*" berdasarkan kebutuhan siswa. Hal ini menekankan semakin pentingnya peran ahli desain instruksional untuk membuat resep-resep proses instruksional untuk dilaksanakan oleh guru dan dosen.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut, teori desain instruksional juga mulai menerima pengaruh-pengaruh dari beberapa teori atau perkembangan ilmu yang baru, misalnya strategi adaptif (*adaptive strategies*), teknologi baru, strategi konstruktivisme, proses instruksional minimalis, dan perubahan sistemik.

**Strategi adaptif** menjadi kata kunci dalam teori desain instruksional pada masa globalisasi. Hal ini terjadi seiring dengan

tumbuhnya kesadaran akan perbedaan karakteristik dan perilaku siswa secara individu, bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dalam kebutuhan belajar, minat, tujuan, kemampuan, pengetahuan awal, dll. Oleh karena itu, proses instruksional harus didesain berdasarkan kebutuhan dan minat masing-masing siswa (*personalized and individualized*). Sementara itu, **teknologi baru** mempengaruhi desain instruksional dalam dua hal, sebagai tutor dan alat bagi siswa, dan sebagai alat bagi ahli desain instruksional. Sebagai tutor, teknologi menawarkan kemampuan interaktif untuk membantu siswa belajar secara mandiri. Multimedia, sistem ahli (*expert systems*), *artificial intelligence*, computer-based instruction, dan proses instruksional maya (*virtual reality*) adalah contoh dari pemanfaatan teknologi sebagai tutor.

Paradigma **konstruktivisme** menawarkan strategi instruksional yang praktis yang dapat digunakan oleh ahli desain instruksional maupun praktisi pendidikan. Strategi-strategi ini sedemikian rupa telah mengubah citra proses instruksional pada era globalisasi ini. Yang paling menarik, ragam strategi yang ditawarkan tidak hanya meliputi strategi yang umum atau generik saja, tetapi juga strategi khusus untuk menstimulasi proses belajar tingkat tinggi atau *higher-order learning* (strategi kognitif). Prinsip utama dari paradigma konstruktivisme adalah kepercayaan bahwa setiap siswa mengkonstruksi (membangun) sendiri khasanah pengetahuannya, sehingga proses instruksional harus mendorong partisipasi siswa yang aktif untuk membangun khasanahnya, serta pengalaman belajar perlu bersifat otentik yang dapat memperkaya khasanah siswa. Dalam membangun khasanah pengetahuannya, siswa, secara individu, belajar membentuk makna dari pengalaman belajar dan pengetahuan yang dipelajari.

Sementara itu, aliran **minimalis** yang mempengaruhi desain instruksional percaya bahwa proses instruksional seharusnya bersifat menyajikan apa yang perlu dipelajari untuk melakukan sesuatu (*"what they need to learn in order to do what they wish to do"*). Prinsip ini sangat tepat dalam perancangan pelatihan, yang mengharuskan peserta tidak diberikan hal-hal yang tidak diperlukan untuk pekerjaannya. Dalam dunia manajemen, prinsip ini sangat mirip dengan prinsip *"just-in-time" training*. Dengan

demikian, proses instruksional harus bersifat adaptif, memanfaatkan teknologi yang tepat, dan mengimplementasikan strategi konstruktivisme.

Berdasarkan perkembangan-perkembangan yang ada dan dari berbagai bidang, maka adalah suatu keharusan bagi desain instruksional untuk selalu berubah dan berkembang. Namun demikian, perkembangan dari segi teori maupun aplikasi dalam desain instruksional menjadi sia-sia dan tak bermanfaat, jika tatanan sistem di mana desain instruksional berada tidak berubah dan berkembang. Dengan demikian, perubahan yang terjadi dalam desain instruksional sebagai komponen dari sistem instruksional perlu diikuti oleh perubahan tatanan sistem instruksional secara menyeluruh dan sinergis, atau disebut sebagai **perubahan sistemik**. Hal ini tidak hanya berarti dalam jenjang proses instruksional saja, tetapi juga berlaku secara *trickle-up* pada jenjang administrasi institusi pendidikan, bahkan sampai pada jenjang kebijakan pemerintah.

### **Model-model Desain Instruksional**

Model desain instruksional mulai populer pada tahun 1960-an. Model desain instruksional berfungsi sebagai panduan pelaksanaan (resep) bagi praktisi pendidikan, yaitu instruktur, dosen, atau guru. Model desain instruksional terdiri dari seperangkat langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan untuk merancang proses instruksional yang efektif, efisien, dan relevan. Secara umum, model desain instruksional dapat digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek pengembangan program instruksional, sebagai alat komunikasi antara ahli desain instruksional dengan praktisi, ahli materi, maupun siswa, dan alat bantu pengambilan keputusan dalam hal organisasi dan struktur materi, serta kegiatan instruksional.

Model desain instruksional berkembang sejalan dengan perkembangan bidang ilmu yang melandasinya, perubahan praktek di lapangan, serta kemajuan teknologi (terutama teknologi informasi). Dalam empat dasawarsa, telah banyak model desain instruksional dihasilkan oleh para ahli desain instruksional, secara individual maupun lembaga. Perubahan dan perkembangan yang

terjadi pada model-model tsb., menurut Gustafson (1996), tidak terlalu drastis dan mencerminkan adanya evolusi teori yang sangat mikro. Berdasarkan model-model desain instruksional dan perubahan serta perkembangannya, Gustafson (1991) membuat skema klasifikasi yang pada garis besarnya mengelompokkan model-model instruksional ke dalam tiga kategori besar, yaitu model-model yang berfokus pada sistem, produk, dan praktek dalam kelas. Masing-masing kategori model tersebut dapat dianalisis lebih lanjut lagi berdasarkan beberapa variabel, seperti hasil/keluaran, jumlah sumberdaya yang dialokasikan, upaya individual atau kelompok, proses pengembangan materi baru atau seleksi materi yang sudah ada, jenis dan jumlah analisis yang dilakukan sebelum proses perancangan, proses ujicoba, serta proses diseminasinya.

### **Model yang berfokus pada praktek dalam kelas**

Tidak terlalu banyak model yang berfokus pada praktek dalam kelas, atau "teacher-based instruction", misalnya model Gerlach & Ely (1980), Kemp et al. (1994), Heinich et al. (1996). Situasi ini menjelaskan kurang populernya model desain instruksional bagi guru-guru, terutama guru sekolah menengah ke bawah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurang sensitifnya model desain instruksional terhadap dunia guru-guru kelas. Guru kelas biasanya harus membuat persiapan pengajaran yang berbeda setiap hari, dengan alokasi sumberdaya yang terbatas, dan bantuan perencanaan serta perancangan yang minimal yang dapat diperoleh. Dengan demikian, guru merasa lebih mudah jika membuat persiapan seperti yang sudah diberikan dalam kurikulum nasional, memilih materi hanya dari materi-materi yang sudah ada di dekatnya (atau di pasaran), tidak usah mengajarkan topik yang sama sampai tahun berikutnya, dan memecahkan segala masalah di dalam kelas secara sendiri (tanpa berbagi dengan sesama guru). Model desain instruksional yang relatif lebih tepat bagi guru barangkali adalah model yang menekankan pada proses seleksi dan pengembangan materi instruksional, tanpa terlalu banyak beban untuk analisis, ujicoba, revisi, dan dapat dilakukan sendirian.

### **Model yang berfokus pada produk**

Model-model desain instruksional yang berfokus pada produk memiliki orientasi pada pengembangan paket-paket produk instruksional untuk kelompok siswa yang khusus, atau untuk keperluan komersial, misalnya model Romiszowski (1981), Van Patten (1989), Bergman dan Moore (1990). Sejauh ini, model-model tsb. lebih berlandaskan pada pengembangan produk cetak (print-based), namun demikian, akhir-akhir ini model desain instruksional yang berlandaskan pada pengembangan produk non-cetak (technology-based) menjadi semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi. Hasil yang diperoleh dari model ini biasanya merupakan paket-paket bahan belajar mandiri yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis yang intensif dan memerlukan sumberdaya yang cukup.

### **Model yang berfokus pada sistem instruksional**

Model-model desain instruksional yang berfokus pada sistem instruksional banyak memiliki persamaan dengan model-model yang berfokus pada produk. Perbedaan yang utama terletak pada ruang lingkup upaya perancangan. Model yang berfokus pada produk memiliki ruang lingkup desain hanya satu produk (paket) per upaya desain, misalnya desain mata kuliah, desain bahan ajar pelatihan. Sementara itu, model yang berfokus pada sistem memiliki ruang lingkup yang meliputi beragam produk yang dirancang pada saat bersamaan untuk membentuk suatu sistem, misalnya desain program studi, desain sistem akademik. Model yang berfokus pada sistem mempersyaratkan analisis yang intensif, alokasi sumberdaya yang ekstensif, ujicoba yang terkontrol, dan perbaikan yang berkesinambungan, serta diseminasi yang terencana. Contoh model desain instruksional yang berfokus pada sistem adalah model Briggs et al. (1991), Gagne et al. (1992), Dick dan Carey (1996).

### **Penerapan Desain Instruksional**

Penerapan desain instruksional di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an. Pada awalnya, penerapan desain instruksional dilakukan oleh ahli-ahli desain instruksional melalui diseminasi

konsep pusat sumber belajar, sebagai perkawinan antara konsep perpustakaan, pusat produksi dan koleksi media instruksional, serta konsep layanan desain instruksional bagi praktisi pendidikan. Tingkat adopsi konsep pusat sumber belajar ternyata tidak terlalu memuaskan, karena beragam kendala. Penerapan desain instruksional untuk sementara dilakukan secara individual oleh ahli desain instruksional dalam upaya-upaya yang berskala mikro.

Secara kelembagaan, integrasi teknologi pendidikan ke dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu melalui didirikannya Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat TKPK) di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K) (sekarang adalah Pustekkom di bawah Balitbang Dikbud) merupakan suatu tanda yang positif. Hal ini juga bersamaan dengan dibukanya program pendidikan teknologi pendidikan di banyak IKIP/FKIP (LPTK) di Indonesia, baik pada jenjang Strata 1 maupun kemudian pada jenjang Strata 2 dan Strata 3.

Namun demikian, desain instruksional sebagai bagian utama dari teknologi pendidikan mengalami masa gemilang ketika diterapkan secara makro melalui institusi resmi, yaitu melalui pendirian Universitas Terbuka pada tahun 1984. Segala aktivitas yang terjadi dalam Universitas Terbuka merupakan aktivitas yang langsung menerapkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Sistem *outsourcing* yang dilakukan oleh Universitas Terbuka dalam proses pengembangan program akademik, pengembangan bahan ajar (cetak dan non-cetak), penyediaan bantuan belajar, serta pengembangan ujian, menjadi cara yang amat berharga dalam proses diseminasi konsep teknologi pendidikan secara umum dan desain instruksional secara khusus kepada khalayak perguruan tinggi di Indonesia.

Proses diseminasi desain instruksional di Indonesia juga menarik perhatian Bank Dunia yang mengalokasikan satu unit dari proyeknya (Bank Dunia XVII) untuk mendirikan Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional yang ditempatkan di bawah Universitas Terbuka. Ide dasar dari PAU-PPAI-UT adalah menyediakan bantuan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam hal pengembangan

bahan ajar (instructional materials development). Hal ini merupakan gambaran yang nyata dari aplikasi proses desain instruksional yang berfokus pada produk. Melalui PAU-PPAI-UT sebagai proyek Bank Dunia, sejumlah dosen dari perguruan tinggi di Indonesia berpartisipasi dalam pengembangan bahan ajar melalui beragam pelatihan dan proses pengembangannya berdasarkan konsep desain instruksional.

Setelah proyek Bank Dunia selesai, proses diseminasi desain instruksional masih terus berlanjut dengan digulirkannya program nasional PEKERTI<sup>1</sup> dan AA<sup>2</sup> untuk peningkatan keterampilan dosen dalam bidang teknik instruksional oleh DIKTI melalui PAU-PPAI-UT. Pada awalnya, kiprah PAU-PPAI-UT lebih mengarah pada penyebaran dan upaya menggalakkan penerapan desain instruksional yang berfokus pada produk instruksional di perguruan tinggi, misalnya penyusunan rencana pembelajaran, pengembangan strategi instruksional, pengembangan media dan alat bantu instruksional, dan penyusunan bahan ajar. Namun demikian, dalam perjalanannya PAU-PPAI-UT sekarang ini terlibat dalam penyebaran dan upaya mendorong penerapan desain instruksional yang berfokus pada sistem instruksional (terutama sistem program akademik) di perguruan tinggi melalui pencanangan program hibah bersaing kelembagaan untuk pengembangan pusat pengembangan pendidikan oleh DIKTI. Unit/pusat/lembaga tersebut diharapkan dimiliki oleh setiap perguruan tinggi sebagai wadah bagi segala upaya pengembangan program akademik perguruan tinggi, mulai dari upaya-upaya yang berorientasi kepada pengembangan staf akademik, peningkatan kualitas proses instruksional, dan atau pengembangan organisasi serta sistem akademik di perguruan tinggi.

---

<sup>1</sup> PEKERTI adalah akronim dari Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional – sebuah program peningkatan keterampilan dosen yang ditujukan bagi dosen muda.

<sup>2</sup> AA adalah akronim dari Applied Approach (diterjemahkan bebas sebagai Ancangan Aplikasi) – sebuah program peningkatan keterampilan dosen yang ditujukan bagi dosen senior.

Upaya-upaya diseminasi penerapan desain instruksional yang dilakukan oleh PAU-PPAI-UT tidak terbatas hanya pada khalayak perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pendidikan dan latihan di departemen maupun non departemen, perguruan tinggi kedinasan, dan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia, serta dunia usaha/bisnis dan industri. Bentuk upaya deseminasi tersebut adalah pelatihan-pelatihan dan proses pengembangan serta jasa konsultasi.

### **Model & Pemanfaatan Media Pembelajaran**

Perkembangan teknologi komunikasi yang berlangsung sangat pesat telah mengubah cara pandang terhadap proses pembelajaran. Berlangsungnya proses pembelajaran tidak lagi mutlak bergantung kepada tersedianya nara sumber, tempat dan waktu belajar. Ketersediaan beragam media, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, telah memungkinkan proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan kebutuhan individu (*learner*). Akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan menjadi semakin meluas bersamaan dengan berkembangnya teknologi komunikasi.

Ada empat model interaksi pembelajaran yang menggambarkan pemanfaatan medium sebagaimana dikemukakan oleh Jonassen, dkk. (1991).

Keempat model tersebut yaitu:

- Model I** Proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang sama (*same time/same place instruction*).
- Model II** Proses pembelajaran pada waktu yang sama namun pada tempat yang berbeda (*same time/different place instruction*).
- Model III** Proses pembelajaran pada waktu yang berbeda, namun berada pada tempat yang sama (*the different time/same place instruction*).
- Model IV** Proses pembelajaran berlangsung pada waktu dan tempat yang berbeda (*different time/different place instruction*).

Media merupakan kata jamak dari kata medium, berarti "perantara". Dalam proses pembelajaran, media dapat diartikan sebagai "*Anything that carries information between a source and receiver*" (Heinich, dkk. 1986, hal 5).

Jerold Kemp (1986) mengemukakan klasifikasi media pembelajaran sebagai berikut:

- Printed media (media cetak)
- Display media (media pameran)
- Overhead transparencies
- Audiotape recordings (rekaman pita audio)
- Slide series dan filmstrips
- Multi image presentation (presentasi multi gambar)
- Video recordings and motion picture film (rekaman video dan film)
- Computer based instruction (pembelajaran berdasarkan komputer).

### **Model I**

Model I merupakan model interaksi pembelajaran yang sudah sangat dikenal yaitu interaksi pembelajaran tatap muka. Dalam model ini seorang nara sumber (guru atau dosen) menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan kepada sekelompok siswa. Banyak media yang dapat digunakan dalam model I ini, misalnya flip chart, papan tulis elektronik dan medium yang sangat simpel penggunaannya, yaitu overhead transparansi.

Setiap jenis media memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Medium overhead transparansi, misalnya, merupakan medium yang sangat populer penggunaannya. Untuk keperluan interaksi pembelajaran tatap muka medium ini memiliki kelebihan antara lain:

- a. memusatkan perhatian terhadap materi
- b. membuat proses pembelajaran menjadi lebih sistematis
- c. memungkinkan terjadinya *eye contact* antara instruktur dengan *learner*
- d. meningkatkan rasa percaya diri instruktur
- e. meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Keterbatasan yang ada pada medium overhead transparansi yaitu:

- a. efektivitas penggunaannya sangat tergantung pada kemampuan penyaji (*presenter*)
- b. tidak dapat dipergunakan untuk keperluan study independen.

Jenis medium lain yang dapat digunakan pada aktivitas pembelajaran tatap muka yaitu medium slide suara. Medium ini mampu menampilkan pesan dalam kombinasi antara gambar diam dan suara (audio). Unsur fotografis dalam medium slide mampu membuat penyampaian pesan dan informasi menjadi lebih realistis dan sistimatis. Namun demikian, medium ini lebih kompleks (rumit) penggunaannya jika dibandingkan dengan penggunaan overhead transparansi.

## **Model II**

Model II dapat diklasifikasikan dalam dua kategori pembelajaran yaitu:

- Interaksi pembelajaran dengan menggunakan media telekomunikasi. Dalam interaksi jenis ini dua pihak yang melakukan interaksi dapat berkomunikasi secara simultan, namun terpisah oleh jarak dan faktor geografis.
- Interaksi dengan menggunakan media non interaktif merupakan kategori lain dari Model II. Contoh interaksi jenis ini yaitu siaran program radio dan program televisi secara terbuka (*open broadcast*).

Media telekomunikasi merupakan medium yang memiliki potensi cukup besar untuk digunakan sebagai medium komunikasi dua arah. Medium ini mampu mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam melakukan interaksi pembelajaran. Contoh media yang digunakan dalam interaksi ini adalah telepon dan faksimili.

Penggunaan telepon dan faksimili dapat membuat orang secara aktif. Proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif karena siswa atau individu terlibat interaksi belajar didalamnya. Telepon dan faksimili memberi kemungkinan bagi dua pihak yang melakukan interaksi dapat memperoleh umpan balik (*feedback*) yang segera. Umpan balik dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan

dalam menempuh proses pembelajaran (Hannafin dan Peck, 1988).

Medium radio dan televisi tergolong sebagai media massa yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pada proses belajar jarak jauh (*distance learning*). Hal ini dimungkinkan karena penyiaran program radio dan televisi dapat menjangkau khalayak yang berada dalam jangkauan wilayah geografis yang sangat luas. Sama seperti film yang tergolong sebagai *motion pictures*, televisi mampu menayangkan informasi dengan cara yang realistik. Gabungan unsur gambar, suara dan warna dalam medium televisi dapat memberikan gambaran tentang objek dan peristiwa secara rinci.

Penyiaran program radio dan televisi memiliki keterbatasan yang spesifik. Penayangan informasi dan ilmu pengetahuan melalui radio dan televisi hanya bersifat satu arah – *one way communication*. Pemirsa tidak dapat memperoleh umpan balik segera. Di samping itu, ada keterbatasan lain yang cukup menonjol dari pemanfaatan siaran radio dan televisi. Informasi yang ditayangkan melalui kedua medium tersebut berlangsung dalam kecepatan yang tetap (*fixed paced*). Penyajian informasi seperti ini akan membuat pemirsa mengalami sedikit kesulitan dalam memahami pesan dan informasi.

Untuk mengatasi kedua hambatan tersebut medium radio dan televisi harus dilengkapi dengan sarana komunikasi lain yaitu telepon. Telepon akan menjadikan tayangan informasi melalui radio dan televisi dapat bersifat interaktif.

### **Model III**

Proses pembelajaran model III berlangsung pada tempat tertentu misalnya pada pusat studi (*learning center*) dan laboratorium. Media yang dapat digunakan pada model ini adalah media yang kerap digunakan pada pusat studi atau perpustakaan seperti kaset audio, kaset video, buku dan perangkat komputer.

Faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendesain media yang akan digunakan pada model pembelajaran ketiga ini adalah jadwal dan tugas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Aktivitas

pembelajaran tatap muka tidak diperlukan dalam model ini. Siswa ditugaskan untuk melaksanakan eksperimen di laboratorium atau aktivitas belajar dalam bentuk lain dengan bantuan *study guide* tertulis dari instruktur atau tutor yang berada pada tempat terpisah.

Model II dan III merupakan proses belajar tipikal yang berlangsung pada sistem belajar jarak jauh. Dalam sistem ini proses belajar lebih ditentukan oleh media komunikasi yang digunakan. Pada negara yang memiliki wilayah geografis yang luas medium televisi dan radio kerap digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.

#### **Model IV**

Teknologi informasi yang digunakan pada Model IV tergolong dalam teknologi informasi yang mentransformasikan informasi satu arah (*one way*) seperti media cetak kaset audio dan video dan teknologi yang mampu menciptakan proses pembelajaran interaktif. Secara spesifik teknologi informasi yang dipergunakan dalam model IV dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

- 1) Teknologi informasi atau media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara instruktur dengan siswa (*learner*) dan antara kelompok siswa dengan kelompok siswa yang lain.
- 2) Media yang memberi kemungkinan bagi siswa untuk melakukan interaksi dengan media informasi seperti *computer based instruction* dan video interaktif.

Dengan demikian, media yang akan dimanfaatkan tergantung pada model pembelajaran. Disamping itu, pemanfaatan kombinasi dari beberapa jenis media lebih direkomendasikan karena dapat menutup keterbatasan penggunaan satu jenis media.

#### **Strategi Penyampaian Materi Pembelajaran**

Kita harus membedakan antara proses perancangan pembelajaran dengan penyampaian isi pembelajaran tersebut. Pendekatan sistem adalah proses perancangan, sedangkan pengajar, modul, komputer, televisi/video ataupun radio/audio adalah mekanisme penyampaian materi pembelajaran. Mekanisme penyampaian ini

dapat ditujukan baik untuk satu siswa/learner secara individual ataupun untuk banyak siswa seperti dalam kelas. Bagian utama dari perancangan program pembelajaran adalah untuk menentukan bagaimana cara yang paling efektif untuk menyampaikan pembelajaran itu.

Terdapat beragam strategi yang biasa digunakan oleh para profesional di bidang teknologi pendidikan untuk penyampaian pembelajaran. Seperti telah kita ketahui bersama, teknologi pendidikan adalah suatu proses pemecahan masalah yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan, mengevaluasi dan menerapkan pemecahan untuk berbagai masalah pendidikan, terutama yang berhubungan dengan belajar dan mengajar. Pemecahan masalah pendidikan ini bermacam-macam formatnya. Ada yang berbentuk suatu rencana untuk restrukturisasi suatu sistem pendidikan; suatu kurikulum untuk suatu program studi, fakultas atau sekolah; serta berbagai produk seperti matakuliah, presentasi materi belajar dengan menggunakan media tertentu atau suatu sumber belajar. Bentuk lain misalnya berbagai proses atau prosedur, seperti prosedur untuk menyampaikan umpan balik atau suatu job aid. Ada beberapa kategori cara penyampaian materi pembelajaran yang sering digunakan oleh profesional teknologi pendidikan yang ke semuanya merupakan usaha untuk menciptakan komunikasi antara pengajar dan siswa.

Kategori itu adalah strategi, teknik, materi atau media, peralatan atau perangkat keras (hardware). Strategi adalah rencana pembelajaran yang mengikuti suatu prinsip dasar belajar mengajar berdasarkan hasil studi teoritis atau empiris. Strategi umumnya ditujukan lebih kepada siswa secara individual daripada kepada pengajar. Teknik atau metode adalah prosedur yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang terfokus pada pendekatan-pendekatan yang telah divalidasi, untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Materi atau media adalah kendaraan yang membawa materi belajar dan dirancang untuk dimanfaatkan dalam strategi dan teknik yang disebut di muka. Kadang-kadang untuk ini digunakan istilah perangkat lunak (Software). Peralatan atau perangkat keras biasanya meliputi baik peralatannya sendiri maupun petunjuk cara pengoperasiannya. Peralatannya sendiri

merupakan kendaraan kosong yang dapat digunakan untuk membawa dan menyampaikan informasi. Siswa perlu memiliki peralatan yang wajib yang dijalankan dengan sistem pengoperasian internal. Pada bab ini hanya akan dibicarakan beberapa strategi penyampaian bahan ajar.

### **Bahan Ajar Modular**

Sebuah modul adalah satu unit materi kurikulum yang lengkap sebagai bahan ajar. Kepada unit modul ini dapat ditambahkan unit-unit materi lain untuk tujuan yang lebih kompleks atau jauh. Sistem ini berasal dari sistem kuliah pendek pada tingkat perguruan tinggi atau pendidikan profesi. Saat ini sistem modular ini diterapkan pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bentuk. Ada dua pendekatan dalam mengembangkan bahan ajar modular ini. Pendekatan pertama diperuntukkan bagi matakuliah yang sudah mapan. Matakuliah ini dipecah menjadi unit-unit kecil yang akan digunakan secara berurutan seperti tempat pijak untuk menuju kepada pemahaman isi matakuliah tersebut secara keseluruhan. Pendekatan yang kedua adalah dengan memperlakukan para siswa sebagai fokus perhatian. Kepada mereka seolah-olah disediakan sejumlah besar modul yang menguraikan berbagai topik, sehingga dapat dikembangkan menjadi berbagai program sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Pendekatan modular ini memperhatikan tujuan yang membangun suatu kurikulum. Pendekatan seperti ini menggabungkan fokus internal dari suatu topik pembelajaran dan penyesuaian akan kebutuhan, sehingga menjadi bahan pembelajaran yang menarik baik bagi pengajar maupun bagi siswa. Untuk program pendidikan formal, program modular ini tentu saja harus disertai petunjuk yang jelas, pembimbingan atau tutorial serta pencatatan kemajuan dan prestasi siswa.

### **Model Belajar Tuntas (*Mastery Learning*)**

Strategi belajar tuntas ini menarik sejak tahun 1970-an. Strategi ini telah diterapkan di seluruh dunia. Hasil penelitian mengenai program belajar tuntas ini membuktikan bahwa proses belajar

menjadi lebih baik dan siswa memperoleh prestasi yang lebih tinggi serta mengembangkan keyakinan diri yang lebih besar akan kemampuan belajar mereka.

Namun muncul pula salah tafsir dan kebingungan mengenai belajar tuntas ini. Pertanyaan yang biasa muncul antara lain elemen-elemen apa yang penting dalam belajar tuntas? Bagaimana menerapkan elemen-elemen tersebut? Sejauh mana perubahan yang harus dilakukan guru jika akan menerapkan model belajar tuntas ini?

Dengan strategi belajar tuntas, yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1968, konsep dan materi yang akan dipelajari disusun menjadi unit-unit pembelajaran. Umumnya satu unit pembelajaran terdiri dari beberapa konsep yang dapat diajarkan dalam satu atau dua minggu waktu pembelajaran. Setelah satu unit selesai dipelajari, siswa akan diberikan quiz yang berguna sebagai umpan balik mengenai apa yang telah berhasil dipelajarinya dan apa yang belum. Setelah itu siswa akan mendapatkan pengarahannya, terutama mengenai apa yang harus dilakukannya untuk materi yang belum dikuasai. Karena itu strategi ini harus menyediakan materi untuk remedial yang harus diusahakan berbeda dalam hal susunan dan aktivitas yang harus dilakukan siswa. Di samping itu harus pula disediakan materi untuk tujuan pengayaan atau perluasan untuk mereka yang langsung mencapai ketuntasan dalam belajar dalam sekali belajar.

### **Pembelajaran Pada Orang Dewasa (*Self-directed Adult Learning*)**

Ini adalah strategi belajar di mana siswa, yaitu orang dewasa, adalah penanggungjawab utama dalam hal perencanaan, penerapan malah juga evaluasi terhadap hasil belajarnya sendiri. Ini biasa dilakukan oleh mereka yang telah bekerja dan menyadari bahwa perubahan yang cepat dalam berbagai bidang serta banyaknya informasi penting menuntut mereka untuk mencari jalan untuk memperbaharui keterampilan atau pengetahuan mereka. Bahan ajar modular yang dapat dipakai untuk belajar mandiri (*self-instructional*) cocok sekali untuk mereka. Mereka dapat memilih topik-topik yang cocok dengan tujuan belajar mereka. Ini juga akan

menjadi kecenderungan cara memperbaharui pengetahuan dan keterampilan di era informasi ini.

### **Pembelajaran Berfokus Individu (Individualized Instruction)**

Pembelajaran berfokus individu merupakan usaha para pengajar atau pengambil keputusan untuk menyesuaikan pembelajaran terhadap perbedaan individu siswa, sehingga pertumbuhan akademik, sosial, dan personal mereka dapat lebih ditingkatkan daripada bila mereka belajar pada pembelajaran tradisional. Hal-hal yang diperhatikan dalam strategi ini adalah perbedaan siswa dalam hal kemampuan belajar, karakteristik dan gaya belajar, keinginan belajar atau kecepatan belajar mereka. Namun demikian keefektifan program ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menerapkannya. Lebih jauh lagi hasil-hasil riset menunjukkan bahwa ada beberapa variabel pendidikan yang menguntungkan boleh dikatakan bagi semua siswa, antara lain adanya lingkungan belajar yang terstruktur, kelas yang berorientasi kerja dan tujuan yang tegas; dan adanya umpan balik yang bersifat korektif. Hasil-hasil riset ini dan tingginya biaya untuk melaksanakan strategi pembelajaran berfokus individu menyebabkan strategi ini jarang diterapkan.

### **Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)**

Pembelajaran langsung ini telah berkembang mulai dari pembelajaran yang berfokus pada guru tanpa memperhatikan prosedur pengajaran dan karakteristik siswa. Dengan pendekatan ini siswa menghabiskan sebagian waktu untuk mendengar pengajaran langsung dari guru, terutama dalam mengembangkan keterampilan menguasai materi yang diajarkan dan kemudian dilanjutkan dengan aktifitas pemantapan seperti latihan di bawah bimbingan guru atau asisten guru.

Perkembangan selanjutnya dari strategi pembelajaran langsung ini dipengaruhi oleh penelitian mengenai guru yang efektif, dengan efektifitas ditentukan oleh prestasi siswa pada tes pencapaian hasil belajar (*achievement test*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru yang efektif dalam mengajar topik yang sudah terstruktur

dengan mapan, seperti perhitungan aritmetika, akan melakukan hal-hal berikut dalam proses pengajaran tatap muka: a) memulai pelajaran dengan meninjau kembali pelajaran yang telah lewat; b) dilanjutkan dengan menerangkan tujuan pelajaran saat itu secara singkat; c) mengajarkan materi baru setahap demi setahap, di mana diberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih pada setiap tahap tersebut, selanjutnya tahap-tahap tersebut digabungkan sehingga siswa dapat melihat keseluruhan proses; d) memberi instruksi dan keterangan dengan jelas dan rinci, memodelkan strategi yang harus dilakukan, menyuarakan pemikirannya saat melakukan pemilihan, memberikan cue cards untuk membantu siswa mengingat berbagai langkah; e) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya, mendorong siswa untuk menyuarakan pemikirannya saat menerapkan suatu strategi, mendorong siswa untuk melakukan pengajaran kepada rekan mereka; f) memberikan banyak pertanyaan dan mengecek pemahaman siswa lewat respons mereka terhadap berbagai pertanyaan tersebut; g) membimbing siswa saat pertama kali mempraktekkan apa yang dipelajari, mendorong mereka untuk membuat check list; h) memberikan umpan balik dan koreksi secara sistematis juga memberi contoh hasil kerja yang baik.

### **Pembelajaran Melalui Penemuan (Discovery Learning)**

Pembelajaran secara discovery adalah pembelajaran di mana siswa secara aktif mencari suatu generalisasi atau aturan lewat pencarian dan seleksi dari materi yang dipelajarinya. Saat ini strategi ini dikembangkan sebagai strategi konstruktivisme. Di sini guru berperan untuk menyediakan pengarahannya dan sumber belajar sehingga siswa dapat melangkah dari hal-hal yang spesifik untuk sampai kepada suatu generalisasi. Pembelajaran secara discovery ini adalah lawan dari pembelajaran ekspositori.

Pembelajaran cara ini menuntut guru yang cakap dalam menyusun sumber-sumber belajar, memberikan pengarahannya yang cukup serta menyusun tahap-tahap pembelajaran yang diperlukan. Dengan demikian siswa tidak terlalu dilepas sendiri sehingga dapat dipastikan bahwa ia dapat menemukan generalisasi tersebut. Di

samping itu siswa juga harus memiliki kemampuan dan motivasi cukup untuk mengambil inisiatif dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Strategi ini cukup sulit untuk siswa yang agak lambat dalam belajar.

Pada era informasi ini, banyak siswa yang telah memiliki banyak informasi karena mereka memiliki akses kepada informasi yang kadang-kadang lebih baik dari pengajar. Sebagai implikasi, institusi pendidikan harus menyediakan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk dapat memanfaatkan pengalaman yang telah mereka miliki itu. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi pengalaman siswa sebelumnya adalah pembelajaran *discovery* ini. Tentu saja ini bukan merupakan satu-satunya cara tetapi salah satu cara yang baik asal pengajar dapat menyesuaikan cara mereka dalam memberikan pengajaran atau bimbingan, pentahapan dan sumber pengajaran itu sendiri

### **Pendidikan Jarak Jauh**

Pendidikan jarak jauh telah menjadi populer akhir-akhir ini. Ada yang menyebutnya sebagai pendidikan terbuka, pendidikan secara korespondensi, *home study*, *independent study* dan lain-lain. Tingkat pendidikan yang dilayani oleh cara ini mulai dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, juga pelatihan-pelatihan di bidang bisnis, industri dan institusi pemerintah. Tujuan pendidikan jarak jauh umumnya sama seperti pendidikan tatap muka. Perbedaan utamanya adalah pendidikan jarak jauh ini tidak mewajibkan siswa untuk datang ke kelas pada waktu dan tempat tertentu.

Umumnya siswa belajar lewat materi cetak atau elektronik interaktif. Seandainya harus ada komunikasi antara pengajar dan siswa, biasanya tidak dilakukan segera secara fisik tetapi melalui telepon, surat, atau email. Siswa mungkin saja menerima tugas tertulis yang harus diselesaikan untuk kemudian dikirimkan kembali untuk dievaluasi oleh tutor. Siswa mungkin juga akan menerima komentar mengenai hasil penyelesaian tugas atau saran mengenai tindakan belajar selanjutnya melalui surat atau email.

## **Komunikasi Melalui Komputer (Computer-mediated Communication)**

Dari 1970-an sampai dengan 1993 jejaring komputer (computer network) telah menyebar ke seluruh dunia sehingga diperkirakan ada 20 juta orang yang berkomunikasi mengenai pendidikan, bisnis dan rekreasi lewat jaringan ini. Ke semuanya ini terjadi karena pertumbuhan yang pesat dari jejaring komunikasi, kemudahan akses melalui telepon atau modem, dan makin banyak personal komputer yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan karena harga unit komputer makin terjangkau. Pertukaran informasi yang dimungkinkan karena adanya perangkat lunak pada jejaring komputer ini biasanya berbentuk email (*electronic mail*), group conferencing dan sistem pesan interaktif, database dan pembelajaran berbantuan komputer. Komunikasi lewat jejaring komputer ini disebut sistem on-line.

Kuliah pertama yang ditawarkan secara on-line dilakukan tahun 1984. Sistem komunikasi on-line ini merupakan lingkungan belajar yang memiliki ciri sebagai berikut: a) para peserta terpisah waktu dan tempat sehingga komunikasi dapat dilakukan secara tertunda—tidak perlu segera; b) dapat melibatkan kelompok atau individu; c) interaktif—di mana peserta dapat mengubah isi informasi jika perlu; d) dapat menghubungkan berbagai lokasi sekaligus baik lokal, regional maupun internasional; e) kebanyakan informasi berbentuk teks, walaupun ada juga yang berbentuk audio, video atau gambar; f) komunikasi yang ditimbulkan biasanya terstruktur.

Komunikasi dengan sistem on-line ini cocok untuk siswa yang telah mampu mengarahkan dirinya sendiri, senang berkelompok, mampu dibidang teknik serta memiliki motivasi diri tinggi. Lingkungan belajar yang cocok untuk on-line sistem ini adalah kuliah seminar untuk kelas yang lebih tinggi; ukuran kelas yang dapat dikelola, siswa sudah cukup kenal dengan isi yang akan dibahas, dan hubungan pengajar dan siswa yang lebih dekat.

Untuk keberhasilan penerapan on-line sistem ini pada tingkat perguruan tinggi diperlukan perhatian pada akses terhadap teknologi ini, bagaimana membuat pengguna baru menerapkan

sistem on-line ini, dukungan yang kontinyu untuk para pengguna, keterampilan yang cukup untuk menjalankan kuliah secara on-line. Strategi ini diterapkan baik untuk sistem pendidikan jarak jauh maupun sistem pendidikan konvensional.

### **Daftar Pustaka**

- Bergman, R. & Moore, T. (1990). *Managing Interactive Video/Multimedia Projects*. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
- Briggs, L., Gustafson, K., & Tillman, M. (1991). *Instructional Design*. 2<sup>nd</sup> Ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
- Dick, W. & Carey, L. (1996). *The Systematic Design of Instruction*. 4<sup>th</sup> Ed. Scott, Foresman/Little, Brown, Glenview, Illinois.
- Gagne, R., Briggs, L., & Wager, W. (1992). *Principles of Instructional Design*. 4<sup>th</sup> Ed. Harcourt, Brace, Jovanovich, Forth Worth, Texas.
- Gerlach, V. & Ely, D.P. (1980) *Teaching and Media: A Systematic Approach*. 2<sup>nd</sup> Ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Gustafson, K.L. (1991) *Survey of Instructional Development Models*. Syracuse, New York: ERIC.
- Gustafson, K.L. (1996) Instructional Design Models. In Plomp, T. & Ely, D.P. (Eds.). (1996). *International Encyclopedia of Educational Technology* 2<sup>nd</sup>Ed. New York: Pergamon.
- Heinich, R. dkk. (1986) *Instructional Media: The New Technologies of Instruction*, New York: Jon Willey & Sons.
- Heinich, R., Molenda, M., Russel, J. & Smaldino, S. (1996). *Instructional Media and Technologies for Learning*. 5<sup>th</sup> Ed. New York: Macmillan.
- Jonassen, D.H. *et. all.* (1996). *Handbook of Research for Educational Communication and Technology*, New York : AECT.

- Kemp, J. Morrison, G. & Ross, S. (1994) *Designing Effective Instruction*. New York: Merrill.
- Reigeluth, C.M. (ed.) (1983) *Instructional Design Theories and Model: An Overview of their Current Status*. Earlbaum, Hillsdale, New Jersey.
- Reigeluth, C.M. (1996) Instructional Design Theories. In Plomp, T. & Ely, D.P. (Eds.). (1996). *International Encyclopedia of Educational Technology* 2<sup>nd</sup>Ed. New York: Pergamon.
- Romiszowski, A.J. (1981) *Designing Instructional Systes: Decision Making in Courseplanning and Curriculum Design*. London: Kogan Page.
- Seels, B. & Richey, R.C. (1994) *Instructional Technology: The Definistion and Domains of the Field*. Washington, D.C.: Association for Educational Communication and Technology.
- Suparman, A. (1996). *Desain Instruksional*. Jakarta: PAU-PPAI-UT.
- Van Patten, J. (1989). What is Instructional Design? In Johnson, K. & Foa, L. (1989). *Instructional Design: New Alternatives for Effective Education and Training*. New York: Macmillan.

## **7. TEKNOLOGI PENDIDIKAN: DIFUSI & IMPLEMENTASI, MANAJEMEN, EVALUASI DAN APLIKASI DI BERBAGAI SEKTOR**

---

Atwi Suparman, Purwanto,  
Trini Prastati, Suciati, Ida Malati

Tulisan ini merupakan bagian kedua dari dua rangkaian pembahasan tentang Teknologi Pendidikan. Pada bagian kedua ini, pembahasan berfokus pada beberapa aspek teknologi pendidikan, yaitu difusi dan implementasi teknologi pendidikan, manajemen, evaluasi, serta aplikasi teknologi pendidikan di berbagai sektor.

### **Sumber Inovasi dalam Bidang Pendidikan**

Pendidikan adalah bidang yang dipenuhi dengan pengetahuan yang secara intensif ditransfer, antara lain melalui proses difusi dan diseminasi. Berbagai hasil penelitian, kebijakan, bahan belajar baru dan berbagai macam informasi serta ide baru lainnya memerlukan sesuatu cara untuk sampai kepada sasaran yang dituju, yakni masyarakat. Proses pemasyarakatan atau biasa disebut difusi tersebut, berlangsung secara terus-menerus, tak pernah berhenti. Distribusi informasi dalam pendidikan tersebut sarasannya lebih ditekankan pada hasil, yaitu tercapainya pengetahuan dan perubahan pada masyarakat dalam arti positif.

Ide-ide inovatif yang muncul dalam rangka pembaharuan pendidikan datangnya bisa berasal dari berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan. Salah satu sumber ide-ide inovatif tersebut adalah dari disiplin teknologi pendidikan. Ahli-ahli di bidang teknologi pendidikan telah melahirkan berbagai ide-ide baru, antara lain dalam sistem perancangan instruksional (*instructional system design*), pemanfaatan media, serta pemanfaatan teknologi

komunikasi dan informasi. Ide-ide inovatif tersebut dikomunikasikan agar dapat tersebar secara luas di masyarakat, khususnya di kalangan pendidikan, melalui suatu kegiatan difusi inovasi.

### ***Difusi Inovasi***

Difusi sebagaimana dikemukakan oleh **Rogers**, adalah suatu proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dan pada suatu waktu, kepada anggota-anggota suatu sistem sosial. Difusi merupakan suatu bentuk komunikasi yang khas, di mana isi pesannya yang dikomunikasikan adalah ide-ide baru. Dari pengertian difusi tersebut diketahui bahwa unsur-unsur pokoknya adalah; inovasi, komunikasi, saluran, waktu, dan sistem sosial. Lebih jelasnya, berikut ini uraian untuk masing-masing unsur tersebut.

- a. Inovasi. Inovasi adalah ide, cara atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Difusi dimungkinkan terjadi karena adanya inovasi.
- b. Strategi komunikasi. Ada banyak cara berkomunikasi dengan orang lain tentang sesuatu proyek (termasuk pendidikan), antara lain dengan; memberikan literatur, mengajak bicara, meminta bantuan, mengajak mengunjungi lokasi, mengadakan demonstrasi, mempresentasikan pada saat lokakarya, dan melibatkannya dalam pengembangan produk.
- c. Saluran komunikasi. Agar orang menyadari adanya sesuatu inovasi dan memiliki pengetahuan, pesan-pesan harus disampaikan melalui saluran komunikasi. Saluran yang tersedia untuk itu adalah saluran media massa, dan saluran interpersonal. Saluran media massa dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada orang banyak secara cepat. Sedangkan saluran interpersonal sangat ampuh untuk meyakinkan orang atau memperlancar proses persuasi.
- d. Waktu. Seseorang biasanya lebih menyukai suatu inovasi apabila mereka melewati semua tahapan difusi, yaitu kesadaran, minat, dan mencoba. Selama tahap kesadaran seorang agen harus berbicara kepada orang sebanyak

mungkin. Informasi cetak juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan kesadaran-pengetahuan. Untuk mengajak orang bergerak maju ke tahap minat, diperlukan strategi komunikasi yang lebih ampuh. Agen bisa meminta bantuan atau memberikan demonstrasi. Salah satu cara meningkatkan minat adalah mengajak klien untuk mengunjungi proyek dan mengkaji bahan-bahan yang sedang dikembangkan. Jika agen pembaharuan ingin mendorong difusi melalui tahap mencoba, maka perlu melibatkan calon yang berpotensi menjadi pengguna dalam; "*focus group*", evaluasi formatif, dan perencanaan implementasi.

- e. Sistem Sosial. Perlu diingat bahwa komunikasi terjadi dalam suatu struktur sistem sosial. Hal ini berarti bahwa ada jaringan (*network*) di mana komunikasi bisa terjadi. Agen pembaharuan memerlukan dukungan dari pemimpin opini (*opinion leader*). Oleh karena itu agen pembaharuan harus berkomunikasi dengan pemimpin opini, yaitu orang yang memiliki pengaruh dan kredibilitas untuk mempengaruhi orang lain agar menerima inovasi.

Selanjutnya apabila seseorang ingin benar-benar berperan dalam menggerakkan terjadinya proses difusi, maka ia harus memiliki sejumlah keterampilan. Menurut **Schiffman** (1995) keterampilan-keterampilan difusi meliputi kemampuan dalam; membangun hubungan baik (*relationship*), mendiagnosis, menemukan sumber, memilih jalan keluar atau solusi, mendapatkan penerimaan, dan meningkatkan kemampuan untuk menyempurnakan diri (*self renewal*). Keterampilan-keterampilan tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses difusi. Hambatan-hambatan difusi yang biasanya dihadapi oleh ahli teknologi pendidikan adalah berasal dari; tradisi budaya, keengganan mengambil resiko, kurangnya pengetahuan, kurangnya penerimaan oleh pengguna, biaya, dan isu-isu tentang infrastruktur.

Selain memiliki keterampilan seorang agen pembaharuan juga harus menguasai teori-teori difusi. Teori difusi inovasi telah terbukti berguna untuk meningkatkan adopsi suatu ide atau produk inovatif,

dalam berbagai bidang seperti pertanian, pemasaran dan lain-lain. Para ahli teknologi pendidikan juga memanfaatkan teori difusi untuk menggenjot tingkat adopsi inovasi di bidangnya.

Teori difusi yang telah dikenal luas adalah teori-teori yang dikemukakan oleh **Rogers**. Teori-teori tersebut meliputi empat teori, yaitu teori tentang proses keputusan inovasi, teori keinovatifan individu, teori kecepatan adopsi, dan teori tentang atribut inovasi. Teori tentang proses keputusan inovasi menyatakan bahwa proses difusi adalah proses yang terjadi pada suatu waktu dan memiliki lima tahapan dari mulai pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi. Teori keinovatifan individu menyatakan bahwa individu yang cenderung inovatif akan mengadopsi suatu inovasi lebih awal daripada yang kurang memiliki kecenderungan tersebut, Teori kecepatan adopsi mengemukakan bahwa inovasi didifusikan melewati waktu dan dalam pola pertambahan secara kumulatif adopternya mengikuti kurva ketajaman S (*S-shape curve*). Teori tentang persepsi terhadap atribut inovasi menyatakan bahwa calon adopter menilai inovasi atas dasar persepsinya tentang lima atribut, yaitu; *trialability*, *observability*, *relative advantage*, *complexity* dan *compatibility*.

Penerapan teori difusi dalam teknologi instruksional menurut **Surry & Farquhar**, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori dengan tujuan yang berbeda. Kategori pertama, **teori makro**, terfokus pada reformasi dan restrukturisasi kelembagaan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perubahan organisasi sekolah atau institusi pendidikan. Perubahan yang diharapkan adalah dalam sistemik, melibatkan adopsi dalam rentang dan dimensi yang luas. Contoh teori makro ini adalah kajian tentang Sistem Pendidikan Gelombang Ketiga (Reigeluth, 1987), dan Sekolah Model 2000 (*Center for Educational Technology*, 1989). Kategori yang kedua, yaitu **teori mikro**, terfokus pada peningkatan adopsi dan pemanfaatan produk instruksional tertentu. Tujuannya adalah mengembangkan teori adopsi yang akan memungkinkan penggunaan secara luas suatu inovasi teknologi instruksional oleh adopter. Contoh teori ini adalah kajian tentang Pengembangan Instruksional yang Berorientasi kepada Pengguna (Burkman,

1987), Analisis Lingkungan (Tesmer, 1990), Analisis Adopsi (Farquhar dan Surry, 1994), dan Model Teknologi Imperatif (Schneberger dan Jost, 1994).

TUJUAN

F I L S A F A T		Perubahan Sistemik (Makro)	Pemanfaatan Produk (Mikro)
	<b>Pengembang</b> (Determinis)	Terfokus pada struktur dan pematapan kerangka organisasi yang efektif	Terfokus pada proses perancangan, pengembangan dan penilaian produk instruksional yang efektif
	<b>Adopter</b> (Instrumentalis)	Terfokus pada sosial, politis dan lingkungan profesional dalam organisasi	Terfokus pada kebutuhan dan opini dari calon adopter dan karakteristik lingkungan adopsi

Bagan 1: Teori Difusi dilihat dari Tujuan dan Filsafatnya

Selanjutnya, faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses dan hasil kegiatan difusi inovasi menurut Rogers adalah karakteristik inovasi itu sendiri, bagaimana informasi tentang inovasi dikomunikasikan, waktu dan sifat dari sistem sosial di mana inovasi diperkenalkan. Oleh karena itu bagi orang yang berperan sebagai agen pembaharuan di bidang teknologi pendidikan harus menguasai teori-teori difusi dan faktor-faktor penting lainnya dalam difusi.

Masih menurut **Surry & Farquhar**, mempelajari teori difusi berguna bagi ahli teknologi pendidikan karena alasan-alasan sebagai berikut. **Pertama**, ahli teknologi pendidikan tidak memahami mengapa produk mereka tidak diadopsi. Penyebab-penyebab kegagalan difusi menjadi misteri bagi mereka. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi difusi inovasi, mereka akan mampu menjelaskan, meramalkan dan memperhitungkan faktor-faktor yang menghambat atau menunjang proses difusi dari produk mereka. **Kedua**, teknologi pendidikan itu sendiri merupakan bidang yang didasarkan atas inovasi. Banyak produk yang dihasilkan oleh teknologi pendidikan merupakan inovasi yang radikal baik dalam bentuk, organisasi, urutan dan metode pengajaran. **Ketiga**, mempelajari teori difusi dapat membimbing kepada pengembangan

yang sistematis. Ahli teknologi pendidikan mempergunakan model sistematis dalam proses pengembangan instruksional. Model sistematis difusi dapat menjadi petunjuk bagi proses difusi inovasi dengan cara yang sama dan dengan hasil yang sama efektifnya.

### **Implementasi Inovasi**

Menurut **Ely** (1995), implementasi tidak hanya berarti bahwa ide-ide teknologi pendidikan telah didifusikan dan diterima, tetapi telah terjadi suatu penggunaan media atau teknologi baru dalam suatu bidang pendidikan. **Burkman** (1987) menekankan bahwa kelangsungan dari penggunaan atau implementasi tersebut merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Sedangkan **Gentry** (1994) menganggap aktivitas difusi dan implementasi, seperti "*training*" dan "*budgeting*", adalah merupakan tahapan yang disebut "*product instalation*". Ia mendefinisikan tahapan ini sebagai "proses menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan secara efektif dari produk atau proses instruksional yang baru, pada saat mulai diberlakukan dalam sistem". Guna menyiapkan implementasi perlu pelatihan dan pembiayaan. Keputusan mengenai pelatihan dan pembiayaan atau alokasi sumber harus dibuat sebagai komitmen awal. Gentry membedakan pelaksanaan (*maintenance or utilization*) dari "*product instalation*" atau implementasi.

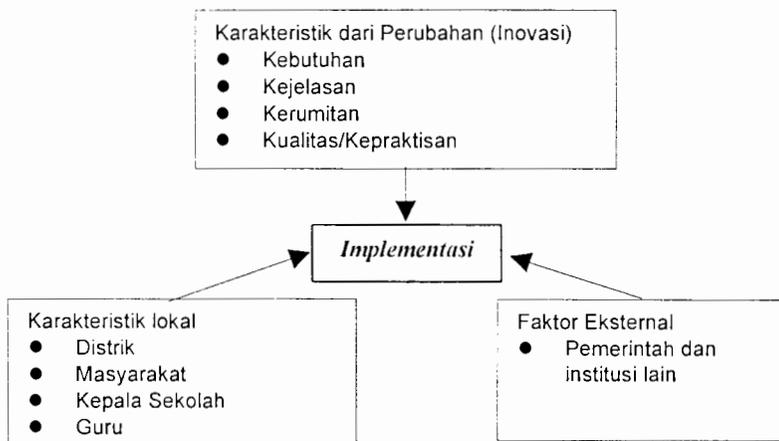
Lebih lanjut menurut **Gentry**, tugas-tugas dalam menyelesaikan "*product instalation*" adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan persetujuan untuk mendukung proses atau produk baru dari pembuat keputusan dalam organisasi dan dari "*gatekeepers*".
- Mengidentifikasi pihak-pihak lain dalam sistem yang dituju yang akan dipengaruhi oleh "*product instalation*".
- Meyakinkan pihak-pihak lain yang dipengaruhi oleh "*product instalation*" akan nilainya.
- Meyakinkan bahwa dukungan yang diperlukan oleh produk telah tersedia.
- Meyakinkan bahwa sumber-sumber yang diperlukan oleh proses dan produk telah dialokasikan secara resmi.
- Mengidentifikasi sistem personel yang akan mengajar atau mengelola pelaksanaan produk instruksional.

- Memberikan pelatihan untuk guru atau manajer.
- Menyediakan akses untuk fasilitas instruksional yang sesuai bagi terselenggaranya penggunaan produk pertama.
- Mendukung instruktur dan manajer selama penggunaan pertama kali produk dalam sistem klien.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi**

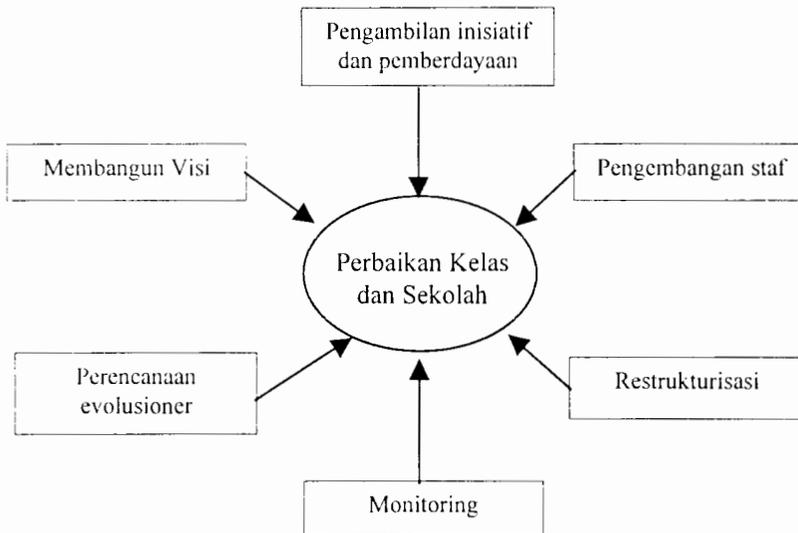
Menurut **Fullan**, faktor yang sangat menentukan dalam proses implementasi adalah: 1) karakteristik dari perubahan; kebutuhan, kejelasan, kerumitan, kualitas/kepraktisan; 2) karakteristik lokal; distrik, masyarakat, kepala sekolah, guru; 3) faktor luar; pemerintah dan instansi lain. Jadi, ada sembilan faktor penting yang berkaitan dengan implementasi yang sukses. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu karakteristik dari perubahan itu sendiri, karakteristik lokal, dan faktor eksternal.



Bagan 2: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi yang Sukses

Masih menurut Fullan, tema pokok dalam implementasi adalah:

- 1) Membangun visi. Dalam membangun visi, terdapat dua dimensi yang terlibat di dalamnya yaitu arah perubahan yang dituju, dan strategi untuk mencapai arah tersebut.
- 2) Perencanaan dan pengembangan evolusioner. Suatu implementasi terjadi atas dasar adanya perpaduan antara keinginan untuk perubahan dan kondisi atau kesempatan. Kebanyakan perubahan tidak didasarkan kepada perencanaan yang ketat. "Memiliki rencana, tetapi belajar sambil berjalan" adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan implementasi.
- 3) Pengambilan inisiatif dan pemberdayaan. Membuat orang bertindak dan berinteraksi pada arah yang dituju adalah aturan pokok untuk perubahan. Untuk itu, inisiatif dapat datang dari mana saja, yang terpenting dalam implementasi ada pembagian kekuasaan dan kolaborasi. Pemimpin sekolah harus mendukung dan merangsang pengambilan inisiatif oleh yang lain, mendelegasikan wewenang dan mengelola peran serta kelompok.
- 4) Pengembangan staf. Pengembangan staf adalah tema sentral dalam perubahan.
- 5) Monitoring dan evaluasi. Monitoring melayani dua fungsi, yaitu membuat agar informasi tentang cara inovatif memungkinkan akses kepada ide yang bagus, dan membantu menghindari kesalahan praktek.
- 6) Restrukturisasi, yaitu perubahan struktural dalam organisasi diharapkan akan kondusif untuk perbaikan dan memiliki dampak yang positif.



Bagan 3: Tema Pokok dalam Implementasi

Jadi apabila kegiatan implementasi suatu inovasi diarahkan untuk peningkatan kualitas kelas dan sekolah, maka pada kenyataannya akan berkaitan dengan tema-tema tersebut di atas.

### **Perspektif dalam Proses Perubahan**

Proses implementasi merupakan proses yang kompleks dan dilematis. Ada empat hal penting yang sulit diperkirakan, yaitu; permulaan aktif dan partisipasi, tekanan dan dukungan, perubahan perilaku dan keyakinan, serta penolakan kepemilikan terhadap inovasi. Suatu implementasi inovasi teknologi pendidikan dalam pembelajaran yang berhasil harus mampu mewujudkan terjadinya perubahan sebagaimana dikehendaki. Hal itu berarti masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan dengan empat hal tersebut dapat diatasi.

## **Manajemen**

Fungsi manajemen merupakan salah satu aspek yang terintegrasi di dalam sistem pendidikan. Para ahli dalam bidang pendidikan menempatkan fungsi manajemen di berbagai komponen. Dalam teknologi instruksional fungsi manajemen berintegrasi pula pada pelaksanaan kontrol melalui perencanaan, koordinasi dan supervisi.

Bidang pendidikan secara operasional mengenal dua istilah, yaitu program dan proyek. Dalam pelaksanaannya kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain fungsi manajemen dijalankan sejalan dengan pelaksanaan program maupun proyek.

Program biasanya mempunyai misi, dalam pelaksanaannya cenderung mempunyai waktu yang cukup panjang, dan terdiri dari berbagai macam proyek. Sedangkan proyek lebih spesifik, dalam pelaksanaannya memiliki waktu yang terbatas, dan menghasilkan produk, baik berupa paket maupun jasa pelayanan. Sebagai contoh; paket program CAI, Bahan Ajar, Laporan Evaluasi, Media A/V dan sebagainya. Pelaksanaan proyek dilakukan di awal satu kegiatan dan berakhir apabila satu kegiatan tersebut selesai. Hasil yang diinginkan juga cukup jelas, berupa produk, jasa pelayanan atau kemampuan tertentu. Adapun program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan berhubungan, sebagai upaya secara terus-menerus untuk mencapai misi tertentu. Berikut ini akan dibahas mengenai langkah-langkah operasional program maupun proyek yang dikembangkan secara sistematis, yang berkaitan dengan fungsi manajemen bidang pendidikan.

Proyek dalam bidang pendidikan memiliki lima fase. Kelima fase tersebut adalah sebagai langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu proyek. Secara berurutan fase tersebut terdiri dari analisis - desain - pengembangan - implementasi - kontrol. Sebagaimana proyek, program juga terdiri dari lima fungsi, yaitu analisis - perencanaan – staf - kepemimpinan - kontrol.

## **Fungsi Program**

### ***Analisis***

Analisis masalah sesungguhnya datang dari adanya kebutuhan, ancaman dari luar, penemuan baru bahkan adanya bencana alam, dan penyebab-penyebab lain yang harus diatasi. Apabila kebutuhan tersebut tidak diatasi maka dapat menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu program yang akan dijalankan harus mengacu pada pemecahan masalah. Dengan demikian maka sebagai langkah awal suatu program adalah melakukan analisis terhadap masalah yang ada.

### ***Perencanaan***

Perencanaan program perlu disusun dengan mengacu pada misi. Dari misi (sebagai acuan) dapat dirumuskan tujuan umum ("*goal*"). Dari tujuan umum selanjutnya dapat dijabarkan tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang disebut tujuan khusus ("*objectives*").

### ***Staf***

Sekarang ini mungkin lebih dikenal dengan sebutan sumberdaya manusia atau SDM. Suatu organisasi harus memiliki SDM yang dapat bekerja secara efektif. Salah satu kesulitan yang dialami dalam pengadaan SDM, baik untuk program maupun proyek adalah bagaimana organisasi dapat menganggarkan biaya SDM yang diperlukan. Pada dasarnya jika organisasi bersedia mengeluarkan dana yang cukup, besar kemungkinan organisasi akan menunjukkan hasil yang baik.

### ***Kepemimpinan***

Tugas memimpin pada proses manajemen adalah sanggup menginterpretasikan segala sesuatu yang sangat luas dan bervariasi, misalnya bagaimana cara menyampaikan perintah mungkin dapat belajar dari pengalaman bidang militer. Disamping itu kepemimpinan harus dapat pula melakukan segala sesuatu sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Performa organisasi tidak akan meningkat tanpa ada feed back yang valid (Banathy,1992). Menurut Chaplan, 1992 dalam Ensiklopedia

Pendidikan, perlu ada implementasi sistem quality control untuk mengukur kapabilitas program.

### ***Kontrol***

Melakukan kontrol berarti menjawab pertanyaan mengenai apakah ada perbedaan antara hasil dengan tujuan yang akan dicapai oleh suatu program. Disamping itu juga untuk melakukan koreksi untuk menghindari adanya ketidakcocokan.

Kata "kontrol" dalam bidang pendidikan sering dikonotasikan *negatif*, karena kontrol sering disama artikan dengan pemeriksaan atau mencari kesalahan. Menurut Branson, 1991 dalam Ensiklopedia Pendidikan, apabila mengacu pada domain feedback, kontrol pada dasarnya melakukan koreksi. Keuntungan dari adanya kontrol dalam manajemen adalah melakukan koreksi yang terus menerus pada variabel-variabel yang cukup kritis, seperti "anggaran". Tetapi pada dasarnya kontrol perlu dilakukan terhadap variabel-variabel manapun yang saling berkaitan, misalnya dana dihubungkan dengan waktu, "program excelent", tingkat atau mutu pelayanan.

### ***Lingkup Program***

Program biasanya terdiri dari beberapa proyek yang berdiri sendiri atau saling berhubungan. Program sebaiknya dievaluasi dengan menggunakan model yang terpercaya, sehingga dapat menjawab semua persoalan yang penting. Evaluasi yang dilakukan termasuk evaluasi pada poin-poin penting yang meliputi analisis efektifitas biaya, analisis cost benefit dan analisis investasi. Hasil evaluasi ini berguna untuk membuat keputusan dan penilaian terhadap program yang dijalankan.

### ***Manajemen Proyek***

Proyek biasanya bagian dari program yang cukup besar. Dalam bidang pendidikan proyek penelitian dilakukan oleh pemerintah atau suatu yayasan. Proyek ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan melakukan penemuan-penemuan baru. Selain penelitian ada pula beberapa proyek lain, salah satu diantaranya proyek pengembangan kurikulum. Proyek seperti ini biasanya

ditawarkan untuk diajukan secara kompetitif. Penilaian dilakukan terhadap semua proposal yang masuk. Biasanya salah satu komponen yang termasuk di dalam kriteria penilaian adalah biaya, karena biaya adalah faktor yang sangat signifikan untuk dievaluasi.

### ***Analisis***

Analisis terhadap masalah harus dilakukan dengan cermat, terutama mengenai sumber, dana dan metode yang diajukan proyek. Tahap ini untuk mencapai kesepakatan bahwa solusi yang diajukan melalui proyek benar-benar besar pengaruh dan manfaatnya terhadap pemecahan masalah. Hasil dari fase analisis adalah suatu parameter berupa skenario untuk menyusun rencana proyek dan mengidentifikasi elemen-elemen yang akan dijadikan prototipe.

Hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa tanggung jawab memutuskan hasil analisis bukan pada manajer proyek melainkan pada manajer program.

### ***Desain***

Dengan menggunakan skenario hasil analisis, maka selanjutnya menyusun rencana proyek yang lebih rinci dengan komponen-komponen yang lengkap. Salah satu komponen yang harus jelas di dalam perencanaan adalah output yang diinginkan. Dari output tersebut maka selanjutnya diperkirakan besarnya dana yang diperlukan untuk menghasilkan output. Efektifitas biaya juga merupakan kriteria dapat diterimanya rencana proyek. Disamping itu hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sosial dalam kaitannya dengan output yang akan dihasilkan.

Pada semua proyek yang akan dikembangkan sebaiknya diundang expert yang kompeten dengan bidang yang dikembangkan.

### ***Pengembangan***

Pada fase ini dan berdasarkan pada rencana proyek, sebaiknya mulai dikembangkan product. Dalam hal ini product yang dihasilkan masih berupa prototipe. Sebagaimana layaknya suatu prototipe, maka ini masih perlu diuji dan dinilai efektifitasnya. Ide utama pada

fase ini adalah dapat menyelesaikan produk dalam bentuk final sebelum batas waktu selesainya proyek. Dengan demikian kontrol terhadap waktu perlu dilakukan secara cermat.

### ***Implementasi***

Tujuan dari implementasi adalah menguji prototipe. Sejauh mana prototipe ini baik dan dapat diterapkan lebih lanjut ?

Pada fase ini prototipe benar-benar diimplementasikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi ini adalah audience atau responden harus sesuai dengan tujuan dan kondisi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang akrab dan tidak tegang,

### ***Kontrol***

Kontrol mengacu pada proses membandingkan apakah hasil implementasi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kemudian menilai pula apakah implementasi yang dilakukan cocok dengan rencana atau bahkan menyimpang dari apa yang telah direncanakan.

Disamping itu perlu ditinjau apakah semua fase berjalan sesuai dengan sekecul yang direncanakan proyek.

Progress check adalah salah satu kegiatan yang paling baik untuk dilaksanakan dalam kontrol. Kontrol yang dilakukan secara efektif, secara tidak langsung dapat membina personal untuk melakukan kebiasaan dalam memiliki kemampuan memonitor dan mengontrol dirinya sendiri atau pekerjaannya sendiri. Dengan kata lain setiap personal di dalam organisasi dapat melakukan supervisi kecil dan langsung terhadap diri sendiri, pekerjaan dan lingkungan kerja.

Jika pada fase ini telah dihasilkan data atau dokumen, data atau dokumen tersebut dapat menjadi masukan sebagai bahan perhitungan dan penilaian tentang performa kerja.

### ***Efisiensi dan Efektifitas***

Fungsi manajemen perlu memperhatikan masalah efisiensi dan efektifitas program maupun proyek yang dikembangkan dalam bidang pendidikan.

Pada dasarnya program atau proyek dapat dikatakan efisien apabila sumberdaya dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan efektifitas pendidikan lebih memperhatikan apakah seperangkat sumberdaya memiliki efek positif terhadap kemampuan orang yang mengikuti program pendidikan. Berapa besar efektifitas, pada dasarnya tidak ditentukan oleh perbandingan sumberdaya atau biaya yang digunakan. Karena "apakah efektif ?" tidak sama dengan "apakah efisien ?".

Fungsi manajemen yang dijalankan tidak terlepas dari seperangkat tugas yang lengkap. Dalam hal ini organisasi harus yakin mengenai tenaga yang dipakai dan disupervisi, dana yang direncanakan dan dilaporkan, serta fasilitas yang dikembangkan dan dipelihara.

Dalam mengontrol organisasi seorang manajer harus berani membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Menurut Prozano dan Prozano, 1987, dalam AECT, 1994; seorang manajer juga harus mampu memimpin, memotivasi, memberi perintah, membimbing, melatih, mendorong, mendelegasikan dan berkomunikasi. Adapun tugas dalam personalia meliputi penerimaan, ketenagaan, seleksi, supervisi dan evaluasi. Tugas yang berhubungan dengan keuangan diantaranya merencanakan anggaran, membuat keputusan dan memonitor, serta mencatat dan melakukan pembelanjaan. Tanggung jawab mengenai sarana dan pra-sarana diperlukan dalam perencanaan, supporting dan supervisi. Caffarella, 1993, dalam AECT, 1994 menyebutkan bahwa seorang manajer harus bertanggung jawab selama proses pengembangan berjalan. Berikut beberapa penerapan fungsi manajemen dalam bidang pendidikan:

### ***Manajemen Sumberdaya***

Manajemen sumberdaya meliputi perencanaan, monitoring dan kontrol terhadap sistem pelayanan sumberdaya. Manajemen sumberdaya termasuk bidang yang urgen karena menyangkut kontrol terhadap akses yang ada. Sumberdaya ini meliputi manusia, dana, waktu, fasilitas, sumber belajar dan pengadaan. Efektifitas biaya dan efektifitas hasil belajar adalah dua hal yang perlu diperhitungkan dalam manajemen sumberdaya.

### ***Manajemen Sistem Pelayanan***

Manajemen sistem pelayanan meliputi perencanaan, monitoring dan kontrol. Manajemen sistem pelayanan ini difokuskan pada produk dalam bentuk software maupun hardware, tenaga penunjang seperti teknisi atau operator, proses dalam bentuk petunjuk operasional bagi perencana maupun instruktur. Keberhasilan manajemen sistem pelayanan diukur dari kesesuaian metode atau teknologi yang dipilih dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sehingga manajemen sistem pelayanan bergantung pada sistem manajemen sumberdaya.

### ***Manajemen Informasi***

Manajemen informasi meliputi perencanaan, monitoring, kontrol penyimpanan informasi, serta transfer dan proses penerimaan informasi yang bermanfaat sebagai sumber belajar. Hal ini merupakan satu kesatuan yang cukup besar yang saling melengkapi antara proses penyimpanan, transfer dan penerimaan informasi yang fungsi utamanya adalah memenuhi kebutuhan belajar. Oleh sebab itu teknologi diperlukan dalam pengembangan cara penyimpanan dan pelayanan informasi. Dengan demikian maka transmisi maupun transfer informasi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Menurut Lindenmayer, 1988, p.317, dalam AECT, 1994 ; "Proses mengubah beberapa aspek informasi (melalui komputer), ..... paling cocok untuk mencapai tujuan".

### ***Evaluasi & Monitoring Dalam Teknologi Pendidikan***

Evaluasi merupakan komponen integral teknologi pendidikan. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah belajar atau mengusahakan belajar yang maksimal, baik berupa program, bahan ajar atau bentuk lain, perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta kualitasnya, atau untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat menjadi masukan untuk memperbaiki program atau bahan ajar tersebut agar mencapai hasil yang maksimal.

Konsep evaluasi berkembang sejak Ralph Tyler mulai memperkenalkannya pada tahun 30an. Diikuti Robert Mager pada tahun 1962 dengan bukunya *Preparing Instructional Objectives*,

dan pengembangan kawasan tujuan instruksional oleh Bloom, Krathwohl dan Masia. Konsep evaluasi dikembangkan lebih jauh oleh Stufflebeam dengan model CIPP (*context, input, process, product*), dan Kaufman dengan struktur konseptual yang dikembangkannya untuk menganalisis ketepatan atau kelayakan tujuan pembelajaran.

Sejalan dengan berkembangnya riset dan metodologi riset dalam pendidikan, bidang kajian evaluasipun menjadi semakin jelas dan lengkap bentuknya. Dalam hal metodologi, riset (penelitian) dan evaluasi menggunakan cara yang sama, misalnya dengan menggunakan studi kusus, survey, atau pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada tujuan, yaitu bahwa tujuan penelitian utamanya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bentuk pengujian validitas berbagai teori yang sudah ada ataupun penemuan teori baru. Sedangkan tujuan evaluasi, sering juga disebut sebagai evaluasi riset, adalah untuk menemukan kebaikan atau nilai suatu program, proses atau produk (Scrivenn, 1980).

Untuk menjelaskan berbagai aspek evaluasi dan penerapannya dalam praktek, bagian ini akan membahas, fungsi evaluasi, jenis-jenis evaluasi, dan kecenderungan perkembangan evaluasi.

### ***Fungsi Evaluasi***

Pengembangan program atau produk instruksional, yang merupakan kegiatan teknologi pendidikan, seringkali dilakukan dalam bentuk proyek. Dalam hal ini evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif, mencakup konseptualisasi desain program, monitoring implementasi program dan mengukur pemanfaatan dan manfaat program.

Dalam evaluasi analisis permasalahan (*Problem Analysis*), suatu program dievaluasi untuk melihat apa yang sebenarnya merupakan kebutuhan (*Need Analysis*). Melalui proses ini akan ditemukan apakah intervensi instruksional merupakan pemecahan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, atau dibutuhkan jenis intervensi lain, misalnya perubahan sistem atau kondisi lingkungan. Dengan demikian akan diyakini bahwa suatu program menjawab masalah yang jelas dan merupakan pemecahan yang tepat pula.

Evaluasi pada berbagai tahap dilakukan agar program instruksional tersebut secara maksimal berhasil mencapai sasaran yang ditentukan.

Pada dasarnya, menurut jenisnya, evaluasi mempunyai empat tujuan atau fungsi (Smith, 1996), yaitu monitoring, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, serta meta evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses evaluasi yang dilakukan terhadap suatu program.

a) Monitoring

Monitoring dilakukan untuk menentukan apakah suatu program atau proses pengembangan instruksional berjalan sebagaimana direncanakan, dan untuk mengusahakan agar manajemen program atau proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Yang menjadi fokus perhatian di sini adalah bagaimana agar program atau proses dapat berlangsung dengan lancar dan bagaimana efektivitas manajemen program dapat ditingkatkan.

b) Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif dilakukan pada berbagai titik pada tahap awal pengembangan suatu program, dijelaskan sebagai pengumpulan data tentang proses atau produk instruksional dengan tujuan untuk menggunakan informasi tersebut sebagai dasar atau masukan untuk pengembangan lebih lanjut. Betapapun bagus dan rincinya suatu program direncanakan, dalam pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan dan hambatan ini kemungkinan akan mengubah desain program.

Dengan kata lain, tujuan evaluasi formatif lebih bersifat langkah perbaikan ("to improve") dari pada untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan ("to prove"). Dengan menemukan berbagai faktor pada program yang sudah baik dan yang belum, pengembang atau pengelola program dapat berusaha memperbaiki kekurangan yang terjadi.

Dalam evaluasi formatif suatu produk instruksional, pengumpulan informasi dilakukan melalui analisis materi dan

uji-coba terbatas menggunakan sampel target peserta secara individual atau dalam bentuk kelompok.

c) Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif biasanya dilakukan setelah suatu program atau produk digunakan secara luas. Evaluasi ini lebih berorientasi kepada kepentingan pengguna (konsumen), dan bertujuan untuk menentukan apakah program tersebut terbukti efektif dan berkualitas. Beberapa pertanyaan yang menjadi fokus evaluasi sumatif diantaranya : apakah program tersebut mempunyai kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, mencapai sasaran jangka pendek maupun jangka panjang, dan apakah program tersebut dapat mencapai tujuan dengan biaya yang lebih murah dan efisien dibandingkan dengan program sejenis.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan dimanfaatkan untuk memutuskan apakah program tersebut akan dilanjutkan dan disebarakan lebih luas atau akan dihentikan

d) Meta Evaluasi

Pada saat melakukan evaluasi suatu program atau produk instruksional, kita juga perlu mengevaluasi cara evaluasi tersebut dilakukan. Tindakan ini semacam "*reflection-in-action*" untuk mengusahakan agar evaluasi dilakukan menggunakan kaidah atau standar yang profesional. Pelaku evaluasi perlu memeriksa praktek yang dilakukannya, dan menjadikannya sebagai pengalaman belajar, sehingga kesempatan untuk melakukan evaluasi mendatang akan menjadi lebih baik.

Meta evaluasi dapat dilakukan sendiri oleh evaluator, sekaligus pada saat dia melakukan evaluasi. Dapat juga dilakukan oleh evaluator dari luar untuk memeriksa dan memberi kredibilitas pada desain, kemajuan dan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

### ***Jenis Jenis Evaluasi***

Evaluasi juga dapat dibedakan berdasarkan sasaran yang dievaluasi, yaitu program, proyek, atau suatu produk instruksional.

a) **Evaluasi Program**

Evaluasi ini dilakukan terhadap suatu program instruksional, misalnya program kewirausahaan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Program ini dikembangkan untuk menumbuhkan wawasan “berwirausaha” bagi mahasiswa, sehingga setelah menyelesaikan studinya akan mempunyai mentalitas wirausaha untuk menciptakan peluang kerja.

Dalam hal ini yang menjadi fokus evaluasi adalah keseluruhan aspek program, yang mencakup kurikulum, berbagai kegiatan dalam implementasinya, dan dampak yang terjadi pada cara berpikir mahasiswa.

b) **Evaluasi Proyek**

Evaluasi ini dirancang untuk mengukur dan menilai kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tugas yang tertentu pula, sebagai contoh, mengevaluasi pelatihan untuk dosen yang dilakukan selama 2 bulan, atau workshop 3 hari untuk membuat karya ilmiah.

Perbedaan antara program dan proyek terletak pada apakah kegiatan tersebut diharapkan akan menjadi kegiatan jangka panjang atau merupakan kegiatan untuk jangka waktu pendek saja. Tetapi dalam perkembangannya suatu proyek jangka pendek, seperti pelatihan dosen di atas, apabila telah menjadi bagian integral usaha peningkatan dosen perguruan tinggi, maka akan diperlakukan sebagai program.

c) **Evaluasi Produk**

Evaluasi produk berhubungan dengan mengevaluasi materi dan bentuk fisik suatu produk instruksional, misalnya seperangkat pengajaran menggunakan kaset tentang keterampilan berbahasa Inggris, paket pembelajaran menggunakan komputer, video, cetakan, dsb.

Yang menjadi fokus dalam evaluasi ini adalah validitas dan keakuratan materi yang dikandung dalam tampilan serta

proses kegiatan di dalam paket instruksional tersebut. Di samping kemasan paket itu sendiri, strategi dan proses instruksional yang terjadi juga perlu diperhatikan, sebab hal ini akan mempengaruhi motivasi dan keberhasilan pengguna.

### ***Trend Pengembangan Evaluasi***

Dalam perkembangannya saat ini, praktek evaluasi sudah lebih intensif dilakukan, sejalan dengan kesadaran tentang peran evaluasi sebagai bagian integral suatu usaha pengembangan dan juga terhadap manfaatnya yang besar. Yang menarik adalah evaluasi berkembang menjadi kegiatan yang bersifat interdisipliner, membentuk usaha sinergi berbagai bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, manajemen, politik, dan sebagainya.

Arah perkembangan ini menjadi imbas pada perkembangan teori dan praktek evaluasi. Pengaruh yang positif adalah terjadinya pengayaan perspektif dan dimensi berpikir terhadap evaluasi serta meningkatkan *sharing* metoda evaluasi dari berbagai bidang ilmu tersebut. Hal ini akan meningkatkan kompetensi evaluator sekaligus memberikan tantangan untuk mampu menggunakan berbagai pilihan metodologi dan melakukan berbagai peran sebagai evaluator.

Analisis kebutuhan yang semula lebih bersifat behavioral dengan konsentrasi pada perilaku (*performance*) dan menjabarkan materi kedalam rinciannya, kini berkembang menjadi lebih luas cakupannya dengan lebih memberikan perhatian kepada analisis peserta program serta pada analisis organisasi dan lingkungan (Richey, 1992).

Evaluasi juga akan dipengaruhi oleh wawasan kendali mutu (*quality control*). Dengan demikian evaluasi akan dilakukan secara berkesinambungan, bahkan setelah evaluasi sumatif dilakukan, sebagai langkah yang logis dalam setiap siklus implementasi program.

Dalam skenario pengumpulan dan analisis data, evaluasi akan menggunakan pendekatan *triangular*, yang berarti menggunakan berbagai bentuk data untuk melakukan pengecekan validitas. Hal ini akan mendorong lebih jauh kecenderungan untuk

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam evaluasi.

Beberapa permasalahan harus tetap diperhatikan dalam pengembangan evaluasi adalah: bagaimana meningkatkan relevansi dan kegunaan hasil evaluasi terhadap praktek; menjadikan kegiatan evaluasi menjadi cost-effective, meningkatkan peranan pengguna/konsumen dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan evaluasi, meningkatkan kemampuan evaluator untuk dapat bersikap dengan integritas menghadapi masalah moral dan etika dalam melakukan evaluasi serta menumbuhkan identitas profesional yang lebih jelas dan konkrit sebagai pedoman perkembangan landasan teoritis dan praktek lebih lanjut.

## **Implementasi Teknologi Pendidikan Di Berbagai Sektor Pendidikan**

### **Pengertian Teknologi Pendidikan**

Teknologi dapat diartikan sebagai *alat* dan *proses* yang mempunyai potensi untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan. Potensi tersebut terlihat dari kemampuan teknologi pendidikan didalam membantu meningkatkan kejelasan komunikasi yang komprehensif antara siswa dan guru di dalam kelas, memberikan mekanisme yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar mandiri, membantu pembahasan dan perumusan kurikulum, meningkatkan penggunaan metode belajar yang baru dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan produktivitas instruksional di sekolah.

Dalam kenyataannya, implementasi teknologi pendidikan masih memiliki kelemahan diantaranya adalah terbatasnya ketersediaan teknologi, walaupun ada teknologi ini hanya dapat ditemukan pada sistem pendidikan yang sangat kaya. Disamping itu, di sekolah-sekolah teknologi pendidikan hanya digunakan untuk mendukung keterlaksanaan kurikulum dan metode mengajar yang ada, bukan sebagai alat yang dapat digunakan untuk transformasi atau peningkatan produktivitas instruksional.

Teknologi sebagai suatu **proses** yang pada umumnya dipakai sebagai alat bantu untuk pemecahan masalah atau sebagai satu set teknik pengelolaan pembelajaran, kurang dipahami dan kurang dimengerti oleh banyak kalangan, termasuk kalangan pendidikan. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang masih menganggap pengertian teknologi pendidikan sebatas konsep alat saja.

Dengan mengacu pada dua pengertian tersebut (konsep alat dan proses), maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan konsep alat maka teknologi pendidikan diartikan sebagai sekelompok alat-alat mekanik atau elektronik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sementara dalam pengertian konsep proses, maka teknologi pendidikan diartikan sebagai suatu teknik yang dapat membantu proses pengembangan, penerapan dan penilaian terhadap suatu sistem, teknik atau alat bantu yang dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

### **Potensi Teknologi Pendidikan**

Berikut ini adalah pengelompokan teknologi sebagai alat dan konsep yang sering dipakai guna meningkatkan mutu proses pembelajaran, yaitu :

- a. Teknologi tingkat rendah : Kapur, papan tulis, kertas dan pensil, model, foto, poster, dan chart.
- b. Media Audiovisual : OHT, slide, filmstrips, kaset, CD, video dan film.
- c. Format komputer : Interactive video, computer multimedia dan hipermedia.
- d. Telekomunikasi : Siaran radio, televisi, satelit, computer mediated telecommunication (internet, e-mail, e-bulletin board, WWW).
- e. Teknologi "lunak" (teknologi pendidikan dalam pengertian konsep): : Programmed instruction, programmed tutoring, programmed teaching atau direct instruction, Personalized System of

Instruction (PSI), simulasi, games, Team Accelerated Instruction, Instructional System Development dan Low Cost Learning System.

### **Realitas pemanfaatan teknologi pendidikan**

Dalam kenyataannya, pemanfaatan teknologi pendidikan dalam berbagai sektor pendidikan masih banyak dipandang sebagai konsep alat dibanding konsep proses. Walaupun demikian, pada saat teknologi pendidikan sebagai konsep alat dirancang dan diimplementasikan dalam proses belajar mengajar atau dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia lainnya, pada saat bersamaan teknologi pendidikan sebagai konsep proses pun sebetulnya secara implisit sudah terintegrasi didalamnya. Berikut ini beberapa contoh implementasi teknologi pendidikan, baik dalam konsep alat maupun proses, di berbagai sektor pendidikan :

- a. ***Di tingkat pendidikan dasar dan menengah***, teknologi pendidikan berperan didalam membantu sekolah merealisasikan misinya yaitu membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap sebagaimana tertera dalam kurikulum.

Wolberg (84) menyatakan bahwa "learning achievement" secara langsung tergantung pada empat faktor, yaitu *aptitude, motivation, instruction, dan psychological environment of the classroom*. Dengan kata lain teknologi pendidikan dianggap mempunyai potensi secara langsung ataupun secara tidak langsung di dalam meningkatkan motivasi, menguatkan pengajaran dan meningkatkan lingkungan psikologi didalam kelas. Dengan demikian diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

- b. ***Dalam pendidikan luar biasa***, teknologi pendidikan dimanfaatkan untuk hal-hal yang dapat membantu siswa-siswa yang berkelainan (= pendidikan luar biasa) dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, teknologi pendidikan

dikategorikan sebagai :

- *Teknologi asistif*, yaitu teknologi yang berupa sebuah alat atau satu set produk yang digunakan untuk menambah, menjaga, atau meningkatkan kemampuan fungsional individu-individu yang menderita kelainan, atau dapat pula berupa layanan jasa yang secara langsung membantu seorang individu yang memiliki kekurangan di dalam memilih, memperoleh atau menggunakan teknologi asistif.

Contoh :

1. No technology : - menjarangkan tempat duduk  
- melekatkan tali pada pintu  
- menyiapkan meja dan kursi sehingga mudah dicapai oleh siswa yang memakai kursi roda, misalnya.
  2. Low technology : - digital switcher for wheelchair  
- page turner  
- talking clocks  
- videotaped textbook
  3. High technology : - computer, optical and a/v technologies  
- eyegaze system  
- Automatic Speech Recognition System  
- Large Scale Integrated Circuit  
- Analog Computer Technology  
- Paperless Braille System  
- CD ROM
- *Teknologi untuk belajar*, berupa perangkat keras, perangkat lunak atau rancangan sistem yang dapat digunakan oleh guru atau siswa luar biasa untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Ada dua macam jenis teknologi ini yaitu teknologi untuk anak berbakat dan teknologi untuk anak yang memiliki kelainan pada tubuh maupun panca indranya.

- c. **Di diklat**, perkembangan ilmu dan teknologi berdampak luas terhadap dunia kerja yang semakin kompleks dan penuh ketidakjelasan. Hal tersebut secara langsung berpengaruh juga terhadap sistem penyediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil. Untuk itu, program-program diklat harus pula dibenahi agar senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Peranan teknologi pendidikan dalam hal membenahi program-program diklat biasanya dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana teknologi pendidikan dapat memperkaya atau meningkatkan integrasi antara pendidikan kejuruan dan akademik, bagaimana teknologi pendidikan dapat mengaitkan dunia pendidikan dengan dunia kerja, dll.

Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi konsep-konsep teknologi pendidikan dalam program-program diklat, diantaranya adalah :

- *Integrated Learning System*, merupakan bahan diklat dan perangkat lunak manajemen yang terdapat di dalam perangkat keras jaringan pekerja. Sistem ini berisi paket kurikulum program diklat yang lengkap dan menggunakan microcomputer dan perangkat keras lainnya dalam pengoperasiannya, yang berbeda dengan cara pengoperasian komputer di sekolah-sekolah (Roth, 1990).
- *Interactive Television System*, sistem ini memungkinkan siswa berinteraksi dengan guru atau instruktur atau dengan sesama siswa, guru tamu, pakar, yang tempat tinggalnya berjauhan. Winger (1991) mengemukakan tiga kelebihan Interactive Television System ini, yaitu dapat menembus waktu, ruang dan materi pelajaran.
- *Computer Based Training System*, merupakan suatu program atau sistem yang digunakan para *educational technologist* pada saat berperan di dalam membantu proses pelatihan di sektor bisnis, industri dan organisasi waralaba, misal untuk pelatihan petugas industri nuklir.

- d. **Di bidang pendidikan jarak jauh**, media yang sangat penting dalam SPJJ ada empat, yaitu media cetak, audio, televisi dan komputer. Kaufman (1989) mengelompokkan media yang digunakan dalam SPJJ kedalam tiga generasi, yaitu media tunggal, multi media dan teknologi interaksi dua arah. Korespondensi, baik lewat surat, radio maupun televisi merupakan contoh dari media tunggal, kelemahannya adalah interaksi antara guru dan siswa sangat kurang. Generasi kedua dinamakan generasi multimedia karena untuk mengelola pembelajarannya suatu institusi pendidikan jarak jauh sudah mulai mengkombinasikan media satu arah (seperti cetak, siaran, kaset) dengan komunikasi dua arah (korespondensi tutor, tutorial tatap muka). Sementara generasi ke tiga media pendidikan jarak jauh ditandai dengan penggunaan teknologi informasi elektronik (Pelton, 1990). Contoh : computer conferencing, computer networking, audio-video conferencing, audio graphic, two-way television dan voice telephone.
- e. **Dalam pendidikan Matematika**, teknologi pendidikan yang paling banyak dimanfaatkan adalah microcomputer, (termasuk didalamnya desk-top, lap-top, atau notebook computer), handheld calculator, videodisk, dan CD ROM, yang sering juga dikategorikan sebagai perangkat teknologi informasi yang paling mutakhir.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengajaran matematika di sekolah, yaitu menyebabkan perubahan pada sifat matematika itu sendiri, cara mengajarkan matematika, dan perubahan pada teknologi yang digunakan.

Fraser (1988) mengelompokkan komputer untuk pengajaran matematika menjadi empat kelompok, yaitu sebagai "mathematical toolkits", "catalyst", "formal language interfaces", dan "tutorials". Yang termasuk "mathematical toolkits" diantaranya adalah kalkulator, spreadsheet, alat-alat pembuat grafik, serta perangkat-perangkat lunak yang biasa digunakan untuk matematika, seperti Geometers' Sketchpad, Algebra Xpresser (Olive dan Steffe, 1990). LOGO adalah

contoh dari formal language interfaces. Sementara program tutorial dalam komputer biasanya digunakan untuk latihan dan penyelesaian soal-soal matematika.

- f. **Dalam pendidikan Sains**, teknologi informasi yang digunakan sebagian besar komputer. Beberapa aplikasi komputer dirancang khusus untuk keperluan pendidikan sains, seperti simulasi, sistem permodelan, *microworld*, microcomputer based laboratories, database, CAI, dan Interactive Video Teknologi.

Simulasi adalah gambaran dari kenyataan, walaupun dalam skala kecil. Dengan simulasi, siswa akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang disimulasikan. Disamping itu, simulasi pun memungkinkan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin diajarkan, misal dikarenakan masalah keamanan, etika, biaya, dan jenis alat yang dibutuhkan, jadi dapat dilakukan. Selain itu, simulasi juga dapat dipakai sebagai alat bantu untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak.

Sistem pemodelan dan *microworld* dapat dianggap sebagai bentuk yang lebih spesifik dari simulasi. Dengan sistem pemodelan siswa dapat mengembangkan model sendiri tentang aspek-aspek ril.

Microcomputer-based Laboratories (MBL) kemungkinan dirancang untuk topik-topik khusus, misalnya tentang panas dan suhu, atau untuk penggunaan yang lebih umum. Hal-hal yang mungkin dilakukan dengan menggunakan MBL yaitu pengumpulan data, pengulangan eksperimen, pengukuran beberapa variabel pada saat bersamaan, analisa data, dan menampilkan data dalam bentuk grafik, dsb. Untuk menggunakan MBL diperlukan perangkat keras tertentu.

Database digunakan untuk menyimpan dan mengambil berbagai informasi dari beragam bidang ilmu pengetahuan.

Berbagai jenis program pendidikan, dari yang berbentuk sederhana seperti latihan, sampai dengan yang berbentuk tutorial, dikemas dalam bentuk CAI, tidak terkecuali program

pendidikan sains. Dengan CAI memungkinkan siswa untuk dapat belajar mandiri.

Interactive Video Technology merupakan perkembangan dari aplikasi komputer. Untuk tutorial, videodisk dapat memberikan gambaran nyata, dibanding hanya disampaikan dengan kata-kata. Penggunaan interactive video technology menciptakan nuansa multimedia dalam kelas sains.

- g. **Dalam Pendidikan Bahasa**, penggunaan komputer semakin meningkat dan semakin diterima sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Dalam pendidikan bahasa, terdapat empat jenis teknologi informasi yang digunakan, yaitu Telecommunication-mediated Writing, Word Processor-facilitated Composition, Hypermedia-supported Language Instruction, dan Simulation-simulated Oral Discourse.

Telecommunication-mediated Writing merupakan program yang memungkinkan siswa untuk bergabung dengan suatu kelompok penulis. Program ini memfasilitasi siswa dengan audiens yang asli, yang terdiri dari teman sejawat, guru, siswa dan guru dari lain sekolah, serta pakar menulis, seperti novelis atau penyair. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjalin kerjasama kognitif. Telecommunication-mediated Writing terdiri dari komputer, modem, perangkat lunak komunikasi, line telephone, serta hak bagi siswa untuk masuk kedalam pusat sistem komputer.

Penggunaan word processor dalam kelas bahasa, memungkinkan siswa untuk dapat melakukan perubahan dengan cepat dan mudah pada karangan yang dibuatnya, tanpa harus menulis ulang semua pekerjaannya. Selain itu, word processor telah terbukti mampu membantu guru didalam membangkitkan motivasi siswa-siswanya untuk dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Selain itu, beberapa program komputer sekarang ini sudah dilengkapi dengan perangkat yang dapat digunakan untuk membantu menulis, misalnya Microsoft Word for Windows.

Untuk dapat mengajari siswa agar dapat berbicara bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, dibutuhkan penguatan yang terus menerus dari guru, apalagi siswa dituntut untuk dapat mengucapkan dan menggunakan kata-kata dengan benar. Metode bermain peran dan menggunakan film, merupakan dua metode yang dapat digunakan untuk itu. Salah satu teknologi informasi, dalam hal ini simulasi komputer, dapat memfasilitasi penggunaan ke dua metode tersebut di atas. Penggunaan program simulasi senantiasa dilakukan di dalam kelompok. Program simulasi memberikan motivasi dan kerangka kontekstual kepada siswa. Hal ini dikarenakan siswa dapat mendemonstrasikan peran yang berbeda-beda dalam setiap simulasi atau mereka membuat keputusan-keputusan penting dalam berbagai diskusi yang dipantau gurunya. Dengan demikian, melalui simulasi kemampuan siswa dalam berkomunikasi dapat diperagakan dan dinilai oleh gurunya. Percakapan dan bermain peran dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswanya dalam bidang-bidang tertentu, kemudian memilih atau mengembangkan bahan instruksional yang sesuai untuk siswa-siswanya tersebut.

Saat ini sudah banyak program-program simulasi yang sudah jadi dan tersebar luas di pasaran, misalnya *Where in the world is Carmen Sandiego*, *Sim city* dan *The other side*. Bagi siswa yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, maka program-program simulasi tersebut bila digunakan akan dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sementara bagi siswa yang bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris, maka contoh program simulasi tersebut bermanfaat di dalam merangsang interaksi kebahasaan serta dapat melatih siswa dalam proses pengambilan keputusan dan juga kemampuan pemecahan masalah. Contoh program simulasi lainnya adalah *Romance*, *Business Executive Decision*.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi teknologi pendidikan**

Pada umumnya pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran masih rendah. Kalaupun ada, teknologi pendidikan hanya dipakai sebagai pelengkap, bukan merupakan bagian yang utuh dari sistem pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti :

a. Ketersediaan perangkat keras dan lunak.

Di pasaran, jenis dan macam perangkat keras dan lunak untuk program pendidikan ini sangat bervariasi, tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya, jenis dan teknologi yang dipakai di sekolah-sekolah akan sangat ditentukan oleh lokasi dimana sekolah itu berada. Di negara maju, seperti Eropa, Jepang dan negara-negara Amerika Utara penggunaan teknologi pendidikan dalam proses belajar mengajar sangat bervariasi, dari mulai OHT, video sampai dengan komputer dengan mudah dapat ditemukan. Sebaliknya, di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara-negara di Amerika Latin dan Afrika, sangat jarang ada media yang digunakan dalam proses belajar mengajar, bahkan papan tulis dan kapur sekalipun kadang-kadang tidak selalu tersedia di sekolah.

b. Pola penggunaan teknologi.

Penggunaan teknologi pendidikan oleh guru sangat terbatas, termasuk di negara yang aksesnya terhadap teknologi elektronika sangat umum sekalipun.

Di USA media yang sering dan banyak dipakai dalam proses pembelajaran adalah media cetak, sedikit media audio visual dan games.

c. Faktor ekonomi.

Teknologi masih dianggap mahal, sehingga belum semua negara mampu untuk menggunakannya dalam proses belajar mengajar atau dalam kegiatan pendidikan secara keseluruhan.

d. Budaya

Tidak semua teknologi mudah di terima oleh suatu masyarakat, misal karena sudah terlanjur tidak suka dengan Amerika Serikat, maka teknologi apa pun yang berbau Amerika Serikat dianggap haram oleh masyarakat Amerika Latin.

e. Kebijakan

Implementasi teknologi perlu dukungan dan persetujuan dari pemegang kebijakan, tanpa itu sulit.

### **Kesimpulan**

Berbicara tentang peranan teknologi dalam pendidikan, semestinya tidak hanya berbicara mengenai alatnya semata, tetapi harus juga berfikir tentang pendidikan secara umum, khususnya tentang keterkaitan antara efektivitas strategi instruksional dengan perangkat lunak program pendidikan yang tersedia.

Gleason et all (1990) menyimpulkan bahwa guru dan siswa akan memperoleh keuntungan yang tidak sedikit jika mereka melakukan analisis yang seksama terhadap substansi mata pelajaran, dan menggunakan prinsip-prinsip dasar instruksional yang berkaitan dengan suara untuk melaksanakan program pengajaran bagi siswa yang pendengarannya terganggu.

Hofmeister dan Thorkildsen (1989) juga menyimpulkan bahwa videotape merupakan salah satu alat yang efektif untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi efektivitas pengajaran sesungguhnya terletak pada pemilihan strategi instruksional yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta keahlian guru di dalam menyampaikan materi. Mereka juga berpendapat bahwa videodisc hanya efektif digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran oleh guru, tetapi bukan sebagai alat yang dapat menggantikan peranan guru.

Pogrow (1988) berkesimpulan bahwa penggunaan komputer tidak akan efektif jika hanya dianggap sebagai alat belaka. Komputer akan membantu proses pembelajaran jika ia dapat bekerja sama dengan guru atau paling tidak digunakan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran terjadi.

**Daftar Pustaka**

- Richey, R.C. (1992). *Designing Instruction for the Adult Learner: Systemic Training Theory and Practice*. London:Kogan Page.
- Rogers, E.M. (1995). *Diffusion of Innovations*, 4<sup>th</sup> edn. New York: The Free Press.
- Rossi, P. & Freeman, H. (1995). *Evaluation: A Systematic Approach*. Beverly Hills: Sage Publications. Inc.
- Schmid, T. (1980). *Media Center Management: A Practical Guide*. Toronto: Copp Clark Ltd.
- Scriven. M. (1980). *Evaluation Thesaurus (2<sup>nd</sup>, Ed)* Inverness, CA: Edgepress.
- Seel, B. & Richey, R. (1994). *Instructional Technology: The Definition and Domains of The Field*. Washington D.C.: Association for Educational Communication and Technology.
- Seels, B. and Glasgow, Z. 1998. *Making Instructional Design Decisions*. 2<sup>nd</sup> edn. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Smith, L. (1996). *Project Evaluation and Monitoring in International Encyclopedia of Educational Technology* in Tjeerd Plomp dan Donald P. Ely, (eds) Terrytown: Elsevier Science Inc.
- Surry, D.W., and Farquhar, J.D., (<http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/vol2no1>)
- Plomp, T. and Ely, D.P. (1996). *International Encyclopedia of Educational Technology*. 2<sup>nd</sup> edn. Cambridge. Pergamon.

## **8. KARAKTERISTIK DASAR PROSES BELAJAR**

---

Bambang Sutjiatmo

### **Pendahuluan**

Secara sederhana, proses belajar antara lain dapat dipandang sebagai rangkaian proses mengenali, memperhatikan, dan selanjutnya memahami sifat atau konsep yang terkandung dalam obyek belajar. Dalam tulisan ini akan dipelajari karakteristik proses belajar sebagai fungsi waktu, dengan model yang sangat sederhana. Proses belajar dilihat sebagai proses 'mengendapnya' informasi di dalam memori orang, hingga terjadi pemahaman hakekat, sifat atau hubungan sifat informasi atau kelompok informasi. Secara khusus, di sini hanya dipelajari bagaimana karakteristik hasil belajar orang dalam pemahaman suatu bahan ajar tertentu. Karakteristik yang dimaksud adalah bagaimana dan berapa lama bagian bahan ajar dipahami. Apakah bahan ajar yang diberikan dapat dipahami seluruhnya? Bahan ajar yang dimaksud di sini adalah suatu himpunan bahan yang tersusun secara sistematis, sehingga membentuk suatu elemen kecil ilmu atau pengetahuan. Model yang digunakan adalah otak yang mengolah informasi berdasarkan motivasi dan keadaan awal informasi yang dipunyainya. Walaupun di sini dilakukan analisis kuantitatif, tetapi karena modelnya sangat sederhana, hasilnya harus diinterpretasi secara kualitatif.

Belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat kompleks, sehingga tidaklah mungkin memformulasikannya secara tuntas dan sempurna. Bagaimanakah mekanisme orang belajar? Pertanyaan itu tentu telah menjadi pertanyaan standar mereka yang berminat

mempelajari proses belajar bagi pengembangan proses pembelajaran.

Uraian ini merupakan elemen karakteristik belajar seseorang untuk melihat kemampuan individu dalam menerima dalam arti memahami makna dan hubungan antar informasi, sehingga membentuk pemahaman. Otak merupakan suatu sistem yang sangat kompleks yang dapat mengolah pikiran, emosi, dan imajinasi secara bersamaan. Model yang digunakan di sini adalah model yang sangat sederhana. Otak mengolah informasi menjadi pemahaman hanya berdasarkan motivasi dan keadaan awal. Motivasi dalam analisis ini merupakan resultan dari kebutuhan, keingin-tahuan, minat, perhatian dan lainnya yang sejenis dengan itu. Sedangkan keadaan awal itu adalah informasi yang telah dipahami oleh pebelajar yang berkenaan dengan bahan ajar yang sedang dipelajari. Karakteristik yang diperoleh dalam analisis ini belum melibatkan emosi dan keadaan psikologis lain dari pebelajar, keadaan fisik lingkungan, serta fasilitas belajar. Karena itu, karakteristik belajar yang diperoleh merupakan karakteristik dasar proses belajar.

### **Analisis**

Melalui proses belajar, bahan ajar dipelajari hingga sebagian besar bahan tersebut dipahami. Bahan ajar dapat dipandang terdiri dari banyak bagian. Bagian bahan ajar tersebut dipelajari dengan urutan yang ditentukan, menurut sistematika tertentu, sehingga sebagian besar bahan ajar dapat dipelajari dengan mudah. Dalam analisis ini, seluruh bahan ajar yang diberikan diberi lambang B. Keadaan awal pemahaman orang terhadap bahan yang akan dipelajari berbeda-beda. Orang dapat mempelajari B dengan keadaan awal kecil, yaitu bahwa ia baru mengetahui sangat sedikit bagian dari B. Di samping itu, terdapat orang yang mempelajari B itu dengan telah memahami sebagian dari B.

Misalkan pada suatu saat dalam belajar, bagian dari B yang telah dipahami adalah P, sehingga sisa bahan ajar yang masih harus dipelajari adalah  $(B - P)$ . Proses belajar sangat dipengaruhi oleh motivasi belajar. Di samping itu, setiap bagian dari bahan ajar yang telah dipahami berperan menyumbang proses pemahaman

selanjutnya. Sumbangan itu sebanding dengan sisa bahan ajar yang dipelajari. Makin besar sisa bahan ajar, makin besar sumbangan setiap bagian bahan ajar yang telah dipahami pada proses belajar. Karena adanya motivasi, besar laju pemahaman per setiap bagian yang telah dipahami sebanding dengan sisa bahan ajar.

Laju pemahaman adalah perubahan  $P$  terhadap waktu, atau  $\frac{dP}{dt}$ .

Sedangkan laju pemahaman per bagian yang telah dipahami dapat dituliskan sebagai  $\frac{dP}{Pdt}$ . Dapat dikatakan, bahwa **laju**

**pemahaman untuk setiap bagian bahan ajar sebanding dengan sisa bahan yang harus dipelajari, dengan faktor kesebandingan motivasi yang diberi lambang  $m$ .** Pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\frac{dP}{P dt} = m (B - P)$$

atau

$$\frac{dP}{dt} = m(B - P) P, \quad m > 0, B > 0, P \geq 0 \quad (1)$$

Persamaan (1) merupakan persamaan yang dikenal sebagai persamaan logistik, Vandermeer (1990). Persamaan diferensial tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan cara pemisahan peubah, yaitu bahwa persamaan (1) dapat dituliskan sebagai

$$\frac{dP}{(B - P) P} = m dt \quad (2)$$

Integrasi persamaan (2) menghasilkan

$$\ln\left(\frac{P}{B - P}\right) = mt + A$$

atau

$$\frac{P}{B - P} = C e^{mt}$$

di mana A dan C adalah konstanta.

Dengan keadaan awal  $P = P_0$  pada  $t = 0$  diperoleh

$$C = \frac{P_0}{B - P_0}$$

sehingga, solusi persamaan (1) dapat ditulis sebagai

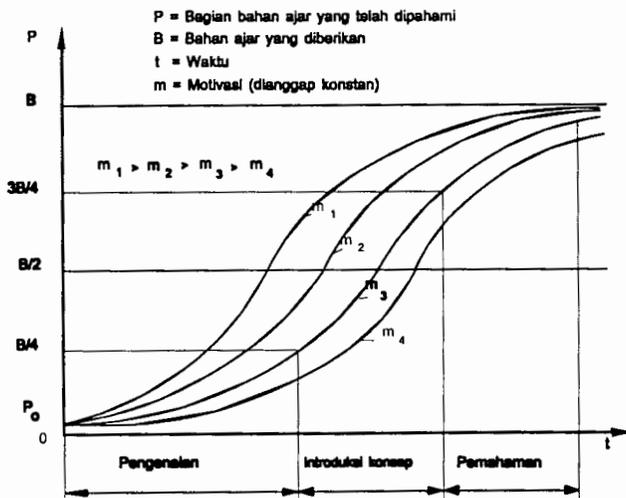
$$P(t) = \frac{P_0 B}{P_0 + (B - P_0) e^{-mt}} \quad (3)$$

Langkah penyelesaian persamaan diferensial dengan cara pemisahan peubah dapat dilihat dalam berbagai buku standar matematik tentang persamaan diferensial, seperti misalnya Kreyszig (1988), sedangkan langkah integrasi di atas dapat dipelajari melalui buku standar tentang kalkulus, seperti misalnya Purcell dan Varberg (1990).

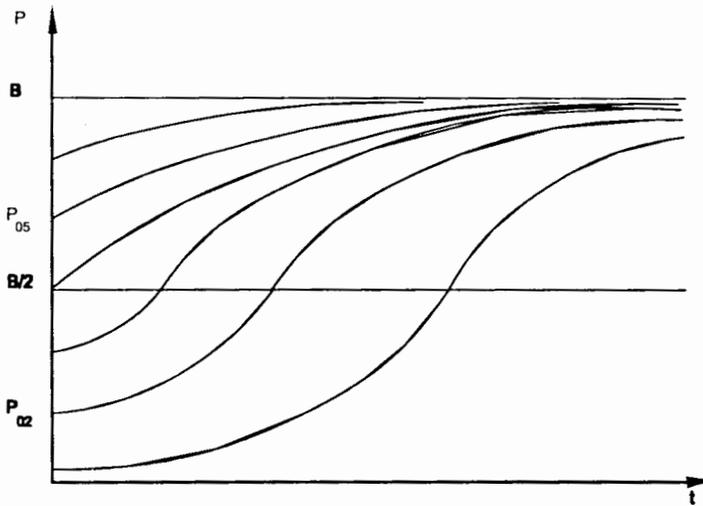
Jika  $P_0 = 0$ , yaitu keadaan awal peserta ajar adalah nol, maka  $P(t) = 0$ . Hal itu menunjukkan, bahwa jika peserta ajar belum mempunyai informasi sedikitpun mengenai materi ajar, peserta ajar tidak pernah bisa memperoleh pemahaman sedikitpun. Hal itu merupakan suatu keadaan ekstrem yang sesungguhnya tidak pernah dijumpai. Bagaimanapun, pebelajar telah mempunyai informasi awal mengenai bahan ajar yang akan dipelajari. Dalam proses belajar, informasi awal tentang materi ajar merupakan informasi yang maha penting dan harus dipunyai oleh pebelajar. Informasi awal tersebut antara lain dapat berupa definisi elemen dasar dari himpunan informasi obyek ajar. Definisi elemen dasar obyek ajar harus dipahami dahulu oleh pebelajar sebelum dia mulai belajar.

**Kurva S**

Untuk suatu keadaan awal  $P_0$  yang kecil, persamaan (3) digambarkan sebagai gambar 1. Karena kurva karakteristik hasil belajar itu menyerupai huruf S, kurva tersebut dapat disebut sebagai kurva S. Pada gambar 1 ditunjukkan solusi  $P$  untuk suatu keadaan awal  $P_0$  dan berbagai motivasi  $m$ . Kecepatan rata-rata pemahaman dapat ditingkatkan dengan memperbesar  $m$ . Gambar 2 menunjukkan persamaan (3) untuk berbagai keadaan awal  $P_0$ . Dari kedua gambar tersebut dapat dilihat bahwa pemahaman sampai  $P/2$  memerlukan waktu yang panjang, karena kurva  $P$  cekung ke atas. Sedangkan setelah pemahaman mencapai  $P/2$ , waktu pemahaman bagian materi tertentu menjadi lebih pendek, karena kurva  $P$  cekung ke bawah. Juga terlihat bahwa pemahaman seluruh materi ajar dicapai secara asimtotik, artinya pemahaman seluruh materi dicapai dalam waktu tak terhingga. Hal itu berarti, bahwa orang tidak dapat memahami seluruh materi secara sempurna. Itu sesuai dengan hakekat pengetahuan, yaitu bahwa orang tidak akan pernah dapat memahami sesuatu sampai sempurna. Makin banyak orang belajar, makin tahu dia bahwa dia belum tahu.



Gambar 1. Kurva S : Karakteristik dasar proses belajar



Gambar 2. Karakteristik dasar proses belajar untuk berbagai keadaan awal

Dari uraian di atas dapat dikatakan hal berikut. Karakteristik dasar proses belajar tergantung dari dua hal utama, yaitu keadaan awal pemahaman materi ajar dan motivasi belajar. Pada awal belajar, pebelajar harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai setidaknya definisi dari elemen dasar dari bahan ajar. Makin besar keadaan awal tersebut, makin cepat hasil belajar diperoleh. Proses belajar sampai dikuasainya setengah bahan ajar merupakan proses yang berjalan lambat. Untuk mempercepatnya, motivasi belajar harus besar. Setelah dicapainya pemahaman setengah dari bahan ajar, proses belajar menjadi cepat. Orang tidak dapat mencapai pemahaman seluruh bahan ajar secara sempurna. Sepanjang hayatpun tidak cukup untuk mencapai pemahaman sempurna tersebut. Itulah sebabnya, jika orang ingin banyak tahu, dia harus belajar sepanjang hayat. Sebagai pedoman, setiap pebelajar dikatakan telah memahami seluruh bahan ajar, jika dia telah memahami katakanlah 95 % bahan ajar.

Karakteristik dasar proses belajar tersebut dapat dipandang sebagai karakteristik belajar dengan obyek belajar suatu modul atau bahan ajar terpadu. Sebagai karakteristik dasar proses belajar, karakteristik itu dapat dipandang misalnya sebagai karakteristik belajar suatu konsep. Gambar 1 memperlihatkan, bahwa karakteristik dasar proses belajar dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah **tahap pengenalan**, yaitu tahap sampai pemahaman seperempat bahan ajar. Tahap ini memerlukan waktu yang relatif panjang. Tahap kedua adalah **tahap introduksi konsep**, yaitu tahap pemahaman dari seperempat sampai tigaperempat pemahaman. Pada tahap ini, hasil belajar yang banyak dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek. Kemudian tahap terakhir adalah **tahap pemahaman konsep**. Secara teoritik, pemahaman sempurna tidak pernah dicapai. Orang hanya dapat mencapai pemahaman hampir sempurna.

Pada tahap pengenalan, pebelajar mulai mengenali elemen dasar dan tujuan konsep yang dipelajari. Waktu pengenalan ini cukup panjang. Setelah itu, tahap introduksi konsep berlangsung dengan relatif cepat, asal motivasi tidak berkurang. Pada tahap itu, pebelajar mencari makna dan hubungan antar elemen dasar bahan ajar dengan menggunakan kreativitasnya. Proses kreativitas berlangsung pada tahap ini. Kemudian, proses belajar diakhiri dengan tahap pemahaman konsep. Pada tahap ini pebelajar mempelajari penerapan konsep dan barangkali memperluasnya dengan ide baru.

### **Penutup**

Karakteristik dasar proses belajar dengan variabel motivasi dan keadaan awal pemahaman bagian bahan ajar telah ditunjukkan. Karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai pedoman awal bagi usaha peningkatan hasil proses pembelajaran. Motivasi belajar berperan sangat penting bagi cepatnya pencapaian hasil belajar. Penyusunan rangkaian bahan ajar dengan persyaratan bahan ajar *prerequisite* merupakan usaha yang baik untuk meningkatkan keadaan awal pemahaman bahan ajar yang dapat sangat mempercepat pemahaman bahan ajar. Bahan ajar *prerequisite*

memberikan keadaan awal yang besar pada proses pembelajaran, sehingga proses belajar dapat berlangsung dalam waktu yang lebih pendek, lihat gambar 2. Karakteristik kurva S ini menegaskan pentingnya bahan ajar *prerequisite* terhadap bahan ajar lainnya.

Karakteristik dasar proses belajar ini dapat digunakan untuk, baik proses belajar mandiri maupun untuk proses pembelajaran. Dalam belajar mandiri, pebelajar harus menjaga sendiri motivasi belajarnya dan memilih urutan belajar dengan baik, agar hasil belajar dapat diperoleh dengan waktu yang pendek. Sedangkan dalam proses pembelajaran, hal yang harus diperhatikan antara lain adalah, bahwa pada kelompok pebelajar, masing-masing pebelajar mempunyai bentuk kurva S sendiri-sendiri, karena mereka masing-masing mempunyai motivasi dan keadaan awal pemahaman bahan ajar yang berbeda-beda. Fasilitator belajar harus merangsang dan menjaga motivasi setiap pebelajar. Di samping itu, urutan penyampaian bahan ajar harus dibuat sebaik mungkin, sehingga urutan proses belajar, yaitu pengenalan, introduksi konsep dan pemahaman dapat berlangsung dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Vandermeer, J. (1990). *Elementary Mathematical Ecology*. Malabar, Florida : Krieger Publ. Co.
- Kreyszig, E. (1988). *Advanced Engineering Mathematics*. New York : John Wiley & Sons.
- Purcell, EJ. dan Varberg, D. (1990). *Kalkulus dan Geometri Analitis*. Edisi keempat. Terjemahan I Nyoman Susila dkk. Surabaya:Erlangga.

## 9. PEMBELAJARAN YANG BERFOKUS PADA PESERTA DIDIK: KONSEP DAN PRASYARAT IMPLEMENTASI(\*)

---

---

Aris Pongtuluran  
Arlinah Imam Rahardjo

### Pendahuluan

Komisi Internasional tentang Pendidikan Untuk Abad XXII dalam laporannya kepada UNESCO, menyebutkan bahwa dalam pengembangan pendidikan seumur hidup harus berlandaskan pada 4 pilar yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to live together*) dan belajar menjadi seseorang (*learning to be*) (Delors, 1996).

**Belajar Mengetahui** adalah memadukan antara kesempatan untuk memperoleh pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk bekerja pada sejumlah subjek yang lebih kecil secara lebih mendalam. Dalam pilar ini, kesempatan untuk mengembangkan sikap dan cara **belajar untuk belajar** (*learning to learn*) lebih penting daripada sekedar memperoleh informasi. Peserta didik bukan hanya disiapkan untuk dapat menjawab permasalahan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong mereka memahami mengembangkan rasa ingin tahu intelektual, merangsang pikiran kritis, serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, agar dapat menjadi bekal sepanjang hidup. Belajar jenis ini dapat dilakukan melalui kesempatan-kesempatan berdiskusi, melakukan percobaan-

---

(\*) Judul asli: Student-Centered Learning: The Urgency and Possibilities disampaikan dalam Seminar Innovative Approaches in Higher Education di Universitas Petra – Surabaya, Agustus 1999.

percobaan di laboratorium, menghadiri pertemuan ilmiah, serta kegiatan ekstrakurikuler atau berorganisasi.

**Belajar Berbuat**, artinya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk tidak hanya memperoleh keterampilan kerja tetapi juga memperoleh kompetensi untuk menghadapi berbagai situasi, bekerja dalam tim, berkomunikasi serta menangani dan menyelesaikan masalah dan perselisihan. Termasuk di dalam pengertian ini adalah kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam bersosialisasi maupun bekerja di luar kurikulum seperti magang kerja, aktivitas pengabdian masyarakat, berorganisasi, serta mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dalam konteks lokal maupun nasional, ataupun dikaitkan dengan program belajar seperti praktek kerja lapangan, kuliah kerja nyata, atau melakukan penelitian bersama.

**Belajar Hidup Bersama**, berarti mengembangkan pengertian atas diri orang lain dengan cara mengenali diri sendiri, menghargai kesaling-tergantungan, melaksanakan proyek bersama, dan belajar mengatasi konflik dengan semangat menghargai nilai pluralitas, saling mengerti, dan perdamaian. Dalam belajar hidup bersama, aspek seperti kesempatan untuk menjalin hubungan antara pendidik dengan peserta didik, dorongan dan penyediaan waktu yang cukup untuk memberi kesempatan pada peserta didik untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga, serta organisasi sosial maupun profesi di luar sekolah, menjadi sangat penting.

**Belajar menjadi seseorang**, berarti mengembangkan kepribadian dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri, kritis, penuh pertimbangan, serta bertanggung jawab. Dalam hal ini pendidikan tak dapat mengabaikan satu aspek pun dari potensi seseorang seperti ingatan, akal sehat, estetika, kemampuan fisik, maupun keterampilan berkomunikasi.

Telah banyak diakui bahwa sistem pendidikan formal saat ini cenderung untuk memberi tekanan pada penguasaan ilmu pengetahuan saja yang akhirnya merusak bentuk belajar yang lain. Kini telah tiba saatnya untuk memikirkan bentuk pendidikan secara menyeluruh, yang dapat menggiring terjadinya perubahan-

perubahan kebijakan pendidikan di masa akan datang, dalam kaitan dengan isi maupun metode.

### **Pendidikan di Sekolah-sekolah Kita Saat Ini**

Tujuan pendidikan nasional serta tujuan dari masing-masing jenjang pendidikan seperti yang termasuk di dalam sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan-peraturan Pemerintah RI adalah sebagai berikut: (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992).

- **Pendidikan Nasional** bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- **Pendidikan Prasekolah** bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.
- **Pendidikan Dasar** bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
- **Pendidikan Menengah** bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian; serta untuk
  - b. meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

- **Pendidikan Tinggi** bertujuan untuk:
  - a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; serta untuk
  - b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk menuangkan tujuan-tujuan tersebut dapat dalam undang-undang maupun peraturan secara tepat, pendidikan harus diwujudkan sebagai **pengajaran, pembimbingan**, dan pelatihan (*teaching, guiding and training*). **Mengajar** untuk memberikan **pengetahuan membimbing** untuk menamamkan **sikap**, dan **melatih** untuk meningkatkan **keterampilan**. Semua ini harus dilakukan secara berkesinambungan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sepanjang hayat.

Masih harus diakui bahwa guru memainkan peranan utama dalam proses pendidikan yang berkualitas, namun guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Hal lain yang perlu dipikirkan dalam memajukan proses belajar mengajar adalah kurikulum, program-program pendidikan, sumber daya, fasilitas pendidikan, keuangan, manajemen, dan kepemimpinan pendidikan.

Karena berbagai alasan, pendidikan di sekolah-sekolah kita saat ini masih merupakan pembelajaran yang berfokus pada pengajar (*Instructor-Centered Learning*). Konsentrasi utama dalam proses belajar mengajar terletak pada aspek mengajar saja. Pembimbingan serta pelatihan hampir tidak ada. Bukan guru yang harus disalahkan, tapi seluruh sistem pendidikan. Kurikulum nasional yang ada terlalu kaku dan tersentralisir. Terlalu banyaknya subjek yang harus diajarkan di sekolah dalam 37 – 42 jam per minggu, tidak memungkinkan inovasi sekecil apapun untuk dilakukan. Para guru dihantui oleh kurikulum nasional dan silabus untuk dilaksanakan tepat waktu. Kurikulum, walaupun ada kemungkinan untuk mengadaptasikannya dalam konteks lokal,

telah kaku. Sedangkan waktu yang teralokasi tak cukup bahkan untuk melaksanakan kurikulum nasional itu sendiri. Jalan keluar yang akhirnya dipikirkan guru adalah “bookish”. Yang artinya bahwa apapun yang dikatakan dalam buku wajib nasional harus dianggap benar tanpa adaptasi dengan situasi dan kondisi lokal secara kontekstual, tanpa interpretasi lanjutan dari guru, dan tanpa improvisasi dari guru apalagi peserta didik.

Contoh sederhana berikut ini menggambarkan betapa salah seorang guru SD menjadi “yes man” terhadap buku (petunjuk dari pusat).

- Pertanyaan berganda (*multiple choice*). “Kalau rumah ditinggal ke luar, mana jawaban yang benar? A: dikunci; b: dijaga satpam; dijaga anjing; atau ditiptkan tetangga?” Menurut buku harus dijawab: dikunci. Anak yang menjawab dijaga satpam pasti disalahkan, apalagi yang lain-lain.
- Pertanyaan berikut adalah pertanyaan lisan seorang guru kepada seorang murid: Di mana letak Bunaken? Dijawab: Di Sulawesi Utara. Guru berdasarkan kunci jawaban mengatakan: Salah, yang benar di Sulawesi Selatan. Sang murid mempertahankan karena pernah berkunjung ke Bunaken, namun sang guru tetap mengatakan salah, karena kebetulan buku kunci mengatakan di Sulawesi Selatan.

Conton-contoh tersebut menunjukkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah-sekolah saat ini lebih ditekankan untuk menghafal jawaban yang benar, bukan memberikan jawaban-jawaban yang memungkinkan, yang lebih sesuai dengan kenyataan sehari-hari dalam menghadapi permasalahan. Peserta didik diharuskan mempelajari serta memberi jawaban sesuai dengan buku atau kurikulum standar, bukan apa yang ingin dipelajari atau ingin dikerjakan oleh peserta didik. Pilihan untuk belajar tidak terletak pada letak pada minat atau kemampuan peserta didik. Dengan demikian peserta didik akan kehilangan motivasi untuk belajar. Penilaian yang diberikan hanya memancing perasaan takut akan kegagalan atau tidak naik kelas yang hanya merupakan motivasi ekstrinsik.

### **Mengapa Perlu Student – Centered Learning?**

Sebelum usia sekolah, anak jarang menerima pendidikan secara formal. Orang tua menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak secara alami yang membawa anak dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui olehnya. Kadang anak menolak bantuan dalam mengerjakan sesuatu hingga benar-benar tak mampu mengerjakannya sendiri. Mereka lebih suka mengerjakan sendiri. Orang yang bijak akan membiarkan tetapi selalu siap sedia jika anak bertanya atau membutuhkan pertolongan. Dengan demikian anak memegang kontrol atas cara belajarnya sendiri. Mereka tidak belajar karena disuruh. Bimbingan secara individu, ketika dibutuhkan, adalah dasar dari pendidikan yang diterima anak sebelum masuk sekolah, sehingga mereka merasa sedang bermain, tidak merasa terpaksa untuk belajar. Dari proses itu, motivasi intrinsik anak untuk belajar akan tergalikan dan berkembang secara alami.

Begitu anak siap untuk memasuki sekolah secara formal, antusiasme dan kesenangan dalam belajar menjadi hilang. Anak cepat menjadi bosan, lebih tertarik pada hal-hal lain seperti menonton televisi, bermain, dan sebagainya. Motivasi untuk belajar menjadi hilang disebabkan oleh kenyataan bahwa anak diharuskan belajar menurut apa yang harus dipelajari, bukan apa yang diinginkan anak. Padahal, motivasi dari dalam diri sendiri sangat dibutuhkan bagi seorang anak untuk terus dan suka belajar.

Sistem pendidikan kita saat ini dibangun dengan mengacu pada tujuan dari para pendidik bukan peserta didik. Tujuan, materi, serta metode pendidikan ditetapkan berdasarkan pada apa yang diinginkan dan dianggap perlu diketahui dan dipelajari oleh peserta didik secara seragam, tanpa memperdulikan keanekaragaman kebutuhan, minat, kemampuan, serta daya belajar tiap peserta didik. Setiap anak berbeda, dan karena apa yang dipelajari oleh peserta didik tidak semuanya merupakan kebutuhan yang ingin dipelajari oleh peserta didik, materi menjadi sulit dicerna oleh sebagian besar peserta didik.

Sementara itu, era globalisasi serta perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat

cepat di segala bidang. Batasan wilayah, bahasa dan budaya yang semakin tipis, serta akses informasi yang semakin mudah menyebabkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperoleh seseorang menjadi cepat usang. Persaingan yang semakin tajam akibat globalisasi serta kondisi perekonomian yang mengalami banyak kesulitan, terutama di Indonesia, membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, memiliki jiwa *entrepreneur* serta kepemimpinan. Pendidikan yang menekankan hanya pada proses transfer ilmu pengetahuan tidak lagi relevan, karena hanya akan menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan masa lampau, tanpa dapat mengadaptasinya dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

*Student-Centered Learning*, atau pembelajaran yang berfokus pada peserta didik yang menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik, menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik untuk dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat seperti kreativitas, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, keahlian teknis, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Melalui sistem *Student-Centered Learning* yang menghargai keunikan setiap individu peserta didik, baik dalam minat, bakat, pendapat serta cara dalam gaya belajarnya, setiap peserta didik disiapkan untuk dapat menghargai diri sendiri, orang lain dan perbedaan, menjadi bagian dari masyarakat yang demokratis, serta berwawasan global.

### **Apa Yang Dimaksud Dengan Student-Centered Learning?**

*Student-Centered Learning* adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Model pembelajaran ini berbeda dari model belajar *Instructor-Centered Learning* yang menekankan pada transfer pengetahuan dari guru ke murid yang relatif bersikap pasif. Dalam menerapkan konsep *Student-Centered Learning*, peserta didik diharapkan menjadi peserta yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggungjawab dan berinisiatif untuk

mengenali kebutuhan belajarnya, yang menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab pertanyaannya, dan yang membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya. Dalam batas-batas tertentu peserta didik dapat memilih sendiri apa yang akan dipelajarinya.

Dengan anggapan bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik, proses, materi dan metode belajar disesuaikan secara fleksibel dengan minat, bakat, kecepatan, gaya, serta strategi belajar dari setiap peserta didik. Tersedianya pilihan-pilihan bebas ini bertujuan untuk menggali motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya secara individu, bukan kebutuhan yang diseragamkan. Sebagai ganti proses transfer ilmu pengetahuan, peserta didik lebih diarahkan untuk belajar keterampilan belajar (*Learn how to learn*) seperti *problem solving*, berpikir kritis dan reflektif, serta keterampilan untuk bekerja dalam tim.

Dalam *Student-Centered Learning*, evaluasi bukan merupakan evaluasi standar yang berlaku untuk seluruh peserta didik, tetapi lebih bersifat individu sepanjang proses pendidikannya. Pembuatan portofolio bagi peserta didik merupakan salah satu bentuk evaluasi hasil belajar peserta didik sepanjang proses belajar. Peran serta guru, murid, serta orang tua peserta didik sangatlah dibutuhkan dalam merencanakan proses belajar maupun dalam merancang proses dan bentuk evaluasi.

### **Mungkinkah Pendidikan Kita Mengacu Pada *Student – Centered Learning*?**

Melihat kembali pada proses perkembangan seorang anak secara alami sebenarnya tiap anak memiliki potensi serta keinginan untuk belajar. Secara alami pula anak akan semakin suka belajar jika diberi kesempatan belajar seluas-luasnya seiring dengan kebutuhannya, bukannya dipaksakan oleh orang lain. Agar anak dapat terus mengembangkan motivasi untuk terus suka belajar, dunia pendidikan hanya perlu mempelajari dan mengadaptasi proses belajar alami yang dialami oleh setiap anak untuk dapat dikembangkan pula di sekolah.

Kalau diperhatikan pula, maka proses belajar alami ini lebih mengacu pada kebutuhan, minat, kemampuan serta gaya belajar dari anak itu sendiri sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan demikian, *Student-Centered Learning* adalah suatu langkah *back to basic*, yang mengembalikan cara belajar ke proses belajar alami dari setiap anak. Untuk kembali ke konsep dasar pendidikan yang mengacu pada peserta didik ini, tentunya cara berpikir para pendidik perlu direformasi, di samping beberapa faktor pendukung yang sangat diperlukan yang tentunya harus disesuaikan dengan makin meningkatnya kebutuhan sesuai dengan perkembangan usia, minat, ataupun kemampuan setiap peserta didik. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa faktor pendukung yang sangat diperlukan yang tentunya harus disesuaikan dengan makin meningkatnya kebutuhan sesuai dengan perkembangan usia, minat, ataupun kemampuan setiap peserta didik. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal utama yang perlu disiapkan meliputi sikap dan peranan pendidik, metode pembelajaran, akses terhadap sumber belajar, dan infrastruktur yang memunjang.

### ***Perubahan Sikap dan Peranan Pendidik***

Dalam konsep belajar *Instructor-Centered Learning*, pendidik memainkan peranan utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik. Pendidik harus mempersiapkan materi selengkap mungkin dan menerangkan secara searah. Peserta didik akan menerima secara pasif materi yang diberikan dengan mencatat serta menghafal. Dengan demikian, sumber belajar utama adalah pendidik. Dengan menerapkan konsep *Student-Centered Learning*, sebagian beban dari mempersiapkan serta mengkomunikasikan materi berpindah ke peserta didik yang harus pula berperan secara aktif. Pendidik bukan lagi tokoh sentral yang tahu segalanya. Namun, tidak berarti bahwa tugas pendidik menjadi lebih ringan atau tidak lagi penting. Pendidik tetap memainkan peran utama dalam proses belajar, tetapi bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Melalui berbagai metode seperti diskusi, pembahasan masalah-masalah nyata, proyek bersama, belajar secara kooperatif (*Cooperative Learning*), serta tugas-tugas mandiri, pendidik akan lebih dituntut menjadi

motivator, dinamisator, dan fasilitator yang membimbing, mendorong, serta mengarahkan peserta didik untuk menggali persoalan, mencari sumber jawaban, menyatakan pendapat, serta membangun pengetahuan sendiri. Dalam perubahan peranan ini, dibutuhkan kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi serta keterbukaan dari pendidik untuk dapat menjalin hubungan secara individu, untuk dapat mengerti serta mengikuti perkembangan dari masing-masing peserta didik, di samping tentunya wawasan yang luas dalam mengarahkan peserta didik ke sumber-sumber belajar yang dapat digali. Hati dan ilmu menjadi tuntutan bagi pendidik dalam menerapkan konsep *Student-Centered Learning*.

### ***Perubahan Metode Pembelajaran***

Jika seseorang berpikir bahwa ia sedang bersenang-senang ketika ia sedang belajar, maka ia akan lupa bahwa ia sedang belajar dan dengan sendirinya akan menikmati dan mendapatkan banyak manfaat (Burns, 1997). Ungkapan ini merupakan ungkapan yang sering terlupakan oleh pendidik. Penerapan kedisiplinan dan cara yang salah, kurikulum standar, dan sebagainya yang membuat anak tidak memiliki pilihan sendiri tentunya tidak akan membuat peserta didik merasa sedang bersenang-senang, karena tidak sesuai dengan apa yang disukainya. Beberapa metode pembelajaran yang mengacu pada belajar secara alamiah dan mengacu pada keunikan individu yang perlu dikembangkan antara lain adalah *collaborative learning*, *problem based learning*, *portfolio*, *team project*, *resource-based learning*. Metode-metode ini menekankan pada hal-hal seperti kerja sama tim, diskusi, jawaban-jawaban terbuka (*open-ended answer*), interaktivitas, pembuatan proyek nyata bukan hanya menghafal, serta belajar bagaimana cara belajar dan bukan hanya memperoleh ilmu pengetahuan.

### ***Akses Berbagai Sumber Belajar***

Untuk menunjang metode pembelajaran yang memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengenali permasalahan, serta menggali informasi sebanyak mungkin secara mandiri, akses informasi tidak boleh lagi dibatasi hanya pada guru, buku wajib serta perpustakaan lokal saja. Peserta didik perlu ditunjang dengan

akses tanpa batas ke berbagai sumber informasi lain seperti industri, organisasi sosial maupun profesi, media masa, para ahli dalam bidang masing-masing, bahkan dari masyarakat, keluarga, maupun sesama peserta didik. Perkembangan teknologi informasi bahkan memungkinkan tersedianya akses ke berbagai informasi global dari seluruh dunia, melalui akses ke perpustakaan maya (*virtual library*), museum maya (*virtual museum*), pangkalan-pangkalan data di jaringan komputer, atau bahkan memungkinkan untuk dapat berhubungan langsung dengan para ahli internasional.

### ***Penyediaan Infrastruktur Yang Menunjang***

Untuk mendukung perubahan serta kebutuhan yang diperlukan dalam menerapkan konsep *Student-Centered Learning* secara maksimal, perlu ada infrastruktur yang menunjang. Jaringan kerja sama antar institusi, baik institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan, secara nasional, regional maupun internasional akan sangat mendukung terbukanya kesempatan untuk belajar di luar batasan dinding sekolah atau budaya. Sehingga dapat lebih memperkaya pengertian akan perbedaan, sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan menjadi lebih tak terbatas. Fasilitas pendamping pendidikan seperti perpustakaan, museum sekolah, laboratorium, pusat komputer maupun layanan administrasi yang memudahkan, responsif, simpatik, serta mengacu pada kepuasan dan kebutuhan peserta didik, akan sangat mendukung terciptanya budaya *Student-Centered Learning*. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti komputer, telekomunikasi, dan jaringan baik dalam kampus maupun luar kampus seperti Internet, merupakan pendukung yang sangat penting dalam menunjang terciptanya fleksibilitas dalam memilih tempat dan waktu belajar, menghubungkan peserta didik dengan akses ke sumber belajar yang luas, kolaborasi serta komunikasi antar pendidik dan peserta didik, orang tua, sesama peserta didik maupun para ahli. Teknologi informasi yang memiliki kemudahan dalam hal komunikasi dan interaktivitas tanpa batasan waktu dan tempat, serta kemampuan multimedia yang sekaligus menampilkan teks, gambar, suara dan gerak, merupakan media yang menarik, baik bagi peserta didik anak-anak maupun dewasa.

## **Penutup**

Kebutuhan untuk menerapkan konsep *Student-Centered Learning* telah di depan mata, tetapi tidaklah mudah. Teori boleh berkembang tetapi praktiknya dapat menjadi lain. Banyak usaha penyangkalan, penolakan, maupun kekegetan akan dijumpai baik dari pihak peserta didik, pendidik, serta pihak-pihak lain terkait sebelum konsep ini dapat diterima dan dirasakan hasilnya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari banyak pihak untuk melakukan perubahan dalam banyak hal yang menyangkut kebijakan, kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur serta pendanaan. Sehingga dapat ditemukan bentuk yang paling tepat dalam mengembangkan konsep *Student-Centered Learning* untuk masing-masing institusi. Saling belajar dan menimba pengalaman antar institusi pendidikan merupakan juga salah satu usaha jaringan kerjasama untuk dapat memantapkan langkah.

## **Daftar Pustaka**

- Burns, (1997), *Multimedia as a Quality Solution*. Quality Progress. P.51-54.
- Colorado, Division of Student Affairs. *Culture of a Student-Centered Learning Environment*. <http://www.colorado.edu/sacs/stu-affairs/centered/concept.html>.
- Delors, (1996). *Belajar: Harta Karun Di Dalamnya: Laporan Kepada Unesco Dari Komisi Internasional Tentang Pendidikan Untuk Abad XXI*. Paris: Unesco.
- Eight Things That Can Be Done*. [http://www.ils.nwu.edu/~fe\\_for\\_e/nodes/NODE-284-pg.html](http://www.ils.nwu.edu/~fe_for_e/nodes/NODE-284-pg.html)
- Felder, M. and Brent, *Navigating the Bumpy Road to Student – Centered Instruction*. <http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/Resist.html>.
- Formal Education vs. Childhood Learning*. [http://www.ils.nwu.edu/~e\\_for\\_e/nodes/NODE-47-pg.html](http://www.ils.nwu.edu/~e_for_e/nodes/NODE-47-pg.html).

*The Goals of The Current Education System.* [http://www/ils.nwu.edu/~e\\_for\\_e/nodes/NODE-28-pg.html](http://www/ils.nwu.edu/~e_for_e/nodes/NODE-28-pg.html).

Rahardjo, Meilania and Nugraha, (1998). *Internet as an Alternative Media For Creating a Learning Society*. Surabaya: UK Petra.

*Student-Centered Learning: Selected Web Resources.* <http://elisp.nv.cc.va.us/sci.html>.

*Top Ten Minstake in Education.* [http://www.ils.nwu.edu/~e\\_for\\_e/nodes/NODE-283-pg.html](http://www.ils.nwu.edu/~e_for_e/nodes/NODE-283-pg.html).

*What is Student Centered Learning?* <http://athena.wednet.edu/curric/weather/adptcty/stcmtr.html>.

*Why Schools Fail to Teach Our Children.* [http://www.ils.nwu.edu/~e\\_for\\_e/nodes/NODE-40-pg.html](http://www.ils.nwu.edu/~e_for_e/nodes/NODE-40-pg.html).

## **10. INTERAKTIVITAS DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH MELALUI MEDIA**

---

Dewi Padmo Putri

### **Pendahuluan**

Sistem pendidikan jarak jauh (SPJJ) dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai sistem pendidikan *darurat* yang dibutuhkan hanya karena desakan keadaan, melainkan karena tuntutan zaman. Kini, pendidikan jarak jauh telah menjadi kecenderungan yang cukup *trendy*, yang diminati, dicari dan dibutuhkan. Di Indonesia kecenderungan tersebut mulai terlihat jelas dengan munculnya gagasan pengembangan *dual mode university* pada beberapa universitas negeri yang memiliki kredibilitas tinggi seperti ITB dan UI. Di sisi lain, merupakan sebuah realita bahwa *interaksi* antara pengajar dan atau pengelola dengan peserta didik dalam pendidikan jarak jauh acapkali menjadi kendala. Padahal interaksi dalam proses belajar mengajar ini merupakan sebuah kebutuhan yang memungkinkan peserta didik mengetahui hasil belajar yang telah mereka tempuh, kesalahan yang mereka lakukan, dan perbaikan yang perlu mereka lakukan serta hal lain yang memerlukan proses interaksi. Hal ini sangat disadari oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan jarak jauh, mengingat salah satu karakteristik pendidikan jarak jauh adalah *adanya keterpisahan antara pengajar dan peserta didik* (Keegan, 1991).

Dari waktu ke waktu, isu mengenai kebutuhan akan proses belajar yang bersifat interaktif selalu menjadi bahan pemikiran. Dewasa ini isu tersebut semakin terbuka selaras dengan semakin tingginya tuntutan terhadap kualitas pelayanan pendidikan jarak jauh. Proses belajar-mengajar yang bersifat interaktif, yang dipercaya

mampu memberikan nilai tambah pada kualitas pendidikan jarak jauh, semakin dituntut dan menjadi prasyarat. Bahkan Bates (1995) melalui konsep *ACTION* (*Access, Cost, Teaching functions, Interactivity, Organizational issues, Novelty, Speed*) mengemukakan pentingnya mempertimbangkan aspek kemampuan interaktif dari media yang akan digunakan. Latar belakang tersebut mendorong penulis untuk menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan proses interaktif dalam kegiatan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh, yang mencakup pengertian, jenis, dan kadar interaksi yang dibutuhkan, bagaimana media yang telah dikenal sebagai alat penghantar bahan ajar mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut, serta sejauhmana dan bagaimana para pengelola pendidikan jarak jauh mampu mengakomodasi proses belajar mengajar interaktif ?

## **Proses belajar mengajar interaktif dalam SPJJ**

### ***Pengertian interaktif***

Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, banyak teori belajar yang menggarisbawahi pentingnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Bates (1995) menandakan bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak cukup hanya dengan mendengar, melihat atau membaca saja, peserta didik harus pula melakukan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajarannya, yang menunjukkan bahwa mereka memahami materi yang dipelajari. Keaktifan siswa dapat dicerminkan dalam kemampuannya untuk memberikan respon terhadap bahan ajar dengan cara tertentu. Sebaliknya, pengajar harus membangkitkan kemampuan peserta didik untuk bersikap aktif serta memberikan umpan balik. Kondisi seperti ini tentu membutuhkan adanya suatu proses interaktif yang timbal balik. Armstrong (1990), Rafaeli (1988), dan Tucker (1989) sependapat bahwa proses belajar mengajar yang bersifat interaktif adalah suatu kebutuhan. Interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan motivasi dan ketertarikan peserta didik terhadap suatu subjek, selain itu juga mampu meningkatkan ketajaman dan daya ingat terhadap informasi yang disampaikan.

Dalam sistem pendidikan tatap muka, proses pembelajaran yang bersifat interaktif umumnya tidak menjadi masalah, sebaliknya dalam SPJJ hal ini jauh lebih sulit. Proses interaktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh harus mampu menjembatani kendala jarak, ruang dan waktu. Dalam proses pembelajaran pada SPJJ, kata interaktif tidak hanya sekedar diartikan sebagai komunikasi antara dua orang tetapi digunakan dalam arti yang lebih luas dan bervariasi (Mason, 1994). Misalnya, penggunaan *Computer Based Training* (CBT) dan video interaktif umumnya dikaitkan dengan sifat interaktif; peserta didik dapat menghentikan atau memulai program tersebut sesuai dengan keinginan, menggunakan program tersebut sesuai dengan kecepatan mereka, dan bahkan dapat memilih jalur belajar yang berbeda dalam menguasai bahan ajar. Bahan ajar cetak pun dapat dikategorikan sebagai bahan ajar yang interaktif apabila ditulis dengan menggunakan *bahasa percakapan yang bersifat personal* dan menyertakan pertanyaan-pertanyaan dengan sejumlah jawaban. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa kemampuan menuangkan materi ajar kedalam media/teknologi yang dipilih memegang peranan penting untuk mengakomodasi sifat interaktif dalam proses belajar mengajar pada SPJJ. Media/teknologi memiliki peran yang tidak sedikit mengingat masing-masing media/teknologi mempunyai perbedaan, baik dari segi kelemahan maupun keunggulannya, dalam mengakomodasi sifat interaktif dalam proses pembelajaran.

Berkaitan dengan proses pembelajaran interaktif dalam SPJJ, Moore (1989) mendiskusikan tiga jenis interaksi yang sangat esensial yaitu interaksi antara peserta didik-pengajar, peserta didik-bahan ajar, dan peserta didik-peserta didik. Interaksi antara peserta didik dengan pengajar memungkinkan pemberian motivasi, umpan balik dan dialog di antara keduanya. Interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar adalah interaksi yang terjadi untuk memperoleh informasi dari bahan ajar. Sementara interaksi antara peserta didik dengan peserta didik terjadi sebagai forum tukar pendapat, tukar informasi atau ide dan dialog di antara mereka yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Didasari pemikiran Moore mengenai jenis interaksi yang dapat diakomodasi dalam proses belajar mengajar pada SPJJ, Bates (1995) mengemukakan dua jenis interaksi yang dapat diwujudkan dalam kegiatan

pembelajaran jarak jauh: *pertama* interaksi yang bersifat individual atau *isolated activity* (interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar), dan *kedua* adalah interaksi sosial atau *social activity* (interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih, misalnya peserta didik dengan tutor; peserta didik dengan peserta didik, mengenai bahan ajar yang tengah dipelajari). Jenis interaksi yang dikemukakan oleh Bates (1995) dan Moore (1989) ini merupakan sebuah konsep yang cukup mendasar yang bila dikaitkan dengan pemanfaatan media dapat diterjemahkan kedalam sejumlah pemikiran yang mungkin dapat diterapkan dalam SPJJ.

### **Pengakomodasian Proses Interaksi Individual Melalui Media**

Dalam SPJJ, interaksi individual antara peserta didik dengan bahan ajar merupakan hal yang *tidak mudah* sekaligus *tidak murah*. Pengertian "tidak mudah dan tidak murah" ini berkaitan dengan usaha dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menciptakan interaksi antara peserta didik dan bahan ajar dengan rancangan khusus. Rancangan bahan ajar yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bahan ajar yang dituangkan pada media yang *secara teknis mampu* mengakomodasi adanya interaksi tetapi juga pada media yang *secara teknis tidak memiliki kemampuan* tersebut.

#### **Media Cetak**

Media cetak sebagai media yang relatif murah dan dikenal mampu menyampaikan berbagai bahan ajar, umumnya diasumsikan sebagai media yang tidak mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan peserta didik. Apakah asumsi terhadap media cetak tersebut sudah menjadi harga mati yang tidak dapat diubah? Dalam kadar tertentu, apabila kita mau melihat secara jeli, asumsi tersebut dapat berubah. Melalui rancangan khusus, media cetak juga mampu menjadi media yang memiliki sifat interaktif. Sudah tentu untuk itu diperlukan kemampuan untuk merancang dan menulis bahan ajar cetak yang dapat mengakomodasi sifat interaktif ini. Sama halnya dengan proses pembelajaran di dalam kelas, diperlukan keterampilan mengajar seperti keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, membuka dan

menutup kelas. Bates (1995), Holmberg (1983), dan Mason (1994) mengemukakan bahwa interaksi antara peserta didik dan bahan ajar dapat diciptakan melalui *simulated guided conversation*, percakapan simulasi, yang dituangkan dalam bahan ajar. Interaksi tersebut dapat berbentuk pertanyaan-pertanyaan beserta umpan baliknya, atau meminta peserta didik untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajarinya, dan teknik-teknik lain yang dapat melibatkan peserta didik untuk bersikap aktif. Peranan desainer atau pengembang bahan ajar cetak dalam menggunakan teknik "percakapan simulasi", sangat penting untuk dapat memunculkan adanya interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar.

### ***Kombinasi Media Cetak dan Non Cetak***

Proses belajar interaktif juga dapat dirancang dengan mengombinasikan dua jenis media yang secara fisik dikenal sebagai media yang tidak memiliki fungsi interaktif, misalnya media cetak dengan media audio. Kombinasi keduanya dapat dilakukan untuk memunculkan interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar. Keduanya, baik media cetak maupun audio dapat secara bergantian berperan sebagai *pemberi arahan* kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu, sebagai *pemberi umpan balik* terhadap usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik, *penguatan* ataupun sebagai penyampai materi pokok (Rowntree, 1994). Kombinasi media cetak dan non cetak yang mampu menghadirkan proses interaksi adalah model *listening and looking* dan model *listening, looking and doing* yang dikemukakan oleh Rowntree (1994). Pada model pertama, peserta didik dimungkinkan untuk melihat atau membaca teks dan secara bersamaan mendengarkan audio kaset, hubungan keduanya dapat digunakan untuk memberikan penguatan, respon, pertanyaan atau alternatif jawaban. Sedangkan pada model kedua, *listening, looking and doing*, selain mendengar dan melihat, diperkaya dengan mengerjakan sesuatu. Kedua model kombinasi tersebut memungkinkan interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar mempunyai kadar yang cukup tinggi. Posisi media audio tentu saja secara otomatis dapat diganti dengan media lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik materi yang akan disampaikan, misalnya video atau

media non cetak lain. Walaupun bukan merupakan interaksi langsung dua arah, setidaknya kombinasi keduanya dapat menghadirkan adanya interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar dalam kadar intensitas tertentu.

### ***Media Komputer***

Bentuk interaksi lain antara peserta didik dengan bahan ajar yang dapat dihadirkan dalam proses pembelajaran pada SPJJ adalah menggunakan media yang memang memiliki kemampuan interaktif. Interaksi yang terjadi sangat bergantung pada kemampuan media itu sendiri untuk dapat menghadirkan fungsi interaktif dengan peserta didik. Kemajuan teknologi yang luar biasa telah menciptakan sebuah media yang memiliki kemampuan berinteraksi yang tinggi yaitu komputer. Bahan ajar berbantuan komputer sangat potensial untuk menciptakan adanya interaksi. Heinich, et.al (1996) mengemukakan sejumlah bentuk interaksi yang dapat dimunculkan melalui media komputer seperti penyajian praktek dan latihan, tutorial, permainan, simulasi, penemuan dan pemecahan masalah. Penyajian program komputer tersebut pada dasarnya mampu menghadirkan interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar. Melalui rancangan tertentu, peserta didik dimungkinkan untuk memberikan respon, menerima umpan balik, mempelajari materi yang lebih disukai lebih dahulu, menerima koreksi, mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan memperoleh penguatan yang memadai. Dengan teknologi yang dimiliki, media komputer mampu menyajikan proses belajar yang bersifat interaksi dengan *kadar yang lebih tinggi*.

### ***Interaksi Sosial Melalui Media***

Jenis interaksi lain yang dapat dihadirkan dalam SPJJ adalah interaksi antara peserta didik dengan tutor atau antara peserta didik dengan peserta didik. Interaksi antara peserta didik dengan tutor dapat dilakukan dengan berbagai media. Mulai dari media yang paling sederhana sampai kepada bentuk interaksi yang canggih. Interaksi sederhana yang dapat dilakukan dalam SPJJ adalah melalui korespondensi surat, namun cara ini dinilai lambat dan mengalami banyak kendala. Seiring dengan kemajuan

teknologi komunikasi, kendala dalam menciptakan interaksi dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan jarak jauh dapat dikurangi. Teknologi komunikasi yang berkembang telah memungkinkan pendayagunaan media yang telah ada sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dua arah secara langsung dan fleksibel. Kemampuan tersebut telah memacu para praktisi pendidikan jarak jauh untuk memanfaatkan media berteknologi tinggi. Media telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam SPJJ ini dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain: siaran radio/televisei interaktif, *Audio teleconferencing* (telekonferensi audio), *Video teleconferencing* (telekonferensi video) dan *Computer teleconferencing* (telekonferensi komputer).

### ***Radio/Televisei Interaktif***

Televisei dan radio pada awalnya dikategorikan sebagai media yang tidak mampu menciptakan interaksi, namun dengan perkembangan teknologi memungkinkan adanya interaksi. Media televisei dan radio interaktif ini dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi adanya interaksi antara peserta didik dengan tutor. Melalui tutorial yang dijadwalkan, peserta didik dapat melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi pelajaran. Tutor dan peserta didik berada di tempat yang berbeda tetapi harus dalam waktu yang sama.

### ***Telekonferensi Audio***

Telekonferensi audio mampu menjembatani pertemuan antar individu atau kelompok yang berada pada lokasi yang berbeda, pada saat yang bersamaan. Dalam SPJJ kegiatan ini terjadi untuk mempertemukan peserta didik baik dalam bentuk kelas atau kelompok yang lebih kecil dengan kelompok lain atau narasumber. Komunikasi dua arah yang terjadi dalam telekonferensi audio umumnya dilakukan secara langsung dengan menggunakan saluran telepon maupun satelit. Untuk telekonferensi yang menghubungkan satu narasumber dan satu kelompok, maka peralatan yang dibutuhkan adalah telepon biasa untuk narasumber, dan *speaker* telepon untuk kelompok. Sementara untuk menghubungkan dua atau lebih kelompok peserta konferensi dibutuhkan peralatan *amplifier microphone* khusus pada tiap lokasi.

Peralatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa suara yang didengar cukup jelas. Selain itu dibutuhkan pula peralatan yang disebut dengan *bridge* yang merupakan sistem elektronik yang menghubungkan suara dari seluruh lokasi yang mengikuti konferensi tersebut, menyelaraskan level suara, memfilter gangguan-gangguan dan memperhatikan masalah tidak tersambungnya hubungan telepon.

Pemanfaatan telekonferensi audio dalam SPJJ dilakukan dengan berbagai macam sistem. Olgren dan Parker (1983) mengamati bahwa ada berbagai macam sistem pemanfaatan telekonferensi audio, tetapi sistem yang paling umum digunakan adalah: (1) konferensi terselenggara karena peserta berinisiatif menelpon (*user-initiated conference calls*), (2) peserta konferensi dihubungi oleh operator (*operator-initiated*), (3) konferensi audio yang diselenggarakan dengan sistem yang mempersilahkan para peserta untuk *mengontak atau menelpon* penyelenggara konferensi (*dial-in or meet-me teleconferencing*), dan (4) jaringan audio yang khusus diperuntukan untuk konferensi audio (*dedicated audio networks*).

Kadar interaksi yang terjadi dalam telekonferensi audio mempunyai nilai cukup tinggi, karena interaksi antara peserta didik dengan tutor atau peserta didik yang lain dapat terjadi secara langsung dan fleksibel. Suara tutor ataupun peserta didik mampu memunculkan itu rasa kehadiran atau *sense of presence* (Mason, 1994). Kendala penyelenggaraan telekonferensi audio akan terasa bila memiliki banyak peserta sehingga sulit untuk membedakan suara satu dengan suara lain. Untuk mengatasi masalah ini, biasanya setiap pembicara diminta menyebutkan nama terlebih dahulu setiap akan mulai bicara. Hal ini agak janggal yang menimbulkan kesan dan suasana formal tetapi setelah satu dengan yang lain mulai mengenali masing-masing suara, situasi formal tersebut akan berangsur menghilang.

### ***Telekonferensi Video***

Komunikasi interaktif melalui suara dan gambar dikenal sebagai media dengan slogan-slogan seperti *better than being there* atau *as good as being there* (Mason, 1994). Kehadiran gambar para

peserta dalam konferensi ini mampu memperkuat rasa kebersamaan atau *social presence*.

Dalam penyelenggaraannya, telekonferensi video memerlukan sejumlah peralatan baik di kedua lokasi pengirim maupun penerima seperti kamera, mikrofon, monitor atau peralatan *recorder* yang diperlukan. Jenis peralatan lain yang sangat dibutuhkan adalah peralatan transmisi dua arah. Peralatan transmisi dua arah ini sangat beragam, mulai dari *fiber optics*, *cable*, *microwave*, *satellite* atau kombinasi dari peralatan-peralatan tersebut (Heinich et.al., 1996). Sebagai sarana komunikasi dua arah dibutuhkan peralatan komunikasi dua arah atau *talkback device* yaitu telepon.

Penyelenggaraan konferensi video dua arah pada umumnya dilakukan dengan menggunakan gambar yang bergerak secara utuh atau *full motion video pictures*. Selain membutuhkan biaya yang tinggi, secara teknis pelaksanaan kegiatan konferensi video ini lebih sulit dibandingkan dengan penggunaan gambar diam. Saluran *signal* yang dibutuhkan pada penyelenggaraan konferensi video dengan gambar yang bergerak, pada dasarnya sama luasnya dengan *signal* yang digunakan pada penyelenggaraan siaran televisi. Sementara apabila video yang ditransmisikan hanya berupa gambar diam, maka hanya diperlukan signal yang lebih pendek dan dapat ditransmisikan melalui saluran telepon.

Munculnya sebuah teknologi *compressed video* memberikan peluang pelaksanaan konferensi video dengan biaya yang lebih murah. Teknologi *compressed video* hanya mentransmisikan informasi visual yang memiliki gerakan. Dengan kemampuan yang demikian, maka informasi visual dapat dipadatkan dan disalurkan melalui saluran telepon. Dari segi biaya penyelenggaraan *compressed video* ini hanya memerlukan 1/10 dari biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan saluran yang lebih luas. Apabila kendala biaya dalam penyelenggaraan video konferensi tidak menjadi masalah, tentu saja penyelenggaraan konferensi video dengan gerakan gambar video penuh merupakan sebuah penyelenggaraan konferensi yang lebih baik dan menarik.

### **Telekonferensi Komputer**

Telekonferensi komputer oleh Mason (1994) diartikan sebagai bentuk komunikasi tertulis yang tersimpan secara terpusat dan dapat diakses oleh kelompok pengguna setiap saat, dan di manapun, selama terdapat akses terhadap peralatan yang diperlukan. Berbeda dengan konferensi audio dan video yang bersifat *synchronous*, telekonferensi komputer bersifat *asynchronous* (walaupun setiap pengguna dapat membaca dan menuliskan pesan yang diinginkan setiap saat tetapi mereka tidak perlu berada didepan komputer pada waktu yang bersamaan). Selain memiliki fleksibilitas dalam waktu penggunaannya, konferensi komputer ini juga memungkinkan setiap peserta dapat memperoleh informasi mengenai partisipan lain, daftar konferensi yang dapat diikuti, tanggal terakhir membuka komputer *log on*, memiliki kemampuan untuk mencari informasi atau pesan tertentu.

Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh media komputer, penggunaan telekonferensi komputer dalam pendidikan cukup beragam. Mason (1994) mengategorikan tiga bentuk penggunaan telekonferensi komputer dalam SPJJ yaitu: (1) sebagai media *optional/pilihan* atau tambahan, (2) dikombinasikan dengan media lain, dan (3) sebagai media utama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sebagai *media pilihan* atau *tambahan*, penggunaan telekonferensi komputer ini umumnya dimanfaatkan oleh SPJJ pada tingkat pendidikan tinggi sebagai sarana tutorial.

Penggunaan lain *computer conferencing* dalam SPJJ adalah sebagai *media yang dikombinasikan dengan media lain*. *Computer conferencing* digunakan untuk menyampaikan sebagian dari materi pembelajaran, dan selebihnya disampaikan melalui media lain, misalnya dalam bentuk bahan cetak, atau bahkan dalam bentuk *audioconferencing* atau *videoconferencing*. Kombinasi seperti ini sangat dimungkinkan mengingat setiap jenis media memiliki karakteristik yang berbeda yang sesuai untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan karakteristik tertentu. Misalnya dalam pelajaran bahasa asing, yang biasanya mensyaratkan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Keterampilan menulis dapat dilatih melalui *computer conferencing*, sementara keterampilan berbicara dapat dilakukan melalui *audioconferencing*.

Kombinasi keduanya merupakan sebuah kombinasi yang efektif yang dapat digunakan oleh tutor ataupun para peserta didik untuk memberi komentar atau tanggapan antara satu dengan yang lain secara tertulis maupun lisan. Dengan semakin meningkatnya akses terhadap peralatan komputer di berbagai negara, maka pemanfaatan komputer sebagai penyampai materi pembelajaran dalam SPJJ semakin meningkat. Penggunaan *computer conferencing* ini umumnya difokuskan pada kegiatan diskusi atau seminar.

Walaupun ditemukan sejumlah keluhan dalam pemanfaatan konferensi komputer, peserta didik juga merasakan nilai positif mengenai keikutsertaannya dalam konferensi komputer. Mason (1994) mencatat beberapa pemikiran positif mengenai konferensi komputer, antara lain:

- Konferensi komputer menciptakan peran peserta didik sangat besar baik dalam melemparkan isu-isu dan memberikan tanggapan maupun argumentasi. Tutor dalam hal ini hanya memberikan arahan, sehingga permasalahan yang muncul pada akhirnya diselesaikan sendiri oleh para peserta didik.
- Konferensi komputer memacu terjadinya diskusi yang serius dan proses pembelajaran yang bersifat partisipatif.
- Konferensi komputer merupakan alat pembelajaran kelompok yang dapat mengekspresikan proses belajar tiap individual. Proses belajar individual yang terlihat adalah tumbuhnya kemampuan individu untuk memberikan apresiasi terhadap pendapat orang lain.

Mason (1994) mengemukakan bahwa pada kelompok kecil yang menggunakan ketiga jenis telekonferensi tersebut, terlihat frekuensi dan kualitas interaksi yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok besar. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi bukan merupakan karakteristik dari media atau teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana mengaplikasikan media/teknologi tersebut.

## **Penutup**

Proses pembelajaran interaktif yang semakin dituntut dalam penyelenggaraan SPJJ pada dasarnya dapat dicapai melalui pemanfaatan berbagai jenis media, baik media sederhana (seperti media cetak yang sangat umum digunakan, kombinasi media cetak dengan media non cetak) sampai kepada media yang memiliki teknologi yang cukup tinggi (seperti komputer). Masing-masing media dan teknologi memerlukan penanganan dan rancangan khusus untuk dapat menghadirkan interaktifitas dalam proses pembelajaran. Kualitas interaksi yang dapat dihadirkan melalui masing-masing media tidak hanya bergantung pada jenis media/teknologi yang digunakan melainkan terletak pada bagaimana perancangan dan penerapannya.

## **Daftar Pustaka**

- Armstrong, B. (1990). STARNET: Interactive Training by Satellite, *Educational and Training Technology International*, Volume 27,3, 249-53
- Bates, T. (1995). *Technology, Open Learning and Distance Education*. New York: Routledge
- Heinich,R., Molenda,M., Russell, Smaldino,S. (1996). *Instructional Media and Technologies for Learning*. New Jersey: Prentice Hall.
- Keegan, D. (1991). *Foundations of Distance Education*. Great Britain: Biddles Ltd.
- Olgren, C.H., dan Paker, L.A. (1983). *Teleconferencing Technology and Applications*, Norwood,M.A:Cambridge University Press.
- Mason,R.. (1994). *Using Communications Media in Open dan Flexible Learning*. London: Kogan Page.
- Moore, M.G. (1989). Three Types of Interaction. *The American Journal of Distance Education* 1(2), 1-5.

- Rafaeli, S. (1988). Interactivity: From New Media to Communication, in Hawkins, R., Weimann, J. and Pingree, S (eds). *Advancing Communication Science: Merging Mass and Interpersonal Processes*. Newbury Park, CA: Sage.
- Rowntree, D. (1994). *Teaching With Audio in Open and Distance Learning*. London: Kogan Page.
- Tucker, R (ed). (1989). *Interactive Media: The Human Issues*, London: Kogan Page.

## **11. MENUMBUHKAN DAN MEMELIHARA MOTIVASI: SUATU UPAYA UNTUK MEMPERTINGGI PERSISTENSI MAHASISWA**

---

Siti Julacha

### **Pengantar**

Dalam kehidupan sehari-hari motivasi memegang peranan penting. Tanpa adanya motivasi orang tidak akan melakukan sesuatu. Orang yang memiliki motivasi untuk memiliki suatu pekerjaan akan selalu berusaha untuk mencari pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki motivasi untuk bekerja tidak akan melakukan apapun untuk memperoleh suatu pekerjaan apalagi menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu pula dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan untuk berperan serta dalam proses belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Motivasi penting bagi setiap jenis proses belajar karena motivasi akan mendorong individu bekerja keras agar berhasil dalam belajarnya.

Dalam sistem belajar jarak jauh, motivasi memegang peranan penting karena mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan berusaha untuk mengatur waktu dan jadwal belajar secara optimal sehingga mereka dapat menguasai materi mata kuliah yang dipelajarinya. Belajar mandiri tidak berarti mahasiswa belajar sendiri. Mahasiswa dapat belajar dalam kelompok, mengikuti tutorial, pergi ke perpustakaan, mendengarkan siaran radio atau televisi serta memanfaatkan sumber belajar yang lain. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan belajar.

Dalam pendidikan konvensional, motivasi belajar mahasiswa dapat ditumbuhkan dan dipelihara oleh guru. Melalui penyajian atau pembahasan materi pelajaran yang menarik, bermanfaat, dan cukup menantang, mahasiswa akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam sistem belajar jarak jauh kehadiran guru digantikan oleh bahan ajar yang dapat dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan dan memelihara motivasi belajar mahasiswa dalam sistem belajar jarak jauh perlu dikembangkan bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan cukup menantang untuk dipelajari oleh mahasiswa.

Sesungguhnya pengembang bahan ajar dan tutor tidak dapat memotivasi mahasiswa secara langsung. Tetapi, pengembang bahan ajar atau tutor dapat mengembangkan atau menciptakan lingkungan belajar yang dapat membangkitkan semangat mahasiswa agar tertarik dan terlibat dalam kegiatan belajar dan melakukan yang terbaik. Motivasi itu ibarat bara, dapat padam tetapi dapat juga berkobar. Tugas pengembang bahan ajar dan tutor adalah menumbuhkan dan memelihara motivasi mahasiswa agar mereka tetap bersemangat untuk belajar.

Berkenaan dengan hal tersebut, uraian berikut akan menyajikan pengembangan pembelajaran dalam sistem belajar jarak jauh yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa secara efektif. Uraian tersebut akan didahului dengan pembahasan tentang pengertian motivasi belajar, peranan motivasi dalam proses belajar, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar.

### **Pengertian Motivasi Belajar**

Kata "motivasi" digunakan untuk menjelaskan suatu dorongan, kebutuhan, atau keinginan untuk melakukan sesuatu (Slavin 1991); Jadi, motivasi adalah sesuatu yang mendorong dan mengarahkan individu untuk melakukan sesuatu. Konsep motivasi berhubungan dengan alasan orang melakukan apa yang mereka kerjakan. Jawaban atas pertanyaan, seperti: mengapa seseorang melanjutkan pendidikannya, mengapa dia melakukan olah raga

setiap hari, mengapa seorang anak pergi ke kebun binatang, berhubungan dengan konsep motivasi.

Brophy (1987) mendefinisikan motivasi belajar sebagai *a general state* dan sebagai *a situation-specific state*. Dalam pengertian sebagai *a general state*, motivasi belajar adalah suatu watak yang permanen yang mendorong seseorang untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam suatu kegiatan belajar. Sebagai *a situation-specific state*, motivasi belajar muncul apabila keterlibatan individu dalam suatu kegiatan tertentu diarahkan oleh tujuan memperoleh pengetahuan atau menguasai keterampilan yang diajarkan. Pengertian ini senada dengan pendapat McCombe (1991) yang menyatakan bahwa motivasi belajar adalah kemampuan internal yang terbentuk secara alami yang dapat ditingkatkan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberikan dukungan, memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan, memberikan tanggung jawab untuk mengontrol proses belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi.

### **Peranan Motivasi Dalam Proses Belajar**

Secara umum, Wlodkowski (1985) mengemukakan bahwa motivasi dapat menyebabkan timbulnya suatu tingkah laku, memberikan arah dan tujuan bertingkah laku, memungkinkan suatu tingkah laku berlangsung terus, dan mengarahkan pada pemilihan suatu tingkah laku tertentu. Motivasi penting dalam proses belajar. Bahkan Slavin (1991) menyatakan bahwa motivasi merupakan salah satu prasyarat yang paling penting dalam belajar. Bila tidak ada motivasi, proses belajar tidak akan terjadi. Motivasi dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar.

Motivasi yang dimiliki dan dibawa individu ke dalam lingkungan belajar berpengaruh kuat terhadap apa dan bagaimana mereka belajar (Wlodkowski, 1985). Winnie dan Marx (1989) menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu proses dan hasil dari suatu proses belajar. Sebagai suatu proses, motivasi adalah suatu kondisi dari suatu proses pembelajaran. Bila mahasiswa memiliki motivasi selama proses belajar, segala kegiatan akan berjalan lancar, komunikasi berlangsung tanpa hambatan, dan kecemasan

akan menurun. Sebagai suatu hasil, motivasi merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang menarik, bermanfaat, dan cocok bagi mahasiswa akan meningkatkan keterlibatan dan usaha mahasiswa dalam melaksanakan tugas belajar. Bila mahasiswa mengikuti pengalaman belajar yang menarik dan bermanfaat, mereka akan berminat terhadap materi yang akan dipelajari dan terdorong menggunakan apa yang telah dipelajarinya.

### **Faktor-Faktor Yang Dapat Meningkatkan Motivasi Belajar**

Wlodkowski (1985) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu sikap (*attitudes*), kebutuhan (*needs*), rangsangan (*stimulation*), emosi (*affects*), kemampuan (*competencies*), dan penguatan (*reinforcement*).

*Sikap* adalah kombinasi antara konsep, informasi, dan emosi yang menyebabkan kecenderungan individu untuk mereaksi senang atau tidak senang terhadap orang, kelompok, ide, kejadian atau objek-objek tertentu. Sikap mahasiswa terhadap tutor, materi dan situasi belajar, dirinya sebagai mahasiswa, dan terhadap harapannya untuk berhasil, mempengaruhi proses belajar. Oleh karena itu, tugas pengembang pembelajaran adalah mengembangkan bahan ajar dan tutorial yang dapat membuat mahasiswa menyukai dan menghargai tutor dan mata kuliah, serta memiliki rasa percaya diri bahwa mereka akan berhasil dalam menangani tugas-tugas belajar.

*Kebutuhan* adalah suatu kondisi kekurangan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan (Wlodkowski, 1985). Semakin kuat mahasiswa merasakan suatu kebutuhan, semakin besar usaha yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bahan ajar dan tutorial yang efektif adalah bahan ajar dan tutorial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa.

*Rangsangan* adalah segala perubahan dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang menyebabkan individu menjadi aktif (Wlodkowski, 1985). Semakin menarik dan

bermanfaat suatu kegiatan semakin aktif mahasiswa terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan memperhatikan faktor ini, pengembang pembelajaran harus mengembangkan bahan ajar dan tutorial yang dapat menarik perhatian mahasiswa, membangun minat mereka, dan melibatkan mereka dalam proses belajar.

*Emosi* mengacu pada pengalaman individu selama proses belajar. Emosi dapat merupakan pendorong intrinsik. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan emosi mahasiswa dalam proses belajar adalah penting untuk memelihara motivasi belajar mereka. Oleh karena itu, tugas pengembang pembelajaran adalah memelihara suasana emosi untuk meningkatkan keterlibatan emosi mahasiswa dalam belajar. Pengembang pembelajaran yang efektif selalu melihat keharmonisan antara emosi dan pikiran sebagai tenaga pendorong mahasiswa untuk tetap aktif belajar.

*Kemampuan* mengacu kepada kemampuan individu untuk merespon sebagai hasil belajar (Perlmutter & Hall, 1992). Mahasiswa akan merasa memiliki kemampuan apabila mereka menyadari bahwa mereka telah mencapai tingkat pengetahuan atau keterampilan tertentu yang sesuai dengan standar pribadi atau sosial. Berkenaan dengan hal ini, pengembang pembelajaran hendaknya mengembangkan bahan ajar dan tutorial yang memungkinkan mahasiswa memperoleh kemampuan tertentu. Motivasi belajar mahasiswa akan meningkat apabila proses belajar meningkatkan kesadaran mereka akan kemajuan, penguasaan, dan tanggung jawab dalam belajar.

*Penguatan* adalah segala kegiatan yang memelihara dan meningkatkan kemungkinan untuk merespon lebih lanjut (Wlodkowski, 1985). Semakin tepat proses belajar memberikan penguatan terhadap tingkah laku mahasiswa, semakin meningkat motivasi belajar mahasiswa.

Sementara Wlodkowski mengemukakan enam faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memotivasi, Keller dalam (Hirumi & Bower, 1991) menyarankan bahwa, untuk memotivasi individu,

pengembang pembelajaran harus mengembangkan proses pembelajaran yang:

1. menarik perhatian individu (*Attention*);
2. berhubungan dengan kebutuhan individu (*Relevance*);
3. meningkatkan keyakinan diri individu mengenai kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan berhasil (*Confidence*); serta
4. memberikan kepuasan dengan terpenuhinya harapan mereka dan dengan memberikan balikan yang sesuai (*Satisfaction*).

Keller menggambarkan keempat kategori tersebut *dalam model ARCS (Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction)*.

*Attention* (perhatian) merupakan elemen motivasi dan juga merupakan prasyarat untuk belajar. Oleh karena itu, tugas pertama pengembang pembelajaran adalah menarik perhatian mahasiswa. Semakin menarik suatu proses pembelajaran, semakin kuat keingintahuan mahasiswa. Namun demikian, menarik perhatian tidaklah cukup. Pengembang pembelajaran hendaknya mengembangkan pembelajaran yang tidak saja menarik, tetapi juga mampu memelihara perhatian mahasiswa.

*Relevance* (kesesuaian) mengacu pada persepsi individu tentang pemuasan kebutuhan pribadi dalam hubungannya dengan pembelajaran (Wlodkowski, 1985). Berdasarkan kondisi ini, pengembang pembelajaran sebaiknya mengembangkan aktivitas pembelajaran yang membantu mahasiswa melihat kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kehidupan pribadi dan profesi mereka. Jika mahasiswa melihat hubungan antara apa yang dipelajari dengan tujuan mereka, mereka akan termotivasi untuk terlibat dalam proses belajar.

*Confidence* (keyakinan diri) berhubungan dengan sikap individu terhadap keberhasilan dan kegagalan. Keyakinan diri mahasiswa berpengaruh terhadap tingkah laku mereka. Semakin yakin mahasiswa berpikir bahwa mereka akan berhasil dalam proses belajar, semakin kuat usaha yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keyakinan mahasiswa, pengembang pembelajaran sebaiknya menyajikan persyaratan-persyaratan penguasaan dan kriteria evaluasi untuk

membantu mahasiswa memperkirakan kemungkinan keberhasilan. Menyediakan balikan dan kesempatan untuk mengontrol juga membantu mahasiswa membuat hubungan antara keberhasilan dan usaha.

*Satisfaction* (kepuasan) mengacu pada perasaan senang individu terhadap penguasaan mereka. Kepuasan ini penting untuk memelihara motivasi. Jika hasil usaha mahasiswa sesuai dengan harapan mereka dan jika mereka merasa senang akan hasil yang diperoleh, mereka mungkin akan terus termotivasi untuk terlibat dalam proses belajar (Keller, 1984; Keller & Suzuki, 1988). Apa yang dapat dilakukan pengembang pembelajaran adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh, memberikan balikan yang tepat terhadap keberhasilan mereka, dan konsisten dengan kriteria penguasaan untuk memberikan rasa keadilan.

### **Pengembangan Pembelajaran yang Memotivasi**

Secara umum, setiap pembelajaran baik tatap muka melalui tutorial maupun jarak-jauh melalui bahan ajar, terdiri atas empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi. Untuk menumbuhkan dan memelihara motivasi belajar mahasiswa, dalam mengembangkan keempat komponen pembelajaran tersebut, pengembang pembelajaran harus mempertimbangkan indikator-indikator motivasi yang mempengaruhi belajar mahasiswa.

### ***Tujuan Pembelajaran***

Tujuan pembelajaran menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pengembang pembelajaran sebaiknya memperhatikan kebutuhan, minat, atau tujuan mahasiswa mengikuti suatu mata kuliah. Hal ini perlu diperhatikan karena apabila mahasiswa melihat kesesuaian antara tujuan mereka dengan tujuan pembelajaran, motivasi belajar mereka akan tumbuh.

Di samping faktor kesesuaian, rumusan tujuan pembelajaran harus merupakan pernyataan yang jelas. Pernyataan ini harus menggambarkan tingkah laku yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa sebagai bukti keberhasilan belajar. Tingkah laku yang tercantum dalam rumusan tujuan pembelajaran harus merupakan tingkah laku yang dapat diamati. Ini penting karena, bila mahasiswa memahami dengan jelas kemampuan apa yang diharapkan untuk dikuasai, kebingungan akibat ketidakjelasan tujuan tidak akan terjadi. Selain itu, rumusan tujuan pembelajaran yang jelas akan meningkatkan keyakinan mahasiswa karena mereka dapat menilai sendiri pencapaian tujuan berdasarkan tujuan tersebut. Rumusan tujuan juga harus berada dalam jangkauan mahasiswa. Apabila kemampuan yang diharapkan dicapai terlalu rendah bagi mereka, meskipun mereka tidak berusaha, mereka akan dapat menguasai kemampuan tersebut dengan mudah. Hal ini akan menimbulkan kebosanan pada diri mahasiswa. Sebaliknya, jika tujuan yang diharapkan terlalu tinggi, meskipun mahasiswa bekerja keras untuk mencapainya, mereka akan tetap gagal dan akibat dari kegagalan ini mereka dapat mengalami frustrasi.

### ***Materi Pelajaran***

Berdasarkan rumusan tujuan, pengembang pembelajaran mengidentifikasi materi pelajaran yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Seperti dalam perumusan tujuan, tujuan mahasiswa mengikuti suatu pelajaran juga perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi pelajaran. Mahasiswa mengikuti suatu program karena mereka mengharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, materi yang akan dibahas sebaiknya berhubungan dengan kebutuhan dan minat mahasiswa. Dengan membahas materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa, pengembang pembelajaran dapat mengarahkan mahasiswa pada pengalaman-pengalaman belajar yang mendorong keingintahuan dan keinginan untuk memahami.

Dalam mengorganisasikan materi pelajaran, pengembang pembelajaran harus memperhatikan kemampuan mahasiswa.

Menurut Perlmutter dan Hall (1992), motivasi mahasiswa bersumber dari kepercayaan terhadap kemampuan, kekuatan, dan kelemahan yang mereka miliki. Kepercayaan mengenai hal-hal tersebut seringkali direfleksikan dalam tingkat aspirasi yang mereka pakai dalam mengarahkan tingkah laku. Mahasiswa yang telah lama meninggalkan bangku sekolah mungkin merasa takut dan merasa sudah tidak mampu lagi untuk belajar. Oleh karena itu, dalam mengorganisasikan materi pelajaran perlu diperhatikan tingkat kesulitan materi pelajaran. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diorganisasikan materi pelajaran yang memungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang termasuk kategori ini mengalami keberhasilan dalam belajar sehingga mereka merasa yakin bahwa mereka masih mampu belajar.

### ***Proses Pembelajaran***

Proses pembelajaran mengacu pada pembahasan materi pelajaran dengan menerapkan berbagai metode dan media. Banyak strategi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

Sebelum membahas materi pelajaran, karena tidak semua mahasiswa terbiasa belajar dengan modul, pengembang bahan ajar harus menyediakan informasi tentang langkah-langkah belajar yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa agar mereka berhasil dalam belajar dengan modul. Dengan mempelajari prosedur belajar yang tepat, mahasiswa akan melihat bahwa usaha yang dilakukan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Setelah membaca petunjuk belajar, mahasiswa akan merasa yakin tentang apa yang seharusnya mereka lakukan selama mereka mempelajari suatu mata kuliah. Hal ini juga berlaku bagi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam tutorial. Dalam melaksanakan tutorial, tutor perlu mempertimbangkan mahasiswa yang telah lama meninggalkan bangku sekolah. Mereka mungkin takut bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk belajar. Mereka cenderung tegang dan khawatir. Tantangan bagi tutor dalam memelihara motivasi belajar mereka adalah dengan mendorong perkembangan rasa percaya diri. Tutor sebaiknya membantu mereka membentuk pandangan bahwa tingkat

keberhasilan tertentu adalah mungkin jika mereka cukup berusaha. Oleh karena itu, tepat apabila memulai tutorial dengan cara yang mudah, santai, sampai mahasiswa merasa yakin akan kemampuan dirinya. Misalnya, tutor memulai tutorial dengan memperkenalkan dirinya. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperkenalkan dirinya juga merupakan ide yang bagus. Kegiatan semacam ini dapat menurunkan tekanan emosi pada awal tutorial.

Di samping itu, ada beberapa mahasiswa yang memiliki konsep diri yang negatif. Bagi mereka perlu diberikan pengalaman belajar yang memungkinkan mereka memperoleh rasa penghargaan diri yang positif. Tutor sebaiknya menekankan kegiatan tutorial pada kekuatan yang dimiliki mahasiswa untuk membantu mereka memiliki rasa senang terhadap dirinya sendiri. Dengan menekankan pada kekuatan mahasiswa, tutor dapat mengubah konsep diri yang negatif menjadi positif.

Menurut Keller (1987b), minat dan perhatian merupakan prasyarat untuk belajar. Oleh karena itu, tugas pertama pengembang pembelajaran adalah menciptakan lingkungan belajar yang menarik, bermanfaat dan cukup menantang bagi mahasiswa. Karakteristik "menarik, bermanfaat, dan cukup menantang" ini tidak hanya berasal dari materi pelajaran itu sendiri tetapi dapat juga berasal dari cara materi tersebut dibahas (Keller, 1987a). Dengan kata lain, gaya pembahasan atau strategi yang digunakan dalam membahas materi pelajaran mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Berkaitan dengan hal tersebut, materi pelajaran harus disajikan dengan cara yang menarik, yang memuaskan, dan meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi pelajaran (Keller, 1987a; Slavin, 1991). Pembahasan materi dapat dimulai dengan menyajikan fakta yang bertentangan atau dengan mengajukan pertanyaan. Teknik pembahasan semacam ini akan membangkitkan konflik mental dan kemudian akan mendorong timbulnya keinginan untuk menyelidiki. Minat mahasiswa akan hilang apabila materi pelajaran selalu dibahas dengan cara yang monoton. Penting kiranya untuk menggunakan teknik pembahasan yang bervariasi, seperti menggunakan "concept trees", menyajikan masalah, atau menggunakan visualisasi untuk memelihara perhatian mahasiswa.

Menarik perhatian tentulah tidak cukup. Tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana memeliharanya. Tentulah sulit bagi mahasiswa untuk tertarik pada sesuatu yang tidak dimengerti. Memberikan contoh dan analogi yang sesuai dengan pengalaman mahasiswa merupakan salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep baru yang memungkinkan mahasiswa lebih memahami konsep tersebut. Dalam memberikan contoh, menunjukkan penerapan suatu konsep dalam kehidupan sehari-hari merupakan ide yang bagus. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apa yang mereka pelajari dapat diterapkan akan meningkatkan minat dan apresiasi mereka terhadap topik yang dibahas. Analogi penting untuk meningkatkan minat terhadap sesuatu karena analogi memperlihatkan ide atau konsep baru dan informasi dalam bentuk dan konteks yang sudah diketahui oleh mahasiswa. Di samping menggunakan contoh-contoh dan analogi, pembahasan materi yang dilengkapi dengan alat peraga seperti foto, slide, kaset audio, video atau model-model akan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi pelajaran. Materi yang terlalu abstrak akan menyulitkan mahasiswa untuk berkonsentrasi.

Materi pelajaran hendaknya diorganisasikan dalam langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Adalah penting untuk memberi "tanda" untuk membantu mahasiswa menentukan dengan mudah dan mengingat butir-butir penting (Keller, 1987b). Pengulangan juga merupakan teknik yang tepat untuk memberikan petunjuk bahwa suatu konsep merupakan hal yang penting. Tetapi pengulangan sebaiknya tidak terlalu sering digunakan karena hal itu akan menimbulkan kebosanan.

Untuk membantu mahasiswa lebih memahami apa yang mereka pelajari, perlu diberikan latihan. Dengan mempraktikkan apa yang telah dipelajari, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan pengalaman belajarnya. Melalui kegiatan ini mahasiswa akan memiliki persepsi diri bahwa mereka adalah mahasiswa yang berhasil. Sebelum memberikan latihan atau tugas, perlu dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini penting untuk mencegah kegagalan mahasiswa dalam melaksanakan tugas hanya karena ketidakjelasan petunjuk. Selain

itu, materi latihan harus konsisten dengan tujuan belajar, materi pelajaran, dan dengan contoh-contoh. Di samping itu, latihan juga harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan belajar. Mahasiswa tidak akan mengerjakan tugas-tugas yang tidak mengarah pada tujuan meskipun mereka mengetahui bahwa mereka dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan berhasil. Latihan juga harus berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa mendatang. Juga penting untuk memberikan tugas-tugas yang menuntut mahasiswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru untuk memecahkan suatu permasalahan. Tugas-tugas yang seperti itu akan mendorong mahasiswa menyelesaikan tugas-tugasnya karena mereka melihat kesesuaian antara kebutuhan mereka dengan tugas-tugas yang diberikan. Latihan yang konsisten dengan tujuan dan materi pelajaran akan mendorong keyakinan mahasiswa bahwa mereka akan berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas apabila mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.

Di samping itu, tugas-tugas yang diberikan harus memungkinkan mahasiswa berhasil tanpa harus membuat tugas-tugas tersebut terlalu mudah untuk beberapa mahasiswa. Segala sesuatu yang terlalu mudah adalah murah; dan sesuatu yang murah dapat diperoleh oleh semua orang. Mahasiswa tidak tertarik terhadap tugas-tugas yang terlalu mudah. Sebaliknya, segala sesuatu yang terlalu sulit memiliki resiko yang tinggi untuk gagal; segala sesuatu yang menyebabkan kegagalan akan dihindari oleh semua orang.

Khusus untuk kegiatan tutorial, dalam menerapkan strategi pembelajaran, tutor perlu mempertimbangkan tujuan mahasiswa datang ke tempat tutorial. Bagi mahasiswa yang datang ke tempat tutorial untuk memecahkan masalah yang dimilikinya atau untuk meningkatkan kemampuan mereka, strategi yang cocok adalah strategi pemecahan masalah atau strategi yang berorientasi pada masalah atau tugas. Kegiatan tutorial harus didasarkan atas masalah yang dimiliki mahasiswa atau didasarkan atas tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab mereka. Tutor dapat mengembangkan tutorial yang melibatkan semua mahasiswa dalam memecahkan masalah, seperti menggunakan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, pengalaman mahasiswa

menjadi sumber yang penting bagi proses diskusi. Para mahasiswa dapat berbagi pengalaman dan belajar dari pengalaman mahasiswa lainnya. Menggunakan pengalaman mahasiswa dalam proses tutorial tidak hanya berguna dalam memecahkan suatu masalah, tetapi juga meningkatkan kepuasan mereka. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang telah menguasai materi pelajaran untuk membantu memecahkan masalah-masalah mahasiswa lainnya memungkinkan mereka untuk merasa dirinya penting dan menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk dibagikan pada yang lain.

Mahasiswa yang datang ke tempat tutorial dengan tujuan sosialisasi akan terpenuhi kebutuhannya apabila proses tutorial menyediakan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan teman baru, dan berteman untuk berbagi ide atau pengalaman. Tutor sebaiknya menggunakan teknik "*multi-communication*" yang dapat memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk mengenal satu sama lain. Akan lebih baik apabila kegiatan tutorial disela waktu istirahat. Waktu istirahat ini tidak hanya berguna sebagai waktu untuk memulihkan perhatian mahasiswa yang mungkin telah menurun, tetapi juga sebagai waktu bagi mahasiswa untuk mengenal satu sama lain, dan untuk berdiskusi tentang ide-ide dan pengalaman mereka. Dengan adanya kesempatan berkomunikasi dengan yang lain, mahasiswa akan terdorong untuk terus mengikuti tutorial karena kebutuhan sosial mereka terpenuhi.

Sebelum mengakhiri pembelajaran, konsep-konsep dasar atau keterampilan yang diperoleh selama tutorial penting untuk direviu dan untuk dievaluasi sebagai balikan terhadap proses belajar. Kegiatan semacam ini tidak hanya membantu mahasiswa menyadari bahwa mereka telah memahami materi pelajaran yang telah dibahas tetapi juga memusatkan perhatian mereka dan memberikan rasa kepuasan yang berasal dari kesadaran bahwa tugas-tugas belajar telah diselesaikan.

### ***Evaluasi***

Evaluasi adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang penguasaan terhadap tujuan belajar. Untuk menentukan apakah mahasiswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan

atau belum, pengembang pembelajaran hendaknya mengembangkan kegiatan evaluasi. Dengan mengadakan evaluasi, penguasaan mahasiswa terhadap materi yang dipelajari dapat diketahui.

Menurut Wlodkowski (1985), jenis evaluasi yang cocok untuk mendorong motivasi belajar mahasiswa adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif ialah evaluasi yang digunakan untuk tujuan diagnostik. Dengan menggunakan evaluasi formatif, kemajuan mahasiswa dapat diukur dan kesulitan belajar yang dihadapi mahasiswa dapat diidentifikasi. Bagi mahasiswa yang telah menguasai suatu unit, evaluasi formatif akan memberikan balikan yang positif dan mendorong mereka meningkatkan belajarnya. Bagi mereka yang belum menguasai suatu unit, evaluasi formatif dapat menunjukkan topik-topik, keterampilan dan proses tertentu yang menuntut mereka untuk bekerja lebih keras. Dari hasil evaluasi formatif, mahasiswa memperoleh informasi tentang tingkat pemahaman mereka, yang dapat merupakan penguatan terhadap kegiatan belajar yang telah dilakukannya.

Sebelum melaksanakan evaluasi perlu kiranya disampaikan dengan jelas standar penguasaan atau kriteria keberhasilan. Apabila mahasiswa mengetahui kriteria keberhasilan, mereka dapat mengantisipasi hasil dan kegiatan belajar yang telah dilakukannya. Selain itu, mereka dapat menilai diri sendiri sehingga dapat mengatur diri dalam kegiatan belajar untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Materi dan jenis masalah yang diajukan dalam evaluasi hendaknya dikembangkan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan latihan-latihan yang telah dipelajari. Evaluasi semacam ini dapat membantu mahasiswa merasa lebih yakin akan keberhasilannya dalam belajar karena hasil evaluasi menggambarkan kemajuan belajar. Mereka akan merasa lebih kompeten apabila yang dinilai berhubungan dengan tujuan yang ingin mereka capai.

Seperti halnya latihan, alat evaluasi yang digunakan dalam evaluasi formatif sebaiknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berhasil. Masalah yang diajukan dalam evaluasi harus berada dalam jangkauan semua mahasiswa, tetapi tidak

terlalu mudah untuk dijawab. Tingkat kesulitan soal-soal didasarkan pada distribusi normal. Ini tidak berarti bahwa semua soal harus mempunyai tingkat kesulitan sedang. Soal-soal tes yang tingkat kesulitannya tinggi mungkin dapat dijawab dengan benar oleh mahasiswa yang berkemampuan tinggi. Sedangkan mahasiswa yang berkemampuan rendah akan dapat menjawab soal-soal tersebut apabila mereka berusaha.

Khusus untuk pengembang bahan ajar, karena mahasiswa mengerjakan tes dan memeriksanya sendiri, perlu kiranya disediakan kunci jawaban dan penjelasannya serta kriteria keberhasilan. Penjelasan kunci jawaban ini hendaknya memberikan informasi yang menguatkan jawaban yang benar dan informasi yang mengoreksi jawaban yang salah. Informasi ini akan membantu mahasiswa memahami mengapa jawabannya benar atau salah. Dengan mengetahui bahwa pekerjaannya benar, mahasiswa akan merasa dihargai usahanya dan balikan terhadap kesalahan akan menambah motivasi mereka untuk mempelajari kembali.

Karena adanya perbedaan individual dalam menguasai materi yang diajarkan, perlu kiranya diberikan komentar terhadap pekerjaan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan berpengaruh terhadap hasil kerja. Setiap mahasiswa mengharapkan pengakuan positif terhadap hasil kerja mereka. Mereka akan memandang dirinya mampu dalam bidang tertentu apabila mereka mendapatkan pengakuan akan keberhasilannya. Oleh karena itu, perlu adanya penghargaan terhadap mahasiswa yang berhasil dalam melaksanakan tugas belajarnya. Memperoleh pengakuan umum merupakan penentraman diri dan penguatan yang membantu mahasiswa memandang bahwa dirinya mampu.

Di samping pengakuan umum, balikan juga merupakan cara yang ampuh yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kompetensi mahasiswa karena balikan dapat mengurangi perasaan ketidakberdayaan dan meningkatkan kemungkinan untuk terus berusaha. Oleh karena itu, hasil evaluasi penting diberitahukan secepatnya dengan balikan yang informatif dan mendorong. Balikan yang diberikan segera mengarah kepada perasaan yang lebih kuat tentang kontrol dan tanggung jawab pribadi.

## Kesimpulan

Motivasi merupakan karakteristik internal individu, yang tidak dapat diajarkan secara langsung sebagai suatu konsep atau suatu keterampilan. Namun demikian, pengembang pembelajaran dapat membangkitkan motivasi mahasiswa melalui penciptaan lingkungan belajar yang menarik, bermanfaat, dan cukup menantang bagi mahasiswa. Proses pembelajaran semacam ini akan memungkinkan mahasiswa mencapai tujuan secara optimal dan memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa. Untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik, bermanfaat, dan cukup menantang, pengembang pembelajaran hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Namun demikian, tidak ada resep umum dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat membangkitkan dan memelihara motivasi mahasiswa, karena terlalu banyak keragaman dalam karakteristik mahasiswa.

## Daftar Pustaka

- Brophy, J. (1987). Synthesis of Research on Strategies for Motivating Students to Learn. *Educational Leadership*, 45 (2), 40-48.
- Hirumi, A. & Bower, D.R. (1991). Enhancing Motivation and Acquisition of Coordinate Concepts by Using Concepts Tree. *The Journal of Educational Research*, 84, 273-279.
- Keller, J.M. (1984). The Use of the ARCS Model of Motivation in Teacher Training. Dalam Ken Shaw & A.J. Trott (Eds.), *Aspects of Educational Technology, volume XVII: Staff Development and Career Updating*. New York: Kogan Page.
- Keller, J.M. (1987a). Development and Use of The ARCS Model of Instructional Design. *Journal of Instructional Development*, 10, 2-10.
- Keller, J.M. (1987b). The Systematic Process of Motivational Design. *Performance & Instruction*, 26 (9), 1-8.

- Keller, J.M. & Suzuki, K. (1988). Use of the ARCS Motivation Model in Courseware Design. Dalam David H. Jonassen (Ed.), *Instructional Designs for Micro Computer Courseware*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- McCombs, B.L. (1991). Motivation and Lifelong Learning. *Educational Psychologist*, 26 (2), 117-127.
- Perlmutter, M. & Hall, E. (1992). *Adult Development and Aging* (2<sup>nd</sup> ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Slavin, R.E. (1991). *Educational Psychology: Theory into Practice* (3<sup>rd</sup> ed.). Needham Heights, M.A.: Allyn and Bacon.
- Winne, P.H. & Marx, R.W. (1989). A Cognitive-processing Analysis of Motivation within Classroom Tasks. Dalam Russell E. A. & Carole A. (Eds.), *Research on Motivation in Education, volume 3: Goals and cognitions*. London: Academic Press.
- Wlodkowski, R.J. (1985). *Enhancing Adult Motivation to Learn: A Guide to Improving Instruction and Increasing Learner Achievement*. San Fransisco, California: Jossey-Bass.

## **12. PENDIDIKAN TERBUKA: MENUNGGU REFORMASI POLA PIKIR MENDASAR<sup>(\*)</sup>**

---

Tian Belawati

Dalam tiga tahun terakhir di akhir milenium kedua ini, kata yang paling populer dan paling banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah "reformasi". Reformasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan tidak terkecuali di bidang pendidikan, menjadi topik yang paling hangat didiskusikan. Setiap orang berbicara tentang reformasi, tidak terkecuali para tokoh, pengamat, dan juga praktisi pendidikan.

Banyak tulisan maupun pernyataan lisan telah disampaikan mengenai bentuk atau format reformasi pendidikan yang diperlukan. Sebagian besar menyoroti jenjang pendidikan dasar yang dianggap sebagai fondasi bagi jenjang-jenjang pendidikan tingkat selanjutnya. Demikian pula, kerangka berpikir yang mendasari format reformasi yang dilontarkan pada umumnya berkenaan dengan pendidikan tatap muka. Substansi reformasi yang diinginkan, baik oleh para praktisi, pengamat, maupun tokoh pendidikan, pada umumnya juga ditekankan pada perbaikan praktik penyelenggaraan pendidikan yang bersifat pragmatis, seperti menghapuskan sistem EBANAS, mengurangi beban belajar, meningkatkan kandungan muatan lokal pada kurikulum, meningkatkan tingkat partisipasi murid di dalam kelas, dan sebagainya.

Aspek perbaikan tersebut tentu sangat baik dan perlu dilakukan. Akan tetapi, hal-hal tersebut belum menyentuh persoalan pokok yang paling mendasar yang seharusnya mengalami reformasi

---

<sup>(\*)</sup> Dikembangkan dari makalah Seminar Wisuda PGSD Universitas Terbuka, Maret 1999.

terlebih dahulu, yaitu reformasi pola pikir mengenai pendidikan. Pola pikir melahirkan paradigma yang memberi kerangka acuan pada cara membuat perencanaan, melaksanakan, dan kemudian melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Oleh karena itu, pola pikir harus berkembang seiring dengan perkembangan konteks tempat kita berada, agar sistem pendidikan dapat sesuai dengan tuntutan yang disebabkan oleh perubahan tatanan kehidupan masyarakat pemakainya. Demikian pula, dari sudut pandang masyarakat pengguna sistem pendidikan, fenomena yang ada menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum mempunyai pola pikir yang mencerminkan budaya belajar yang bersifat holistik. Pendidikan pada umumnya selalu dikaitkan secara langsung dengan upaya untuk memperoleh gelar, dan mencari pekerjaan. Pendidikan juga selalu dikaitkan dengan pergi ke sekolah atau ke kampus.

Dua masalah utama pendidikan di mana pun, termasuk di Indonesia, adalah kuantitas dan kualitas. Bagaimana kita menyeimbangkan masalah pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dari aspek ketersediaan sumber pendidikan (seperti sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya) dan bagaimana kita menjaga kualitas pendidikan itu sendiri. Intinya, bagaimana kita dapat meningkatkan daya jangkau pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mempedulikan lokasi tempat tinggal, usia, jenis kelamin, maupun status ekonomi mereka. Di sini ditekankan "meningkatkan daya jangkau" dan bukan "meningkatkan daya serap" sistem pendidikan, karena yang diperlukan memang kemampuan sistem untuk menjangkau dan mengakomodasi segala lapisan masyarakat. "Meningkatkan daya jangkau" mengandung pengertian "kemampuan untuk membuat masyarakat ingin memanfaatkan kesempatan belajar yang ada". Sedangkan "meningkatkan daya serap" lebih bersifat pasif dan hanya mengandung pengertian bahwa jika masyarakat mendaftar, maka sistem yang ada mampu menerima mereka. Bagaimana kita merancang suatu sistem pendidikan yang mampu mengajak masyarakat untuk "ingin" belajar, dan yang mampu memberikan "pelayanan" kepada seluruh masyarakat yang "ingin" belajar tersebut? Disamping itu, dari sudut

masyarakatnya, bagaimana kita membuat masyarakat menjadi "ingin" belajar?

### **Reformasi Pola Pikir: Suatu Langkah Awal**

Kita semua sudah sangat terkondisi dengan pola pikir tradisional tentang pendidikan dan persekolahan. Dari kecil, kita di"kuliahi", diberi contoh-contoh, dan di "cita-cita"kan untuk mengikuti suatu pola "kehidupan" yang serupa, yaitu sekolah sampai jenjang tertinggi yang mungkin dicapai, kemudian bekerja. Pola pikir "sekolah-bekerja" ini sudah demikian melekat pada kita semua, sehingga seolah-olah ada pembagian waktu dalam kurun usia kita, bahwa antara 7 tahun sampai dengan, kira-kira, 18-24 tahun adalah masa ketika kita harus menuntut ilmu. Orang tua secara sadar ataupun tidak, selalu menekankan dan mengingatkan kita akan "ritme" yang harus kita jalankan itu. Demikian pula sistem pendidikan formal kita, menunjang dan mendukung pola pikir sekolah-bekerja itu. Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas, kemudian Perguruan Tinggi dirancang dengan sistem tertutup yang kurang memberikan fleksibilitas terhadap usia, tempat tinggal, dan ketersediaan waktu serta biaya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sebagai akibatnya, kita semua dikondisikan untuk mempunyai pola pikir yang tertutup tentang pendidikan. Pola pikir inilah yang harus kita ubah dulu.

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga teknologi, kelompok masyarakat kurang beruntung (*disadvantaged group*) semakin besar jumlahnya. Demikian pula, tuntutan keterampilan yang diperlukan oleh dunia kerja menjadi sangat dinamis dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, muncul fenomena-fenomena "baru" yang 15 tahun yang lalu belum begitu menonjol dan belum menarik perhatian. Fenomena-fenomena tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Semakin banyak orang yang tidak mampu untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada "usia sekolah";

- Semakin banyak ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai lagi atau tidak sesuai lagi dengan tuntutan pekerjaan bila ingin terus meningkat karirnya; serta
- Semakin tingginya dana yang diperlukan untuk menyediakan prasarana pendidikan secara tradisional atau tatap muka.

Sebagai ilustrasi, bayangkan seseorang yang karena keadaan ekonominya hanya mampu bersekolah formal hingga tingkat sekolah menengah, dan kemudian harus bekerja. Atau seseorang yang karena "cita-cita"-nya ingin menjadi sarjana, lalu mati-matian mengurus seluruh sumberdaya keluarganya dengan mengorbankan saudara-saudaranya untuk "ngotot" bersekolah sampai selesai dan baru bekerja. Kedua ilustrasi tersebut tidak perlu terjadi, kalau orang menyadari bahwa berhenti "sekolah" pada saat dia tidak mampu lagi membiayai bukanlah akhir dari perjalanan "belajar"-nya; karena setelah dia bekerja dan mampu membiayai, dia dapat meneruskan proses "belajar"-nya. Tetapi itu adalah pola pikir yang belum memasyarakat, dan inilah yang harus kita masyarakatkan secara luas.

Konsep pendidikan sepanjang hayat (*life-long learning*) dan pendidikan untuk semua (*education of all*) yang dicetuskan dan dideklarasikan oleh UNESCO merupakan suatu ideologi yang harus dihayati dan dijalankan. Kedua konsep itu secara mendasar mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan belajar dan mendapatkan pendidikan sepanjang hayatnya. Artinya, tidak ada batasan waktu untuk belajar. Masyarakat harus diajak untuk menghayati konsep itu, untuk membuka diri terhadap pola berpikir yang baru tentang pentingnya "belajar" dan tentang "fleksibel"-nya waktu dan tempat belajar.

Pemahaman pola berpikir tentang tidak terbatasnya usia sekolah, serta fleksibilitas waktu dan tempat belajar akan juga mendorong pemahaman masyarakat akan adanya "cara" atau metode belajar yang lain selain tatap muka di dalam kelas. Pemasyarakatan pola berpikir ini tentu harus diprogramkan, didukung, dan ditunjang dengan penyediaan suatu sistem pelayanan pendidikan, baik yang formal, non-formal, maupun informal.

## **Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh: Suatu Upaya Awal**

Sistem pendidikan terbuka atau *open learning* adalah suatu keadaan dimana setiap individu dapat belajar tanpa dibatasi apapun (Bates, 1995). Keadaan ini merupakan sesuatu yang ideal, yang dalam praktek tidak selalu dapat dilaksanakan. Salah satu sistem pendidikan yang sejauh ini dianggap lebih mampu dari pada sistem pendidikan tatap muka (konvensional) dalam mencapai keadaan ideal itu adalah sistem pendidikan jarak jauh (*distance education*).

Sistem pendidikan jarak jauh setidaknya mampu menghilangkan kendala ruang dan waktu karena proses belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka dan oleh karenanya tidak perlu dilakukan secara *real time*. Penggunaan media dalam penyampaian materi ajar memungkinkan **proses belajar** (*learning act*) dilakukan dalam tempat dan waktu yang berbeda dengan **proses mengajar** (*teaching act*). Sistem pendidikan jarak jauh dapat ditingkatkan keterbukaannya dengan merancang sistem pembelajaran secara lebih fleksibel, seperti :

- *Open entry – open exit*: artinya setiap individu boleh memulai dan menyelesaikan proses pendidikannya kapan saja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- *No selection criteria*: artinya setiap orang yang mendaftar akan diterima sepanjang mempunyai kualifikasi dasar minimal yang dapat menunjang proses pendidikan yang diikutinya. Misalnya, tidak ada batas usia, tidak ada batas tahun ijazah terakhir, dan sebagainya.
- *Open Registration System*: artinya setiap individu boleh melakukan registrasi secara terbuka, apakah untuk suatu program penuh (seperti program sertifikat, diploma, ataupun sarjana) atau untuk matakuliah-matakuliah tertentu saja. Sistem registrasi terbuka ini juga harus memungkinkan mahasiswa menabung kredit matakuliahnya sehingga jika mau, suatu waktu kredit tersebut dapat diakumulasikan untuk suatu program utuh.

Universitas Terbuka (UT) merupakan suatu upaya konkrit yang dilakukan pemerintah. Institusi ini dirancang sebagai langkah awal menuju suatu sistem pendidikan terbuka. Walaupun belum sepenuhnya "terbuka", sistem yang diterapkan UT mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi tanpa batas usia, tanpa batasan tempat belajar, tanpa batasan waktu belajar, serta dengan biaya yang relatif dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah dan bawah.

Walaupun jumlah mahasiswa UT cukup besar dengan adanya proyek-proyek pendidikan program pemerintah (seperti PGSD dan PGSM), tingkat pemanfaatan UT oleh masyarakat umum boleh dikatakan masih rendah. Data menunjukkan bahwa dari 400-an ribu mahasiswa UT, hanya kurang lebih 15% dari mereka itu merupakan mahasiswa reguler dan swadana. Demikian pula, dari pola registrasi mahasiswa tampak, bahwa pada umumnya mahasiswa masih berlomba menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu seperti di universitas tatap muka. Hal ini terlihat dari jumlah matakuliah yang diambil dalam satu semester, yang berkisar antara 5 sampai dengan 10 matakuliah. Jumlah itu tentu merupakan beban yang sangat berat untuk ditempuh, jika di saat yang sama mahasiswa tersebut juga bekerja.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, baik orang tua maupun calon mahasiswa, belum sepenuhnya memahami, bahwa UT dengan sistem "terbuka"-nya merupakan "jawaban" bagi sebagian besar persoalan mereka. Demikian pula, rendahnya pemanfaatan UT oleh masyarakat umum menunjukkan bahwa pola berpikir sebagian masyarakat termasuk masyarakat pengguna tenaga kerja, belum jauh beranjak dari pola berpikir tradisional. Dengan demikian, upaya konkrit untuk mengoperasionalkan konsep pendidikan sepanjang hayat dan untuk semua, masih harus ditingkatkan dengan sosialisasi pentingnya konsep dan program ini, baik kepada para penentu kebijakan pendidikan maupun kepada masyarakat umum.

### **Sosialisasi dan Penyediaan Sarana: Suatu Upaya Bersama**

Diskusi tersebut secara eksplisit menyatakan pentingnya reformasi pola berpikir dalam proses belajar dan pendidikan. Pola berpikir tradisional yang membatasi pendidikan pada usia serta metode tertentu sudah saatnya harus diubah menjadi pola berpikir pendidikan sepanjang hayat dengan metode yang lebih terbuka. Salah satu metode yang dapat mencapai pola pikir pendidikan terbuka bagi proses belajar sepanjang hayat adalah sistem pendidikan secara jarak jauh.

Mengubah suatu pola berpikir yang telah lama tertanam di masyarakat bukanlah hal mudah. Akan tetapi, itu bukan berarti sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Suatu program terpadu yang direncanakan dengan matang dapat mewujudkan reformasi yang diinginkan.

Para pendidik sebagai praktisi pendidikan dan pemerintah selaku penentu kebijakan perlu menggerakkan upaya reformasi itu secara konsisten dan terus menerus. Upaya itu antara lain adalah sosialisasi tentang konsep pendidikan terbuka dan sepanjang hayat, serta penyediaan program-program pendidikan formal, non-formal, dan informal yang beragam untuk berbagai jenjang pendidikan.

### ***Sosialisasi dan Penanaman Pengertian Sejak Dini***

Sosialisasi tentang pentingnya kontinuitas pendidikan (termasuk belajar) harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Guru merupakan ujung tombak terpenting dalam kampanye ini. Sejak anak usia dini di sekolah dasar, mereka harus mulai diberi pengertian tentang berbagai kemungkinan situasi yang akan mereka hadapi. Secara bertahap dalam setiap jenjang sekolah, guru dapat meningkatkan kedalaman dan keluasan informasi tentang berbagai metode belajar, model pendidikan, jenis pekerjaan, serta pola berpikir yang lebih "terbuka" terhadap hal-hal baru. Penanaman pengertian sejak dini akan menimbulkan pola berpikir yang mantap di kemudian hari, dan pola berpikir itu kemudian akan ditularkan kepada generasi selanjutnya.

Selain menanamkan adanya alternatif pola belajar dan memperoleh pendidikan, guru juga berperan dalam menyiapkan siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri (*independent learners*). Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang dapat memberi peluang untuk melakukan proses belajar sepanjang hayat **menuntut kemandirian siswa**. Setiap orang harus tahu kebutuhan belajarnya, harus tahu cara belajar yang paling efektif untuk dirinya, dan harus mampu memanfaatkan kesempatan serta sumberdaya belajar yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, materi reformasi pendidikan dasar yang telah banyak didengungkan saat ini, memang sangat penting untuk dilakukan. Cara mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah harus dapat mengajarkan siswa untuk menjadi individu yang aktif, kreatif, serta percaya diri. Ini semua, dapat dicapai dengan cara mengajar yang lebih melibatkan siswa secara aktif dalam kelas, serta cara yang berorientasi pada pemahaman materi ajar dan bukan kelulusan ujian.

Pada saat yang sama, sosialisasi melalui kampanye nasional perlu dikembangkan dan diprogramkan pula oleh pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan formal dan non-formal terprogram perlu diikutsertakan sebagai "juru kampanye". Pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan negeri, dan lembaga-lembaga pendidikan swasta harus saling mendukung dengan secara intensif dan terus menerus mempromosikan beragam program pendidikannya.

### ***Penyediaan Sarana dan Prasarana***

Pemerintah serta masyarakat juga dapat melakukan kampanye dengan merancang dan menyediakan sarana serta prasarana program-program pendidikan yang lebih beragam, baik dari segi materi/bidang maupun dari segi metode pembelajarannya. Dengan demikian, masyarakat akan mempunyai pilihan-pilihan sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan, serta "interest" masing-masing. Program-program pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan bergelar, profesional, pengembangan diri, ataupun semata untuk pengembangan hobi. Sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menunjang suatu program pendidikan yang fleksibel juga harus disediakan, seperti misalnya jaringan alat komunikasi yang

memungkinkan interaksi dua arah pada suatu pembelajaran jarak jauh.

Dengan tersedianya berbagai alternatif materi dan cara memperoleh pendidikan, lambat laun diharapkan masyarakat umum akan melihat dan menyadari bahwa pola berpikir “sekolah-bekerja” dalam pengertian tradisional sudah bukan zamannya lagi. Masyarakat akan terkondisi, bahwa bila mereka harus berhenti dahulu “sekolah” secara formal, bukan berarti, bahwa sudah tertutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikannya dan pengembangan dirinya. Dengan demikian, pola berpikir tentang tertutupnya suatu proses belajar akan secara berangsur-angsur berubah menjadi pola pikir pendidikan yang terbuka.

Kampanye yang terpadu dan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat akan menghasilkan suatu sinergi yang optimal. Kesadaran akan pentingnya dan fleksibelnya pendidikan yang dibarengi dengan tersedianya pilihan-pilihan program dan metode pendidikan akan meningkatkan jumlah masyarakat yang “belajar”. Secara berkelanjutan, upaya ini akan menciptakan suatu masyarakat yang mandiri dalam belajar (*learning society*).

## **Penutup**

Reformasi pendidikan di tingkat pendidikan tinggi sama pentingnya dengan reformasi di tingkat pendidikan dasar. Reformasi pendidikan yang ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan kualitas “hidup” masyarakat harus dimulai dengan reformasi pola pikir tentang pendidikan itu sendiri. Pola pikir masyarakat harus di“giring” kepada suatu pemahaman dan kesadaran tentang keterbukaan sistem dan cara memperoleh pendidikan, serta keterbukaan tentang waktu untuk melakukan proses pendidikan formal maupun proses belajar sepanjang hayat untuk pengembangan dirinya. Reformasi pola pikir ini perlu ditunjang dan ditindaklanjuti dengan reformasi penyediaan sarana serta prasarana belajar yang memadai, sehingga aspirasi dan keinginan masyarakat untuk selalu belajar sebagai hasil dari reformasi pola pikirnya dapat terakomodasi. Guru merupakan kunci serta ujung tombak yang harus berperan aktif dalam menyiapkan generasi

yang mempunyai **pola pikir terbuka** serta yang mampu menjadi **pelajar mandiri**, sehingga reformasi pendidikan yang kita inginkan menjadi kenyataan.

### **Referensi**

- Bates, A.W. (1995). *Technology, Open Learning, and Distance Education*. New York: Routledge.
- Daniel, J.S. (1997). *Mega-universities and Knowledge Media. Technology Strategies for Higher Education*. Great Britain: Kogan Page.
- Moore, M.G. (1993). Theory of Transactional Distance. Dalam D. Keegan, *Theoretical Principles of Distance Education* (hal. 22-38). New York: Routledge.
- Moore, M.G. and Kearsley, G. (1996). *Distance Education. A System View*. Toronto: Wadsworth Publishing.

### **13. UNIVERSITAS TERBUKA: PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**

---

---

Nuraini Soleiman

#### **Terbuka dan Jarak Jauh**

Terbuka dan Jarak Jauh merupakan dua buah konsep yang berkaitan, yang diterapkan oleh Universitas Terbuka (UT) dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Konsep belajar jarak jauh lebih ditujukan pada proses pembelajaran baik berupa proses belajar mahasiswa maupun metoda penyampaian yang dilaksanakan oleh lembaga. Sehingga dalam penjelasannya 'Jarak Jauh' banyak dikaitkan dengan ruang dan waktu. Ruang atau letak geografis atau tempat belajar bukanlah menjadi hambatan bagi seseorang untuk mengikuti pendidikan. Waktu belajar yang biasanya tersusun secara ketat antara 'guru' dan 'peserta ajar' dibuat sedemikian longgarnya, sehingga secara umum dalam proses belajarnya, mahasiswa adalah penentu waktu belajarnya. Di sisi lain, lembaga pendidikan melakukan semua persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan proses pembelajaran, yang kemudian penyampaiannya dilakukan melalui berbagai media yang mungkin. Beragamnya media penyampaian yang digunakan mengakibatkan konsep jarak jauh dikaitkan juga dengan penggunaan teknologi informasi.

Konsep terbuka di lain pihak memiliki ciri tersendiri yang lebih didominasi oleh sifat pemberian peluang yang lebih besar pada setiap calon mahasiswa untuk mengikuti pendidikan tinggi. Terbuka sering diterjemahkan sebagai pengurangan kriteria masuk bagi calon mahasiswa, dengan dasar pertimbangan kemampuan mahasiswa adalah seleksi berikutnya yang menentukan tingkat bertahannya mahasiswa dalam mengikuti pendidikan. Namun

terbuka juga dapat diartikan sebagai kebebasan pemilihan bidang studi yang akan ditempuh mahasiswa. Sehingga garis batas yang tegas antara suatu program studi dengan program studi lainnya tidak terlalu ditonjolkan. Dengan demikian, mahasiswa diperbolehkan menentukan matakuliah yang akan diambilnya yang berasal dari luar program studinya. Terbuka juga diartikan berhubungan dengan penentuan waktu studi, sehingga jangka waktu studi atau lama belajar menjadi fleksibel. Namun demikian, 'keterbukaan' ini tentunya bukan tanpa batas. Cuti registrasi misalnya hanya boleh dilakukan 4 kali masa registrasi berurutan. Setelah itu mahasiswa harus melakukan registrasi pertama kembali. Semua kelonggaran yang diterapkan dari konsep terbuka dan metoda belajar jarak jauh yang diterapkan UT, jika dicermati lebih lanjut adalah suatu pendidikan pendewasaan bagi sumber daya manusia Indonesia. Sifat kemandirian seorang mahasiswa sangat dibutuhkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam mengikuti pendidikan di UT.

### **Mahasiswa**

Keegan (1991) memberikan ciri lain pendidikan jarak jauh, yaitu terjadinya "*Pemisahan antara guru dan murid selama masa belajar*". Keterpisahan ini dapat diartikan sebagai keterpisahan geografis dan waktu. Pengertian keterpisahan waktu inilah yang akhirnya berdampak pada profil mahasiswa UT, yang pada saat ini didominasi oleh mahasiswa yang telah bekerja (Laporan rutin Puskom, 1999).

Pemanfaatan sistem terbuka dan jarak jauh, mengakibatkan mahasiswa UT dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu mahasiswa yang dengan inisiatifnya sendiri mengikuti pendidikan di UT, dan mahasiswa yang karena kebutuhan instansi tempat bekerjanya membutuhkan peningkatan pendidikan karyawannya (mahasiswa institusional). Tabel 1 menunjukkan sebaran mahasiswa menurut institusi tempat mereka bekerja, baik mahasiswa yang menerima bea siswa maupun mahasiswa yang mendanai dirinya sendiri. Dari sebaran itu terlihat bahwa proporsi jumlah mahasiswa institusional sekitar 75% dari jumlah mahasiswa UT. Sistem UT juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk

peningkatan kualitas guru SD dan SLTP. Dalam hal ini, UT menyiapkan program khusus yang sifatnya penyetaraan terhadap program D-I dan D-III. Sehingga UT juga mengenal istilah mahasiswa penyetaraan dan mahasiswa reguler. Istilah mahasiswa reguler digunakan untuk mahasiswa yang mengikuti pendidikan di UT melalui program diploma atau program sarjana dengan ketentuan yang sama dengan pada universitas konvensional.

Keberadaan mahasiswa institusional dan keragaman latar belakang pendidikan sebelumnya, memperkaya sistem UT. Untuk mengantisipasi hal itu, UT mengadopsi konsep '*alih kredit*', yaitu pengakuan terhadap matakuliah atau kelompok matakuliah yang setara yang berasal dari jurusan atau program studi lain. Alih kredit juga diartikan sebagai pemberian kredit tertentu terhadap pengalaman kerja dari suatu profesi yang relevan. Sistem ini memungkinkan seorang manajer yang telah berpengalaman, untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu lebih singkat, karena teori yang diberikan untuk pendidikan tersebut telah dipraktekkan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sistem alih kredit ini juga mengakomodasi perpindahan mahasiswa dari suatu program studi ke program studi lain di lingkungan UT. Adanya alih kredit dalam sistem UT merupakan konsekuensi dalam menerapkan konsep '*terbuka*'.

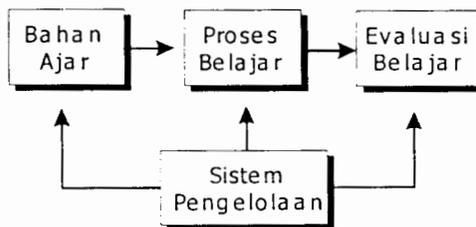
Tabel 1 : Sebaran Mahasiswa aktif menurut Institusi (Juni 1999)

INSTITUSI	JUMLAH MAHASISWA
UT Reguler	101.640
DIKDASMEN	
PGSD	156.378
PGSMP	30.838
PGSD Swadana	107.116
BNI	283
Angkatan Darat	673
Angkatan Laut	75
Angkatan Udara	113
Garuda	283
Merpati	773
BPS	363
BKKBN	1742
Deptan	1259
Total	401.536

Catatan: Beberapa institusi belum termasuk dalam sebaran ini, seperti PERPUSNAS.

### Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan pada PTJJ dapat digambarkan seperti gambar 1.



Gambar 1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan PTJJ

Keterkaitan antar komponen sistem dinyatakan oleh Daniel (1996) sebagai berikut, suatu universitas dengan sistem terbuka dan jarak jauh dengan jumlah mahasiswa yang besar, bergantung pada sistem yang menghasilkan tiga hal, yaitu *bahan ajar yang baik*,

*pelayanan mahasiswa yang efektif dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien.* Jika sistem ini dianalogikan dengan proses produksi, maka keluaran (output) dari kerja sistem adalah bahan ajar dan pelayanan pada mahasiswa, dengan sumberdaya sebagai bahan bakar untuk memproduksi keluaran. Dengan demikian sistem baru dianggap baik jika outputnya baik dan penggunaan sumberdaya dilakukan secara efisien.

Sebagai PTJJ, UT juga mengacu pada komponen sistem yang sama seperti yang diberikan pada gambar 1, dengan output bahan ajar dan pelayanan pada mahasiswa. Pelayanan pada mahasiswa mencakup proses belajar dan evaluasi hasil belajar. Untuk menghasilkan output yang baik maka efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya menjadi pertimbangan UT. Hal ini tercermin pada bentuk organisasi dan sistem penyelenggaraan yang dilaksanakan UT.

Sistem penyelenggaraan pendidikan di UT dibentuk dengan mengacu pada tiga hal, yaitu pertama sentralisasi dari fungsi-fungsi kerja tertentu, sehingga dalam organisasinya terdapat unit pelaksana teknis (UPT) dengan fungsi sebagai pendukung kegiatan akademis.

Kedua, UT menggunakan sistem desentralisasi dari pelayanan akademiknya pada 31 Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di kota-kota besar di Indonesia. Mengingat wilayah jangkauan UT sangat luas, keberadaan UPBJJ merupakan salah satu jaringan kerja yang harus dimiliki UT untuk dapat mendukung kegiatannya. Di samping sebagai unit penunjang dalam pelaksanaan kegiatan akademik pada wilayahnya, maksud lain yang terkandung dalam pembentukan 31 UPBJJ adalah sebagai wakil UT dalam hubungan dengan universitas pembina. Ketiga, kemitraan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang disebut universitas pembina. Eksistensi dari universitas pembina dalam tubuh sistem UT adalah bagian dari efisiensi penggunaan sumberdaya secara nasional. Dengan berfungsinya jaringan kerja ini, UT tidak perlu memiliki sumberdayanya sendiri dalam melaksanakan kegiatan akademik. Bahan ajar, tutorial, dan bahan ujian, dapat dikoordinasikan

pembangunannya dengan universitas pembina. Selain itu, fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan dapat pula dimanfaatkan bersama.

### **Bahan Ajar**

Bahan ajar merupakan komponen pertama dan penentu dalam penyelenggaraan pendidikan pada PTJJ. Kualitas bahan ajar secara umum ditentukan oleh dua hal, yaitu materi atau substansi bahan ajar tersebut dan kemasan dari bahan ajar. Hal lain yang juga mendukung penyelenggaraan pendidikan dengan baik adalah ketersediaan bahan ajar dan waktu penyampaiannya. Dengan demikian, kontrol utama yang harus dilakukan adalah terhadap kualitas, ketersediaan, dan waktu penyampaian (distribusi). Sehubungan dengan pentingnya kualitas suatu bahan ajar, dalam pengembangan bahan ajar, UT melakukan pendekatan dengan memanfaatkan para tenaga pengajar di universitas konvensional yang dianggap mempunyai standard yang baik di Indonesia. Sehingga mutu substansi bahan ajar tidak lagi dipertanyakan. Sebaran penulis bahan ajar UT yang diberikan pada tabel 2.

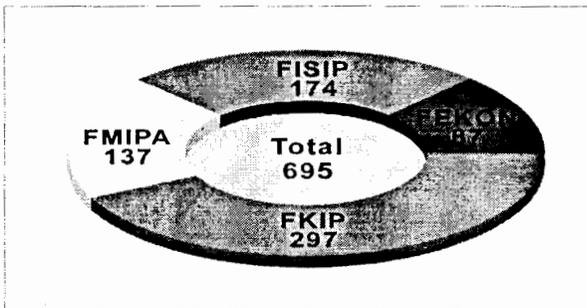
Tabel 2 : Sebaran Penulis Bahan Ajar UT

Institusi	Jumlah Penulis Bahan Ajar
Universitas Indonesia	54
ITB	11
UGM	53
UNBRAW	22
UT	23
IIKIP Jakarta	79
IKIP Bandung	119
UNDIP	8
Lain-lain: IPB ITS UNPAD UNSOED	

Catatan: Data diperoleh thn 1996, bahan presentasi Rektor UT 1996.  
Data penulis dari institusi lain tidak diperoleh.

Kontribusi staf pengajar universitas konvensional terkemuka ini merupakan salah satu cara pemanfaatan keahlian yang selama ini hanya dinikmati oleh sebagian anggota masyarakat.

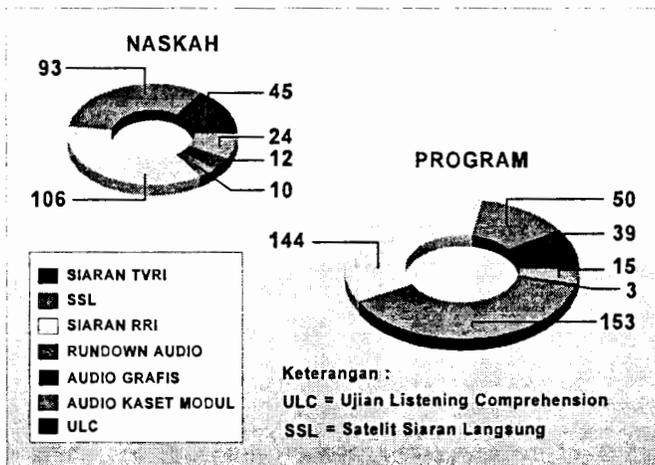
Bahan ajar utama UT adalah bahan ajar cetak. Produksi bahan ajar cetak untuk mahasiswa reguler terlihat pada gambar 2. Dalam bidang kemasan bahan ajar, UT sangat mempertimbangkan daya beli masyarakat secara umum. Sehingga, bahan ajar cetak UT dikemas untuk dipasarkan dengan harga minimal.



Gambar 2: Bahan Ajar Cetak (per Juni 1999)

Keberadaan bahan ajar terkait dengan matakuliah dari kurikulum pada suatu program studi. Pada universitas konvensional suatu matakuliah dapat menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dosen yang mengajar yang dapat diperoleh secara cepat dari toko buku, atau dipersiapkan langsung oleh dosennya. Sedangkan UT, dalam pengembangan bahan ajar harus mempertimbangkan waktu pengembangan yang cukup panjang, sehingga bahan ajar tersebut harus dapat dimanfaatkan dalam waktu cukup lama. Konsekuensinya, bahan ajar UT harus bersifat moduler, sehingga perubahan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengembangan kurikulum, UT juga harus memperhatikan bagian terpenting dari suatu matakuliah secara lebih cermat, sehingga dalam pengembangan bahan ajarnya dapat disesuaikan. Akibatnya, kurikulum UT tidak terlalu mudah untuk diubah.

Selain bahan ajar cetak UT juga menyiapkan bahan ajar non cetak, yang merupakan bahan pendukung bagi bahan ajar cetak. Gambar 3 menggambarkan pengembangan dan produksi bahan ajar non cetak.



Gambar 3: Produksi Bahan Ajar Non cetak

### Proses Belajar

PTJJ menuntut kemandirian mahasiswa dalam proses belajar. Namun demikian, setiap lembaga PTJJ berkewajiban memberikan bantuan belajar terhadap mahasiswanya. UT memberikan bantuan belajar dalam bentuk tutorial tatap muka, tertulis, ataupun dengan media elektronik. Ketiga jenis tutorial itu mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Tutorial tatap muka, misalnya, hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang berdomisili di sekitar lokasi tutorial. Terkadang yang menjadi kendala adalah waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk mahasiswa mengikuti tutorial. Sisi keuntungannya, mahasiswa dapat berhubungan langsung dengan tutor untuk mengatasi kesulitannya dalam pemahaman bahan ajar. Contoh tutorial tatap muka yang diselenggarakan UT adalah pelaksanaan tutorial untuk program penyetaraan D-II PGSD. Tutorial ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kandep Dikbud setempat, dengan membentuk kelompok belajar yang berbasis kecamatan. Contoh lain adalah tutorial yang diselenggarakan di UT

Pusat, di bawah koordinasi kelompok belajar mahasiswa (KBM)-UT. Tutorial melalui KBM ini diadakan atas dasar permintaan mahasiswa.

Tutorial tertulis dirasakan terlalu memakan waktu, karena ada waktu tunggu yang cukup lama. Terkadang permasalahan yang dihadapi mahasiswa telah selesai pada saat hasil analisis atau jawaban dari tutor tiba. Namun tutorial tertulis dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, sehingga mahasiswa yang berdomisili di daerah terpencil sekalipun dapat melakukan hubungan dengan tutornya. Jenis tutorial ini pernah diselenggarakan oleh FMIPA.

Tutorial elektronik yang disiapkan UT terdiri atas dua jenis, yaitu melalui penyiaran radio ataupun televisi, dan melalui internet. Tutorial melalui radio atau televisi dirasakan kurang interaktif, sehingga lebih banyak digunakan untuk pemantapan materi bahan ajar. Padahal media ini dapat diterima oleh hampir setiap mahasiswa UT. Salah satu kendala dalam melaksanakan tutorial dengan media TV adalah keterbatasan jam tayang yang diberikan untuk penyiaran program. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.

TAHUN	PENAYANG STASIUN TELEVISI	PENAYANGAN
1984-1990	TVRI	2 Program/bulan
1991-1994	TVRI TPI	2 Program/bulan 4 Program/bulan
1995	TVRI TPI	2 Program/bulan 2 Program/bulan
1996-1998	TVRI	1 Program/bulan
1999	TVRI SSL	2 Program/bulan ?

Gambar 4: Perkembangan Program Siaran Televisi

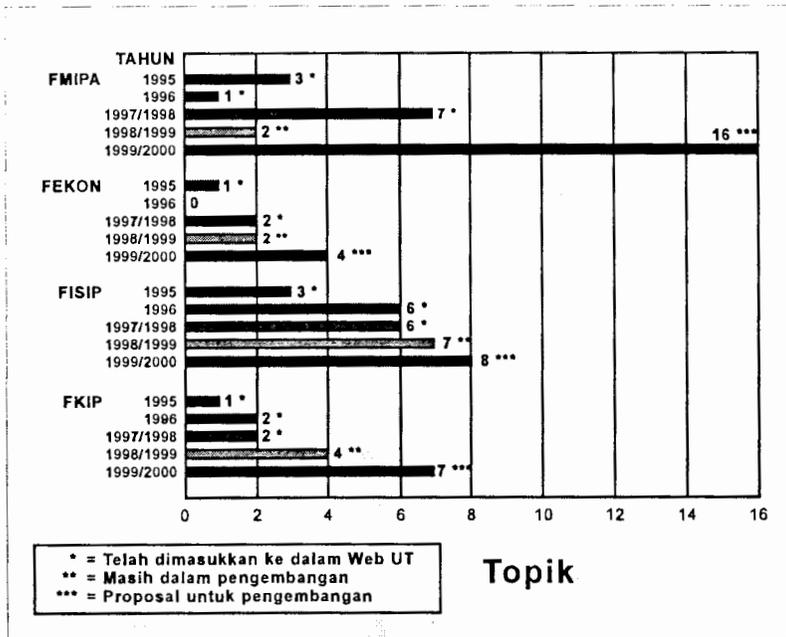
Tutorial internet, memiliki keterbatasan pada pengguna yang mempunyai akses pada internet, yang sampai saat ini belum menjangkau semua wilayah. Tutorial dengan media komputer ini, sebenarnya menjawab permasalahan interaktif yang sering dikeluhkan oleh para peserta didik maupun pemerhati pendidikan. Fasilitas Wasantara-Net yang disiapkan oleh PT. Pos Indonesia diharapkan dapat membantu penyelenggaraan tutorial ini, sehingga frekuensi tutorial dapat ditingkatkan. Penggunaan internet sebagai salah satu alternatif bantuan belajar, juga dapat dimanfaatkan untuk komunikasi mahasiswa dengan institusi untuk permasalahan lainnya. Hal ini tergambarkan dalam aktivitas yang telah diselenggarakan UT untuk mendukung penggunaan media ini yang tertera pada gambar 5.

<b>TAHUN</b>	<b>KEGIATAN</b>
1995	● Akses Internet
1998	● Ujicoba Integrasi Faksimili dan Internet
1999	● Tutorial melalui Internet ● Akses Nilai Hasil Ujian melalui Internet

Gambar 5: Perkembangan Program Internet

Selain bantuan belajar tersebut UT juga telah menyiapkan bantuan belajar berbantuan komputer. Gambar 6 menunjukkan pengembangan dan produksi yang telah dilakukan UT. Untuk dapat melakukan kendali pada proses belajar mahasiswa, UT sewajarnya menyiapkan semua jenis tutorial yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Saat ini tutorial masih merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan yang belum terhubung dengan sistem lainnya. Agar tutorial menjadi bagian

utu dari sistem perlu dipertimbangkan keterkaitannya dengan biaya pendidikan dan evaluasi hasil belajar. Untuk dapat mendukung hal ini penyiapan tenaga tutor dan bahan tutorial sewajarnya menjadi bagian dari sistem.



Gambar 6: Pengembangan Bahan Tutorial Berbantuan Komputer

### Biaya Studi

Biaya pendidikan di UT terdiri dari komponen biaya registrasi dan bahan ajar, seperti terlihat pada tabel 3. Untuk menghitung biaya studi ini, diasumsikan pada setiap semester mahasiswa mendaftarkan matakuliah sejumlah 15 sks, membeli sendiri bahan ajar yang akan digunakan, dan dianggap lulus untuk setiap matakuliah yang diikuti ujiannya. Dengan kondisi itu, mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh program pendidikannya dalam waktu 10 semester dengan biaya studi yang diberikan pada tabel 3.

Mahasiswa yang tidak lulus ujian suatu matakuliah dapat

meregistrasikan matakuliah tersebut pada semester berikutnya dengan tambahan biaya pada registrasi bagi matakuliah yang diulanginya. Biaya lain yang dikeluarkan mahasiswa adalah biaya pengiriman formulir ke UPBJJ masing-masing dan biaya transportasi pada saat ujian.

Tabel 3: Biaya Studi mahasiswa reguler

Komponen	Biaya per sks	Biaya per mhs per Semester	Dilakukan hanya satu kali	Biaya Keseluruhan
Bahan Ajar	6.000	90.000		900.000
Registrasi I			20.000	20.000
Registrasi Mtk		15.000		150.000
Formulir Matakuliah	6.000	90.000		900.000
Total		205.000		1.970.000

(Perhitungan dalam rupiah)

### *Lama Studi*

Dasar pertimbangan yang diambil untuk menghitung lama studi mahasiswa UT adalah pelaksanaan ujian dan waktu ujian. Ujian akhir semester (UAS) dilakukan dalam waktu bersamaan untuk semua wilayah di Indonesia dengan memperhatikan perbedaan waktu antar wilayah. Setiap matakuliah ditentukan waktu ujiannya dengan masing-masing mata ujian berlangsung selama 90 menit. Hari ujian ditentukan pada dua hari minggu, dengan setiap hari maksimal diujikan lima matakuliah. Dalam satu semester mahasiswa dapat menempuh sepuluh mata ujian. Ujian komprehensif tertulis (UKT) dilaksanakan pada hari Sabtu, setiap semesternya.

Sebagai contoh, untuk menghitung lama studi diambil mahasiswa dari program S-I Administrasi Niaga (ADNI). Untuk dapat menyelesaikan studi pada program studi ADNI mahasiswa diwajibkan untuk lulus matakuliah sejumlah 149 sks, dengan sebaran matakuliah yang terdiri atas matakuliah wajib dan pilihan.

Sebaran jumlah mata-kuliah terhadap jam ujian yang diberikan pada tabel 4, menyatakan bahwa matakuliah wajib baru dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu enam semester.

Namun ada pertimbangan tambahan untuk menghitung lama studi ini, yaitu persyaratan untuk mengikuti UKT. Untuk dapat mengikuti UKT mahasiswa harus sudah menempuh dan lulus (N-18) sks, dengan N adalah total sks yang harus diselesaikan, serta memperoleh indeks prestasi minimal dua. Dengan kata lain seorang mahasiswa program studi ADNI baru dapat menempuh UKT setelah menyelesaikan 131 sks atau  $(149 - 18 = 131)$  dengan indeks prestasi (IPK) minimal 2.00. Jadi mahasiswa baru dapat mengikuti UKT setelah 8 semester, dengan rata-rata 16 sks per semester. Sehingga secara umum, waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengikuti kuliah di UT adalah empat setengah tahun. Bagi mahasiswa yang mengajukan alih kredit karena latar belakang pendidikan sebelumnya, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat.

Tabel 4 : Sebaran Jam Ujian Program Studi S1- Administrasi Niaga

Jam Ujian	Jumlah Mtk Wajib	Jumlah Mtk Pilihan
I.1	4	2
I.2	4	2
I.3	3	4
I.4	3	5
I.5	5	3
II.1	6	2
II.2	4	3
II.3	3	3
II.4	3	7
II.5	3	
	33	

### **Evaluasi Hasil Belajar**

Evaluasi hasil belajar mahasiswa UT terdiri atas ujian tengah semester (TM), ujian akhir semester (UAS) dan ujian komprehensif tertulis (UKT). TM diberikan pada mahasiswa untuk dikerjakan secara individual ataupun berkelompok. UAS dilaksanakan secara nasional, setiap akhir semester untuk setiap matakuliah yang diambil oleh mahasiswa. Sedangkan UKT merupakan evaluasi terhadap pemahaman akhir mahasiswa dari suatu program studi strata satu.

Ujian akhir semester terdiri atas dua jenis yaitu ujian objektif dan ujian uraian. Penentuan suatu matakuliah menggunakan jenis ujian tertentu ditetapkan sebagai berikut.

1. Matakuliah yang tidak mungkin dilaksanakan ujiannya dengan ujian objektif. Contoh matakuliah Writing tidak mungkin dilaksanakan dengan ujian objektif, karena keterampilan menulis yang akan dievaluasi.
2. Selain matakuliah yang tertera pada butir satu di atas, setiap matakuliah yang peserta ujiannya lebih dari 300 mahasiswa, menggunakan ujian objektif.

Jumlah matakuliah yang diujikan setiap semester diberikan pada tabel 5. Sedangkan tabel 6 memberikan gambaran meningkatnya jumlah ujian uraian pada masa ujian tertentu. Sementara sebaran jumlah peserta ujian uraian dengan peserta di atas 300 mahasiswa pada masa ujian tertentu, terlihat pada Tabel 7. Sehingga, dari 646 matakuliah yang diujikan pada masa ujian 98,2, terdapat 133 matakuliah uraian atau lebih dari 20%. Dari jumlah ini 14 di antaranya atau sekitar 10,5% adalah matakuliah yang pesertanya melebihi kriteria yang telah ditetapkan oleh UT. Salah satu penyebab dari meningkatnya ujian uraian adalah sulitnya penyiapan butir-butir soal untuk ujian objektif. Mengantisipasi masalah ini UT sedang mengembangkan komputerisasi sistem bank soal. Diharapkan sistem ini dapat mereduksi permasalahan pengadaan soal ujian, terutama untuk ujian objektif.

Untuk dapat mengikuti UKT mahasiswa telah memenuhi beberapa kriteria misalnya jumlah sks minimal yang telah lulus, dan indeks

prestasi kumulatif (ipk) tertentu. Khusus bagi mahasiswa FKIP, UKT ditempuh jika telah lulus seluruh matakuliah atau telah memenuhi seluruh persyaratan akademiknya.

Tabel 5: Sebaran jumlah matakuliah yang diujikan pada semester tertentu

Masa Ujian	UT-Reguler	Prog. Penyetaraan	Total
961	570	139	709
962	583	130	713
971	589	120	709
972	626	180	806
981	634	158	792
982	646	197	843
Rata-rata	608	136	762

Catatan : Data diperoleh tgl 6 April 1999

Tabel 5 menggambarkan beban kerja yang dilakukan UT untuk mempersiapkan ujian. Jumlah rata-rata matakuliah yang diujikan pada setiap masa ujian untuk mahasiswa reguler 608 matakuliah, sedang untuk mahasiswa penyetaraan 136 matakuliah. Naskah ini diperbanyak sejumlah mahasiswa yang registrasi pada matakuliah tersebut dengan tambahan beberapa persen untuk naskah cadangan. Selanjutnya sejumlah naskah ini dikirim ke UPBJJ, untuk disiapkan lokasi ujian serta pelaksanaan ujiannya. tabel 6, memperlihatkan beban kerja yang dilakukan dalam persiapan bahan ujian serta pengelolaan hasil ujian dalam kurun waktu satu tahun yang dilakukan oleh Pusat Pengujian UT.

Faktor utama yang menjadi batasan dalam penyiapan pelaksanaan ujian adalah waktu yang tersedia tidak terlalu panjang. Penyiapan peserta ujian baru dapat dilaksanakan jika data registrasi dari seluruh UPBJJ telah seluruhnya diproses di UT Pusat, untuk ini BAAK-RENSI hanya mempunyai waktu paling lama empat minggu. Berdasarkan data ini Pusat Pengujian akan mempersiapkan bahan ujian sesuai dengan daftar peserta ujian per lokasi ujian. Selanjutnya dibutuhkan waktu maksimal dua minggu untuk pendistribusian bahan ujian ke masing-masing UPBJJ.

Permasalahan yang muncul dan selalu menjadi perhatian pimpinan UT dalam penyiapan bahan ujian adalah jumlah dan keamanan naskah ujian. Pemrosesan peserta ujian, sering kali terlalu terlambat karena keterlambatan masuknya data ke UT Pusat. Oleh karena itu, jumlah naskah yang dicetak diprediksi dari peserta ujian pada beberapa masa ujian sebelumnya. Hal ini mengakibatkan tidak terlalu akuratnya jumlah naskah yang dicetak. Keamanan naskah ujian sering dipengaruhi oleh ketersediaan waktu dalam mempersiapkan naskah ujian, naskah ujian harus dijaga oleh Pusat Pengujian selama Pusat Pengujian melakukan penyiapan naskah ujian. Demikian pula UPBJJ harus menjaga keamanan naskah ujian sampai dengan ujian berlangsung. Yang tidak kalah pentingnya untuk keamanan naskah ujian adalah pendistribusian bahan ujian dari UT Pusat ke UPBJJ. Hal ini ditambah lagi dengan terlibatnya pihak luar UT, dalam pendistribusian bahan ujian.

Selain keamanan naskah ujian, pengawas ujian yang dikoordinasikan oleh UPBJJ, juga menjadi titik penentu kualitas pelaksanaan ujian. Dengan demikian dalam pelaksanaan ujian, koordinasi unsur-unsur pelaksana dan waktu pelaksanaan pada masing-masing unit terkait, serta kualitas SDM yang terlibat, sangat menentukan kualitas pelaksanaan ujian.

Pemrosesan hasil ujian secara umum memakan waktu delapan sampai sepuluh minggu. Sedang waktu pengiriman, rata-rata membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Sehingga mahasiswa baru dapat menerima hasil ujiannya sepuluh minggu setelah ujian.

Jenis ujian yang dilaksanakan UT terdiri atas ujian objektif dan ujian uraian. Sehingga pemeriksaan hasil ujian terbagi atas dua bagian yaitu pemeriksaan terhadap hasil ujian objektif dalam bentuk lembar jawaban ujian (LJU) dan hasil ujian uraian dalam bentuk buku jawaban ujian (BJU). Semua ujian objektif diperiksa menggunakan *scanner (optical scanner)* dan selanjutnya diproses dengan komputer. Ketergantungan sistem pada tenaga manusia sangat kurang pada pelaksanaan pemeriksaan ujian jenis ini. Dilain pihak BJU diperiksa oleh manusia yang kemudian hasilnya barulah dimasukkan kedalam komputer. Pemeriksaan BJU dilakukan sendiri oleh staf UT yang sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun penguasaan bidang ilmunya, sehingga seringkali waktu

pemrosesan hasil ujian akan meningkat. Terganggunya salah satu komponen dalam pengelolaan hasil ujian mengakibatkan terlambatnya hasil ujian diterima oleh mahasiswa.

Tabel 6: Uraian Pengelolaan Ujian

Jenis Kegiatan	98.1	98.2	99.1
Naskah Ujian Mhs Reguler	592.704	579.586	481.837
LJU diproses utk mhs reguler	249.226	275.717	253.746
BJU diproses utk mhs reguler	25.517	24.508	24.965
DNU untuk mhs reguler	51.129	55.958	51.593
Naskah ujian Mhs Penyetaraan	1.134.631	1.513.469	1.165.888
Nilai yang diproses untuk program penyetaraan	879.290	1.102.828	*
DNU mhs penyetaraan	174.801	216.185	*

\* = Data belum selesai diproses

Tabel 7: Sebaran Matakuliah Yang Diujikan untuk mahasiswa UT-Reguler menurut jenis ujian per masa ujian

Masa Ujian	Total Matakuliah yang diujikan	Matakuliah Objektif	Matakuliah Uraian
96.1	570	496	74
96.2	583	500	83
97.1	589	498	91
97.2	626	497	129
98.1	634	505	129
98.2	646	513	133

Tabel 8 : Sebaran Peserta Ujian Matakuliah Uraian Masa Ujian 98.2

No	Kode Matakuliah	Matakuliah	Jumlah Peserta
1	Adne4110	Kebijakan Publik	1.711
2	Adni4333	Manajemen Keuangan	439
3	Adpe4211	Sistem Politik Indonesia	1.976
4	Mana4232	Pembelajaan I	2.223
5	Mana4336	Manajemen Produksi I	1.906
6	Mana4337	Manajemen Pemasaran I	1.963
7	Mana4438	Akuntansi Manajemen	636
8	Mana4439	Manajemen Sumber Daya Manusia I	1.945
9	Pina4436	Menulis I	306
10	Pina4471	Strategi Belajar Mnegajar Bahasa Indonesia	445
11	Ping4438	Writing	409
12	Ping4450	Pengantar Materi bahasa Inggris dan Kurikulum SMU 94	341
13	Pmak8190	Praktek Pengalaman Lapangan	800
14	Pmat4431	Kalkulus	743
15	Pmat4435	Geometri Analitik Ruang	601
16	Pmat4470	Pengajaran Matematika	451

Catatan: Yang diambil hanya matakuliah dengan peserta di atas 300 mahasiswa

### **Sistem Pengelolaan**

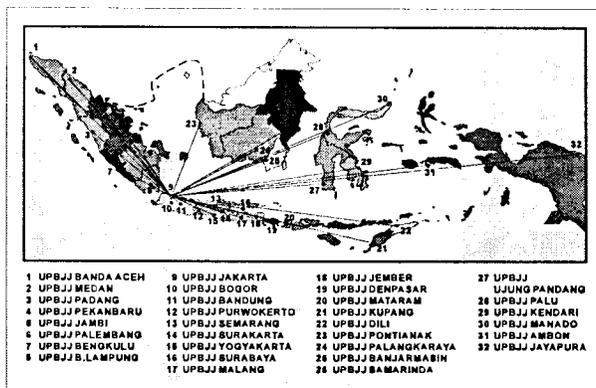
Organisasi UT dirancang untuk mendukung sistem yang diterapkan UT dengan mengacu pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Salah satu ciri lembaga pendidikan jarak jauh menurut Keegan (1991) adalah *"keterlibatan organisasi pendidikan dalam perencanaan dan persiapan bahan ajar dan ketersediaan*

*pelayanan pada mahasiswa*". Pada universitas konvensional, hal ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang bahkan oleh satu orang, namun pada lembaga pendidikan jarak jauh kegiatan tersebut dilakukan oleh unit-unit kerja dengan melibatkan banyak orang. Keterkaitan fungsi unit-unit dalam suatu organisasi pendidikan jarak jauh sangat erat dan saling bergantung (Daniel 1996). Sehingga, organisasi lembaga pendidikan jarak jauh agak berbeda dengan universitas konvensional. Keberadaan UPBJJ dalam organisasi UT, merupakan salah satu contoh perbedaan ini.

UPBJJ merupakan perwakilan UT di daerah dan sebagai perpanjangan tangan UT di wilayahnya untuk menjangkau mahasiswa. Gambar 7 memberikan ketersebaran UPBJJ UT di seluruh Indonesia. Hubungan antara mahasiswa dan UPBJJ sangat erat, karena mulai dari mendaftarkan matakuliah yang dilakukannya pada setiap semester sampai dengan mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda, mahasiswa harus melakukannya melalui UPBJJ. Sekalipun mahasiswa tidak perlu hadir secara langsung di UPBJJ, namun setiap UPBJJ berkewajiban melayani mahasiswanya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas UPBJJ beberapa kebijakan telah ditetapkan oleh pimpinan UT, sehingga terjadi desentralisasi beberapa tugas UT Pusat. Penjualan formulir registrasi di UPBJJ yang selama ini hanya dapat dilakukan di kantor pos, penjualan bahan ajar cetak, serta registrasi matakuliah adalah contoh dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan ujian, penyiapan lokasi ujian, pengawas ujian, serta pendistribusian bahan ujian yang sesuai dengan lokasi ujian dilakukan oleh UPBJJ. Dengan demikian peran UPBJJ dalam melaksanakan pelayanan pada mahasiswa sangat besar.



Gambar 7: Jaringan Operasional

Agar terjadi efisiensi dalam pengelolaan, organisasi UT dibentuk berdasar fungsi yang diembannya dan lebih bersifat sentralistik. Penanggung jawab materi pembelajaran dilakukan di empat fakultas. Namun produksi dari bahan ajar dilakukan oleh unit-unit lain seperti Pusat Penerbitan untuk bahan ajar cetak dan Pusat Produksi Media untuk bahan ajar A/V. Bahan ujian, pelaksanaan ujian, dan pengolahan hasil ujian dilakukan di bawah tanggung jawab Pusat Pengujian. Dalam pelaksanaan ujian, Pusat pengujian melakukan koordinasi dengan UPBJJ sebagai pelaksana di masing-masing wilayah. Baik bahan Ajar maupun naskah ujian didistribusikan ke UPBJJ oleh Pusat Distribusi.

Registrasi mahasiswa yang dilaksanakan di UPBJJ dilakukan di bawah koordinasi BAAKRENSI sehingga pintu masuk ke UT Pusat hanya satu. Demikian pula dengan pelayanan pada mahasiswa dilakukan oleh Unit Pelma, yang merupakan koordinasi beberapa unit kerja.

Untuk mendukung kegiatan unit-unit ini, pemrosesan data dilakukan dengan komputer. Untuk ini semua menyediakan fasilitas perangkat keras dan lunak yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan dikoordinasikan oleh Pusat Komputer.

Pengembangan bahan ajar dan bahan bantuan belajar dilakukan oleh Pusat Penelitian Media untuk bantuan belajar dengan media internet dan Pusat Antar Universitas (PAU) untuk penyiapan tenaga tutor ataupun bahan bantuan belajar dengan komputer (CAI). Dari segi pengembangan ini saja dapat terlihat bahwa hasil kerja dilakukan di bawah koordinasi unit-unit tertentu, di luar penanggung jawab materi atau substansi pembelajaran. Demikian pula untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilakukan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.

Semua kegiatan tersebut dilakukan di bawah koordinasi masing-masing Pembantu Rektor. Dengan gambaran ini maka staf akademik UT melaksanakan peran yang berbeda dengan peran dosen di universitas konvensional. Atau dapat dikatakan bahwa staf akademik UT mempunyai tugas tambahan yang sifatnya rutin, yang tidak terdapat di universitas konvensional.

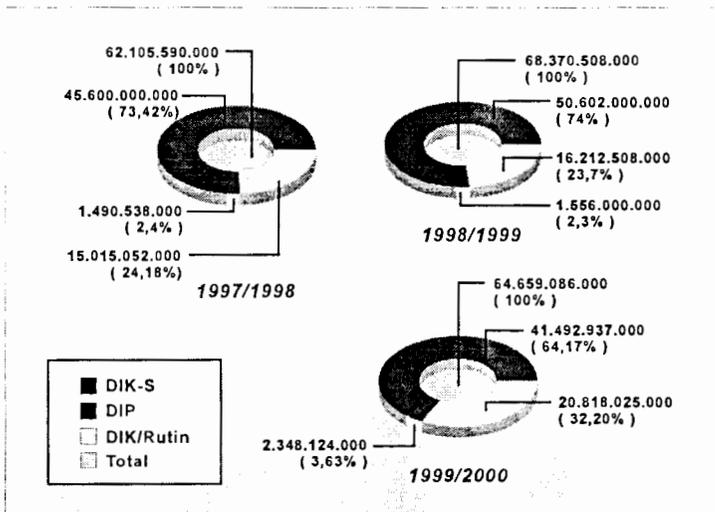
Selain bentuk organisasi, manajemen UT juga agak berbeda dengan universitas konvensional. Dalam penyiapan bahan ajar dan bahan ujian telah terlihat bahwa UT tidak dapat terlepas dari hubungan kerja dengan universitas konvensional. Di samping itu tersebar nya mahasiswa yang sangat bervariasi di setiap wilayah mengakibatkan UT perlu menggunakan semua sarana komunikasi yang mungkin untuk melayani mahasiswanya. Kemitraan dengan PT Pos Indonesia dalam penyelenggaraan registrasi dan pengiriman bahan ujian dan hasil ujian, juga adalah bentuk lain dari hubungan kerja UT dengan lembaga lain. Selain itu UT juga menggunakan BRI sebagai tempat pembayaran biaya belajar.

Pelayanan UT kepada mahasiswa sangat bergantung pada hasil kerja mitra kerja ini, PT Pos Indonesia misalnya merupakan mitra terpenting dalam menjamin ketepatan waktu dalam pengiriman bahan ujian serta hasil ujian pada mahasiswa, terutama mahasiswa reguler. Selain ketepatan waktu, juga keamanan bahan yang dikirim tentunya sangat penting mengingat bahwa bahan ujian UT juga sebagian dikirim melalui pos.

## Sumberdaya

Untuk dapat mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan UT, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Gambar 8 menggambarkan kebutuhan dana untuk pengoperasian kegiatan belajar mengajar UT dalam tiga tahun terakhir. Baik penerimaan dana ataupun pendanaan suatu kegiatan dilakukan secara sentral, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan pada waktu yang telah direncanakan.

Gambar 8 juga memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir lebih dari 60% dana UT berasal dari masyarakat, yang bersumber dari SPP ataupun penjualan benda UT. Dengan demikian maka sumber pemasukan bagi UT ini, harus selalu diperhatikan.



Gambar 8: Perkembangan Data Keuangan

Hubungan kerja dengan universitas konvensional yang dinyatakan dalam pemanfaatan keahlian tenaga dosennya untuk kepentingan proses pembelajaran di UT mengakibatkan secara fungsi seorang tenaga akademik UT tidak akan sama dengan rekannya pada universitas konvensional. Sehingga penyiapan tenaga pengajar

untuk keahlian pada bidang ilmu seperti yang tercerminkan dalam kurikulum suatu program studi, bukan menjadi prioritas utama.

Tenaga pengajar UT lebih difungsikan pada tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan ajar, bantuan belajar, dan evaluasi hasil belajar. Pelaksana dari butir ini dapat diperoleh dari universitas konvensional. Bukan berarti UT tidak memerlukan tenaga ahli sendiri, namun karena tenaga dosen universitas konvensional juga dapat dicatat sebagai tenaga dosen UT, kebutuhan ini tidak terlalu dominan. Hal ini mengakibatkan bahwa keterkaitan antara UT dengan universitas pembina merupakan bagian dari sistem yang tak terpisahkan.

JABATAN	FEKON		FISIP		FMIPA		FKIP		TOTAL
	PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH	
Magang Dosen	7	-	16	-	18	-	3	-	44
Asisten Ahli Madya	7	4	15	2	11	-	28	80	147
Asisten Ahli	7	1	15	4	26	2	37	158	250
Lektor Muda	13	4	14	4	35	5	40	118	233
Lektor Madya	3	-	4	-	8	-	13	34	62
Lektor	1	-	4	1	1	-	11	15	33
Lektor Kepala Madya	-	-	1	1	2	-	3	1	8
Lektor Kepala	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Guru Besar Madya	-	-	1	-	1	-	2	-	4
Guru Besar	1	-	-	-	2	-	2	-	6
Total Pusat	39		70		104		142		
Total Daerah		9		11		7		406	
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>		<b>81</b>		<b>111</b>		<b>548</b>		<b>788</b>

Gambar 9: Tenaga Akademik Menurut Jabatan Fungsional (Mei 1999)

Tenaga pengajar yang melaksanakan semua kegiatan proses belajar mengajar, diluar penulis bahan ajar dari luar UT, terlihat dalam Gambar 9. Dengan 788 staf akademik yang tersebar di empat fakultas dan unit-unit lainnya di UT serta staf administrasi yang terdapat di UT Pusat maupun UPBJJ, sistem UT dilaksanakan. Staf administratif sejumlah 685, yang terdapat di UT Pusat maupun UPBJJ, merupakan pendukung kegiatan yang sangat erat hubungan kerjanya dengan staf akademik.

Beragamnya kegiatan yang diselenggarakan secara rutin dan keterkaitan masing-masing unit sangat erat, sehingga batasan nyata antara tugas akademik dengan administratif agak kabur. Hal ini agak sulit dipahami, terutama oleh pihak-pihak di luar UT. Sekalipun sejak awal berdirinya hal ini telah disadari oleh para konseptor UT. Kenyataan ini terbukti dengan sulitnya pengakuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf akademik UT pada unit-unit pendukung. Demikian pula dengan organisasi UT yang masih mengadopsi organisasi universitas konvensional, di mana secara fungsional tidak dapat diterapkan pada UT. Keberanian UT dalam memformulasikan bentuk kegiatannya yang tidak terdapat pada universitas konvensional belum terwujudkan, di samping itu pihak luar UT juga belum dapat menerima perbedaan yang ada ini sebagai suatu kenyataan.

Setelah melalui 15 tahun pertama dari perjalanannya, UT perlu menentukan dengan segera jati dirinya. Dari sinilah akan dimulai suatu perencanaan kerja, pengembangan, dan prioritas pelaksanaan kegiatan, tanpa meninggalkan fungsinya sebagai pengemban tri dharma perguruan tinggi.

### **Daftar Pustaka**

- Verduin Jr, J.R., & Clark Thomas A., (1991). *Distance Education*. California USA: Jossey Bass Inc.
- Daniel, J.S. (1996). *Mega Universities & Knowledge Media*. Kogan Page.
- Bahan Presentasi Rektor Universitas Terbuka*, Februari 1996.
- Laporan Rutin Pusat Komputer*, (1999).
- Katalog Universitas Terbuka*, Edisi kedua. (1998).
- Universitas Terbuka*, (Agustus 1999).

## **14. PELEMBAGAAN UPAYA PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI**

---

---

Subagjo

### **Pendahuluan**

Perguruan tinggi, sebagai salah satu institusi sentral dalam pembangunan Indonesia, secara terus menerus dihadapkan pada berbagai perubahan yang bergerak sangat cepat dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menimbulkan beragam tantangan baru bagi dunia pendidikan tinggi. Tantangan dan perkembangan tersebut mempersyaratkan perguruan tinggi untuk berubah, baik dari segi pandangan serta asumsi dasarnya, sistem nilai dan sistem pendidikan yang dianut, tatanan struktur institusi, proses pengelolaan, program akademik, serta standar mutu masukan dan keluaran. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, perguruan tinggi perlu selalu melakukan pemantauan, analisis, serta perencanaan pengembangan perguruan tinggi secara berkesinambungan.

Walaupun demikian, perubahan-perubahan yang terjadi sedemikian cepatnya menyebabkan mutu akademik saat ini dari perguruan tinggi tidaklah sama dengan mutu akademik di waktu yang lampau, dan tidak juga akan menjadi mutu akademik di masa mendatang. Dengan demikian, perguruan tinggi dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan mutu akademiknya. Menurut Mangindaan (1994), dalam segi apapun, usaha pencapaian akan kualitas tidak akan pernah berakhir. Kebutuhan akan perubahan ke arah yang lebih baik tidak pernah ada hentinya (Mangindaan, 1994). Sementara itu, mutu akademik, merupakan salah satu pilar

utama dari keberadaan perguruan tinggi. Mutu akademik merupakan isu sentral dalam sistem pendidikan tinggi. Jika terjadi perubahan dalam hal mutu akademik, dengan sendirinya, seluruh mata rantai perguruan tinggi akan berubah secara sinergis sebagai satu kesatuan. Keberhasilan, kredibilitas (keterpercayaan) dan akuntabilitas suatu perguruan tinggi sangat tergantung pada mutu akademiknya. Oleh karenanya, upaya-upaya peningkatan mutu akademik di perguruan tinggi merupakan upaya yang berkesinambungan, yang tidak pernah berhenti.

Dalam perjalanan pengembangan pendidikan tinggi, beragam program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik telah dilakukan, baik sebagai inisiatif mandiri dari perguruan tinggi, maupun sebagai inisiatif kolektif dari pemerintah. Program-program tersebut dirancang sebagai program yang mengupayakan peningkatan kualitas dosen, peningkatan kualitas mahasiswa (melalui proses rekrutmen yang terseleksi, dan kriteria kelulusan yang baku), peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas karyawan. Diasumsikan program yang beragam tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu akademik perguruan tinggi. Jika dosen berkualitas, proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik, sehingga akan diperoleh hasil pembelajaran yang baik, dalam hal ini, lulusan yang berkualitas.

Persepsi tersebut begitu sederhana dibandingkan masalah mutu akademik dalam suatu perguruan tinggi yang sesungguhnya sangat kompleks. Di samping itu, persepsi ini juga menggambarkan pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan secara parsial dan fragmentaris berdasarkan masalah yang timbul. Dengan demikian, proses dan upaya-upaya pengendalian mutu pendidikan tinggi terjadi lebih sebagai respon yang sporadis terhadap masalah yang dihadapi perguruan tinggi daripada upaya sistemik yang terintegrasi ke dalam sistem perguruan tinggi.

Salah satu cara untuk mengorganisasikan beragam upaya pengendalian mutu akademik di perguruan tinggi secara sistemik adalah melalui pengembangan wadah yang dapat mengakomodasikan terjadinya upaya antisipatif perguruan tinggi terhadap perkembangan dan berbagai tantangan, implementasi

perubahan-perubahan yang direncanakan di perguruan tinggi, pemantauan serta analisis terhadap praktek kegiatan akademik yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Melalui pewadahan ini, proses dan upaya pengendalian mutu akademik menjadi bukan sekedar respons yang sporadis lagi, tetapi merupakan kegiatan yang terencana, terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga dapat menghasilkan dampak yang nyata dan bermakna dalam peningkatan mutu akademik di perguruan tinggi.

### **Mutu Akademik**

Proses pembelajaran merupakan penentu utama dari mutu akademik di perguruan tinggi. Dalam hal ini, proses pembelajaran tidak sama artinya dengan *perkuliahan* atau *proses belajar mengajar di kelas* yang selama ini dianggap sebagai jantung hati perguruan tinggi. Jantung hati perguruan tinggi adalah mutu akademik yang secara nyata diwujudkan melalui hubungan kerjasama dan interaksi yang intensif antara staf akademik dengan siswa melalui pemanfaatan beragam sumber belajar – perpustakaan, laboratorium, lingkungan, dll. Bidang ilmu menjadi sarana untuk terjadinya interaksi tersebut. Kesemua itu menggambarkan proses pembelajaran di perguruan tinggi, yaitu proses untuk mengembangkan siswa agar menguasai keterampilan dan metode, dengan jalan mana ia dapat secara ilmiah mengkaji, memilih, dan menerapkan informasi yang baru didapatkannya.

Masalah utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu akademik di perguruan tinggi adalah masalah keseimbangan antara tuntutan pemerataan di satu pihak dengan tuntutan kualitas dan relevansi di lain pihak. Proses pendangkalan intelektual seringkali terjadi di banyak perguruan tinggi akibat arah pengembangan pendidikan lebih banyak ditujukan pada pembangunan kemampuan hardware dan software perguruan tinggi untuk dapat menampung siswa yang makin meningkat jumlahnya, dan pada pelaksanaan kurikulum – penyampaian materi bidang ilmu sesuai dengan kurikulum. Sementara itu, perhatian terhadap isi substansial perguruan tinggi, yaitu proses pembelajaran, relatif minimal. Begitu juga pengembangan

kemampuan siswa untuk berpikir secara mandiri dan kritis yang memerlukan kebebasan akademis dan budaya akademis yang mendukung, sejauh ini belum memperoleh perhatian yang memadai dalam sistem perguruan tinggi.

Seruan untuk berubah sudah dikumandangkan oleh berbagai kalangan pendidikan, terutama dalam hal arah dan pendekatan proses pembelajaran di perguruan tinggi, dari yang berfokus kepada staf akademik menjadi berfokus kepada siswa, sehingga siswa lebih aktif, mandiri serta kritis dalam mengkonstruksikan ilmu pengetahuan bagi dirinya. Namun demikian, pada prakteknya, proses pembelajaran di perguruan tinggi pada umumnya tidak lebih dari sekedar proses penyampaian ilmu dari staf akademik kepada siswa. Staf akademik masih memiliki pandangan bahwa menjadi staf akademik berarti mengajar. Mengajar berarti memberi ceramah di muka kelas. Siswa dipandang sebagai penerima informasi yang pasif saja. Di samping itu, staf akademik kebanyakan percaya pada satu buku saja – disebut sebagai buku pintar, sehingga proses pembelajaran hanya didasarkan pada buku tersebut. Untuk mempermudah siswa (terutama jika buku pintar masih ditulis dalam bahasa asing), maka dibuatlah ringkasan atau diktat untuk dipelajari siswa. Munculnya sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang sangat “students oriented” pun belum dapat mengubah tradisi yang berlangsung. Kenyataan ini menimbulkan berbagai masalah yang pada akhirnya menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan tinggi, yaitu masalah mutu akademik di perguruan tinggi.

### **Pengendalian mutu akademik**

Pembenahan masalah mutu akademik tidak akan membawa dampak sebagaimana dikehendaki, apabila peta permasalahan secara utuh dan sistemik belum diidentifikasi, serta jika pemecahan masalah hanya dilakukan sebagai respon terhadap masalah yang timbul secara parsial atau tiba-tiba. Sejauh ini upaya pengendalian mutu akademik diasumsikan terjadi dengan sendirinya seiring dengan berjalannya proses perkuliahan di perguruan tinggi, karena memang belum ada wadah yang secara khusus menangani hal tersebut.

Upaya pengendalian mutu akademik yang diasumsikan terjadi dengan sendirinya, agak berbeda dengan upaya pengendalian mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah secara struktural dan sistemik ditangani oleh perguruan tinggi. Padahal, perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan dengan mutu akademik sebagai jantung hatinya, sehingga pengorganisasian upaya pengendalian mutu akademik secara sistemik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Beragam upaya pengendalian mutu akademik telah dilakukan oleh perguruan tinggi maupun pemerintah. Secara umum, upaya-upaya tersebut tergabung dalam beberapa kategori, yaitu yang berfokus pada staf akademik, pada aktivitas instruksional, serta pada program akademik.

Upaya pengendalian mutu yang berfokus pada staf akademik meliputi beragam aktivitas yang ditujukan untuk peningkatan mutu tenaga dosen serta peningkatan profesionalisme dosen, baik melalui peningkatan pendidikan formal ataupun informal. Diasumsikan, jika staf akademiknya berkualitas, maka proses pembelajaran akan meningkat, dan mutu akademik perguruan tinggi juga akan meningkat. Aktivitas-aktivitas tersebut, antara lain, pertukaran staf, pelatihan dan penataran di bidang pembelajaran dan penilaian, pembimbingan individu tentang pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembelajaran, pelatihan dan fasilitasi bagi staf untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, serta pendidikan lanjutan (S2, S3) dalam bidang ilmu maupun bidang pengayaan.

Tujuan utama upaya yang berfokus pada staf akademik adalah:

1. menunjukkan kepedulian perguruan tinggi terhadap peningkatan mutu staf akademik secara individual
2. meningkatkan produktivitas setiap staf akademik
3. meningkatkan kepuasan bekerja di kalangan staf akademik
4. memberikan fasilitas untuk perubahan peran sesuai tuntutan perkembangan
5. mengembangkan keterampilan staf akademik dalam bidang ilmu maupun pembelajaran ke arah yang lebih baik dan kontekstual.

Upaya pengendalian mutu akademik yang berfokus pada aktivitas instruksional meliputi beragam aktivitas untuk peningkatan mutu belajar siswa melalui pengembangan mata kuliah dan kurikulum, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan perancangan, implementasi dan evaluasi terhadap mata kuliah dan kurikulum.

Tujuan utama dari upaya yang berfokus pada aktivitas instruksional adalah:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga pengajar dan kegiatan akademis
2. meningkatkan pemanfaatan sumberdaya
3. meningkatkan aktivitas dan kualitas belajar mahasiswa
4. berusaha meningkatkan jumlah mahasiswa dan membuat mahasiswa senang belajar di perguruan tinggi tsb.
5. meningkatkan kepuasan tenaga pengajar dalam melaksanakan program pembelajaran.

Upaya pengendalian mutu akademik yang berfokus pada aktivitas instruksional, antara lain adalah program penyediaan laboratorium dan perpustakaan di perguruan tinggi, program hibah mengajar, program PEKERTI/AA, dan program manajemen mutu terpadu dalam pembelajaran.

Upaya pengendalian mutu akademik yang berfokus pada program akademik meliputi kegiatan analisis, perencanaan serta pelaksanaan struktur dan kebijakan program akademik secara menyeluruh, serta pembatasan peran dan keterkaitan unit-unit terkait dalam penyelenggaraan program akademik sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, upaya-upaya bersifat lebih menyeluruh dengan mencakup pengembangan staf akademik, pengembangan aktivitas instruksional, dan pengembangan program akademik pada tingkat perguruan tinggi.

Tujuan utama upaya yang berfokus pada program akademik adalah:

1. memperjelas peran dan keterkaitan antara satu unit dengan unit lain dalam sistem perguruan tinggi yang ada

2. mendiagnosa permasalahan akademik di perguruan tinggi
3. meningkatkan pola komunikasi dan umpan balik dalam bidang akademik
4. pemberdayaan staf akademik untuk pelaksanaan manajemen mutu terpadu dalam bidang akademik
5. meningkatkan suasana akademik yang kondusif
6. menyelesaikan permasalahan program akademik di perguruan tinggi.

Upaya-upaya yang berfokus pada program akademik, antara lain Development of Undergraduate Education (DUE), Quality of Undergraduate Education (QUE), DUE-like, QUE-like, semi-QUE, hibah bersaing lembaga pengembangan pendidikan, dan manajemen mutu terpadu program akademik.

Dari upaya-upaya tersebut, ada tingkatan mulai dari yang sangat terfokus pada staf akademik sampai pada yang berfokus luas, yaitu pada program akademik sebagai sebuah sistem. Hal ini menggambarkan perjalanan upaya pengendalian mutu akademik yang dijalankan di berbagai perguruan tinggi, mulai dari yang hanya mengendalikan staf akademiknya saja, sampai kepada yang berpikir secara sistemik, yaitu mengendalikan program akademiknya. Jika perguruan tinggi memikirkan pengendalian mutu akademik secara utuh terfokus pada program akademik, maka pewadahan beragam aktivitas pengendalian ke dalam suatu wadah – lembaga/unit pengembangan pendidikan, menjadi salah satu pilihan yang amat strategis.

### **Pengembangan wadah**

Wadah yang mengorganisasikan upaya pengendalian mutu akademik secara sistemik telah mulai dikembangkan di berbagai institusi pendidikan tinggi sejak tahun 1970-an. Pada awalnya, munculnya ide untuk membentuk wadah tersebut terutama didorong oleh keinginan para pengelola program pendidikan untuk membantu staf akademik dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Wadah semacam ini pertama kali dirintis pembentukannya oleh Harvard University, dengan nama Derek

Bok Teaching and Learning Center, yang memusatkan kegiatannya pada pengembangan instruksional, terutama penggunaan pendekatan "problem based learning" untuk bidang kedokteran (Lambert & Tice, 1993). Sejak tahun 1975 sampai sekarang, wadah semacam ini sudah berkembang di berbagai perguruan tinggi, konvensional maupun jarak jauh, dalam dan luar negeri.

Pengembangan wadah tersebut dapat berdampak positif terhadap proses pembelajaran karena secara gamblang menjelaskan bahwa perguruan tinggi menjadikan mutu akademik sebagai prioritas utama. Dengan pengelolaan yang baik dan benar, upaya tersebut juga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Pada akhirnya, upaya tersebut dapat meningkatkan mutu akademik di perguruan tinggi melalui proses pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan.

Sejauh ini, dalam kebanyakan tatanan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, wadah yang khusus untuk menangani upaya peningkatan dan pengendalian mutu akademik belum menjadi perhatian khusus. Banyak pimpinan perguruan tinggi menganggap bahwa karena institusinya adalah institusi pendidikan maka hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran sudah bergulir dengan sendirinya melalui terselenggaranya proses perkuliahan. Sementara itu, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang masing-masing berfungsi untuk membina kualitas penelitian dan kualitas pengabdian kepada masyarakat memperoleh perhatian yang cukup tinggi dari pimpinan dan masyarakat akademik di perguruan tinggi. Pramoetadi (1994) menyerukan perlunya ada satu lembaga yang sejajar dengan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu institusi pendidikan tinggi untuk menangani berbagai inisiatif dan upaya dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di institusi pendidikan tinggi tersebut. Menurut Pramoetadi (1994), selama ini berbagai inisiatif dan upaya perbaikan kualitas pembelajaran menjadi tidak berarti karena tidak tertata secara sistemik dan sistematis. Seruan tersebut dilandaskan kepada hasil penelitian terhadap program Applied

Approach yang dilakukan pada tahun 1991-1992, yang menyatakan perlunya suatu organisasi yang menangani secara sistematis upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Himbauan yang sama juga dilakukan oleh Dirbinsarak DIKTI melalui surat edaran no. 120/121 Januari 1995 tentang perlunya inisiasi dari masing-masing institusi pendidikan tinggi untuk mewadahi hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, salah satunya adalah kegiatan AA dan PEKERTI. Keberadaan wadah tersebut dipandang sangat penting, agar pengendalian mutu akademik di perguruan tinggi dapat diselenggarakan dengan terencana dan terpadu.

Wadah yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dapat menjadi tempat yang mengakomodasikan terjadinya proses pelaksanaan pengendalian mutu akademik secara berkesinambungan dan terpadu di perguruan tinggi. Oleh karena itu, fungsi utama wadah ini adalah sebagai "academic quality control" di suatu perguruan tinggi. Selain itu, wadah ini juga mengembangkan beragam program dan aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan mutu akademik (fungsi pengembangan), memantau dan mengevaluasi beragam program dan aktivitas peningkatan mutu yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (fungsi monitoring dan evaluasi), serta memberikan umpan balik baik kepada pelaksana program dan aktivitas peningkatan mutu, maupun kepada pimpinan perguruan tinggi.

### **Upaya Pengendalian Mutu Akademik di Universitas Terbuka – Sebuah Pemikiran**

Pengembangan wadah sebagai upaya pengendalian mutu akademik di perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh bukanlah hal baru. Misalnya University of the Air – Jepang memiliki National Institute of Multimedia Education yang berfungsi untuk melakukan pengembangan, penelitian, pemantauan, dan evaluasi terhadap sistem pembelajaran multimedia yang dilaksanakan oleh University of the Air, dan selanjutnya memberi masukan terhadap pimpinan perguruan tinggi untuk pengambilan keputusan berkenaan dengan mutu akademik perguruan tinggi tersebut. Begitu juga TAFE Sydney dan University of South Pacific – Fiji yang memiliki Office of

Educational Technology, atau Open Learning Institute – Hong Kong yang memiliki unit pengembangan program akademik. Pada umumnya, aktivitas ataupun kegiatan yang ditangani wadah tersebut di institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh berfokus pada pengembangan aktivitas instruksional dan pengembangan program akademik, untuk berfungsi sebagai pusat pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pengendali mutu akademik, serta penyedia informasi mutu akademik bagi pengambil keputusan.

Pada kenyataannya, wadah tersebut bagi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memiliki peran yang sangat esensial, karena proses pembelajaran di perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh sangat tergantung pada perencanaan yang sistematis dan perancangan proses pembelajaran. Sementara, upaya peningkatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi konvensional masih dapat diharapkan terjadi seiring dengan berlangsungnya proses perkuliahan.

Dalam rangka peningkatan dan pengendalian mutu akademik, serta pengorganisasian kegiatan-kegiatan pengkajian dan pengembangan akademik di Universitas Terbuka (UT), seyogyanya UT memulai suatu upaya pengembangan wadah yang disebut Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Upaya ini didasarkan pada kenyataan bahwa setelah 15 tahun berjalan, sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diterapkan UT menyajikan beragam permasalahan, terutama masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya perlu ditangani secara serius. Masalah intrinsik dalam proses pembelajaran di UT menandakan perlunya upaya peningkatan kualitas yang sistemik dan berkesinambungan. Begitu juga kegiatan-kegiatan pengkajian dan pengembangan akademik di UT yang sudah dirintis namun masih belum terorganisasi secara sistemik dan berkesinambungan mempersyaratkan UT untuk memiliki lembaga yang mewadahi hal-hal tersebut.

## **UT dan Permasalahannya**

Sampai saat ini, UT masih berperan sebagai satu-satunya penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia pada tingkat pendidikan tinggi. Mengingat perkembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang sangat pesat ini, UT perlu berupaya keras untuk mempertahankan keberadaannya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang handal dan berkualitas, serta menjadi pusat unggulan untuk pengembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia sehingga UT dapat memberikan bantuan kepada setiap institusi pendidikan yang berminat mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang handal dan berkualitas artinya UT mampu memberikan layanan pendidikan kepada siapa saja, dalam bidang apa saja, di mana saja, kapan saja, melalui beragam cara. Dalam hal ini berarti UT mempunyai posisi strategis dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu, karena UT mempunyai standar mutu yang sama dari ujung Sabang sampai Merauke, maka UT juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjembatani kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia yang belum merata saat ini.

Sebagai pusat unggulan pengembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia, artinya dengan berbekal pengalaman, kemampuan dan komitmen, UT bertekad menjadi pemimpin dalam penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Sebagai pusat unggulan, UT akan terus menerus melakukan penelitian dan pengembangan dalam berbagai aspek pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang dapat digunakan untuk pengembangan dan peningkatan organisasi UT sendiri, dan juga untuk pemberian layanan kepada institusi-institusi pendidikan lain yang berusaha mengembangkan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. (Renstra UT, 1998-2007)

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas di segala bidang agar UT dapat mempertahankan keberadaannya sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang

handal dan berkualitas di era globalisasi dan yang pada akhirnya menjadi pusat unggulan pengembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia menantang UT untuk mampu menerima keterbukaan kepakaran atas dasar 'mutually acceptable standard' dan kemampuan mencirikan keunggulan kompetitif pendidikan UT, yaitu pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Tuntutan ini hanya dapat dipenuhi bila UT selalu mengadakan perbaikan-perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan baik ke dalam maupun ke luar. Salah satu upaya pengembangan dan peningkatan yang dapat dilakukan oleh UT adalah meningkatkan kualitas proses pembelajarannya, yang merupakan salah satu pilar utama eksistensi UT sebagai institusi pendidikan (tinggi terbuka dan jarak jauh).

Proses pembelajaran di UT menghadapi beberapa masalah antara lain:

1. Kebudayaan Indonesia belum mendukung proses belajar mandiri, sehingga ketika mahasiswa masuk untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran di UT, sebagian besar tidak terbiasa belajar mandiri.
2. Layanan pendukung yang diberikan UT untuk mendukung terlaksananya proses belajar mahasiswa masih relatif terbatas.
3. Mutu bahan ajar UT masih perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan jaman agar mampu mengakomodasikan proses interaksi antara siswa dengan bidang ilmu secara optimal, baik melalui penyesuaian substansi (validitas isi), maupun penyampaiannya (metode).
4. Pemanfaatan sarana pembelajaran untuk proses pembelajaran pendidikan terbuka dan jarak jauh yang belum efisien dan efektif
5. Metode dan proses pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan untuk menanggapi perubahan dan perkembangan (responsiveness).
6. Bentuk model administrasi proses pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang masih perlu ditata.

7. Belum mantapnya bentuk dan model penilaian hasil belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
8. Belum mantap metode baku tentang pemantauan dan evaluasi mutu pendidikan terbuka dan jarak jauh (kriteria untuk output dan outcome).

Kesemua permasalahan tersebut kemudian menimbulkan serangkaian permasalahan lanjutan berupa rendahnya indeks prestasi mahasiswa, kualitas lulusan yang belum memadai, serta akuntabilitas dan kredibilitas institusi yang rendah. Upaya untuk mengatasi permasalahan telah dicoba dilakukan oleh UT melalui berbagai cara, misalnya pengiriman staf akademik untuk studi lanjut di dalam maupun luar negeri, pembentukan satuan tugas untuk mengkaji beragam alternatif pemecahan masalah, pelatihan-pelatihan, pembenahan kurikulum, serta penelitian. Namun demikian, belum terasa adanya sinergis antara kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah dirancang berdasarkan suatu proses perencanaan yang cukup panjang. Dengan demikian, dampaknya belum terlihat nyata, dan bahkan masih jauh dari yang diharapkan.

### **Tujuan, Peran, Fungsi wadah**

Mengacu kepada perkembangan yang pesat di segala bidang dan permasalahan akademik yang dimiliki UT, maka UT perlu memiliki wadah yang bersifat tetap untuk membina dan mengembangkan mutu, memperoleh efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di UT, memelihara ketergayutan penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di UT dengan kebutuhan pembangunan nasional, mewujudkan suasana proses pembelajaran di UT menurut norma dan etika yang telah ditetapkan, dan menjadi sumber acuan dalam usaha peningkatan dan pengembangan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, serta membantu meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional pada umumnya.

Secara khusus, wadah ini diharapkan dapat berperan dalam :

- melahirkan konsep dan strategi pembelajaran pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh melalui proses pengkajian, pengembangan, serta pemanfaatan sumber daya

- mendorong dan membantu para staf akademik, baik LPTK maupun non-LPTK untuk melakukan pengkajian kegiatan pembelajaran dalam pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.
- memfasilitasi terjadinya kreativitas pengkajian dan pengembangan berbagai prototipe bahan ajar, model pembelajaran, model evaluasi hasil belajar, dan model kendali mutu dalam sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh
- mendorong dan membantu pengembangan dan peningkatan kegiatan pembelajaran yang berkualitas melalui penerapan teknologi pembelajaran oleh para staf akademik di berbagai institusi pendidikan
- memfasilitasi pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan dan peningkatan mutu program akademik dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
- membantu perkembangan bidang ilmu teknologi pendidikan untuk pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia secara umum.

Dalam menjalankan perannya, wadah ini akan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan dan Senat Universitas Terbuka, serta fakultas dan unit-unit terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh sebagai hasil pemantauan, evaluasi, kajian, dan pengembangan yang dilakukan, serta mengupayakan beragam strategi pemecahan masalah dan upaya peningkatan pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh, khususnya proses pembelajaran, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, wadah tersebut diharapkan berfungsi sebagai pusat pengembangan, pusat pengkajian, pusat pemantauan dan evaluasi, dan pusat pengendalian mutu akademik di UT.

Secara umum wadah yang akan dibentuk di UT adalah agen pembaharuan dalam hal pembelajaran untuk sistem pendidikan tinggi pada umumnya dan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh pada khususnya, fasilitator untuk berbagai kegiatan (pelatihan, pengkajian, evaluasi, pengembangan, dll.) yang

dilakukan oleh staf akademik UT (dan non-UT) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran di UT maupun di luar UT, diseminator yang menyediakan dan menyebarkan berbagai hasil kajian dan pengembangan kegiatan pembelajaran dalam pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh ke unit-unit UT yang memerlukan dan ke berbagai instansi lain yang berminat atau perlu, serta merupakan *professional clinic* bagi staf akademik UT dan instansi lainnya melalui penyediaan jasa konsultasi untuk mengembangkan, meningkatkan, mengevaluasi, dan mencari pemecahan masalah pembelajaran secara umum, dan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh secara khusus. Dalam berfungsi sebagai pengendali mutu akademik, wadah ini membantu menyediakan masukan bagi pimpinan UT untuk pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan akademik UT.

Wadah ini memegang peran sangat penting bagi keberlangsungan program akademik di UT. Perencanaan, pengembangan dan peningkatan program akademik di UT memerlukan pengkajian dan perancangan yang matang jauh sebelum suatu program akademik diluncurkan, dan pemantauan secara intensif dalam pelaksanaannya. Perubahan dan modifikasi secara tiba-tiba dapat menyebabkan tidak berjalannya sistem UT secara utuh, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap mutu akademik UT. Diharapkan, jika UT sudah memiliki lembaga ini, mutu akademik UT sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, terpadu dan terkendali.

## **Kesimpulan**

Beragam masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama masalah akademik, merupakan tantangan yang perlu dijawab secara serius. Upaya-upaya pemecahan masalah yang bersifat sporadis sebagai respon terhadap masalah yang muncul menghasilkan dampak pemecahan masalah yang bersifat sementara. Pewadahan terhadap upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang penting untuk dapat mengendalikan mutu akademik di perguruan tinggi secara berkesinambungan dan terpadu. Tidak adanya wadah khusus yang menangani hal-hal

yang berkenaan dengan upaya pemecahan masalah akademik sebagai bentuk pengendalian mutu akademik perguruan tinggi akan mengakibatkan penanganan masalah akademik yang tidak sistematis, tidak berkesinambungan dan tidak terpadu. Dengan demikian, pewadahan tersebut adalah untuk pengendalian mutu akademik di perguruan tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan diri, UT melakukan pembenahan terhadap mutu akademiknya, yang merupakan salah satu pilar dari keberadaan UT sebagai institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Salah satu upaya yang dilakukan UT adalah dengan pewadahan upaya-upaya pengembangan program akademik di UT secara terpadu dan terkendali. Pewadahan tersebut menjadi sangat penting bagi UT karena segala upaya pengembangan dan pengendalian mutu akademik di UT harus dirancang secara terencana dan terpadu jauh sebelum dilaksanakan. Mutu akademik UT diharapkan dapat ditingkatkan dan dikendalikan secara berkesinambungan melalui pewadahan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Brodjonegoro, S.S. Management Change in University Towards 21st Century: The Indonesian Policy. Dalam *Proceedings of The International Seminar on Managing Higher Education in the Third Millenium*, Jakarta, Oktober 1999.
- Craft, A. *International Developments in Assuring Quality in Higher Education*. London: The Falmer Press, 1994.
- Diamond, R. *A Systematic Approach to Course and Curriculum Design*. Syracuse: Center for Instructional Design, Syracuse University, 1987.
- Ditjen DIKTI, *Program Pengembangan Pusat Pengembangan Pendidikan di Perguruan Tinggi: Kerangka Acuan Kerja*. Jakarta: Ditjen DIKTI, Depdikbud, 1997

- Ditjen DIKTI, *Program Pengembangan Pusat Pengembangan Pendidikan di Perguruan Tinggi: Kerangka Acuan Kerja*. Jakarta: Ditjen DIKTI, Depdikbud, 1999
- Kajian Pustaka & Hasil Studi Banding tentang Pengembangan Unit P2AI Di Berbagai Institusi Dalam dan Luar Negeri*. Jakarta: PAU-PPAI-UT, 1998
- Lambert, L.M. & Tice, S.L. *Preparing Graduate Students to Teach*. Washington, D.C.: American Association for Higher Education, 1993
- Mangindaan, C. The Quality of Higher Education. Dalam Latchem, C., Hartono, T. & Purnomo, H. (eds.) *Improving Teaching and Learning in Higher Education: Indonesian-Australian Experiences*. Malang: Universitas Brawijaya, 1996.
- Pramoetadi, S. *Pembinaan Kualitas di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud, 1994.
- Semiawan, C.R. & Soedijarto. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Grasindo, 1991
- Universitas Terbuka. *Rencana Pembangunan UT 1998-2008*. Jakarta: UT, Depdikbud.

## ***BAB III***

# ***PENGEMBANGAN PENDIDIKAN***



## **15. PENDIDIKAN LUAR BIASA: PROFIL, HARAPAN, DAN TANTANGAN**

---

I.G. A. K. Wardani

### **Pendahuluan**

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 menetapkan bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketetapan ini dikukuhkan kembali dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Bab III, Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Berkaitan dengan ketentuan ini, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa: (1) warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa; (2) warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus; serta (3) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam Undang-undang No. 2/tahun 1989 tersebut merupakan landasan konstitusional Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental; sedangkan satuan pendidikan luar biasa adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa. Bertitik tolak dari peraturan ini, pemerintah menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak yang menyandang kelainan mental dan/atau fisik.

Tahun 1999, UUSPN telah berusia 10 tahun. Selama 10 tahun tentu telah banyak yang diperbuat oleh para pejabat dan pendidik yang peduli terhadap masa depan bangsa. Berbagai gagasan dan tindakan yang bersumber dari UUSPN tersebut telah direalisasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan luar biasa. Namun, setelah keberadaan PLB diakui secara konstitusional, sebuah pertanyaan yang sangat mendasar perlu dijawab "Seberapa jauh keberadaan layanan PLB ini berdampak positif bagi kesejahteraan/pengembangan potensi/masa depan para penyandang kelainan?" Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan berbagai usaha, seperti melakukan penelitian yang berskala nasional, melakukan kajian pustaka, atau kombinasi keduanya, yang dapat dilakukan dengan suatu renungan atau refleksi yang memungkinkan seseorang melihat kembali apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi dalam bidang pendidikan luar biasa.

Artikel ini bermaksud menuangkan hasil renungan atau refleksi yang berupa kajian beberapa aspek yang terkait dengan pelayanan anak berkelainan, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek yang memberi harapan bagi penyandang kelainan dan sekaligus merupakan tantangan bagi mereka yang peduli terhadap PLB. Kajian ini akan dimulai dengan profil PLB yang mencakup keberadaan layanan PLB, sikap masyarakat terhadap penyandang kelainan, dan sistem pelayanan; kemudian dilanjutkan dengan harapan penyandang kelainan, serta tantangan yang dihadapi oleh PLB. Sebagai penutup akan diulas implikasi kondisi nyata ini terhadap peningkatan pelayanan bagi penyandang kelainan.

### **Sepintas tentang Keberadaan Layanan Pendidikan Luar Biasa**

Tuhan menciptakan makhluknya dengan berbagai kondisi. Ada yang dilahirkan normal dan berkembang tanpa mengalami hambatan, namun ada pula yang lahir normal dan mengalami hambatan dalam perkembangannya, sehingga memerlukan layanan khusus agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang optimal. Selanjutnya, ada pula yang sejak lahir sudah mengalami kelainan, sehingga layanan khusus yang diperlukan harus

disediakan secara lebih intensif. Kondisi seperti ini tetap terjadi sepanjang jaman, meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang medis telah mampu mengurangi berbagai kelainan, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang didapat dalam proses perkembangan manusia. Di lain pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga membawa dampak negatif bagi kesejahteraan umat manusia, lebih-lebih jika masyarakat belum siap menerima berbagai perubahan yang terjadi. Sebagai contoh, beredarnya berbagai obat terlarang yang digunakan secara salah akan mempengaruhi kesehatan manusia, dan pada gilirannya berdampak pada lahirnya bayi-bayi yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental, jika yang mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut kaum wanita.

Sejalan dengan uraian tersebut, warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental sudah ada sejak jaman purba. Oleh karena itu, pelayanan khusus kepada mereka pun seyogyanya sudah tersedia sejak lama. Namun, pelayanan khusus ini, baru dapat ditelusuri mulai abad 18. Di Amerika Serikat, keberadaan layanan ini, terutama untuk anak tunagrahita, tunarungu-wicara, dan tunanetra baru dimulai abad 19. Pada sekitar pertengahan abad ke 19, Edouard Senguin, yang merupakan protipe dari Itard (pendiri sekolah untuk anak tunagrahita di Paris), bermigrasi ke Amerika Serikat. Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa sekolah yang serupa untuk anak tunagrahita juga dibuka di Amerika Serikat. Tahun 1817 di Connecticut, Amerika Serikat didirikan *American Asylum for the Deaf*, yaitu sekolah untuk anak tunarungu-wicara. Sekolah untuk anak tunanetra didirikan di Amerika Serikat untuk pertama kali pada tahun 1831 di Watertown, Massachusetts (Gearheart, 1980; Reynold & Birch, 1988). Selanjutnya, pelayanan untuk anak berkelainan mengalami perkembangan yang cukup pesat yang dikukuhkan melalui serangkaian undang-undang, salah satu di antaranya yang sangat terkenal adalah *Public Law 94-142*, yang diundangkan pada tahun 1975 dan berlaku efektif tahun 1978. Undang-undang ini, yang disebut sebagai: *The Education of All Handicapped Children Act*, menjamin hak setiap anak untuk mendapat pendidikan yang sesuai, yang bebas biaya, dan dilaksanakan dalam lingkungan yang paling tidak terbatas (*least restrictive environment*).

Di Indonesia, pelayanan khusus yang disebut sebagai pendidikan luar biasa (PLB) dapat ditelusuri keberadaannya mulai tahun 1901, ketika Institut untuk Tuna Netra didirikan di Bandung. Awal yang memberi harapan bagi para penyandang kelainan ini diikuti dengan pendirian Sekolah Luar Biasa untuk tunagrahita pada tahun 1927 di kota yang sama, yaitu Bandung (Amin, 1985). Sejak itu, perhatian kepada pendidikan anak berkelainan mulai bergema. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pelayanan untuk anak berkelainan mendapat perhatian yang lebih meningkat. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sekolah-sekolah luar biasa mulai bermunculan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagian besar sekolah ini dikelola oleh yayasan dan hanya sebagian kecil yang merupakan sekolah negeri. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa yang merupakan pedoman untuk menyelenggarakan PLB menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan sesuai dengan kelainan yang disandangnya. Sehubungan dengan itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) dibedakan menjadi SLB-A (untuk anak tunanetra), SLB-B (untuk anak tunarungu-wicara), SLB-C (untuk anak tunagrahita ringan dan sedang), SLB-D (untuk anak tunadaksa), dan SLB-E (untuk anak tuna laras). Di samping itu disediakan pula SLB-G untuk penyandang kelainan ganda. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, pemerintah mendirikan sejumlah sekolah negeri untuk anak berkelainan, dan sementara itu, pihak swasta juga tidak tinggal diam, sehingga jumlah sekolah untuk anak berkelainan terus meningkat. Data dari Direktorat Pendidikan Dasar menunjukkan adanya kenaikan jumlah sekolah negeri maupun swasta dalam lima tahun terakhir, sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Sekolah dan Siswa Luar Biasa Tahun 1993/1994 dan Tahun 1998/1999

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa	
		1993/1994	1998/1999	1993/1994	1998/1999
1.	SLB Negeri	23	35	2.055	2.875
2.	SLB Swasta	583	811	27.930	33.974
3.	SDLB*)	209	218	8.385	9.135
4.	Pendidikan Terpadu*)	84	184	246	961
	Jumlah	899	1.248	38.616	46.945

\*) Sekolah Negeri

Dari Tabel 1 dapat dilihat kenaikan yang cukup berarti, baik dalam jumlah sekolah maupun dalam jumlah siswa yang dilayani, yang mencakup sekolah negeri dan swasta. Secara keseluruhan, selama lima tahun, jumlah sekolah meningkat dari 899 buah menjadi 1.248 buah (39%), sedangkan jumlah siswa yang dilayani meningkat dari 38.616 orang menjadi 46.945 orang (22%). Yang cukup menggembirakan adalah perkembangan Pendidikan Terpadu, yang pada tahun 1993/1994 hanya terdiri dari SD Terpadu yang berjumlah 84 buah dan melayani hanya 184 siswa SD, pada tahun 1998/1999 menjadi 184 buah dan melayani 961 siswa yang meliputi SD (872 siswa), SLTP (40 siswa), dan SM (49 siswa). Ini berarti bahwa secara keseluruhan sejumlah 961 orang anak berkelainan yang memenuhi syarat sudah belajar bersama anak normal di SD, SLTP, dan SM.

Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat, di Indonesia, perkembangan pelayanan bagi anak berkelainan belum diikuti oleh penetapan undang-undang/peraturan pemerintah yang memadai, yang khusus dibuat untuk kepentingan anak berkelainan. Peraturan pemerintah yang khusus mengatur pendidikan luar biasa

(PP no. 72/1991) hanya merupakan kebijakan umum yang memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan luar biasa.

### **Sikap Masyarakat terhadap Penyandang Kelainan**

Perkembangan PLB menunjukkan bahwa pada awalnya, keberadaan para penyandang kelainan fisik dan/atau mental disikapi secara negatif oleh lingkungannya. Hewett (dalam Gearheart, 1980) menandai adanya empat hal yang menentukan perkembangan perlakuan terhadap para penyandang kelainan, yaitu (1) kebutuhan untuk tetap hidup (*the need for survival*), (2) kekuatan takhyul atau mistik (*the force of superstition*), (3) penemuan ilmu pengetahuan (*the finding of science*), dan (4) keinginan untuk berada dalam pelayanan (*the desire to be of service*). Dari keempat hal tersebut, tiga hal dapat dikatakan mendorong perkembangan pelayanan/perlakuan terhadap penyandang kelainan, sedangkan satu hal, yaitu kekuatan takhyul atau mistik dapat dikatakan merupakan penghambat. Karena hambatan tersebut, selama berabad-abad para penyandang kelainan menerima perlakuan yang buruk dari masyarakat, bahkan menurut Hewett (dalam Gearheart, 1980), dalam abad 14 dan 15, para penyandang cacat ini menerima perlakuan yang lebih buruk dari sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat, tempat para penyandang kelainan tersebut lahir dan dibesarkan, terutama oleh takhyul atau mistik tentang kecacatan, yang membuat perlakuan terhadap para penyandang kelainan menjadi penderitaan yang berlarut-larut. Misalnya, bayi yang lahir cacat dibuang atau diisolasi merupakan cerita klasik yang mungkin sampai saat ini masih terjadi.

Di Indonesia, sebagaimana halnya di negeri lain, berbagai mitos tentang kecacatan mempengaruhi sikap masyarakat. Mitos yang paling banyak berkembang di masyarakat adalah bahwa penyandang kelainan fisik dan/atau mental merupakan hukuman atau kutukan dari Tuhan, sehingga keluarga yang memiliki anak cacat dianggap sebagai keluarga terkutuk. Pandangan seperti ini masih berkembang, meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat. Tampaknya, kemajuan tersebut

tidak mampu menembus tebalnya kepercayaan terhadap mitos yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Implikasinya akan merambah ke berbagai aspek pelayanan bagi penyandang kelainan. Berbagai usaha akan mendapat hambatan yang kadang-kadang sukar diidentifikasi. Salah satu dari hambatan tersebut datang dari keluarga yang memiliki anak berkelainan. Masih ada keluarga yang merasa malu karena anaknya menyandang kelainan sehingga mereka menyembunyikan anaknya dari masyarakat, dan sebagai akibatnya anak ini tidak akan pernah mengenal dunia sekolah. Sebaliknya, dari pengamatan di lapangan, masih ada keluarga yang malu mempunyai anak bersekolah di SLB, dan memaksa memindahkan anaknya ke sekolah biasa. Akibatnya dapat dibayangkan. Anak ini tidak pernah naik kelas, sehingga menjadi bahan ejekan bagi siswa di sekolah tersebut. Berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap penyandang kelainan, berbagai indikator mengungkapkan adanya hambatan yang terselubung. Sebagai contoh, besarnya sumbangan yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan pelayanan anak berkelainan tidak selalu mencerminkan keikhlasan penyumbangannya, tetapi lebih didasari oleh keinginan untuk menjaga nama baik dan popularitas. Dugaan ini diperkuat oleh sukarnya penyandang kelainan mendapat lapangan kerja, meskipun pemilik lapangan kerja tersebut menunjukkan sikap simpati dengan memberikan sumbangan. Selanjutnya, terbatasnya personil yang menyumbangkan tenaga pada pelayanan anak berkelainan merupakan satu pencerminan dari belum dapat ditembusnya mitos tentang penyandang kelainan. Di samping itu, terbatasnya/ menurunnya jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Luar Biasa (PGPLB), juga merupakan cerminan dari belum ikhlasnya orang tua untuk mendorong anaknya terjun dalam dunia pelayanan anak berkelainan. Wawancara dengan beberapa mahasiswa PGPLB dari IKIP Jakarta (bulan Juli 1999) menunjukkan bahwa pilihan para mahasiswa untuk masuk PGPLB bukan merupakan pilihan pertama. Hal ini sejalan dengan keterangan dari ketua jurusan PLB yang menyebutkan bahwa sering terjadi mahasiswa PGPLB minta pindah jurusan, setelah berada satu semester di jurusan PLB.

Indikator lain yang mengungkapkan sikap masyarakat yang kurang positif terhadap keberadaan penyandang kelainan adalah sukarnya para penyandang kelainan untuk memperoleh lapangan kerja, meskipun mereka sudah tamat dari pendidikan/pelatihan khusus. Hal ini diungkapkan oleh Astaty (1999) yang menemukan bahwa selama lima tahun terakhir, dari 44 tamatan SLB-C YPLB (anak tunagrahita) hanya 10 orang yang bekerja. Dari 10 orang tersebut, empat bekerja di perusahaan keluarga, satu orang sebagai pegawai negeri menggantikan orang tua, dan lima orang bekerja di SLB-C. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sangat sukar bagi anak tunagrahita untuk mendapat pekerjaan, meskipun mereka sudah disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Sebagai akibatnya, anak berkelainan akan tetap mengganggu setamatnya dari sekolah. Tampaknya kondisi yang seperti ini terjadi di mana-mana, termasuk di Amerika Serikat. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Amerika untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerbitkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk menerima tenaga kerja penyandang kelainan. Misalnya tahun 1973 diluncurkan *Rehabilitation Act* yang menjamin hak penyandang cacat untuk mendapat pekerjaan di institusi pendidikan yang mendapat bantuan dari pemerintah federal, dan salah satu pasalnya, yaitu pasal 504 berkaitan dengan penyediaan akses fisik dalam gedung-gedung umum bagi penyandang kelainan (Reynold & Birch, 1988). Selanjutnya, negara bagian menetapkan peraturan untuk mengoperasionalkan peraturan pemerintah federal tersebut.

Bagaimana dengan di Indonesia? Fakta menunjukkan bahwa belum banyak perusahaan yang mau mempekerjakan para penyandang cacat, meskipun para penyandang kelainan ini sudah memiliki keterampilan tertentu. Usaha pemerintah untuk mengatasi hal ini belum memadai, meskipun sudah ada peraturan dan anjuran. Namun peraturan dan anjuran tersebut lebih banyak diabaikan karena tidak ada sanksi yang tegas. Jika hal ini berlanjut terus, minat keluarga untuk menyekolahkan anaknya yang menyandang kelainan akan menurun karena mereka merasa bahwa sekolah tidak membantu anaknya untuk mampu menolong dirinya sendiri. Meskipun sudah memiliki keterampilan, mereka masih tetap menjadi beban keluarga.

### **Sistem Layanan dalam PLB (Segregasi vs Integrasi)**

Dalam dunia pendidikan luar biasa, pada abad 20 ada dua sistem layanan yang selalu dipertentangkan, yaitu segregasi atau layanan terpisah dan integrasi atau layanan terpadu (Hardman, Drew & Egan, 1984). Layanan dalam sistem segregasi memisahkan anak luar biasa (ALB) dari anak normal dalam memperoleh pendidikan. Alasan para pendukung layanan terpisah ini adalah bahwa dalam sekolah yang disiapkan khusus, para ALB akan mendapat perlakuan yang lebih intensif karena para guru yang melayani mereka memang mendapat pendidikan khusus. Layanan dalam sistem integrasi (terpadu) menyediakan pendidikan bagi anak luar biasa di sekolah yang sama dengan anak normal. Alasan kelompok ini antara lain: (1) ALB adalah anggota masyarakat biasa yang seharusnya menghayati dunia yang sama dengan anak-anak normal, (2) keberadaan ALB di sekolah biasa akan membawa dampak positif bagi anak normal karena mereka akan menyadari bahwa setiap individu mempunyai karakteristik yang khas dan keanekaan tersebut harus diterima secara wajar. Meskipun pada umumnya kecenderungan menuju kepada integrasi, bahkan sampai pada bentuk yang paling ekstrim, yang disebut sebagai *inclusion*, yaitu menyekolahkan ALB di sekolah umum yang terdekat, namun silang pendapat mengenai sistem layanan yang disediakan bagi para penyandang kelainan masih terus berlangsung. Para pendukung *full inclusion* berpijak pada undang-undang yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan "*free and appropriate education in the least restrictive environment*", namun American Federation of Teachers (AFT) yang tidak mempermasalahkan undang-undang tersebut, merasa mendapat masalah besar dengan *full inclusion*. Keberatan AFT ini didukung oleh para pakar pendidikan, terutama yang banyak bergerak dalam PLB, seperti Kauffman dan Margaret Wang (dalam Willis, 1994), yang masih terus berargumentasi apakah *full inclusion* dapat mengoptimalkan pelayanan kepada penyandang kelainan. Kauffman sendiri tidak setuju dengan *full inclusion*. Dia menegaskan bahwa sekolah biasa seharusnya hanya menerima anak berkelainan yang sesuai untuk masuk di sekolah itu, bukan menerima semua anak berkelainan yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut, seperti yang diniati dalam *full inclusion*. Para

penyandang kelainan yang cukup parah tidak mungkin mendapat layanan yang memadai di sekolah biasa. Anak-anak ini memerlukan pelayanan di sekolah yang diatur secara khusus agar mampu memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan dan latihan dalam keterampilan hidup sehari-hari. Sementara itu, Margaret Wang menekankan bahwa fokus perhatian para pendidik hendaknya ditujukan pada kekuatan anak, bukan pada hal-hal yang salah (menyimpang) pada anak seperti yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, kelainan anak hendaknya jangan dijadikan satu-satunya pertimbangan dalam pelayanan. Sejalan dengan pemikiran ini, pengintegrasian anak berkelainan hendaknya didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan anak. Setiap penyandang kelainan mempunyai potensi atau kekuatan untuk mengimbangi kelainan yang disandangnya; dan oleh karena itu, tujuan layanan PLB adalah mengembangkan secara optimal potensi yang dimiliki tersebut (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)..

Bagaimana halnya dengan sistem pelayanan PLB di Indonesia? Sampai saat ini, pendidikan bagi anak berkelainan di Indonesia masih merupakan pendidikan yang terpisah, meskipun sekolah terpadu sudah ada di Indonesia sejak tahun 70-an. Namun, UUSPN menetapkan bahwa pendidikan luar biasa di selenggarakan pada sekolah luar biasa (SLB). Ketetapan ini mengindikasikan keterpisahan antara pendidikan bagi anak normal dan anak berkelainan. Dengan demikian, anak berkelainan menempuh pendidikannya dalam sekolah khusus, yaitu mulai dari SDLB (bahkan TKLB), SLTPLB, sampai pada SMLB. Kenyataan ini mengindikasikan pula, bahwa dari segi sistem, Indonesia memang masih menganut sistem segregasi. Keterisolasian ini lebih kentara lagi dengan dipisahkannya layanan pendidikan bagi setiap jenis penyandang kelainan, yaitu SLB-A untuk anak tunanetra, SLB-B untuk anak tunarungu-wicara, SLB-C untuk anak tunagrahita, SLB-D untuk anak tunadaksa, dan SLB-E untuk anak tunalaras. Bahkan untuk tiga jenis sekolah (SLB-A, SLB-B, dan SLB-C) telah ada SLB Pembina Tingkat Nasional, yaitu di Jakarta untuk SLB-A, di Denpasar untuk SLB-B, dan di Malang untuk SLB-C (Aminah, 1993; Wardani, 1994).

Dilihat dari pendidikan terpadu yang terdapat pada Tabel 1, sistem segregasi yang dianut memang tidak murni segregasi, tetapi dikombinasikan dengan sistem integrasi untuk anak-anak yang memenuhi persyaratan. Namun, tetap saja segregasi bagi anak-anak yang bersekolah di SLB menutup kesempatan bagi anak-anak ini untuk menikmati kehidupan dunia yang sama bersama dengan anak-anak normal. Sehubungan dengan itu, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah sistem ini perlu dipertahankan terus atau diubah, atau ditempuh jalan tengah, yaitu sistem segregasi tetap dipertahankan namun diimbangi dengan berbagai usaha yang memungkinkan terjadinya integrasi secara berkala. Ketiga alternatif ini perlu dikaji, sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif.

Pertama, jika sistem segregasi murni tetap dipertahankan, layanan PLB akan tetap seperti yang ada. Tidak ada perubahan struktur organisasi, pergantian personil atau pergeseran petugas. Demikian pula berbagai fasilitas pendidikan yang ada tidak perlu diatur kembali, tinggal dilengkapi atau diperbaharui. Namun, sistem ini akan menciptakan dunia tersendiri bagi penyandang kelainan karena pergaulan mereka setiap hari hanya dengan teman yang menyandang kelainan yang mungkin sejenis atau berbeda. Di lain pihak, para siswa yang bersekolah di sekolah biasa tidak pernah menyadari bahwa ada teman sebaya mereka yang dari segi fisik dan/atau mental kurang beruntung. Teman sebaya ini juga mempunyai kebutuhan untuk dihargai dan mengembangkan potensi seperti mereka, namun karena kondisi fisik dan/atau mental yang berbeda, mereka tidak dapat menikmati layanan di sekolah biasa. Anak-anak normal ini mungkin merasa bahwa dunia ini begitu mulus, sehingga jika mereka tidak pernah diberi kesempatan bergaul dengan anak yang menyandang kelainan, mereka akan bersikap aneh terhadap teman-temannya yang kebetulan mempunyai kelainan fisik dan/atau mental.

Kedua, jika sistem ini akan diubah menjadi sistem integrasi (yang memang merupakan kecenderungan dalam pendidikan luar biasa), tentu banyak yang harus ditata ulang. Undang-undang, peraturan pemerintah, struktur organisasi, pengaturan personil, pengaturan sarana/prasarana dan sebagainya akan mengalami perubahan

drastis. Rasanya, untuk satu dekade mendatang sistem layanan terintegrasi secara ekstrem, lebih-lebih yang berupa *full inclusion* seperti di Amerika Serikat belum mungkin dilaksanakan di Indonesia. Di samping infrastruktur yang belum siap, masyarakat juga barangkali belum mampu menerima kondisi seperti itu.

Alternatif berikut yang perlu dikaji adalah menjalankan sistem segregasi yang dikombinasikan dengan *mainstreaming* (keterpaduan) sesuai kebutuhan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Reynolds & Birch (1988). Pengintegrasian dapat dilakukan dalam tiga jenis yaitu yang disebut sebagai: (1) *physical mainstreaming*, (2) *social mainstreaming*, dan (3) *instructional mainstreaming*. Dalam *physical mainstreaming* atau pengintegrasian fisik, anak berkelainan mendapat kesempatan untuk berintegrasi secara fisik, misalnya mereka berada dalam ruangan atau sekolah yang sama dengan anak normal. Dengan cara ini, anak berkelainan dan anak normal dapat berada dalam dunia yang sama, sehingga mereka dapat menghayati bahwa dunia ini isinya memang beraneka ragam. *Social interaction mainstreaming* atau integrasi dalam interaksi sosial memberi kesempatan kepada anak berkelainan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, atau melakukan interaksi sosial lain dengan anak-anak normal atau dengan anak-anak yang mempunyai kelainan berbeda. Akhirnya, *instructional mainstreaming* atau integrasi dalam pembelajaran memberi kesempatan kepada anak berkelainan yang memang mampu untuk mengikuti pelajaran bersama-sama dengan anak normal.

Dengan mencermati, dan mencoba menerapkan ketiga jenis *mainstreaming* tersebut, layanan terhadap anak berkelainan dapat ditingkatkan meskipun sistem yang dianut tidak berubah. Integrasi yang paling ringan adalah integrasi secara fisik, yang memberi kesempatan kepada anak berkelainan untuk berada bersama dengan anak normal. Dalam kebersamaan ini beberapa anak mungkin dapat memanfaatkan waktunya untuk melakukan interaksi sosial. Namun, untuk anak yang tidak mampu berkomunikasi, mungkin kebersamaan tersebut hanya merupakan kebersamaan fisik. Sebaliknya, bagi anak yang memang mampu, waktu untuk kebersamaan fisik tersebut dapat diisi dengan interaksi sosial dan

mengikuti pelajaran bersama. Untuk mewujudkan hal ini, usaha dari guru dan pembina PLB haruslah cukup gigih, yang tercermin antara lain dalam pengembangan program yang cukup operasional. Misalnya, anak-anak SLB secara terjadwal dapat diberi kesempatan untuk berkumpul dengan anak-anak normal seperti dalam kegiatan ulang tahun sekolah, bazar, perpisahan, atau acara-acara khusus yang memungkinkan anak untuk berkumpul, bersosialisasi, dan saling belajar. Selanjutnya, anak-anak SLB yang memang mampu, secara terjadwal dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran bersama dengan anak normal, misalnya dalam pelajaran Kesenian/Keterampilan, Pendidikan Jasmani, atau pelajaran lain yang sesuai. Namun, penjadwalan ini harus disusun secara hati-hati karena hal ini memang merupakan salah satu masalah dalam implementasi *mainstreaming* (Marozas & May, 1988).

### **Harapan Para Penyandang Kelainan**

Adanya pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh sekolah luar biasa (SLB) dalam berbagai jenjang tentu merupakan satu harapan bagi para penyandang kelainan. Masih banyak penyandang kelainan yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Jika potensi ini tidak didorong untuk berkembang akan terjadi kerugian ganda, yaitu kerugian bagi penyandang kelainan sendiri dan kerugian bagi masyarakat. Para penyandang kelainan, akan tetap tertinggal dan merasa diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua atau bahkan kelas tiga. Sebaliknya, masyarakat akan merasa terbebani oleh para penyandang kelainan karena mereka tidak mampu menolong dirinya sendiri. Tidak mustahil pula, para penyandang kelainan akan menimbulkan gangguan yang mengusik ketenangan masyarakat. Oleh karena itu, layanan pendidikan yang diberikan kepada para penyandang kelainan haruslah ditingkatkan agar misi Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dipenuhi.

Berkaitan dengan kondisi anak berkelainan, keberadaan PLB dan perhatian yang semakin meningkat, baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swasta tentu merupakan sesuatu yang menjanjikan/memberi harapan bagi anak berkelainan beserta

keluarganya. Harapan yang tidak pernah diungkapkan secara nyata tersebut antara lain dapat diterjemahkan sebagai berikut. Pertama, dalam PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa dinyatakan bahwa: *PLB bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.* Jika tujuan ini disimak baik-baik, ternyata peserta didik penyandang kelainan memang diharapkan mampu berkembang secara optimal sebagaimana halnya peserta didik yang lain. Harapan ini tentu merupakan harapan seluruh peserta didik berkelainan dan keluarganya. Mereka ingin mendapat pendidikan yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan kelainan yang disandangnya sehingga potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pada akhir pendidikannya mereka juga diharapkan memiliki keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, dambaan para penyandang kelainan dan keluarganya adalah dunia kerja akan dibuka bagi mereka sesuai dengan kemampuan/keterampilan yang mereka kuasai. Mereka tentu tidak ingin diterima dalam dunia kerja hanya karena belas kasihan, tetapi yang mereka inginkan, mereka diterima karena kemampuan/keterampilan yang mereka miliki memang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Singkatnya, para penyandang kelainan ingin diperlakukan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang tidak menyandang kelainan.

### **Tantangan bagi Pendidikan Luar Biasa**

Dengan menyimak uraian pada bagian terdahulu, setiap orang akan menyadari bahwa PLB di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar agar dapat mewujudkan kesejahteraan/masa depan bagi para penyandang kelainan, sesuai dengan misi UUSPN. Secara umum tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu tantangan selama masa pendidikan dan tantangan pasca pendidikan. Tantangan dalam masa pendidikan menyangkut berbagai aspek, seperti masih rendahnya minat untuk

mengabdikan pada PLB, sehingga sebagian besar yang terlibat dalam PLB masih merasa terpaksa, banyaknya sarana/prasarana pendidikan yang diperlukan, kemampuan profesional para guru/tenaga lainnya yang belum optimal, masih adanya orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya, belum mempunyai sekolah untuk menanamkan keterampilan kerja yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya dana pendidikan yang cukup besar.

Tantangan pasca pendidikan adalah bagaimana cara menyalurkan anak berkelainan yang sudah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SMLB. Bagaimana menyalurkan mereka yang berpotensi untuk melanjutkan sekolah, serta bagaimana mencari lapangan kerja bagi yang tidak mampu melanjutkan. Ini jelas merupakan tantangan yang sangat berat, yang mau tidak mau harus dijawab, jika keinginan untuk membantu peserta didik penyandang kelainan fisik dan/atau mental untuk berkembang secara optimal.

## **Penutup**

Untuk menjawab tantangan tersebut, serangkaian usaha haruslah dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Usaha tersebut harus dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun keluarga sebagai tripusat pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

Di pihak pemerintah, berbagai peraturan yang menyangkut pelayanan/kesejahteraan bagi para penyandang kelainan masih perlu dipikirkan keberadaannya. Berbagai promosi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan potensi yang dimiliki para penyandang kelainan perlu dilakukan melalui berbagai media massa. Tayangan-tayangan di televisi merupakan media yang cukup efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keberadaan para penyandang kelainan ini. Di bidang pendidikan sendiri, masih perlu dilakukan berbagai usaha seperti pengembangan program yang efektif untuk membekali para penyandang kelainan dengan keterampilan kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam hal ini perlu digalang kerja sama dengan berbagai penyedia lapangan kerja, sehingga keterampilan yang dikuasai sesuai dengan kebutuhan

lapangan kerja. Sementara itu, peningkatan kemampuan profesional bagi para guru dan calon guru PLB masih perlu dilakukan, misalnya dengan pelatihan yang terencana yang sesuai dengan kebutuhan guru, serta program pendidikan guru PLB yang akrab dengan lapangan. Selanjutnya, pihak keluarga juga harus menunjukkan kesadaran untuk menerima anggota keluarga penyandang kelainan sebagaimana adanya dan memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuannya. Akhirnya, masyarakat, khususnya para pengusaha yang mampu menyediakan lapangan kerja diharapkan berperan aktif dalam ikut membantu para penyandang kelainan untuk mendapatkan lapangan kerja. Peran pengusaha ini bukan hanya sebagai penyumbang materi, tetapi juga diharapkan menyumbang gagasan dan fasilitas untuk berlatih.

Dengan mengusahakan cara-cara tersebut, diharapkan tantangan yang dihadapi secara berangsur-angsur dapat dijawab dan harapan para penyandang kelainan menjadi kenyataan. Dengan perkataan lain, secara berangsur-angsur, tujuan pendidikan luar biasa akan dapat diwujudkan.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, M. (1985). *Country Report on Special Education in Indonesia*. Yokosuka: The Fifth APEID Regional Seminar on Special Education.
- Aminah Har, S. (1993). *Country Report on Special Education in Indonesia*. Yokosuka: The Thirteenth APEID Regional Seminar on Special Education.
- Astati. (1999). *Program Layanan Dasar Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Anak Tunagrahita Ringan*. Bandung: Thesis Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Data/Informasi Keadaan Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Terpadu Tahun 1998/1999 Sampai Akhir Desember 1998*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar.

- \_\_\_\_\_. (1994). *Kurikulum Pendidikan Guru Pendidikan Luar Biasa Program S1: Buku I: Ketentuan-Ketentuan Pokok*. Jakarta: Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan.
- Gearheart, B. R. (1980). *Special Education for the '80s*. St. Lois: The C. V. Mosby Company.
- Hardman, M. L.; Drew, C. J. & Egan, M. W. (1984). *Human Exceptionality: Society, School, and Family*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Marozas, D. S. & May, D. C. (1988). *Issues and Practices in Special Education*. New York: Longman.
- Reynolds, M. C. & Birch, J. W. (1988). *Adaptive Mainstreaming: A primer for teachers and principals*. New York: Longman.
- Wardani, I G. A. K. (1994). *Country Report on Special Education in Indonesia*. Yokosuka: The Fourteenth APEID Regional Seminar on Special Education.
- Willis, S. (1994). Making Schools More Inclusive. Teaching Children with Disabilities in Regular Classroom. *ASCD Curriculum Update*. October 1994.

## 16. PENDIDIKAN ORANG DEWASA

---

---

Tisnowati Tamat

### **Pendahuluan**

Untuk menghadapi globalisasi, kita membutuhkan tenaga yang siap bersaing dengan tenaga terdidik dari luar negeri. Untuk itu, kita harus menyempurnakan sistem pendidikan sehingga bisa menghasilkan lulusan yang siap bersaing. Di samping itu, belajar terus-menerus perlu dipandang sebagai suatu keharusan. Belajar tidak hanya dilakukan di bangku sekolah (formal), tetapi dilakukan dimana saja dan pada kesempatan apapun juga. Karena itu, pendidikan perlu diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, orangtua dan juga warga belajar itu sendiri.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan ini sudah mulai tumbuh. Hal ini tercermin dari timbulnya berbagai kursus atau pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh badan-badan swasta, perusahaan atau Departemen lain di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tumbuhnya kursus-kursus ini disebabkan antara lain, karena adanya kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan pendidikan formal saat ini dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dituntut untuk dapat memangku jabatan tertentu atau untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kita juga menyadari bahwa pendidikan formal tidak mungkin dapat melayani semua keinginan pemakai lulusan. Pelayanan terhadap keinginan-keinginan semacam itu, seperti keterampilan siap pakai, akan mengakibatkan membengkaknya kurikulum di sekolah-sekolah. Bahkan sekolah kejuruan dan

perguruan tinggi pun tidak mungkin melayani semua kepentingan tersebut. Karena itu, perusahaan dan kantor pemerintah berusaha untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap para lulusan pendidikan formal tersebut supaya mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.

Para penyelenggara pendidikan dan latihan sadar bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan cara yang berbeda dengan cara yang ditempuh oleh pendidikan formal saat ini. Perbedaan tersebut misalnya saja dalam cara menentukan tujuan pendidikan maupun cara penyajiannya. Banyak diantara penyelenggara pendidikan dan latihan telah mencoba metoda belajar mengajar yang mereka inginkan, tetapi berhubung sebagian besar penyelenggara belum mengetahui konsep yang mendasari metode yang mereka pakai, maka yang terjadi mereka hanya meniru atau menerapkan metode partisipatif yang telah banyak digunakan orang. Namun karena kurang memahami dan menghayati apa yang dilakukan, maka mereka sering tergelincir kembali ke metode tradisional yang otoriter.

Karena pendidikan dan pelatihan ini banyak ditujukan untuk orang dewasa maka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini perlu dibekali dengan pengetahuan tentang perbedaan antara pendidikan untuk anak-anak (pedagogi) dan pendidikan orang dewasa (andragogi).

### **Sejarah Pendidikan Orang Dewasa**

Sampai saat ini hanya ada satu model perkiraan tentang "belajar" dan ciri-ciri "orang belajar" yang oleh para pendidik dijadikan landasan untuk menyusun kurikulum dan program kegiatan pengajaran. Model perkiraan tersebut mulai dikembangkan disekolah-sekolah monastik di Eropa antara abad ke 7 sampai 12. Sampai akhir abad ke 12, model ini mendominasi sekolah-sekolah sekular dan universitas-universitas yang pada saat itu baru muncul di Bologna dan Paris. Model ini disebut "Pedagogik", yang berasal dari bahasa Junani "paid" yang berarti "anak", dan "agogus" yang berarti "mengarahkan". Jadi pedagogik secara harfiah berarti "Ilmu dan seni mengajar anak-anak". Model perkiraan tentang "belajar"

dan "orang belajar" pada pedagogik tersebut terutama merupakan hasil observasi para rohaniawan pada saat mengajar keterampilan-keterampilan sederhana terutama dalam membaca dan menulis pada anak-anak kecil.

Dengan makin tersebarinya sekolah-sekolah dasar yang dilakukan oleh para misionaris ke Eropa dan Amerika Utara serta bagian-bagian lain dunia pada abad ke 18 dan 19, maka model tersebut mulai diterima dan digunakan secara meluas. Pada abad dua puluhan, saat para ahli ilmu jiwa pendidikan secara ilmiah mulai mempelajari "peristiwa belajar", model tersebut mendapat tempat yang tinggi, walaupun mereka membatasi penelitiannya pada reaksi anak-anak dan binatang terhadap suatu pengajaran.

Dari penelitian tersebut, tidak diperoleh pengetahuan yang memadai tentang belajar bagi orang dewasa. Penelitian tentang belajar bagi orang dewasa baru dilaksanakan setelah perang dunia ke II. Penelitian dilakukan ketika pendidikan bagi orang dewasa mulai diorganisasikan secara sistematis sekitar tahun 1920, disaat para guru mulai mengalami kesulitan dalam pemakaian model pedagogik.

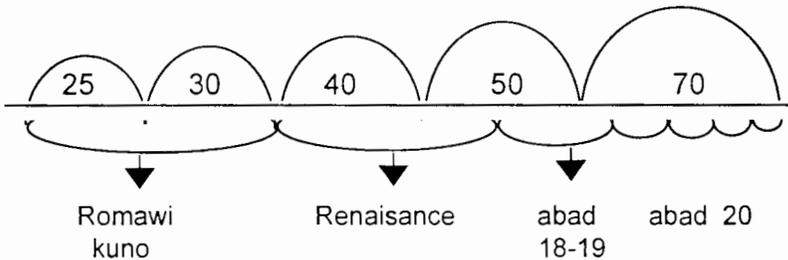
Salah satu kesulitan bersumber dari konsepsi tujuan belajar. Pada pedagogik, tujuan belajar hanya berdasarkan pada konsepsi **penyebaran pengetahuan dan keterampilan**. Hal tersebut dirasakan tidak cukup bagi orang dewasa, yang akibatnya dirasakan oleh para guru. Para guru merasa bahwa para orang dewasa sering kali menghambat dan menentang strategi mengajar para guru, yang telah dijabarkan dan direncanakan berdasarkan konsep pedagogik. Dalam hal ini termasuk kuliah atau ceramah yang penuh dengan fakta, tugas baca, drill, ujian/test/kuis dan hafalan rutin. Orang dewasa membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu. Ketidakpuasan mereka menyebabkan peningkatan jumlah orang dewasa yang putus sekolah atau putus belajar formal.

Walaupun para guru tidak menyadari kemungkinan adanya suatu kesalahan, namun seorang filosof besar pada abad ke 20, Alferd Nort Whitehead, memberikan ulasan tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh para guru. Ia menerangkan bahwa pendidikan yang merupakan suatu proses penyampaian sesuatu itu akan

bermanfaat, jika materi yang dipelajari bisa dirasakan manfaatnya sepanjang hayat. Karena perubahan kebudayaan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan umur rata-rata manusia, maka apa yang dipelajari oleh seseorang dimasa mudanya diharapkan akan tetap bermanfaat dan berlaku sepanjang hayatnya. Tetapi dalam kenyataan saat ini tidaklah demikian, karena tenggang waktu perubahan kebudayaan saat ini jauh lebih singkat dari pada umur rata-rata manusia. Karena itu, Whitehead menyatakan bahwa pendidikan dan latihan harus menyiapkan seseorang untuk menghadapi berbagai kondisi baru dengan mapan.

Gambar 1 memperlihatkan perbandingan antara perubahan kebudayaan dan umur rata-rata manusia.

Umur rata-rata  
Manusia



jangka waktu  
perubahan sosial

Gambar 1. Hubungan antara perubahan sosial budaya dan umur rata-rata manusia

Sebelum abad ke 20, perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh adanya penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, perubahan teknologi, pemindahan penduduk, perubahan politik dan ekonomi

memerlukan waktu beberapa generasi. Sementara itu, pada abad ke 20 ini, perubahan kebudayaan berlangsung dengan irama yang sangat cepat. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang pada saat sekolah, dalam waktu yang relatif singkat akan menjadi kuno atau kadaluarsa pada usia tigapuluhan. Dengan demikian rumusan yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah penyebaran apa yang diketahui, menjadi tidak tepat lagi. Pendidikan seharusnya dirumuskan sebagai suatu **proses menimbulkan keinginan untuk bertanya secara berkelanjutan sepanjang hayat**. Dengan demikian, dalam belajar, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, yang terpenting adalah bagaimana mempelajari **keterampilan untuk dapat mengarahkan diri sendiri** untuk menemukan sesuatu yang baru, atau bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk selalu bertanya dan mencari jawabannya.

Disamping itu, masalah lain yang dihadapi oleh guru yang mengajar orang dewasa adalah banyaknya asumsi tentang ciri-ciri peserta didik anak-anak yang tidak cocok dengan ciri-ciri pada peserta didik orang dewasa. Melihat kenyataan dilakukan penelitian-penelitian yang menggunakan asumsi yang berbeda, dan sering kali memperoleh hasil yang lebih baik.

### **Asal Mula Andragogi**

Antara tahun 1929-1948, jurnal tentang Pendidikan Orang Dewasa yang diterbitkan oleh *American Association for Adult Education* memuat beberapa karangan yang ditulis oleh para guru yang menangani pendidikan bagi orang dewasa. Artikel dalam jurnal tersebut menggambarkan berbagai cara pelaksanaan pendidikan bagi orang dewasa yang agak menyimpang dari model pedagogik yang dikenal selama itu. Seringkali mereka menyalahkan diri sendiri karena telah melanggar aturan-aturan akademis yang biasa dianut, misalkan mengganti kuis atau ujian dengan wawancara yang dilakukan dengan peserta didiknya. Rasa bersalah ini timbul karena mereka tidak memiliki landasan teori yang mendukung apa yang dilakukan. Mereka melakukannya semata-mata karena sikap pragmatis dan mengikuti intuisi mereka belaka.

Di sekitar tahun 1950 mulai terbit buku-buku yang berisi analisis laporan para guru tersebut. Di samping itu telah dibuat beberapa kesimpulan pokok dari hal-hal yang sering mereka hadapi, walaupun belum merupakan suatu teori yang utuh. Sekitar tahun 1960, mulai diperoleh bukti-bukti dari hasil penelitian ilmiah tentang proses internal dalam pendidikan orang dewasa. Penelitian yang membawa harapan tentang perubahan arah ini dilakukan oleh Cyril O. Houle, yang dipaparkan dalam bukunya *The Inquiring Mind* (1961).

Perubahan arah ditemukan oleh Houle setelah dia melakukan wawancara secara bersungguh-sungguh dan mendalam terhadap 22 orang. Penelitian tersebut menghasilkan tiga kelompok orientasi, yaitu:

1. Kelompok *Goal Oriented*, kelompok yang berorientasi pada tujuan, ini adalah mereka yang menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas.
2. Kelompok *Activity-oriented*, yaitu kelompok yang berorientasi pada kegiatan ini adalah mereka yang melibatkan diri karena mereka menemukan manfaat dari situasi belajar, walaupun seringkali tidak memiliki kaitan yang jelas dan berarti, atau bahkan kadang-kadang sama sekali tidak ada kaitan dengan isi dari tujuan mereka mengikuti kegiatan tersebut.
3. Kelompok *Learning-Oriented*, kelompok yang berorientasi pada mempelajari ilmu itu sendiri. Jadi mereka mencari ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu itu sendiri.

Kelompok-kelompok ini tidak merupakan tipe-tipe yang murni, tetapi dapat digambarkan seperti tiga buah lingkaran yang sisi-sisinya saling berkait atau tumpang tindih. Namun demikian tekanan utama dari setiap kelompok tersebut dapat terlihat dengan jelas (lihat gambar 2).



Gambar 2

Salah seorang murid Houle, Allen Tough, sebagai seorang pejabat pada Ontario Institute for Studies in Education, pada dekade yang sama melanjutkan penelitian di bidang ini, dengan penekanan pada masalah "Bagaimana orang dewasa belajar secara alami, apabila mereka tidak diajar". Penemuan-penemuan Allen Tough disampaikan dalam 2 buah laporan yang berjudul *Learning Without a Teacher* (1967) dan *The Adult's Learning Project* (1971).

Dalam laporan-laporan tersebut diutarakan bahwa:

1. Hampir semua orang dewasa terlibat dalam satu sampai dua puluh jenis kegiatan belajar pada setiap tahunnya. Apabila dibuat rata-rata, maka setiap orang terlibat dalam 8 jenis kegiatan belajar.
2. Hanya 10% dari semua jenis kegiatan belajar tersebut ada sangkut pautnya dengan lembaga pendidikan.

3. Terdapat proses belajar alami yang agak universal pada para orang dewasa yang mempelajari sesuatu atas keinginannya sendiri, yaitu dengan cara melalui urutan langkah-langkah serupa atau mirip satu dengan yang lain.
4. Mereka sering kali memerlukan seseorang untuk membantunya.
5. Biasanya mereka meminta bantuan pada seseorang yang tidak terdidik sebagai seorang guru, dan apabila mereka mendatangi seorang guru, maka para guru ini akan mengganggu proses belajar mereka, karena guru-guru tersebut akan merubah urutan-urutan proses belajar alami mereka dengan urutan-urutan langkah pedagogik.

Banyak ilmu pengetahuan lain berperan pada cara belajar orang dewasa. Sekitar tahun 1960 di Amerika Utara dan Eropa dipengaruhi oleh psikologi klinis, psikologi perkembangan, gerontologi atau ilmu yang mempelajari mengapa orang menjadi tua, sosiologi dan antropologi. Pada umumnya penelitian pada ilmu ini mendukung instruksi para guru orang dewasa yang terdahulu. Kemudian para ahli mulai menyusun suatu ilmu pengetahuan baru yang ditarik dari perpaduan kedua sumber tersebut, dan menjadi teori belajar "**bagi orang dewasa**" dan diterima dengan mantap.

Pada awal proses itu, para ahli pendidikan bagi orang dewasa merasa memerlukan nama bagi teori baru itu sehingga memungkinkan mereka untuk membahas teori tersebut sejajar dengan pedagogik. Dipilihlah "Andragogik" untuk sebagaimana teori tersebut. Kata andragogik berasal dari bahasa Yunani, "aner" atau "andr" yang berarti orang (bukan anak) dan agogus berarti "mengarahkan". Istilah andragogik tersebut pertama kali dikenal melalui karya seorang ahli pendidikan bagi orang dewasa yang berkebangsaan Yugoslavia, dalam bukunya *Adult Leadership* (1968). Sejak saat itu istilah tersebut semakin sering dipakai dalam berbagai bacaan di seluruh dunia.

Sebenarnya andragogik dirumuskan sebagai **suatu ilmu dan seni** untuk membantu para orang dewasa belajar, sebagai lawan dari pedagogik yang berarti seni mengajar anak-anak. Namun

kemudian, laporan dari guru sekolah dasar dan sekolah lanjutan serta pengajar di perguruan tinggi menyebutkan, bahwa mereka telah mencoba menerapkan konsep andragogik, dan ternyata dalam situasi tertentu mereka memperoleh hasil yang baik.

Sejak itu timbul asumsi baru bahwa andragogik merupakan asumsi baru tentang orang belajar dan dapat digunakan sebagai model seperti halnya pedagogik. Keduanya pedagogik dan androgogik merupakan alternatif untuk model pembelajaran. Model ini akan lebih bermanfaat apabila tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah atau menjadi dua hal yang berbeda, melainkan jika dilihat sebagai dua ujung sebuah spektrum, dan dengan asumsi pada kedua ujung spektrumnya.

Misalkan, masalah ketergantungan dan pengarahan diri sendiri. Seorang anak berumur 6 tahun sangat kuat dalam pengarahan dirinya dalam mempelajari peraturan permainan, tetapi anak tersebut akan sangat tergantung pada saat mempelajari penggunaan sebuah kalkulator. Di lain pihak seseorang yang berumur 40 tahun mungkin akan sangat tergantung dalam mempelajari program komputer, tetapi sangat besar pengarahan dirinya dalam mempelajari bagaimana memperbaiki perabot rumah tangga.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada saat asumsi pedagogik lebih cocok untuk hal yang akan dipelajari maka strategi pedagogiklah yang diterapkan tanpa memandang usia orang yang sedang belajar, dan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, tidak perlu seorang pedagog selalu setia pada model pedagogik dan tetap beranggapan bahwa seorang yang sedang belajar sangat tergantung pada guru walaupun sebenarnya orang tersebut sudah mampu mengarahkan dirinya sendiri.

### **Pengertian, Misi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Orang Dewasa**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan RI, yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan

bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sementara itu pembangunan jangka Panjang ke II bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang **maju** dan **mandiri** serta **sejahtera lahir batin** sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun sasaran PJP II ini adalah: **terciptanya kualitas manusia** dan **kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri**.

Dalam Pelita ke VI lebih di pertegas lagi, bahwa tujuan pembangunan adalah:

1. Menumbuhkan **sikap** dan **tekad kemandirian manusia** dan **masyarakat Indonesia** dalam rangka meningkatkan **kualitas sumber daya manusia** untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap berikutnya.

Sementara itu, sasaran pembangunan pada Pelita VI adalah **tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia** melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin.

Untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran di atas, diperlukan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan orang dewasa. Pendidikan formal yang diterima, perlu dilengkapi lagi untuk bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi/jabatan tertentu.

Kurang lebih seperempat abad lamanya kegiatan pendidikan orang dewasa telah mendapatkan perhatian yang serius dikalangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Seiring dengan peningkatan berbagai usaha pendidikan orang dewasa itu, tumbuh pula berbagai macam tujuan dan bentuk usaha, yang satu dengan yang lain berbeda penonjolannya. Karena itu sulit untuk menentukan suatu definisi pendidikan orang dewasa yang universal, yang dapat diterima dengan mantap. Pendidikan orang

dewasa di negara berkembang (Asia, Afrika dan Amerika Latin) mempunyai tujuan dan isi berbeda-beda, ada yang beraspek politis, ekonomis, sosial dan kultur. Demikian pula mengenai permasalahannya, yang mempunyai berbagai macam dan corak. Namun umumnya masalah pendidikan orang dewasa berkisar pada topik, yang berhubungan dengan:

1. kurangnya pengertian rakyat (*ignorance*);
2. kemelatan akibat taraf ekonomi rakyat yang rendah sekali; dan
3. kesengsaraan akibat kesehatan rakyat yang buruk sekali.

Untuk itu, berbagai organisasi, baik ditingkat nasional maupun internasional (*Unesco, Unicef* dan lain-lain) berusaha untuk menghapuskan dan memecahkan berbagai masalah tersebut melalui kegiatan pendidikan orang dewasa.

### **Pengertian dan Misi Pendidikan Orang Dewasa**

Di luar negeri, kegiatan dibidang pendidikan orang dewasa ini mempunyai berbagai macam istilah. Misalkan, Unesco menggunakan istilah ***Fundamental education***, yang juga dipergunakan di Spanyol. ***Basic education*** dikenal di Perancis, sedangkan India mempergunakan istilah ***Social education***. ***Adult education*** dipergunakan di U.S.A. dan Kanada, ***Mass education*** dipergunakan di daerah bekas jajahan Inggris, ***Community Education*** dipergunakan di Pilipina dan di Indonesia. ***Volksuniversiteit*** dipergunakan di Belanda, sedangkan ***Institut fur Erwaohsenen Bildung***, di pergunakan di Jerman Barat. Disamping itu, banyak lagi istilah yang dipergunakan di negara-negara sosialis. Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah ***Pendidikan Masyarakat*** atau ***Community Education***.

Pendidikan Orang Dewasa di Indonesia merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Pendidikan masyarakat masuk dalam Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa dan merupakan bagian penting dalam mendukung Program Pembangunan. Pendidikan orang dewasa mempunyai misi membantu pembangunan nasional di sektor ketenaga kerjaan. Era globalisasi dan pasar bebas yang akan datang memberikan tantangan yang berat bagi masyarakat Indonesia. Untuk menjawab

tantangan tersebut, Indonesia harus segera menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, sehingga sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

Apabila ditinjau dari sudut organisasi, lembaga, perusahaan, industri maupun perkumpulan, pendidikan orang dewasa mempunyai misi untuk:

1. Meningkatkan produktivitas,
2. Meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan moral,
3. Mengembangkan pengetahuan baru, keterampilan, pengertian dan sikap positif,
4. Melatih penggunaan sarana dan prasarana baru, prosedur, metoda, modifikasi atau persiapan alih tugas,
5. Mengurangi pemborosan, kecelakaan, pengulangan yang tidak perlu, kelambatan, ketidak hadiran, dan biaya tinggi,
6. Menerapkan perubahan peraturan dan kebijakan,
7. Menukar keterampilan yang tidak diperlukan lagi, dengan keterampilan baru untuk mendukung teknologi dan metoda produksi baru, kebutuhan pasar, dan cara-cara pengelolaan,
8. Membawa seseorang kearah jabatan yang lebih tinggi atau untuk standart kinerja yang lebih tinggi,
9. Menyiapkan calon pemimpin (pengganti atau perluasan),
10. Untuk ketahanan dan pengembangan organisasi, dan
11. Memupuk kerjasama dan memperlancar komunikasi antar unit.

Sedang ditinjau dari kebutuhan individu, pendidikan orang dewasa mempunyai misi:

1. Memberi kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan,
2. Memberi kesempatan kepada seseorang yang pada masa muda tidak sempat belajar di sekolah karena berbagai masalah (paket A; paket B; dan kursus-kursus),
3. Memberi bekal kepada seseorang untuk jabatan tertentu atau alih tugas (pendidikan, pelatihan dan penataran),
4. Memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengukur kemampuan diri di lingkungannya (diskusi, seminar atau simulasi dan lain-lain), dan

5. Menambah kepercayaan diri.

### **Tujuan Pendidikan Orang Dewasa**

R.A. Hodgkin (1975) menjelaskan tujuan pendidikan orang dewasa, di antaranya sebagai berikut:

1. Menutup jurang perbedaan antara generasi tua dan generasi muda, dengan cara mengurangi ketegangan yang sering timbul antara orang tua dengan para pemuda, dan dapat menjadikan rumah/tempat tinggal sebagai tempat mendidik anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang.
2. Memberikan tambahan pendidikan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan memberikan pengetahuan tentang teknologi baru kepada mereka yang telah memperoleh pendidikan sekolah, tetapi dirasa masih sangat kurang. Hal ini biasanya diberikan dalam bentuk program ekstensi universitas.
3. Memperbaiki kebiasaan yang kurang tepat, seperti menginformasikan makanan yang tidak sehat dan teknik pertanian yang tidak efektif dan efisien.
4. Memberantas buta huruf, karena mereka berkeyakinan bahwa pemberantasan buta huruf mempunyai nilai sosial dan psikologis yang tinggi.
5. Walaupun tujuan langsung seperti tersebut diatas, mungkin hanya merupakan sebagian saja dari yang ingin di capai, dan masih ada lagi nilai dan hakekat gerakan pendidikan orang dewasa yang lebih luas, karena pendidikan orang dewasa menyentuh kebutuhan semua lapisan masyarakat sesuai dengan tuntutan pemerintahan maupun dunia usaha.
6. Mengadakan pembaharuan masyarakat sesuai tuntutan modernisasi, karena pendidikan orang dewasa merupakan bagian dari kegiatan pembangunan budaya, ekonomi dan pemerintahan
7. Melengkapi diri seseorang agar dapat menyesuaikan diri dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang disebabkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi supaya tidak ketinggalan

zaman dan merasa canggung di dalam hidup dan kehidupannya.

### **Ruang Lingkup Pendidikan Orang Dewasa**

Di waktu lampau, pendidikan orang dewasa pada umumnya dianggap sebagai usaha untuk menutup kekurangan pendidikan formal, atau untuk membantu mereka yang pada masa mudanya tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Sifatnya adalah sebagai usaha pengobatan atau penyembuhan dari keadaan sakit. Tetapi saat ini *trends* tersebut berubah kearah kelompok diskusi informal yang membahas masalah pekerjaan, individu, keluarga, daerah, nasional dan internasional. Diskusi kelompok ini semakin meluas kurikulumnya, makin besar jumlah pesertanya dan tanpa mereka sadari merupakan suatu bentuk kegiatan pendidikan informal bagi orang dewasa (misalnya dalam bentuk seminar, simposium, semiloka dan lain-lain).

Disamping itu adanya kesadaran dari berbagai kelompok masyarakat dan berbagai lembaga sosial tentang perlunya pembangunan masyarakat pedesaan, menyebabkan pendidikan bagi para orang dewasa direncanakan guna mendukung pembangunan desa. Pendidikan orang dewasa juga dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja karyawan dan buruh di perusahaan atau industri. Demikian pula berbagai lembaga kemasyarakatan dan organisasi pemerintah maupun swasta, yang secara sadar maupun tidak telah menjalankan usaha pendidikan bagi para karyawan dan anggotanya.

Usaha peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif terhadap tugas tersebut, dimaksud untuk meningkatkan kinerja kelompok, lembaga atau organisasi. Dengan kata lain ruang lingkup pendidikan orang dewasa di Indonesia adalah mulai dengan kelompok paket A dan B, berbagai kursus keterampilan, seminar, karyawisata, sampai penataran dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam masyarakat yang masih sangat sederhana atau tradisional, pendidikan orang dewasa dilaksanakan melalui upacara adat, upacara keagamaan atau hal-hal lain untuk menjaga tatacara dan

adat yang harus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya supaya tidak akan hilang.

### **Asumsi Tentang Pedagogik dan Andragogi**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, kedua model pendidikan, yaitu pendidikan untuk anak-anak (pedagogi) maupun untuk orang dewasa (andragogi) tidak perlu dipisahkan, melainkan harus dilihat sebagai dua ujung spektrum.

Untuk memperjelas uraian-uraian terdahulu di bawah ini digambarkan perbedaan antara kedua model tersebut.

### **Konsep tentang peserta didik (learner)**

*Pada pedagogik, peserta didik digambarkan sebagai seseorang yang bersifat tergantung. Masyarakat mengharapkan para guru bertanggung jawab sepenuhnya untuk menentukan apa yang harus dipelajari, kapan, bagaimana cara mempelajarinya dan apa hasil yang diharapkan setelah selesai.*

*Andragogik beranggapan adalah suatu hal yang wajar apabila dalam suatu proses pendewasaan, seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri, namun setiap individu memiliki irama yang berbeda dan juga dalam dimensi kehidupan yang berbeda pula. Dan para guru bertanggung jawab untuk memacu dan memelihara kelangsungan perubahan tersebut. Pada umumnya orang dewasa secara psikologis lebih memerlukan pengarahan diri sendiri, walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat tergantung.*

### **Fungsi pengalaman peserta didik**

*Model pedagogik menganggap pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik tidak besar nilainya, mungkin hanya berguna untuk titik awal. Sedangkan pengalaman yang sangat besar manfaatnya adalah pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari gurunya, para penulis, produsen alat-alat peraga atau alat-alat audio visual dan pengalaman-pengalaman para ahli lainnya. Oleh karenanya, teknik utama dalam pendidikan adalah teknik penyampaian yang*

antara lain berupa ceramah, tugas baca dan penyajian melalui alat pandang dengar.

Pada andragogik ada anggapan bahwa dalam perkembangannya seseorang membuat semacam alat penampungan (*reservoir*) pengalaman-pengalaman yang kemudian akan merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang akan menangkap arti sesuatu dengan lebih baik apabila dia mengalami dari pada apabila mereka memperoleh secara pasif, oleh karena itu teknik penyampaian yang utama adalah: eksperimen, percobaan-percobaan di laboratorium, diskusi, pemecahan masalah, latihan simulasi, dan praktek lapangan.

### **Kesiapan belajar**

Pada pedagogik seseorang harus siap mempelajari apapun yang dikatakan oleh masyarakat, dan hal ini menimbulkan tekanan yang cukup besar bagi mereka karena adanya perasaan takut gagal, anak-anak yang sebaya dianggap siap untuk mempelajari hal yang sama pula, oleh karena itu kegiatan belajar harus diorganisasikan dalam suatu kurikulum yang baku/standar, dan langkah-langkah penyajian harus sama bagi semua anak.

Pada andragogik seorang akan siap mempelajari sesuatu apabila ia merasakan perlunya melakukan hal tersebut, karena dengan mempelajari sesuatu itu, ia dapat memecahkan masalahnya atau dapat menyelesaikan tugasnya sehari-hari dengan baik. Fungsi pendidik disini adalah menciptakan kondisi, menyiapkan alat serta prosedur untuk membantu mereka menemukan apa yang perlu mereka ketahui. Dengan demikian program belajar harus disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka yang sebenarnya dan urutan penyajiannya harus sesuai dengan kesiapan peserta didik.

### **Orientasi belajar**

Pada pedagogik peserta didik menyadari bahwa pendidikan adalah suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan, dan mereka memahami bahwa ilmu-ilmu tersebut baru akan bermanfaat di

kemudian hari. Oleh karena itu kurikulum harus disusun sesuainya dengan unit-unit mata pelajaran dan mengikuti urutan-urutan logis ilmu tersebut, misalnya dari yang kuno ke yang modern atau dari yang gampang ke yang sulit. Dengan demikian orientasi belajar mengarah pada mata pelajaran (*subject matter oriented*). Artinya jadwal disusun berdasarkan terselesaikannya sejumlah mata pelajaran yang telah ditetapkan.

Pada andragogik orientasi belajar terpusat kepada kegiatan itu sendiri atau pada penampilan yang diharapkan (*performance oriented*). Dengan kata lain cara menyusun pelajaran berdasarkan kemampuan-kemampuan apa atau penampilan yang bagaimana yang diharapkan harus dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu proses peningkatan pengembangan kemampuan diri, untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin untuk keperluan dalam hidup. Mereka ingin dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya hari ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau lebih efektif untuk hari esok. Berdasarkan hal tersebut di atas belajar harus disusun kearah pengelompokkan pengembangan kemampuan.

Sebagai rangkuman, dapat diutarakan bahwa dalam hal ciri-ciri peserta didik, andragogik paling tidak memiliki 4 asumsi pokok yang berbeda dengan pedagogik. Asumsi tersebut menyangkut tentang kematangan individual peserta didik yaitu :

1. Konsep peserta didik sendiri yang bergeser dari pribadi yang tergantung menjadi pribadi yang mampu mengarahkan diri sendiri untuk kebutuhan belajarnya.
2. Peserta didik membangun *reservoir* untuk menampung pengalamannya yang semakin kaya/banyak, dan pada saat diperlukan akan merupakan sumber yang sangat bermanfaat baginya untuk belajar.
3. Kesiapan peserta didik untuk mempelajari sesuatu, berorientasi pada arah peningkatan atau pengembangan kemampuan supaya dapat melaksanakan tugas dalam fungsi sosialnya.
4. Perspektif waktu peserta didik berubah dari ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa yang akan datang menjadi

pengetahuan yang dapat segera dimanfaatkan penerapannya. Dengan demikian orientasi belajar bergeser dari orientasi mata pelajaran ke arah orientasi hasil kegiatan.

Disamping ke empat unsur di atas, ada delapan unsur lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

### **1. Pemanfaatan Hasil Belajar**

Dalam pedagogik pemanfaatan hasil belajar mungkin berguna di kemudian hari, mungkin pula tidak berguna, karena kurikulum ditentukan sepihak oleh guru-guru maupun pengelola. Sedang pada andragogik peserta didik berharap hasil belajar segera dapat dimanfaatkan dalam situasi sesungguhnya, karena relevan dan mendukung tugasnya.

### **2. Motivasi Belajar**

Dalam pedagogik motivasi timbul karena penghargaan dari luar dirinya atau adanya hukuman apabila dia tidak melaksanakan.

Pada andragogi motivasi timbul dari diri peserta didik itu sendiri, atau rasa ingin tahu dan harapan akan adanya suatu peningkatan dalam hidupnya.

### **3. Iklim dan Suasana Belajar**

Iklim dan suasana belajar berorientasi pada otoritas guru, otoriter, guru selalu menilai, formal, tegang, dingin, kurang saling mempercayai dan suasana persaingan sangat terasa.

Pada andragogi, guru dan peserta didik saling menghormati dan saling mengisi. Iklimnya demokrasi dan dinamis, saling bekerjasama dalam suasana informal, suasananya santai, hangat, saling mempercayai dan saling membantu.

### **4. Diagnosa Kebutuhan Belajar dan Proses Perencanaan Program**

Pada pedagogik perencanaan program pembelajaran hanya dikerjakan oleh guru, karena guru merasa paling tahu tentang bahan pelajaran yang akan diberikan. Pada andragogik dibuat suatu mekanisme supaya perencanaan program dapat dibuat

bersama-sama antara guru, tutor atau pengajar dengan peserta didik, sehingga proses belajar dapat terpacu dan harmonis.

## **5. Perumusan Tujuan**

Pada pedagogik perumusan tujuan hanya ditentukan oleh guru, sedangkan pada andragogi dirumuskan bersama antara guru dan peserta didik sehingga tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

## **6. Perencanaan Pengalaman Belajar**

Pada pedagogik pengalaman belajar disusun logis dan berorientasi kepada mata pelajaran. Dirumuskan dalam bentuk **unit isi** yang perlu diberikan kepada murid, sedang pada andragogik pengalaman belajar disusun sesuai dengan **kesiapan belajar** peserta didik. Dirumuskan dalam bentuk **unit permasalahan** yang perlu pemecahan atau pembahasan.

## **7. Pengalaman Belajar**

Pada pedagogik, untuk memperoleh pengalaman belajar bagi siswa, menggunakan teknik memindahkan pengetahuan dan keterampilan melalui ceramah, tanya jawab dan tugas baca.

Pada andragogik pengalaman belajar peserta didik memakai teknik dialog, belajar sambil bekerja, diskusi, belajar mandiri, percobaan, atau proyek penelitian.

## **8. Evaluasi Belajar**

Pada pedagogik evaluasi belajar dilaksanakan oleh guru, untuk menentukan siapa yang lulus dan siapa yang gagal, sedang pada andragogik evaluasi belajar dilakukan bersama antara guru dan peserta didik, dengan maksud untuk mendiagnosa kembali kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar tersebut sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya untuk memacu pertumbuhan lebih lanjut.

## **Proses Andragogi Dalam Pengembangan Program**

Apabila prinsip andragogik itu diartikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, maka proses tersebut akan sangat berbeda dengan perencanaan kurikulum dan proses pengajaran yang berlaku secara tradisional dalam pendidikan bagi anak-anak dan remaja. Di dalam program secara keseluruhan dan kegiatan belajar perorangan, penerapan proses andragogi mengikuti beberapa tahapan secara konsisten, yaitu:

1. Membuat diagnose kebutuhan belajar,
2. Perumusan arah tujuan belajar,
3. Mengembangkan pola kegiatan belajar,
4. Menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan partisipatif,
5. Menciptakan atau terciptanya iklim belajar yang mengundang untuk belajar bagi orang dewasa,
6. Pelaksanaan kegiatan, dan
7. Mendiagnosis kembali kebutuhan belajar (evaluasi).

Contoh:

Membuat diagnose kebutuhan belajar.

Kebutuhan belajar bagi orang dewasa harus dimulai dengan "**apa tugas mereka**". Apabila sudah kita ketahui tugasnya, kita harus dapat membuat diskripsi dan rincian tugas mereka. Dari diskripsi dan rincian tugas mereka tersebut diterjemahkan kedalam "**kemampuan apa**" saja yang harus mereka miliki. Dari sejumlah kemampuan yang harus mereka miliki tersebut, dicari sejumlah mata kuliah yang dapat memberi pengetahuan keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Sekarang masalahnya bagaimana kita mengetahui bahwa andragogi lebih baik dari pada pedagogi tradisional. Jawaban yang paling tepat adalah mencoba menerapkan andragogi dan memberikan penilaian yang objektif.

## **Penutup**

Pendidikan, latihan maupun kursus bagi orang dewasa cukup banyak diselenggarakan di Indonesia, namun masih banyak diantara mereka yang menggunakan model pedagogik tradisional, sehingga menciptakan iklim yang formal dan kaku serta para pengajar menempatkan dirinya di atas para peserta didik, hal ini mengakibatkan para pengajar bersikap dingin, defensif dan otoriter.

Apabila penyelenggaraan suatu pendidikan atau latihan bagi orang dewasa tersebut ingin berhasil, sayogyanya para pengelola dan pengajar bersikap sebagai fasilitator, pemudah dan selalu siap membantu para peserta didik untuk menemukan apa yang mereka butuhkan dan apa yang ingin mereka pelajari untuk mendukung tugasnya sehari-hari.

Para pengajar harus menempatkan diri sejajar (equal) dan mengorbankan setiap peserta didik, sehingga para pengajar dapat bersikap terbuka, hangat dan tulus.

Sekarang masalahnya bagaimana kita mengetahui bahwa andragogi lebih baik dari pada pedagogi tradisional. Jawaban yang paling tepat adalah mencoba menerapkan andragogi dan memberikan penilaian yang objektif.

## **Daftar Pustaka**

- Adult and Continuing Education. (1980). *Teaching Adults*. East Lansing: Michigan State University.
- Hartley. (1955). *In Quest of Knowledge: A Historical Perspective on Adult Education*, New
- Hodgkin R.A. (1975). *Education and Change*. London: Oxford University Press.
- Ingalls, D. (1978). *Trainers Guide to Andragogy*. Washington: Data Education incorporated Waltham mass.
- Knowles, S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education, From Pedagogy to Andragogy*. (Revised and updated). Chicago: Association Press

Lagan, P.A. M. (1978). *Helping Others Learn, Designing Programs for Adults*. Ontario: Addison - Wesley Publishing Company.

## **17. BIMBINGAN DAN KONSELING: PENEGAK DIMENSI-DIMENSI PENDIDIKAN**

---

---

Prayitno

Sekolah sampai sekarang masih menjadi andalan utama upaya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tiga unsur utama yang semestinya dilengkapi oleh setiap sekolah apabila sekolah tersebut hendak mengemban misinya secara lengkap adalah: kurikulum/pengajaran, bimbingan dan konseling, serta manajemen pendidikan. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mengacu kepada perkembangan peserta didik dalam rangka pengembangan perikehidupan kemanusiaan secara menyeluruh. Namun, tulisan ini hanya akan membahas peranan bimbingan dan konseling dalam mencapai tujuan pendidikan, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi pendidikan.

### **Sasaran dan Pengukuran Hasil Pendidikan**

Pendidikan memang tidak secara otomatis menjanjikan suatu keberhasilan tertentu. Dalam hal ini Orr (1991) mengemukakan bahwa "it is not education that will save us, but education of a certain kind". Marilah kita simak hasil NEM tahun 1999 siswa sebuah SMU Negeri sebagai berikut:

No.	Jurusan Bahasa		Jurusan IPA		Jurusan IPS	
1.	PPKn	5,95	PPKn	6,75	PPKn	6,25
2.	B. Ind	5,96	B. Ind	6,30	B. Ind	5,53
3.	Sastra	6,73	Mat	4,84	Mat	3,31
4.	Mat.	3,60	B.Inggris	5,36	B.Inggris	3,83
5.	B. Inggris	4,73	Fisika	4,48	Ekonomi	4,40
6.	Sej/Bud	5,70	Biologi	4,90	T.Negara	5,05
7.	B. Arab	6,72	Kimia	5,15	Sosiologi	5,56

Apa yang dapat kita mengerti dari contoh hasil NEM tersebut? Khususnya berkenaan dengan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh SMU? Amat jauh kiranya hasil tersebut apabila kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional yang dikemukakan pada pasal 4 Undang-undang No. 2/1989 yang berbunyi: *mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.*

Angka-angka hasil NEM tersebut paling jauh dapat kita artikan dalam kaitannya dengan "memiliki pengetahuan" yang derajatnya masih jauh dari memuaskan. Dapatkah kita menarik pengertian bahwa siswa-siswa yang mendapat NEM rendah tersebut adalah siswa-siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rendah? Jawabnya dapat dipastikan tidak, karena hasil NEM itu sama sekali belum menunjukkan kemampuan dasar mereka secara menyeluruh. Hasil NEM itu pun belum menggambarkan keseluruhan hasil pengembangan pribadi melalui kegiatan pendidikan di SMU selama tiga tahun penuh. Hasil pendidikan secara menyeluruh tidak dapat

digambarkan secara sederhana melalui sekedar angka-angka berupa hasil NEM seperti itu.

Ungkapan tujuan umum pendidikan sebagaimana tertuang di dalam undang-undang tersebut, tampaknya memang sudah cukup baik, menyeluruh, dan jelas, namun masih sukar diimplementasikan. Untuk lebih memahami tujuan pendidikan, kiranya perlu dikemukakan sasaran pendidikan yang lebih konkrit lagi sehingga lebih mudah diimplementasikan. Dalam hal ini, ada enam sasaran pendidikan, yaitu sasaran yang bersifat pengembangan pribadi, kesadaran terhadap lingkungan, hubungan sosial, efisiensi ekonomi, tanggung jawab kewarganegaraan, dan komitmen keberagamaan.

Sasaran pendidikan yang bersifat *pengembangan pribadi* meliputi tujuan-tujuan pendidikan untuk mengembangkan pribadi setiap peserta didik. Sasaran ini mencakup berbagai hal seperti pengembangan bakat, minat, sikap, dan keterampilan yang positif untuk dapat digunakan dalam menjalani kehidupan secara sukses. Berkembangnya kecerdasan, keterampilan, rasa percaya diri yang kuat, kemauan bekerja keras, tangguh, sehat, bertanggung jawab, dan mandiri pada masing-masing peserta didik merupakan contoh rincian dalam sasaran pendidikan yang bersifat pengembangan pribadi.

Sasaran pendidikan yang bersifat *kesadaran akan lingkungan* meliputi tujuan-tujuan yang terkait dengan ilmu dan teknologi, yang secara langsung dikaitkan dengan lingkungan kehidupan peserta didik; yaitu, tumbuhnya kesadaran akan berbagai hal yang terdapat di luar diri individu untuk diteliti, diolah, dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menopang kehidupan kemanusiaan. Sasaran ini akan mencakup berbagai hal seperti kemauan untuk belajar dari alam sekitar, kesadaran akan manfaat-manfaat yang dapat diberikan oleh alam sekitar itu, serta keinginan dan kebiasaan untuk memelihara alam sekitarnya.

Sasaran pendidikan yang bersifat *hubungan sosial* meliputi tujuan-tujuan pendidikan yang memungkinkan peserta didik berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Termasuk dalam sasaran jenis ini adalah berbagai pengetahuan, sikap, dan

keterampilan yang berkaitan dengan kaidah dasar *hablun minan naas* (hubungan antar manusia) yang ditunjukkan oleh perilaku-perilaku yang saling menghormati, luwes bergaul, berpikir *win-win* dalam menghadapi persoalan bersama, empatetik, dan bersifat toleran dalam kehidupan bersama.

Sasaran pendidikan yang bersifat *efisiensi ekonomi* meliputi tujuan-tujuan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan dan kesadaran peserta didik dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi kepada keteraturan, perencanaan, kerapian, disiplin, dan hasil yang maksimal. Pengembangan sasaran jenis ini akan mendorong setiap individu untuk mengejar nilai tambah dari setiap aktivitas yang dilakukannya. Artinya, mereka akan tidak mau berbuat hal-hal yang mubazir. Sasaran jenis ini mencakup antara lain kemampuan untuk memperoleh informasi pendidikan dan pekerjaan, menetapkan cita-cita pendidikan/pekerjaan, memilih dan mengembangkan karir, serta berperilaku tidak konsumtif.

Sasaran pendidikan yang bersifat *tanggung jawab kewarganegaraan* meliputi tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat *civic education*. Sasaran ini mencakup berbagai hal tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu dalam kaitannya sebagai warga masyarakat dan negara yang baik; yang tercermin dari tingkah laku rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menghayati dengan baik sejarah nasional, menghormati perbedaan antara sesama warga negara, menjunjung tinggi ideologi bangsa, bersifat demokratis, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengimplementasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Akhirnya, sasaran pendidikan yang bersifat *komitmen keberagamaan* meliputi tujuan-tujuan pendidikan yang mengupayakan dimilikinya dan diamalkannya secara teguh ajaran-ajaran serta nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Sasaran pendidikan ini adalah penjabaran dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mendidik manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran pendidikan jenis ini antara lain adalah

pembentukan perilaku yang taat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, toleran terhadap pemeluk agama lain, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama.

Keenam sasaran pendidikan itu saling terkait, saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya; bahkan keenamnya hendaklah terpadukan. Hasil pendidikan yang mengacu kepada sasaran-sasaran yang lebih konkrit itu tidaklah dapat digambarkan melalui sekedar angka NEM. Lebih jauh, sasaran-sasaran tersebut perlu dikaitkan dengan dimensi-dimensi pendidikan. Dimensi-dimensi pendidikan itu merupakan bingkai dari keseluruhan arah pendidikan. Upaya pendidikan sewajarnya selalu berada di dalam bingkai tersebut.

### **Dimensi Pendidikan**

Ada tiga dimensi pendidikan yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) dimensi demokratik, (2) dimensi inspiratif, dan (3) dimensi produktif.

Dimensi *demokratik* dalam pendidikan mengisyaratkan bahwa baik isi maupun penyelenggaraan pendidikan hendaklah dapat memupuk wawasan dan sikap peserta didik untuk menghargai orang lain sebagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Di samping itu, dimensi demokratik juga memupuk tumbuhnya sikap bebas (yang bertanggung jawab) dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Sasaran-sasaran pendidikan tersebut hendaknya berada dalam dimensi ini, sebab bila tidak akan lahir generasi yang mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, dan individualistik; atau sebaliknya, akan lahir generasi individu yang takut/patuh dan pasrah kepada kekuasaan, serta monoloyalistik. Keadaan demikian itu pada dasarnya mencerminkan wawasan, sikap dan perilaku anti-demokratik.

Dimensi *inspiratif* maksudnya bahwa pendidikan hendaknya memuat segenap hal yang dapat mengembangkan berbagai potensi diri peserta didik. Pendidikan seharusnya memupuk peserta didik untuk menjunjung tinggi nilai, moral, dan budi pekerti luhur, membangun penilaian positif terhadap diri sendiri, memacu

semangat dan motivasi peserta didik, serta membangkitkan jiwa pionir di kalangan mereka.

Akhirnya, dimensi *produktif* adalah sisi pendidikan yang berorientasi kepada pemerolehan hasil (*achievement oriented*) yang dapat dirasakan peserta didik sebagai hal yang bermanfaat dan berdayaguna. Dalam dimensi ini peserta didik didorong untuk setiap kali menghasilkan sesuatu dan menciptakan sesuatu yang baru. Kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang mengacu kepada dihasilkannya hal-hal baru yang bernilai tambah termasuk ke dalam dimensi produktif.

Keterkaitan antara keenam sasaran pendidikan dengan dimensi pendidikan sangat erat. Setiap sasaran pendidikan berada di dalam ketiga sisi dimensi pendidikan, dan setiap sisi dimensi pendidikan memuat keenam sasaran pendidikan (lihat matriks 1).

**Matriks 1**  
**Keterkaitan Sasaran dari Dimensi Pendidikan**

Sasaran Pendidikan	Dimensi Pendidikan		
	Demokratik	Inspiratif	Produktif
Pengembangan Pribadi	✓	✓	✓
Kesadaran terhadap Lingkungan	✓	✓	✓
Hubungan Sosial	✓	✓	✓
Efisiensi Ekonomi	✓	✓	✓
Tanggung Jawab Kewarganegaraan	✓	✓	✓
Komitmen Keberagamaan	✓	✓	✓

## **Bimbingan dan konseling**

Peranan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah terhadap pencapaian sasaran pendidikan dalam kaitannya dengan dimensi-dimensi pendidikan diyakini cukup nyata. Untuk itu, pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah telah dikembangkan dalam pola baru yang disebut "BK Pola 17". Pola ini meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- **empat bidang bimbingan**, yaitu bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir;
- **tujuh jenis layanan**, yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok;
- **lima kegiatan pendukung**, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus; dan
- **satu keterpaduan wawasan bimbingan dan konseling**, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, landasan, dan asas-asas bimbingan dan konseling.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dengan polanya yang baru itu diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian sasaran pendidikan dalam bingkai dimensi-dimensi pendidikan yang dimaksudkan. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling yang efektif dapat menegakkan dimensi-dimensi pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan secara tepat sasaran.

## **Bidang bimbingan dan dimensi pendidikan**

Dengan terselenggaranya pelayanan bimbingan dan konseling dalam keempat bidang, dimensi-dimensi pendidikan akan dapat terwujudkan. Keterkaitan antara bidang-bidang bimbingan dengan dimensi pendidikan dapat digambarkan melalui Matriks 2. Kedua belas sel yang terbentuk pada Matriks 2 memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara bidang bimbingan dan dimensi pendidikan.

**Matriks 2**  
**Keterkaitan Bidang Bimbingan dengan Dimensi Pendidikan**

Bidang Bimbingan	Dimensi Pendidikan		
	Demokratik	Inspiratif	Produktif
Bimbingan Pribadi	2.1	2.2	2.3
Bimbingan Sosial	2.4	2.5	2.6
Bimbingan Belajar	2.7	2.8	2.9
Bimbingan Karir	2.10	2.11	2.12

*Sel 2.1* memuat bidang bimbingan pribadi yang mengacu kepada dimensi demokratik. Upaya pendidikan yang termuat di dalam sel ini antara lain mengembangkan wawasan, sikap, dan perilaku demokratik. Sebagai pribadi mandiri, peserta didik menampilkan kediriannya secara berani, jelas dan berbobot tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak orang lain untuk menampilkan diri seperti itu juga. Pribadi yang demokratik menyadari sepenuhnya hak-hak pribadinya yang terkait dengan kewajibannya menghormati hak-hak orang lain sebagaimana ia memilikinya itu. Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak-haknya sendiri.

*Sel 2.2* memuat bidang bimbingan pribadi yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Dalam hal ini, berbagai potensi peserta didik dikembangkan seoptimal mungkin sehingga menjadi orang dewasa yang mampu mengaktualisasikan diri secara penuh. Kedirian yang terkembangkan di dalam dimensi demokratik hendaklah didasari dan diisi dengan aktualisasi kecerdasan, bakat dan minat, serta berbagai kecenderungan pribadi lainnya yang positif. Aktualisasi pribadi ini akan muncul secara penuh, tidak terhambat oleh faktor internal sebagai akibat lemahnya praktik pendidikan, ataupun oleh faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yang tidak demokratis.

Sel 2.3 memuat bidang bimbingan pribadi yang mengacu kepada dimensi produktif. Pribadi produktif adalah yang secara sadar menjadikan dirinya sebagai subyek yang setiap kali menghasilkan sesuatu secara konkrit. Hasil ini dapat berupa berbagai hal yang berguna bagi kebaikan diri dan lingkungannya. Pribadi yang demikian itu selalu berusaha agar diri dan lingkungannya terus maju, dan ia sendiri berusaha agar dirinya itu merupakan komponen bagi kemajuan yang dimaksudkan itu.

Sel 2.4 memuat bidang bimbingan sosial yang mengacu kepada dimensi demokratis. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pribadi yang berciri demokratis sebagaimana terlukis pada sel 2.1. Di sini yang menjadi penekanan ialah, bahwa hak-hak demokratisnya dilaksanakan atas dasar peraturan yang berlaku dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, aktualisasi pribadi yang demokratis tidaklah acak, asal saya suka dan dia juga suka, saya tidak mengganggu dan dia juga tidak terganggu, saya dan dia tidak saling merugikan/dirugikan, dan sebagainya, melainkan konsisten dengan berbagai peraturan yang ada, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, baik peraturan yang bertumpu pada agama, adat, hukum, ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Bidang bimbingan dalam dimensi ini mendorong peserta didik untuk selalu mengembangkan kebersamaannya dengan orang lain, dan mendorong kehidupan bersama itu sesuai dengan tujuan bersama dan peraturan-peraturan yang dibuat serta dipatuhi bersama.

Sel 2.5 memuat bidang bimbingan sosial yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Dalam hal ini, potensi peserta didik yang mengarah kepada berbagai bakat, minat dan kecenderungan sosial dikembangkan. Di sinilah letak pentingnya pengembangan *kecerdasan emosional* yang memungkinkan seseorang bertindak tidak semata-mata bertumpu pada pertimbangan rasio, melainkan terlebih-lebih pada kondisi hubungan sosial. Individu yang seperti itu memiliki kemampuan sosialisasi yang tinggi dan empati yang mendalam, serta sikap *tepo seliro* yang menghangatkan.

Sel 2.6 memuat bidang bimbingan sosial yang mengacu kepada dimensi produktif. Dalam hal ini peserta didik didorong untuk setiap kali dengan sadar memproduksi berbagai hal yang berguna bagi pengembangan kehidupan sosial yang positif. Hal-hal seperti

berusaha menyenangkan hati orang lain, membuat suasana menjadi hangat dan gembira, membuat lelucon yang segar, memberikan penghargaan (*reinforcement*), bersikap tangan terbuka untuk setiap kali membantu orang lain, menyatakan secara konkrit kasih sayang, memberikan perlindungan, dan lain sebagainya, merupakan pengejawantahan isi sel ini. Peserta didik didorong untuk mampu menghasilkan berbagai hal yang berguna bagi kehidupan bersama.

*Sel 2.7* memuat bidang bimbingan belajar yang mengacu kepada dimensi demokratik. Sel ini menunjukkan bahwa wawasan, sikap dan tingkah laku demokratik tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan harus dipelajari. Untuk menjadi individu demokratik, peserta didik perlu menerjunkan diri ke kancah yang memungkinkan berkembangnya suasana demokratik. Dalam suasana seperti itu peserta didik didorong untuk mengembangkan wawasan demokratik, sikap demokratik, dan bertingkah laku demokratik. Suasana seperti itu perlu diwujudkan melalui pengembangan "materi pelajaran berdemokrasi" yang sengaja dirancang untuk itu. Pelaksanaan "materi pelajaran" itu pun harus demokratik.

*Sel 2.8* memuat bidang bimbingan belajar yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Berbagai potensi yang ada pada diri peserta didik dikembangkan melalui proses belajar dalam arti yang seluas-luasnya. Pengembangan berbagai potensi itu tidak boleh hanya terbatas pada bahan-bahan yang bersifat hafalan belaka; bahan hafalan yang memberatkan justru akan memandu potensi pribadi itu sendiri.

*Sel 2.9* memuat bidang bimbingan belajar yang mengacu kepada dimensi produktif. Untuk menjadi pribadi yang berwawasan, bersikap, dan berperilaku produktif peserta didik haruslah belajar berbagai hal. Produk-produk yang dihasilkan oleh seseorang dapat dikembalikan untuk melihat sampai berapa jauh orang itu telah belajar berkenaan dengan produk-produk yang dimaksudkan itu. Apabila proses belajar yang dialami oleh peserta didik bertentangan dengan prinsip-prinsip belajar, tidak mustahil akan dihasilkan individu yang justru "anti produksi", yaitu orang yang pemalas, tidak menghargai waktu, tidak berdisiplin, dan tidak peduli

akan nilai tambah ataupun kemajuan bagi diri sendiri maupun lingkungan.

*Sel 2.10* memuat bidang bimbingan karir yang mengacu kepada dimensi demokratik. Dalam hal ini, pengembangan karir pertamanya dikembalikan kepada kebebasan peserta didik untuk memilih karir yang diinginkannya. Untuk ini dunia karir perlu dibuka seluas-luasnya sehingga pilihan itu dapat terarah sesuai dengan kehendak dan kondisi peserta didik. Pemaksaan atau keterkungkungan peserta didik memasuki jenis sekolah, karir atau pekerjaan tertentu, menyalahi isi sel ini.

*Sel 2.11* memuat bidang bimbingan karir yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Selain individu bebas memilih karir yang ingin dikembangkan, pilihan tersebut hendaklah benar-benar sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat, serta kecenderungan pribadinya. Untuk ini upaya pengungkapan diri sangat diperlukan agar pilihan karir yang terbuka itu dapat disesuaikan dengan kondisi/kecenderungan pribadi peserta didik secara tepat.

*Sel 2.12* memuat bidang bimbingan karir yang mengacu kepada dimensi produktif. Dapat dipahami bahwa suatu karir tertentu secara langsung mengarah kepada dihasilkannya produk-produk berkenaan dengan karir yang dimaksudkan itu. Diharapkan, produk-produk tersebut terwujud dengan kualitas dan kuantitas optimal, bahkan sedapat-dapatnya produk-produk unggulan.

Menilik isi setiap sel tersebut, tampaklah bahwa sasaran pendidikan yang berada di dalam ketiga dimensi pendidikan terkait sangat erat dengan terwujudnya bidang-bidang bimbingan. Hal itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam keempat bidangnya secara langsung menunjang pencapaian sasaran dan tujuan pendidikan dalam ketiga dimensinya.

### **Layanan Bimbingan dan Dimensi Pendidikan**

Secara nyata, bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui tujuh jenis layanan. Apabila ketujuh layanan tersebut diselenggarakan dengan baik, mereka akan menunjang pencapaian sasaran dan tujuan pendidikan dalam ketiga

dimensinya. Keterkaitan antara jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling dengan dimensi-dimensi pendidikan dapat digambarkan dalam Matriks 3. Sebagaimana pada Matriks 2, masing-masing sel pada Matriks 3 mengandung keterkaitan antara jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling dengan dimensi-dimensi pendidikan.

**Matriks 3**  
**Keterkaitan Layanan Bimbingan dan Konseling dengan**  
**Dimensi Pendidikan**

Layanan Bimbingan dan Konseling	Dimensi Pendidikan		
	Demokratik	Inspiratif	Produktif
Layanan Orientasi	3.1	3.2	3.3
Layanan Informasi	3.4	3.5	3.6
Layanan Penempatan Penyaluran	3.7	3.8	3.9
Layanan Pembelajaran	3.10	3.11	3.12
Layanan Konseling Perorangan	3.13	3.14	3.15
Layanan Bimbingan Kelompok	3.16	3.17	3.18
Layanan Konseling Kelompok	3.19	3.20	3.21

*Sel 3.1* memuat layanan orientasi yang mengacu kepada dimensi demokratik. Pribadi demokratik terlebih dahulu perlu menghayati situasi-situasi demokratik yang dapat dijumpai dalam kehidupan nyata. Layanan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman nyata berkehidupan demokratis dengan mengunjungi dan terlibat langsung dalam situasi yang dimaksudkan itu; seperti terlibat langsung dalam pemilihan ketua

kelas, pengurus OSIS, pemilihan Lurah, musyawarah organisasi pemuda, persidangan DPRD, dan sebagainya.

*Sel 3.2* memuat layanan orientasi yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Layanan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan mengalami secara nyata bagaimana potensi individu dapat diungkapkan dan dikembangkan melalui berbagai cara dan instrumen. Kunjungan ke lembaga instrumentasi dan lembaga pengembangan pribadi misalnya, dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman dan pengalaman yang dimaksudkan.

*Sel 3.3* memuat layanan orientasi yang mengacu kepada dimensi produktif. Kunjungan ke objek-objek produksi dapat mengembangkan wawasan, sikap, dan perilaku produktif peserta didik dalam arti seluas-luasnya. Pemahaman dan pengalaman nyata dalam berbagai situasi produktif sangatlah penting bagi peserta didik.

*Sel 3.4* memuat layanan informasi yang mengacu kepada dimensi demokratik. Berbagai informasi tentang peri kehidupan demokratik dapat diberikan melalui berbagai media seperti ceramah, video, film, dan sebagainya. Informasi ini akan memperkuat wawasan dan pengetahuan peserta didik tentang kehidupan berdemokrasi di berbagai kalangan dan wilayah, termasuk di negara atau belahan dunia lain.

*Sel 3.5* memuat layanan informasi yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Tentang pengungkapan dan pengembangan potensi pribadi, berbagai informasi dapat disajikan kepada peserta didik. Informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana potensi pribadi perlu diungkapkan merupakan informasi yang amat penting bagi peserta didik. Demikian juga suasana-suasana pribadi seperti sedih, senang, gembira, rindu, marah, bersemangat dan sebagainya dapat menjadi bahan bagi peserta didik untuk membantu mengembangkan diri peserta didik pada dimensi inspiratifnya.

*Sel 3.6* memuat layanan informasi yang mengacu kepada dimensi produktif. Layanan ini dituntut untuk memberikan informasi yang menggambarkan peristiwa dan kondisi yang memperlihatkan

produktivitas tinggi. Penyajian-penyajian tentang bagaimana pabrik berproduksi, kebun dan lahan-lahan pertanian berproduksi, serta para karyawan dan buruh bekerja keras untuk menghasilkan produk-produk dalam berbagai bentuknya, akan membangkitkan wawasan, sikap dan perilaku produktif peserta didik.

*Sel 3.7* memuat layanan penempatan/penyaluran yang mengacu kepada dimensi demokratis. Penempatan peserta didik pada kelompok-kelompok yang akan menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi, musyawarah, dan kerja sama dalam suasana demokratis, merupakan tugas pokok layanan ini. Catatan yang perlu diberikan bahwa arah dan cara penempatan/ penyaluran itu didasarkan pada kebebasan kemauan peserta didik yang hendak ditempatkan atau disalurkan.

*Sel 3.8* memuat layanan penempatan/penyaluran yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Kondisi pribadi peserta didik, seperti kemampuan dasar, bakat, minat dan kecenderungan-kecenderungan khusus memerlukan penempatan dan penyaluran tersendiri bagi pengembangannya secara optimal. Layanan ini di satu segi perlu memperhatikan kondisi internal peserta didik yang bersangkutan, dan di segi lain memperhatikan kondisi eksternal di sekitarnya. Perpaduan antara kondisi internal dan eksternal itu akan menghasilkan penempatan dan penyaluran yang tepat.

*Sel 3.9* memuat layanan penempatan/penyaluran yang mengacu kepada dimensi produktif. Bakat dan minat dalam kaitannya dengan karir peserta didik memerlukan penempatan/penyaluran yang tepat. Di samping itu, penempatan berdasarkan kondisi pribadi tertentu seperti kondisi fisik, hubungan sosial, dan kondisi mental memungkinkan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sehingga produk-produk yang dihasilkannya optimal. Penempatan duduk di dalam kelas, penempatan dalam kegiatan kelompok, dan penempatan/penyaluran kepada jurusan atau program yang tepat, akan menjamin produktivitas yang tinggi dari peserta didik.

*Sel 3.10* memuat layanan pembelajaran yang mengacu kepada dimensi demokratis. Hubungan sosial yang terjadi di dalam proses pembelajaran hendaklah dilandasi oleh hubungan demokratis,

sehingga dengan demikian melalui proses pembelajaran pun peserta didik dapat merasakan hubungan demokratis yang sehat. Dalam kondisi yang seperti itu peserta didik menjadi senang dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Di samping itu, wawasan, sikap, dan perilaku demokratis pun dapat berkembang.

*Sel 3.11* memuat layanan pembelajaran yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Proses pembelajaran yang demokratis mempergunakan pendekatan individual, dalam arti memperhatikan kondisi setiap individu. Dengan kata lain, perbedaan individual sangat diperhatikan dan dijadikan dasar dalam pengelolaan proses pembelajaran. Dengan pendekatan seperti itu, peserta didik akan diberi kesempatan untuk maju dengan menggunakan kekuatannya sendiri, yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

*Sel 3.12* memuat layanan pembelajaran yang mengacu kepada dimensi produktif. Layanan pembelajaran mendorong peserta didik untuk giat belajar, bekerja keras, mencoba, dan melakukan berbagai kegiatan untuk tujuan menghasilkan sesuatu yang terbaik dan berguna. Kebiasaan positif seperti itu apabila terus-menerus dibina akan menjadi modal yang sangat menguntungkan bagi pribadi-pribadi produktif.

*Sel 3.13* memuat layanan konseling perorangan yang mengacu kepada dimensi demokratis. Layanan ini, dari satu sisi mengarahkan pemecahan masalah berkenaan dengan hubungan sosial peserta didik secara demokratis; dari segi lain, suasana demokratis dicerminkan oleh hubungan antara peserta didik dan konselor di dalam proses konseling itu sendiri. Dalam proses konseling, teknik-teknik yang digunakan pun dilandaskan pada nuansa demokratis.

*Sel 3.14* memuat layanan konseling perorangan yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Layanan ini mendasarkan bantuannya pada berbagai hal yang secara pribadi dialami oleh peserta didik. Kondisi pribadi berkenaan dengan kemampuan, bakat, minat, sikap dan kecenderungan pribadi, serta masalah-masalah pribadi, menjadi titik tolak dan pokok bahasan dalam konseling perorangan.

*Sel 3.15* memuat layanan konseling perorangan yang mengacu kepada dimensi produktif. Dengan dibahasnya masalah-masalah

pribadi peserta didik dalam suasana yang demokratis mempribadi, dapat dimungkinkan peserta didik tumbuh menjadi individu-individu yang mampu mengembangkan potensi-potensi pribadinya seoptimal mungkin. Kemampuan seperti itu akan menghasilkan produk-produk yang tinggi menurut ukuran pribadi yang bersangkutan.

*Sel 3.16* memuat layanan bimbingan kelompok yang mengacu kepada dimensi demokratis. Melalui dinamika kelompok peserta didik diajak untuk membicarakan berbagai topik yang ada dalam kehidupan di sekeliling mereka melalui proses yang demokratis. Mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menampilkan diri di hadapan orang lain di satu sisi, dan di sisi lain mereka dituntut untuk menerima penampilan orang lain menurut cara-cara dan suasana demokratis. Keberhasilan layanan ini akan mengacu kepada wawasan, sikap dan perilaku demokratis, serta dihayatinya berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan kehidupan mereka.

*Sel 3.17* memuat layanan bimbingan kelompok yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Suasana demokratis dalam bimbingan kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada, mengarah kepada perikehidupan sebagaimana diharapkan bersama. Dengan layanan ini terbina keberanian berbicara, semangat untuk memperoleh berbagai hal dari orang lain, serta kemungkinan untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif dan emosional positif.

*Sel 3.18* memuat layanan bimbingan kelompok yang mengacu kepada dimensi produktif. Efektivitas layanan bimbingan kelompok terutama tercermin dalam kemampuan peserta didik untuk memproduksi pikiran dan perilaku yang menyenangkan orang lain di satu sisi, dan di sisi lain tumbuhnya sikap yang mengarah kepada komitmen untuk melakukan hal-hal yang berguna berkenaan dengan materi topik-topik yang dibahas. Komitmen ini lebih jauh akan tercermin pada produk-produk yang dihasilkan oleh para anggota kelompok di luar kegiatan kelompok itu sendiri.

*Sel 3.19* memuat layanan konseling kelompok yang mengacu kepada dimensi demokratis. Layanan konseling kelompok

merupakan pemanfaatan dinamika kelompok untuk mengentaskan masalah-masalah pribadi masing-masing anggota kelompok. Proses, isi, dan teknik-teknik yang dipakai sejalan dengan apa yang terlaksana dalam konseling perorangan, yaitu penuh dengan nuansa demokratik.

*Sel 3.20* memuat layanan konseling kelompok yang mengacu kepada dimensi inspiratif. Sejalan dengan konseling individual, konseling kelompok memanfaatkan dinamika kelompok untuk "membesarkan" individu sesuai dengan potensi-potensi pribadinya. Potensi dan permasalahan pribadi masing-masing anggota kelompok menjadi titik tolak dan fokus pembahasan dalam kelompok.

*Sel 3.21* memuat layanan konseling kelompok yang mengacu kepada dimensi produktif. Pribadi yang mampu menampilkan diri sesuai dengan potensinya sendiri serta terbebas dari permasalahan pribadi adalah sebagai hasil dari konseling kelompok. Pribadi yang demikian itu diharapkan akan mampu menghasilkan produk-produk dalam berbagai bentuknya yang mempunyai nilai tambah bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Isi kedua puluh satu sel pada Matriks 3 tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling semuanya mendorong terwujudnya ketiga dimensi pendidikan. Layanan bimbingan dan konseling menegakkan sasaran-sasaran pendidikan dengan isi yang benar-benar hidup di dalam bingkainya yang berdimensi tiga itu.

## **Penutup**

Sasaran pendidikan yang meliputi segenap aspek pendidikan dapat dikaitkan kepada tiga dimensi pendidikan, yaitu dimensi demokratik, inspiratif, dan produktif. Ketiga dimensi itu membingkai semua sasaran pendidikan.

Ketiga dimensi pendidikan tersebut perlu ditegakkan, bukan semata-mata demi pendidikan itu sendiri, melainkan terutama sekali untuk membangkitkan pendidikan di Indonesia yang dewasa

ini sedang mengalami krisis. Pendidikan kita selama ini agaknya belum berhasil mengembangkan individu warga masyarakat dan negara yang demokratis, terkembangkan potensi diri pribadinya secara optimal, dan produktif. Gejala yang menunjukkan individu yang anti-demokratis, indolensi (*indolence*), dan memiliki etos kerja anti-produktif yang merebak di masyarakat kita dapat dikaitkan dengan kegagalan pendidikan.

Bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pendidikan melalui berbagai jenis layanan dalam keempat bidangnya. Pelayanan bimbingan dan konseling secara langsung dapat ikut serta menegakkan ketiga dimensi pendidikan untuk mencapai sasaran dan tujuan pendidikan dalam mengembangkan individu dan masyarakat yang demokratis, inspiratif, dan produktif. Kelima kegiatan pendukung akan lebih meningkatkan kinerja ketujuh jenis layanan bimbingan dan konseling. Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pendidikan, guru pembimbing di sekolah, sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling, perlu memiliki pemahaman dan kemampuan pelaksanaan yang tinggi dalam BK Pola 17.

### **Daftar Pustaka**

Orr, D (1991). What is education for? *Context*, 27, hal, 52 – 55.

## **18. PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH DASAR**

---

---

Dr. Tisnowati Tamat

### **Pendahuluan**

Pendidikan jasmani telah ada dan telah dilakukan oleh bangsa-bangsa primitif pada masa yang telah silam. Di zaman Romawi dan Yunani kala itu, pendidikan jasmani mempunyai kedudukan yang penting dalam program pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Di abad modern ini pendidikan jasmani telah menjadi bagian dari program pendidikan secara keseluruhan. Hal ini terwujud dengan masuknya pendidikan jasmani dalam kurikulum sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMTA.

Pendidikan jasmani sebagai salah satu bagian dari mata rantai dalam keseluruhan proses pendidikan, memainkan peran yang sangat berarti dalam upaya pembentukan dan pengembangan manusia sebagai mahluk Tuhan, sebagai individu, dan sekaligus sebagai mahluk sosial. Pendidikan jasmani di sekolah disajikan dalam berbagai bentuk olahraga. Penyajian program pendidikan jasmani selalu memperhatikan fase pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan pendidikan jasmani demi tercapainya tujuan pendidikan jasmani khususnya, dan pendidikan pada umumnya.

Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan kesempatan yang diberikan kepada anak didik terutama pada tingkat SD untuk menyalurkan dorongan bergerak. Di samping itu, program tersebut juga merupakan kesempatan yang baik bagi anak didik untuk mengembangkan diri baik secara fisik, mental maupun sosial. Keadaan ini hanya dapat terjadi dalam situasi anak aktif bersama

anak lain untuk melakukan kegiatan pendidikan jasmani di bawah bimbingan seorang guru.

Selama anak-anak melakukan aktivitas jasmani (olahraga) guru akan dapat mengamati sifat dan perilaku anak didiknya. Sebagaimana dinyatakan oleh para ahli psikologi bahwa anak-anak akan muncul dengan berbagai sifat asli mereka, pada saat mereka sedang bermain (Vannier & Foster 1976).

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa pengajaran pendidikan jasmani yang terencana dan dilaksanakan dengan baik akan memberikan sumbangan yang nyata bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai satu kebulatan. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses yang menjadikan lengkapnya proses pendidikan (Andrew, 1979).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari tuntutan bagi pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Maka seharusnya kegiatan tersebut tidak terbatas pada jam pelajaran di sekolah saja karena sekolah hanya menyediakan 2 jam pelajaran setiap minggu. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari kebutuhan hidup seseorang. Dengan demikian, pendidikan jasmani juga merupakan usaha untuk menjadikan seseorang sebagai individu dan warga negara yang sehat dan kuat jasmani dan rohani serta terampil sebagai calon tenaga kerja.

Dalam menghadapi era globalisasi, sumberdaya manusia memegang peranan terbesar. Tenaga kerja yang profesional, yang cerdas, sehat sosial, jasmani dan jiwa serta loyal dan cinta terhadap tugas adalah modal utama dalam persaingan bebas mendatang. Apabila kita tinjau kembali tujuan pendirian negara ini, serta apa tujuan pembangunan di negeri ini, maka pendahulu kita telah menetapkan bahwa: **Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya** dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan manusia Indonesia **seutuhnya** adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri berikut.

**Pertama, manusia yang cerdas.** Orang disebut cerdas apabila dapat membedakan baik dan buruk, sehingga dapat menganalisis

dan memecahkan masalah hidupnya berdasarkan agama dan analisis sebab akibat. Semua langkahnya dipertimbangkan melalui 4 tahapan berikut.

- a. **Bolehkah hal tersebut saya lakukan?** Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan baik dengan terlebih dahulu merenungkan pertanyaan berikut. Apakah Tuhan mengizinkan? Apakah peraturan dan perundangan membolehkan? Apabila jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab dengan “**boleh**” maka dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya.
- b. **Perlukah saya lakukan**, atau sekedar ingin atau ikut-ikutan? Apabila jawabannya **perlu** bahkan perlu sekali, maka harus di jawab pertanyaan berikutnya.
- c. **Mampukah saya melakukannya** ditinjau dari waktu, keuangan, keterampilan, pengetahuan dan hal lain yang perlu direnungkan.
- d. Apabila pertanyaan ketiga sudah terjawab dengan baik maka pertanyaan terakhir adalah **pantaskah** hal tersebut saya lakukan?

Kecerdasan seperti tersebut dapat dilatih melalui kegiatan olahraga sejak dini, karena di dalam kegiatan olahraga seseorang bergerak dalam rambu-rambu peraturan dan harus tahu tentang kemampuan orang lain dan diri sendiri, serta akan selalu memperhitungkan setiap langkah.

**Kedua, manusia yang sehat sosial.** Seseorang disebut sehat sosial apabila orang tersebut dapat mengendalikan diri, sehingga dapat berinteraksi sesuai dengan kebutuhan, tempat dan waktu, serta pandai menempatkan diri sesuai dengan lawan bicara. Dengan kata lain orang tersebut dapat *tepo-seliro*, dapat menghargai karya orang lain, peka terhadap situasi dan tuntutan lingkungan dan selalu mawas diri, misalnya tercermin ketika ia berbicara dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat atau dengan murid.

**Ketiga, manusia yang sehat jasmani.** Adapun ciri-ciri manusia yang sehat jasmani adalah seseorang yang dapat melakukan

semua tugas sehari-hari tanpa merasa terlalu lelah dan masih mempunyai energi untuk melakukan aktivitas tambahan, seperti: mengantar anak dan menonton TV bersama keluarga.

**Keempat, manusia yang sehat jiwa.** Orang yang sehat jiwa adalah seseorang yang dapat menyelaraskan antara harapan dan kenyataan sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat merencanakan keinginan berdasarkan **prioritas dan fungsi**. Dengan cara ini tidak ada penyesalan dalam kegagalan, karena dia telah merencanakan dan berusaha secara maksimal, namun menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan, misalnya dalam ujian atau pertandingan.

Salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut adalah pendidikan jasmani di sekolah, terutama di Sekolah Dasar (SD), karena pada umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun inilah masa pertumbuhan dan perkembangan terbesar, ditinjau dari perkembangan fisik, psikis, sosial dan intelegensi anak. Usaha meletakkan dasar yang benar harus dilakukan, karena kekeliruan yang dilakukan pada masa ini akan mengganggu perkembangan selanjutnya. Apabila kegiatan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar dapat dilaksanakan dengan baik, maka **struktur tubuh anak yang baik dapat tercipta**, dan **dasar kepribadian yang baik** dapat pula ditanamkan sehingga akan selalu menjadi bisikan hati yang baik. Kedua hal tersebut sangat penting **karena hasil yang diperoleh pada saat anak di Sekolah Dasar relatif akan menetap dan dibawa sampai dewasa**.

Munculnya kebudayaan dalam segala bentuk dan perwujudannya, termasuk **sekolah**, walaupun sangat penting bagi perkembangan rohani anak, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak (pertambahan tinggi dan berat badan), bahkan sekolah **dituding** sebagai penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan fisik, seperti: **lordose, kyphose, scolyose** dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah saat ini belum dapat mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia seperti yang tercantum dalam GBHN 1993. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana olahraga, jumlah jam yang tidak

memadai serta kurangnya sikap positif, pengetahuan, dan keterampilan guru karena banyak guru pendidikan jasmani di Sekolah Dasar tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang relevan.

Untuk selanjutnya akan dibahas tentang tujuan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar, karakteristik anak, serta kegiatan dan cara evaluasi keberhasilan pendidikan jasmani.

### **Tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar**

Tujuan utama pendidikan jasmani di Sekolah Dasar adalah memenuhi **hasrat dan dorongan bergerak anak**, karena gerak dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosial, dan emosi anak. Sedang tujuan khusus pendidikan jasmani di Sekolah Dasar adalah membentuk **struktur tubuh yang baik, mengoreksi penyimpangan yang ada dan menguasai gerak dasar secara benar**.

Ditinjau dari bidang studi itu sendiri, pendidikan jasmani mempunyai **4 tujuan**, yaitu sebagai berikut.

1. Memberikan pengetahuan dan pengertian tentang arti dan guna pendidikan jasmani, dan cara bermain olahraga yang benar. (*Cognitive domain*)
2. Membentuk dan mengembangkan sikap serta kepribadian dalam penghayatan dan pengamalan **peraturan** dan **jiwa kesatria** menuju terbentuknya warga negara yang baik. Hal ini antara lain meliputi pengendalian diri, kejujuran, keadilan, disiplin, perhatian pada orang lain dan simpati pada yang lemah, keberanian, toleransi dan kerjasama, ketekunan, apresiasi terhadap keindahan bentuk tubuh dan gerak. (*Affective domain*)
3. Meningkatkan koordinasi, waktu reaksi, penguasaan gerak dalam ruang, keseimbangan, kelenturan, kecepatan, efisiensi gerak, dan keterampilan khusus tentang cabang olahraga tertentu. (*Psychomotor domain*)

4. Meningkatkan **fungsi organ penunjang** untuk memperoleh daya tahan, kekuatan otot, pembentukan sikap tubuh yang baik, berat badan yang ideal, dan penyediaan energi yang cepat melalui sistem enzim. (*Organic domain*)

### **Karakteristik Siswa Sekolah Dasar**

Siswa Sekolah Dasar (SD) rata-rata berusia 6 sampai 12 tahun. Ditinjau dari sudut pelaksanaan pendidikan jasmani di SD, anak dapat dibagi menjadi 3 kelompok, sebagai berikut.

1. Kelompok I terdiri dari anak kelas 1 dan 2 yang berumur sekitar 6 s/d 8 tahun
2. Kelompok II terdiri dari anak kelas 3 dan 4 yang berumur sekitar 9 s/d 10 tahun
3. Kelompok III terdiri dari anak kelas 5 dan 6 yang berumur sekitar 11 s/d 12 tahun

Setiap kelompok anak tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan jasmani harus berbeda pula. Karakteristik kelompok anak tersebut adalah sebagai berikut.

**Kelompok I** Siswa yang termasuk dalam kelompok I, berusia 6 sampai dengan 8 tahun, kelompok ini masih hidup dalam alam fantasi dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Memiliki pertumbuhan otot yang cepat sehingga pendidikan jasmani yang diberikan hendaknya aktivitas yang dapat menggerakkan sebagian besar otot-otot tubuh, kaki dan tangan. Fase ini juga merupakan peluang terbaik bagi perkembangan fungsi jantung dan paru-paru (**cardio-vascular**). Penggarapan saat ini menentukan kemampuan daya tahan seseorang di kemudian hari.
- b. Belum memiliki dengan baik koordinasi, kelenturan, keseimbangan, waktu reaksi, perkiraan jarak dan waktu serta arah gerak, dan rasa irama; karena itu harus diberikan gerakan dasar yang mendukung terbentuknya hal-hal tersebut.

- c. Memiliki masa konsentrasi dan atensi yang pendek, maka penjelasan-penjelasan haruslah jelas dan singkat sekaligus disertai contoh-contoh. Setiap bentuk kegiatan janganlah terlalu lama (15 menit) kemudian diganti dengan bentuk kegiatan yang lain. Hal ini perlu agar dapat mengikat perhatian dan konsentrasi mereka.
- d. Masih hidup dalam dunianya sendiri, (*egocentris*, fantasi). Walaupun bersama-sama dengan kelompoknya, mereka tetap hidup dalam dunianya sendiri, maka olahraga yang sifatnya individual lebih dianjurkan.
- e. Dramatis dan imajinatif, maka semua gerakan olahraga dapat dikaitkan dengan ceritera, misalnya: menirukan pesawat terbang, katak melompat, kera memanjat, dan kuda lari.
- f. Aktif, energik dan responsif terhadap irama, (walaupun belum baik), maka akan menyenangkan bagi mereka apabila hitungan-hitungan diberikan melalui lagu, drum, atau bunyi-bunyian yang lain.
- g. Selalu ingin tahu, maka pada saat memberikan olahraga haruslah memanfaatkan hal tersebut, dengan memberikan sebanyak mungkin gerakan dasar dan kemungkinan gerak yang ada pada manusia, sehingga terbentuk koordinasi, fleksibilitas, keseimbangan dan hal lainnya. Juga dalam keingintahuannya tersebut, guru dapat mengenalkan berbagai macam alat olahraga dengan segala macam sifatnya, misalkan bola, tali, kuda-kuda, ayunan, atau egrang.
- h. Berada dalam masa peka terhadap norma dan nilai dan masa patuh-patuhnya, maka pada saat ini adalah masa yang paling tepat untuk menanamkan nilai dan norma, misalkan tentang baik buruk, benar salah, aturan main dan *sportmanship*.
- i. Ingin mendapatkan kesempatan untuk menentukan gerakannya sendiri, maka tugas-tugas yang sifatnya *problem solving* akan lebih menyenangkan, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri, menyatakan dan mengembangkan diri sesuai dengan minat masing-masing.

Secara singkat, hal yang perlu ditanamkan bagi murid kelas 1 dan kelas 2 dalam melaksanakan pendidikan jasmani adalah *affective domain* dan *organic domain*.

**Kelompok II** Terdiri dari siswa kelas 3 dan 4 SD, berumur sekitar 9 sampai dengan 10 tahun. Kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan organ tubuh yang cepat dan sangat berminat pada aktivitas jasmani.
- b. Membanggakan kekuatan jasmaninya, sehingga mereka cenderung memilih pemimpin yang mempunyai fisik yang kuat.
- c. Karakteristik **fisik** yang perlu diperbaiki oleh guru adalah koordinasi dan posisi tubuh dalam melempar, menangkap, memukul, melompat dan berlari.

Perlu di perhatikan pula pertumbuhan dan ketahanan jasmani meningkat cepat, koordinasi antara tangan dan mata lebih baik, dan anak-anak pada masa ini sangat dinamis sehingga kecelakaan sering terjadi.

- d. Karakteristik **sosial** dan **emosional** yang perlu di perhatikan guru adalah mereka mudah terpengaruh, dan mudah tersinggung, hidup dalam khayalan masih pekat sehingga terkesan pembual, dan senang berpura-pura menjadi seorang yang dikagumi, senang menggoda dan menyakiti temannya, mempunyai kemauan yang kuat, kurang hati-hati, senang membuat gaduh dan senang cari pembenaran (rasionalisasi), menginginkan kebebasan walaupun tetap dalam perlindungan orang dewasa, lebih senang permainan beregu daripada permainan yang bersifat perorangan, suka membandingkan dirinya dengan teman-temannya (keberhasilan, kegagalan dan prestasi), senang pada bunyi-bunyian dan irama, senang meniru orang yang dipujanya, dan senang aktivitas yang bersifat lomba atau pertandingan.

Mengingat karakteristik tersebut, maka dalam memberikan pendidikan jasmani kepada kelompok ini dapat di mulai dengan

memberikan sedikit hal yang menyangkut *cognitive domain*, di samping tetap diberikan hal-hal yang menyangkut *affective domain*, *psychomotor domain* dan *organic domain*. Kelompok ini mulai menyadari keberadaan dirinya dan rasa persaingan mulai timbul, oleh karenanya penerapan norma baik buruk, disiplin dan menghargai prestasi orang lain harus lebih ditekankan oleh para guru pendidikan jasmani.

**Kelompok III** Terdiri dari anak kelas 5 dan 6 SD berumur sekitar 11 s/d 12 tahun, anak-anak kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. **Segi fisik:** mereka mulai menyadari dirinya secara fisik dan perbedaan gender mulai kelihatan, pertumbuhan tubuhnya mulai lambat, waktu reaksinya semakin bagus, dan koordinasi menjadi baik. Mereka kelihatan sehat dan kokoh, pertumbuhan tungkai lebih cepat daripada badan bagian atas, paru-paru terbentuk hampir sempurna, serta laki-laki dan wanita mulai kelihatan perbedaannya dalam kekuatan dan keterampilan.
- b. **Segi mental** mereka menyenangi bentuk kegiatan yang kompetitif, lebih tertarik pada permainan dengan bola dan permainan beregu, belum mengenal masalah kesehatan, serta waktu perhatian/konsentrasi lebih panjang. Mereka sangat memikirkan kelompoknya dan menghargai prestasinya, sebagian cepat putus asa apabila gagal, sukar untuk disuruh mencoba kembali, merasa sudah besar (dewasa), dan kemampuan membaca lebih baik, menghargai waktu, sehingga senang apabila segala sesuatu tepat waktu.
- c. **Segi sosial dan perasaan:** rasa sosial dan perasaannya sesuai dengan pertumbuhan fisiknya, reaktif terhadap komentar dan kata-kata serta mudah terpancing, sangat kritis pada tindakan orang dewasa. Siswa putra tidak begitu suka pada anak putri, sedangkan anak putri mulai menaruh perhatian kepada teman prianya yang lebih tua. Mereka senang apabila dihargai oleh kelompoknya, bangga dengan prestasinya dan benci pada kegagalan atau kesalahan. Mereka akan bekerja keras apabila mendapat dorongan dari

orang dewasa, dan kerjasama meningkat terutama pada anak putra.

Untuk kelompok ini keempat tujuan pendidikan jasmani dapat diberikan.

### **Kegiatan Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar**

Pendidikan jasmani di Sekolah Dasar harus dipandang sebagai bagian penting dalam kurikulum sekolah secara keseluruhan. Program tersebut tidak boleh dianggap sebagai kegiatan tambahan belaka yang dapat dengan mudah diiadakan (dihapus) dari keseluruhan program sekolah. Seperti telah diuraikan di muka, pendidikan jasmani adalah suatu proses dan juga alat yang memberikan sumbangan besar kepada tercapainya tujuan pendidikan, yaitu: membantu anak belajar menggunakan tubuh mereka secara efektif dan efisien serta membantu mereka belajar tentang dunia mereka melalui gerak (Vannier & Gallahue, 1978).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pendidikan jasmani harus merupakan suatu program yang terencana dan meningkat dengan memperhatikan dorongan, kebutuhan dan minat anak (Dauer, & Pangrazi, 1975). Program tersebut bercirikan hal-hal sebagai berikut.

#### **1. Adanya unsur gerak**

Gerak merupakan inti dari pendidikan jasmani. Sehubungan dengan itu, satu-satunya cara untuk menilai kualitas program pendidikan jasmani adalah dengan mengevaluasi tingkat pengalaman gerak yang dimiliki oleh anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan jasmani lebih banyak memberi kesempatan kepada semua anak untuk ikut aktif, sehingga program tersebut akan mampu memberikan pengalaman gerak seluas-luasnya kepada anak.

#### **2. Aktivitas yang disesuaikan**

Aktivitas yang dipilih dan direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan dan minat anak serta disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam hal ini

pendidikan jasmani menjalankan sistem pengajaran yang terpusat dan berorientasi kepada anak (*learner centered teaching*).

### **3. Bimbingan**

Semua kegiatan perlu dibimbing/diarahkan dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tujuan pendidikan jasmani dapat dicapai. Hasil program pengajaran pendidikan jasmani tidak segera dapat dilihat. Dalam hal ini diperlukan guru-guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta mencintai tugasnya demi keberhasilan pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari uraian tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah kegiatan jasmani yang dipilih dan direncanakan atas dasar pertimbangan yang berorientasi pada anak. Materi pengajaran seharusnya disajikan oleh guru yang profesional dalam tugasnya dan melibatkan aktivitas jasmani anak sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan.

### **4. Peran guru**

Kehadiran guru untuk melakukan tatap muka dengan anak didik terutama pada tingkat sekolah dasar adalah mutlak. Karena proses belajar mengajar dalam bidang studi pendidikan jasmani, bersifat unik, kehadiran guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh berbagai media pendidikan.

Oleh karena itu strategi untuk meningkatkan kemampuan belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar harus diarahkan kepada perencanaan yang menyangkut interaksi antara guru dan murid dalam situasi mengajar dan belajar. Perlu diketahui bahwa pendidikan jasmani mempunyai resiko yang cukup tinggi, terutama pada pelajaran berenang dan senam; oleh karenanya kehadiran seorang guru mutlak adanya.

### **5. Kemampuan gerak**

Pendidikan jasmani, terutama yang diselenggarakan di sekolah dasar, merupakan kegiatan pengajaran yang memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas yang

dinyatakan dalam bentuk gerak tubuh dan atau bagian-bagian tubuh. Dari kegiatan tersebut anak akan mendapatkan berbagai pengalaman gerak, dan hal tersebut merupakan sumbangan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di tingkat sekolah dasar (Nixon, 1969).

Pengalaman gerak yang dimiliki seorang anak akan menjadi modal untuk mengembangkan kemampuan gerak yang lebih tinggi dan dalam perkembangan selanjutnya kemampuan tersebut akan dapat memberikan sumbangan kepada penguasaan beberapa macam keterampilan gerak (Stallings, 1973).

Dengan mengambil pengertian dari uraian tersebut maka pendidikan jasmani di sekolah dasar perlu ditangani secara bersungguh-sungguh, sehingga akan tercapai hasil belajar, antara lain berupa kemampuan gerak yang berfaedah dalam kehidupan seseorang pada umumnya dan dalam kegiatan olahraga khususnya. Juga dari uraian tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa pendidikan jasmani merupakan suatu dan barangkali satu-satunya kegiatan pengajaran di sekolah yang memungkinkan anak didik untuk mengaktualisasikan potensi psikofisik mereka. Aktualisasi potensi psikofisik melalui penyajian pendidikan jasmani yang dipersiapkan dengan matang, dan sesuai dengan karakteristik anak, akan membantu perkembangan setiap anak secara optimal dan harmonis.

### **Kegiatan pendidikan jasmani untuk setiap kelompok**

Kegiatan pendidikan jasmani untuk setiap kelompok jelas akan berbeda, karena adanya perbedaan karakteristik anak.

#### ***Untuk Kelompok I:***

Berhubung kelompok ini masih hidup dalam alam fantasi, maka kelompok ini dapat diberikan pendidikan jasmani melalui bentuk ceritera khayalan, dan anak melaksanakan gerakan sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Sebagai contoh, cerita: **pergi ke hutan**. Gerakan sesuai dengan ceritera guru, melangkah pelan

dengan mengangkat tumit karena ada harimau yang sedang tidur, masuk ke lorong yang sempit atau melompati parit, dan seterusnya. Di sini anak dibimbing dan diharapkan dapat berkhayal sesuai situasi di hutan melalui suara dan turun naiknya nada seorang guru.

Permainan lain, yang dapat diajarkan misalnya: permainan kucing dan tikus, menjala ikan, permainan tiga kebanyakan, serta burung elang dan anak ayam.

### ***Untuk Kelompok II:***

Kelompok ini hidup dalam perpindahan antara alam fantasi ke alam nyata, sehingga guru seyogyanya melakukan hal-hal berikut.

1. Memberi tuntunan dalam mempraktikkan dan membiasakan sikap tubuh dan gerakan tubuh yang baik pada waktu berdiri, pada waktu berbaring, pada waktu duduk, pada waktu menulis dan membaca, pada waktu berjalan dan membawa beban, di samping mempraktekkan dan membiasakan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memberi tuntunan dalam menguasai ketangkasan atau keterampilan gerak-gerak dasar seperti jalan, lari, lempar, lompat dan menangkap.
3. Memberi tuntunan dalam mencapai ketangkasan atau keterampilan yang mengandung gerak seperti kelincahan, kekuatan, keseimbangan, ketepatan, kecepatan, dan koordinasi.
4. Memberi tuntunan dalam mencapai ketangkasan atau keterampilan bermain. Permainan tersebut dapat berupa: permainan tanpa alat, permainan dengan alat dan permainan anak-anak yang bersifat regu atau kelompok.
5. Memberi tuntunan dalam mencapai ketangkasan atau keterampilan dasar-dasar atletik antara lain untuk: lari: start berdiri, start jongkok, lari cepat 40 meter dan 50 meter, serta lari bersambung. Keterampilan dasar lompat termasuk lompat jauh tanpa awalan, lompat jauh dan lompat tinggi dengan awalan dan mengulang bahan-bahan pelajaran yang lalu, serta melanjutkan yang baru.

6. Memberi tuntunan dalam mencapai ketangkasan atau keterampilan dasar bermain beregu seperti.
  - bola pukul yang meliputi ketangkasan: lempar, tangkap, pukul dan bermain;
  - kasti yang mencakup ketangkasan: lempar, tangkap, pukul, dan bermain;
  - sepak bola yang melatih gerakan: menendang, mengontrol atau menghentikan bola, membawa bola atau men-dribble, lemparan ke dalam, menangkap bagi penjaga gawang, dan bermain sederhana; serta
  - bola basket yang meliputi gerakan: lempar, tangkap, kaki tumpuan, memasukkan bola ke dalam keranjang, serta bermain sederhana.
7. Memberi tuntunan dalam mencapai ketangkasan atau keterampilan dasar senam baik perorangan maupun berteman.
8. Memberi tuntunan dalam mencapai ketangkasan atau keterampilan dasar berenang yang meliputi: persiapan jasmani dan kejiwaan sebelum masuk kolam, menghilangkan rasa takut terhadap air yang ada di kolam renang, keberanian memasukkan seluruh tubuh di dalam air, kemampuan meluncur dari tepi kolam dan mengambang atau mengapung, kemampuan bernafas pada waktu mengapung dan meluncur, kemampuan melakukan gerakan dengan gaya bebas dalam jarak tertentu, serta keberanian terjun dari tepi kolam.
9. Memberikan pengalaman situasi belajar melalui: berkemah sekolah, karya wisata pada obyek tertentu, gerak jalan, dan baris-berbaris.
10. Usaha mempertinggi taraf kesegaran jasmani dengan cara melakukan berbagai macam tes kesegaran jasmani, sehingga anak mengetahui status atau kedudukannya dalam kelasnya, dan akan selalu berusaha untuk memperbaiki nilai kesegaran jasmaninya.

### **Untuk Kelompok III:**

Kelompok ini hidup dalam alam nyata. Mengingat karakteristik kelompok ini, maka dalam memberikan pendidikan jasmani pada kelompok ini perlu ditekankan semua tujuan pendidikan jasmani (4 domain) yang ada. Maka di samping atletik, berenang dan senam lantai, gerakan dasar permainan beregu dapat mulai diajarkan, antara lain gerakan dasar, untuk sepak bola, bola tangan, raunders, sepak takraw, dan basket.

Walaupun karakteristik kelompok ini senang pada permainan beregu, jenis permainan individual dapat menjadi pilihan pula, seperti bulu tangkis, tenis meja dan permainan tradisional.

### **Evaluasi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar**

Evaluasi pendidikan jasmani di SD harus mengacu kepada tujuan pendidikan jasmani di SD, yaitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak serta untuk mencapai struktur tubuh yang baik. Oleh karenanya, evaluasi hendaknya diarahkan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta struktur tubuh anak menurut teori yang ada. Dengan demikian anak SD belum perlu mengetahui peraturan permainan secara lengkap seperti yang digunakan dalam pertandingan resmi, juga tidak perlu mengetahui ukuran alat dan lapangan. Pemaksaan tentang hal ini hanya akan membebani dan membingungkan anak, karena tidak semua sekolah memiliki alat dan lapangan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Jadi yang penting bagi anak adalah mereka dapat bermain dengan menggunakan alat dan lapangan yang ada di sekolah mereka, sehingga ujian tertulis untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap teori pendidikan jasmani tidak perlu diadakan.

Evaluasi pendidikan jasmani yang perlu dilakukan adalah tes kesegaran jasmani. Tes Kesegaran Jasmani dapat dilakukan sesuai dengan buku penilaian Kesegaran Jasmani untuk Sekolah Dasar, yang diterbitkan oleh Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tes ini dapat dilakukan setiap akhir tahun ajaran, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Hasil tes ini dapat

diperbandingkan dari tahun ke tahun sehingga penyimpangan pertumbuhan mereka dapat dideteksi lebih awal dan diperbaiki.

Tes lain yang perlu dilakukan adalah untuk mengetahui struktur tubuh anak. Tes ini berguna untuk melihat penyimpangan struktur tubuh anak, misalkan, khypose, lordose atau scolyose. Hasil tes ini berguna untuk merencanakan program kegiatan atau latihan untuk koreksi penyimpangan yang ada berdasarkan teori yang ada.

Untuk anak kelas 4, 5 dan 6, dapat dilakukan tes untuk gerak dasar atletik, senam dan beberapa permainan sesuai dengan tingkat kekuatan mereka, sedang untuk tes sikap, dapat dilakukan oleh guru melalui pengamatan pada setiap kegiatan pendidikan jasmani, yang antara lain mencakup aspek-aspek keikutsertaan anak dalam kegiatan pendidikan jasmani, kepatuhan kepada guru maupun teman yang ditunjuk sebagai wasit, kegembiraan mereka dalam mengikuti pengajaran pendidikan jasmani, kepatuhan kepada peraturan yang dibuat oleh guru dalam setiap permainan, dan perkembangan sikap serta kepribadian dalam penghayatan dan pengamalan peraturan dan jiwa kesatria (kejujuran, keadilan, disiplin, perhatian kepada orang lain dan simpati pada yang lemah/menolong teman, kerjasama dan keberanian mencoba hal yang baru).

## **Penutup**

Agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, ia harus membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan. Di samping itu, seorang guru dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan diri untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam situasi seperti saat ini, tugas guru Pendidikan Jasmani semakin berat, karena dalam masyarakat madani seseorang harus tahu kewajiban dan haknya, dapat berbuat sesuai dengan peraturan yang ada, dapat menghargai prestasi dan kelebihan orang lain, serta tidak berprasangka buruk kepada orang lain.

Hal tersebut dapat ditanamkan melalui pertandingan antar kelas dan antar sekolah, sebab semua pertandingan mempunyai

peraturan sebagai rambu-rambu. Setiap peserta harus mematuhi rambu-rambu tersebut, dan bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman.

Apabila kebiasaan mematuhi peraturan ini dibina mulai usia dini, diharapkan pada saat seorang anak menjadi dewasa, akan dengan mudah dan rela mematuhi peraturan yang ada (disiplin) dan dapat menerima suatu kekalahan atau kemenangan secara wajar dan tenang.

Untuk dapat mencapai ke 4 (empat) tujuan pendidikan jasmani tersebut, dibutuhkan guru pendidikan jasmani dengan profil sebagai berikut.

- a. Sadar tentang tugas dan tanggung jawabnya dan mampu membimbing perkembangan anak didiknya sesuai dengan tuntutan dan harapan pemerintah dan masyarakat serta tuntutan kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah.
- b. Mampu meletakkan dasar rasa nasionalisme, memupuk persatuan dan kesatuan serta peningkatan disiplin pada anak didiknya.
- c. Mampu meletakkan dasar yang kuat (jasmani dan rohani) dalam penciptaan tenaga pembangunan yang mampu bersaing dalam era globalisasi.
- d. Mampu membantu mempertahankan olahraga tradisional.
- e. Mampu mempengaruhi perkembangan pengertian (*interpretive* dan *cognitive* tentang pendidikan jasmani), membina sikap positif (*affective*) terhadap pendidikan jasmani, memberikan keterampilan dalam berolahraga (*neuromuscular* atau *psychomotor*) dan meningkatkan fungsi organ tubuh anak didiknya.
- f. Mampu menanamkan norma tentang baik dan buruk, kejujuran, sportmanship, persahabatan, timbang rasa, saling menghormati, saling pengertian, menghargai prestasi dan hasil kerja orang lain, serta hidup sehat.
- g. Mampu menciptakan sekolah sebagai sarana pembibitan olahragawan yang handal.

Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar merupakan beban terberat bagi guru Pendidikan Jasmani karena harus meletakkan dasar yang baik dan benar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Apabila struktur tubuh yang baik dapat tercapai, maka pada saat di SLTP anak dapat belajar keterampilan dengan baik. Dengan demikian sekolah dapat pula merupakan tempat yang baik untuk pembibitan calon olahragawan yang dapat dibanggakan dan dapat menyediakan calon tenaga kerja yang handal. Seorang guru pendidikan jasmani harus sadar benar akan tujuan pendidikan jasmani dan tahu benar apa yang akan dilakukan karena pendidikan jasmani di Sekolah Dasar merupakan sarana yang penting dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mendukung hal tersebut seyogyanya guru Pendidikan Jasmani dan Penilik Olahraga berlatar belakang pendidikan S1 Olahraga atau minimal D-III Pendidikan Jasmani.

### **Daftar Pustaka**

- Andrew, J. (1979). *Essays on Physical Education and Sport*. Cheltenham: Stanley Thornes Publishers Ltd.
- Annarino, A.A. *et al* (1980). *Curriculum Theory and Design in Physical Education*. Toronto: The C.V.Mosby.
- Bloom, B.S. *et al* (1980). *Taxonomy of Educational Objectives, Affective Domain*. New York: Longman Inc.
- Crassy, B.J. (1968). *Movement Behavior and Mottor Learning*. Philadelphia: Lea & Febiger.
- Cowell, C.C. and Helen, W.H. (1961). *Curriculum Designs in Physical Education*. New Jersey: Prentice - Hall, Inc.
- Dauer, V.P. & Robert, P.P. (1975). *Dynamic Physical Education for Elementary School Children*. Minneapolis, Minnesota: Burgess Publishing Company.
- Drowatzky, J.N. (1975). *Motor Learning: Principles and Practices*. Minnesota: Burgess Pub. Co.
- Frost, R.B. (1975). *Physical Education - Foundations, Practices and Principle*. Ontario: Addison Wesley Publishing Company.

- Haywood, K.M. (1986). *Life Span Motor Development*. Illinois: Human Kinetics Publishers, Inc.
- Kane, J.E. (1970). *Curriculum Development in Physical Education*. London: Crosby Lockwood Staples.
- Larson, L.A. (1970). *Curriculum Foundations and Standards for Physical Education*. New Jersey: Prentice - Hall, Inc.
- Neilson, N.P. (1978). *Concepts and Objective in Movement*. New York: Vantage Press.
- Nixon, J.E. & Ann, E.J. 1973. *An Introduction to Physical Education*. Philadelphia: W. B. Saunders Company.
- Singer, R.N. (1980). *Motor Learning and Human Performance*. New York: MacMillan.
- Singer, R.N. (1987). *Motor Learning and Human Performance*. London: MacMillan Publishing.
- Stallings, L.M. (1973). *Motor Skill*. New York: Brown Company Publishers.
- Vannier, M. and Mildred, F. (1976). *Teaching Physical Education in Elementary Schools*. Philadelphia: WB. Saunders Company.
- Vannier, M. and David, L.G. (1978). *Teaching Physical Education in Elementary Schools*. Philadelphia: Saunders College Publishing.

## ***BAB IV***

# ***EVALUASI DALAM PENDIDIKAN***

## **19. EVALUASI PENDIDIKAN, KHUSUSNYA PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**

---

---

Siti Rasminah Chailani S.

### **Pendahuluan**

Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius dewasa ini, mengingat adanya tantangan besar, yaitu krisis ekonomi dan moneter yang berdampak juga menjadi krisis di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Di sisi lain pendidikan nasional harus tetap berlangsung untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam rangka menghadapi persaingan sebagai akibat globalisasi.

Mengingat pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, maka perlu adanya evaluasi pelaksanaan pendidikan di segala bidang. Bidang-bidang tersebut meliputi :

- Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar
- Relevansi
- Peningkatan mutu pendidikan
- Efisiensi
- Kemahasiswaan, dan
- Pengembangan Iptek

## **Evaluasi Program Pendidikan**

### ***Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar***

#### *Kesempatan Belajar*

Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar merupakan program pendidikan yang selalu harus diupayakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini perlu dipikirkan, khususnya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang berprestasi tinggi, tetapi lemah ekonominya. Kesempatan ini dapat diperoleh dengan beasiswa dari Pemerintah. Sebagai contoh adanya kebijakan Pemerintah melalui Program Beasiswa Kerja Mahasiswa (BKM)

#### *Daya Tampung*

Daya tampung masing-masing Perguruan Tinggi sangat bervariasi, hal ini tergantung sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Dengan daya tampung yang telah tercapai, maka efisiensi penggunaan sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan.

#### *Sarana dan Prasarana*

Peranan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran jalannya proses belajar mengajar adalah sangat penting keberadaannya.

Untuk hal tersebut perlu dipikirkan skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana yang dirasakan sangat penting.

Pengadaan sarana dan prasarana selain berasal dari Pemerintah, diusahakan juga upaya-upaya mencari dana di luar Pemerintah, apalagi dengan adanya krisis moneter di negara kita.

## **Relevansi**

### *Penataan Program Studi*

Program studi di masing-masing Fakultas, baik program strata satu (S1) maupun program strata dua (S2) perlu penataan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian ada program studi baru yang dibuka, namun ada juga yang ditutup sementara. Demikian juga perlu standarisasi penataan, maupun kualifikasi program studi.

### *Kurikulum*

Mengingat pesatnya perkembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya evaluasi kurikulum secara berkala, baik kurikulum nasional maupun lokal. Perubahan kurikulum hendaknya didasarkan pada relevansi hasil pendidikan dengan lapangan kerja yang ditentukan oleh: pasar, universitas, dan masyarakat. Perubahan kurikulum ini diikuti dengan mempersiapkan tenaga pengajar, baik dari segi isi, metode maupun peralatan. Hal ini diperlukan agar perubahan itu benar-benar mencapai tujuan.

### *Bidang Prioritas/ Unggulan*

Bidang-bidang yang perlu dikembangkan pada masing-masing Perguruan Tinggi sangat beragam mulai dari bidang kewirausahaan (entrepreneurship), bidang hukum, bidang pertanian lahan kering, bidang budidaya perternakan/perikanan dan sebagainya. Untuk menopang bidang-bidang unggulan tersebut selain dikelola Perguruan Tinggi sendiri perlu kerjasama dengan pihak luar, seperti dengan Perguruan Tinggi di dalam maupun dari luar negeri.

## **Mutu Pendidikan**

### *Peningkatan mutu dosen*

Sasaran nasional di tahun 2000 menyatakan bahwa jumlah dosen biasa di PTN yang berkualifikasi S2 dan S3 sebanyak 50%. Untuk

memenuhi sasaran ini masing-masing perguruan tinggi telah memprogramkan dosen-dosennya memiliki kualifikasi tersebut.

#### *Pengembangan Pascasarjana*

Untuk memenuhi jumlah kualifikasi dosen S2 dan S3 maka program Pascasarjana seyogyanya mendapat perhatian yang lebih serius dan perlunya membuka program-program studi baru.

#### *Sarana Pendidikan dan Penelitian*

Upaya pengembangan mutu pendidikan tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi gedung kuliah, gedung laboratorium, peralatan laboratorium, gedung perpustakaan, jumlah dan jenis buku di perpustakaan. Di samping itu peran penelitian dalam peningkatan kualitas tidak dapat dianggap enteng. Dari hasil penelitian diperoleh informasi kualitas pendidikan yang kita miliki sekarang; selanjutnya dari hasil ini dikembangkan perencanaan dan tindakan untuk meningkatkannya.

#### *Perbaikan proses belajar mengajar*

Bagi dosen-dosen muda diwajibkan mengikuti program Pekerti untuk memberi dasar-dasar kesiapan berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Dengan penataran program Pekerti para dosen muda mampu menyusun GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) dan SAP (Satuan Acara Perkuliahan). Di lain pihak untuk dosen senior diadakan program "Applied approach" untuk memutakhirkan wawasan pembelajarannya.

Di dalam upaya meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi, perlu dijalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa pendidikan formal (S2 dan S3), lokakarya, simposium, seminar, kuliah tamu, dan penelitian yang kesemuanya dapat dilakukan di dalam kampus dalam negeri maupun di luar negeri.

## **Efisiensi**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang program efisiensi adalah:

### *Organisasi/kelembagaan*

Organisasi/kelembagaan di perguruan tinggi harus mantap baik keterkaitan maupun tingkat produktivitas, dan perlu adanya koordinasi baik sarana maupun tugas di dalam proses belajar mengajar.

### *Otonomi*

Otonomi dan kebebasan akademik harus segera dilaksanakan, mengingat masing-masing perguruan tinggi dituntut untuk dapat mandiri di segala aspek pendidikan.

### *Pengelolaan mutu/Total Quality Management (TQM)*

Masing-masing perguruan tinggi perlu memiliki standar pedoman mutu.

### *Sistem informasi*

Kualitas sistem informasi perlu ditingkatkan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem "Lokal Area Network" (LAN) di tingkat Universitas, selanjutnya dikembangkan di tingkat Fakultas dan Unit-unit lain.

## **Kemahasiswaan**

Beberapa komponen yang perlu mendapat evaluasi dalam rangka menunjang keberhasilan program kemahasiswaan adalah:

### ***Memantapkan kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi:***

1. Penalaran bidang ilmu dengan mengikuti berbagai lomba karya ilmiah baik di tingkat Fakultas maupun Universitas dalam dan luar negeri;
2. Kesejahteraan, yang antara lain, dengan penyediaan beasiswa dari berbagai sumber, mengembangkan usaha perkoperasian dan kewirausahaan;

3. Penyaluran minat dan hobi yang umumnya dilakukan di berbagai unit aktivitas pada Universitas, yang dilakukan oleh seksi di dalam kepengurusan SEMA dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan).

Meningkatkan kesadaran bernegara, hal ini dapat dilakukan dengan Diklat Kepemimpinan Berwawasan Kebangsaan maupun program Pembinaan bagi mahasiswa baru.

Meningkatkan kegiatan khusus dan penunjang yang meliputi penyediaan dana kemahasiswaan, penyediaan sarana dan prasarana, sistem informasi kemahasiswaan dan hubungan dengan kegiatan alumni. Demikian juga masalah publikasi dan dokumentasi kegiatan baik secara rutin dan melalui media intern dan ekstern kampus harus selalu ditingkatkan.

### ***Pengembangan IPTEK***

Pengembangan IPTEK perlu mendapat perhatian yang intensif yang terdiri dari:

1. Peningkatan jumlah mutu penelitian, baik penelitian dosen muda maupun dosen senior dengan dana dari DP<sub>4</sub>M, PHB, RUT dan RUK.
2. Penyebarluasan hasil penelitian, lewat seminar nasional/ internasional, publikasi ilmiah lewat jurnal ilmiah.
3. Peningkatan jumlah peneliti yang bermutu melalui pendidikan S2 dan S3

### **Identifikasi Masalah dan Usaha Penanggulangan**

Permasalahan yang dihadapi pada program perluasan dan pemerataan kesempatan belajar antara lain:

1. Banyaknya dana lewat program JPS yang dialokasikan ke dalam DIP justru akan memperkecil jumlah mata anggaran lain yang pada hakekatnya lebih penting untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Demikian juga dengan banyaknya dana JPS kualitas penyelenggaraan seleksi menjadi kurang ketat dan pendistribusian juga belum merata.

2. Sulit mendapatkan data yang akurat mengenai pendapatan orang tua mahasiswa, sebab hal ini sangat tergantung pada kejujuran orang tua.

**Upaya pemecahan masalah adalah:**

1. Memperbaiki sistem dan kriteria seleksi sehingga beasiswa tersalur lebih merata, adil, dan tetap mengutamakan ketersediaan anggaran untuk perbaikan kualitas proses belajar mengajar.
2. Meningkatkan sumber dana beasiswa lain, baik lewat IOM maupun lewat kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha/industri.
3. Meningkatkan besarnya SPP bagi mahasiswa baru untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

***Permasalahan daya tampung***

1. Dengan pembukaan program diploma maupun ekstensi selama ini kurang relevan dengan Visi Universitas untuk mewujudkan "Research and Development University" yang lebih terkait dengan program S2 dan S3.
2. Biaya operasional pendidikan profesional lebih tinggi dibanding pendidikan akademik.
3. Pembukaan program studi yang kurang memadai mengakibatkan akuntabilitas lembaga sulit dipertahankan.

**Upaya pemecahan masalah antara lain:**

1. Perencanaan ulang pembukaan program studi baru yang dituangkan dalam rencana operasional universitas.
2. Mengupayakan langkah-langkah perbaikan kinerja program studi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai akreditasi.
2. Menutup program studi yang tidak "feasible".

Permasalahan sarana dan prasarana, terutama penambahan sarana dan prasarana sangat terbatas karena rendahnya anggaran. Di satu sisi, peningkatan jumlah peminat belum diikuti penambahan sarana dan prasarana.

Usaha pemecahannya dengan melakukan seleksi prioritas, khususnya bagi program studi yang mempunyai relevansi pendidikan tinggi. Demikian juga mengikutsertakan potensi dan kerjasama yang saling bermanfaat misalnya dengan IOM, masyarakat luar, dunia usaha/industri dalam pengembangan sarana dan prasarana.

### ***Hal yang menyangkut relevansi***

1. Khususnya permasalahan pada penataan program studi masih dijumpai pembukaan program ekstensi dan diploma yang tidak sejalan dengan visi universitas, padahal dengan program ekstensi dan diploma tersebut akan terjadi "resource sharing" sarana, prasarana dan SDM.
2. Biaya operasional program profesi yang tinggi belum diimbangi dengan profesionalisme lulusan.

Upaya pemecahannya dengan cara evaluasi diri, sehingga lulusan program diploma benar-benar proporsional dengan biaya pendidikan tinggi. Selain itu, perlu ditingkatkan kemampuan penataan program studi sesuai dengan paradigma penataan yang ditetapkan Dirjen Dikti.

Permasalahan kurikulum antara lain masih terdapat tumpang tindih antara kurikulum nasional dengan muatan lokal, relevansi kurikulum sulit dinilai karena belum cukup data kebutuhan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri akan hasil pendidikan tinggi. Universitas belum mempunyai tenaga pengembang kurikulum yang cukup. Usaha pemecahannya dengan melakukan kajian dan menetapkan parameter relevansi pendidikan di masing-masing program studi dan mengikutsertakan dosen dalam pengembangan kurikulum.

***Permasalahan pada bidang Prioritas/ Unggulan adalah***

1. Tingkat keterlaksanaan masing-masing bidang unggulan masih sangat beragam.
2. Belum ada pemahaman yang jelas tentang bidang unggulan.
3. Walaupun bioteknologi bukan merupakan bidang unggulan, tetapi kenyataannya merupakan salah satu bidang unggulan yang telah berjalan dengan baik.

Upaya pemecahan masalah, dengan mengkaji ulang bidang-bidang unggulan yang sudah disepakati untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta antisipasi keadaan nasional dan global.

Permasalahan mutu dosen, antara lain menyangkut kuantitas dosen berkualifikasi S2 dan S3 belum memenuhi sasaran, jumlah dosen yang berminat mengikuti program Pascasarjana semakin menurun, dan selain sebaran dosen yang berkualifikasi S2 dan S3 belum merata juga belum ideal diantara program studi. Demikian juga lama penyelesaian program Pascasarjana di dalam negeri umumnya lebih lama, dan kurangnya kemampuan dosen dalam penguasaan bahasa asing akan menurunkan minat mengikuti program pascasarjana di luar negeri.

Upaya pemecahan masalah di bidang peningkatan mutu dosen yaitu dengan meningkatkan kemampuan dosen dalam kemampuan bahasa asing melalui kursus TOEFL, dan memberi insentif bagi dosen yang berprestasi. Begitu juga meningkatkan upaya dan langkah-langkah konkrit yang mampu memotivasi fakultas yang belum mencapai sasaran sehingga dosen-dosen dapat mengikuti program pascasarjana dengan beasiswa terbatas.

***Permasalahan pengembangan pascasarjana yaitu:***

1. Pola penataan organisasi dan manajemen pascasarjana, khususnya hubungan lintas sektoral dengan fakultas, jurusan dan universitas belum jelas.
2. Lama studi S2 umumnya masih di atas 2 (dua) tahun
3. Belum ada studi khusus untuk mengantisipasi perubahan-perubahan global yang dipacu oleh majunya teknologi industri barang dan jasa.

Upaya pemecahan masalah dengan jalan pengkajian untuk pola penataan lebih lanjut program pascasarjana yang lebih strategis, memperbaiki koordinasi lintas sektoral, dan mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan pengelolaan program pascasarjana.

***Permasalahan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat***

- Belum adanya standarisasi ukuran kualitas kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Upaya pemecahan masalah dengan membakukan standar kualitas kerjasama sebagai alat ukur kinerja kerjasama, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

***Permasalahan akreditasi yaitu beberapa program studi memperoleh nilai akreditasi di bawah A dan data-data borang kurang valid.***

Usaha pemecahan dengan memperbaiki kinerja dan borang akreditasi.

***Permasalahan proses belajar mengajar meliputi:***

1. Jumlah dosen yang mengikuti Pekerti dan AA tidak mencapai sasaran sebab tergantung anggaran dari DIP.
2. Kemampuan dosen dalam proses pembelajaran belum sepadan dengan kemampuan dan penguasaan substansi akademik yang dimiliki.

Usaha pemecahannya dengan menggali dana di luar DIP, pemberian *reward/incentive* bagi dosen berprestasi, dan perluasan kerjasama dengan lembaga kependidikan di dalam dan di luar negeri.

Permasalahan yang menyangkut efisiensi di bidang organisasi/kelembagaan dan otonomi adalah dengan adanya paradigma penataan pendidikan tinggi yang baru, ternyata banyak universitas yang tidak mampu mengakomodasi dasar-dasar penyelenggaraan universitas, demikian pula masalah otonomi dan kebebasan

akademik belum terlaksana sepenuhnya karena makna otonomi itu sendiri belum jelas. Upaya pemecahan masalah yaitu dengan menyusun kembali statuta di masing-masing universitas dan perlunya sosialisasi perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi dan kebebasan akademik.

Permasalahan kemahasiswaan yang menyangkut pemantapan kegiatan kurikuler (penalaran dan keilmuan, kesejahteraan, penyaluran minat dan hobi) belum terprogram secara baik dan belum mencakup seluruh mahasiswa. Dalam pelaksanaannya lembaga kemahasiswaan belum dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan dan program kerja di bidang kemahasiswaan. Untuk kegiatan khusus, terutama dalam hal penyediaan dana, sarana dan prasarana dana sangat terbatas, contohnya, belum dibangunnya kantor-kantor untuk mahasiswa (Resimen mahasiswa) dan Bimbingan Konseling. Usaha pemecahan masalah dengan jalan kegiatan mahasiswa dilakukan secara terpadu, menambah dana kemahasiswaan secara proporsional, dan di bidang sarana perlu peningkatan dan penambahan sarana kegiatan mahasiswa.

Permasalahan dalam pengembangan iptek meliputi peningkatan jumlah dan mutu penelitian, penyebarluasan penelitian, dan peningkatan jumlah dan mutu peneliti ternyata masih ada keterlambatan informasi penelitian, keterbatasan kemampuan dosen untuk mengantisipasi tawaran penelitian, penyebarluasan hasil penelitian masih terbatas, dan kekurangmampuan dalam bahasa, menyebabkan rendahnya peminat studi ke luar negeri. Usaha pemecahan dengan jalan dosen/peneliti harus aktif mencari informasi penawaran penelitian, penambahan dana untuk penyebarluasan penelitian dan mengirimkan dosen-dosen untuk penataran bahasa dan menyelenggaraan kursus TOEFL.

## **Kesimpulan**

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan:

1. Evaluasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia mutlak diperlukan.
2. Evaluasi tersebut meliputi beberapa hal, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, relevansi, peningkatan mutu

pendidikan dan efisiensi. Demikian juga faktor kemahasiswaan dan pengembangan iptek.

3. Hasil evaluasi akan sangat berguna bagi kebijakan Perguruan Tinggi pada umumnya dalam menghadapi era reformasi dan globalisasi.

### **Daftar Pustaka**

- Ables, A. (1996). *The Academic Executive*. Philippines: SEAMEO-SEARCA Publ.
- Cuyno, V. (1996). *Curriculum Development for Higher Education*. Paper presented in AHEAD Training Course. Philippines: SEAMEO-SEARCA.
- Dahlan, M. (1996). *Tantangan Perguruan Tinggi Era Keterbukaan Globalisasi Informasi dan Sosial Budaya. Bahan Penataran P4*. Tingkat Nasional/Manggala Angkatan XIX Bogor: BP7
- Suhendro, (1996). *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi. Jangka Panjang 1996-2005*. Jakarta: Dirjen DIKTI. Depdikbud.

## **20. MODEL EVALUASI “CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT (CIPP)” UNTUK INSTITUSI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH**

---

Durri Andriani

### **Pendahuluan**

Evaluasi merupakan salah satu komponen dasar yang diperlukan dalam institusi penyedia jasa, termasuk jasa pendidikan. Dengan evaluasi, manajemen institusi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan institusinya dalam kinerjanya memenuhi kebutuhan pelanggan. Evaluasi dapat dilakukan lembaga independen (misalnya lembaga akreditasi) dan institusi itu sendiri. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat penerapan peraturan akan lebih baik dilaksanakan oleh lembaga independen. Evaluasi untuk menilai kinerja sehingga dapat digunakan untuk menyempurnakan program, idealnya dilakukan sendiri oleh institusi yang bersangkutan.

Karena perannya yang sentral untuk penyempurnaan kinerja institusi, evaluasi merupakan salah sebuah terminologi yang banyak dibicarakan. Akibatnya banyak definisi yang diberlakukan untuk evaluasi. Masing-masing definisi mempunyai segi-segi positif (dan negatif). Dalam makalah ini, definisi yang digunakan adalah definisi yang diterapkan oleh the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation: *evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some objects.*

Dengan definisi ini, evaluasi membedakan antara *worth* dan *merit*. Meskipun evaluasi memerlukan prosedur objektif agar menghasilkan informasi yang dipercaya dan tidak bias, evaluasi sendiri tidaklah bebas nilai. Prosedur objektif tidak bisa

menghilangkan esensi evaluasi untuk menentukan baik-tidaknya sesuatu. Per definisi, evaluasi harus menghasilkan penilaian baik-buruk dari sesuatu yang dievaluasi.

Arti serta peran *merit* dan *worth* dalam menentukan nilai dibahas oleh Scriven (1981). Pada saat tertentu, *merit* dari suatu program perlu untuk dilihat. Misalnya, apakah program mempersiapkan guru sejarah berhasil menghasilkan guru yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan dapat mengajar sejarah secara efektif? Jika ya, artinya program pendidikan guru sejarah memiliki *merit*, meskipun belum tentu *worthy*. Jika pada kenyataannya masyarakat tidak memerlukan guru sejarah karena telah tersedia banyak guru sejarah yang berkualitas tinggi, maka meskipun program pendidikan guru sejarah memiliki *merit* - dan mungkin saja lebih baik dari program-program pendidikan yang lain - tetapi akan tidak menguntungkan untuk meneruskan program. Meskipun program yang memiliki *merit* (baik) mungkin saja tidak bernilai, program yang tidak baik tidak mungkin bernilai. Dengan demikian, meskipun masyarakat memerlukan guru sejarah, tetapi jika program pendidikan guru sejarah tidak mampu menghasilkan guru sejarah yang berkualitas tinggi, maka program ini tidak perlu diteruskan.

### **Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh dan Evaluasi**

Institusi pendidikan dituntut untuk memberikan kualitas pembelajaran yang tinggi. Untuk mampu memberikan hal ini, institusi pendidikan perlu memperhatikan lima aspek, yaitu:

1. Adanya harapan yang berbeda dari pelanggan yang berbeda,
2. Kekuatan atau keberhasilan program,
3. Tingkat kebutuhan (potensi nilai) dari program,
4. Kelayakan program, dan
5. Pemerataan daya jangkau program,

Untuk institusi yang menerapkan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) persyaratan ini ditambah lagi dengan:

1. Karakteristik peserta ajar, dan
2. Pemilihan teknologi yang digunakan.

Jika PTJJ mensyaratkan tujuh aspek ini dalam PTJJ, bagaimanakah bentuk evaluasi yang paling sesuai untuk dilakukan? Komparatif atau non-komparatif? Secara umum beberapa ahli (misalnya Stake, Scriven, Cronbach) menyatakan bahwa evaluasi dapat difokuskan pada satu produk/jasa atau membandingkan satu dengan alternatif yang lain. Berdasarkan situasi, evaluasi dapat bersifat komparatif dan non-komparatif. Yang perlu diperhatikan adalah siapa pelanggan yang memanfaatkan jasa pelayanan institusi. Jika pelanggan adalah mereka yang perlu memilih jasa/produk yang ditawarkan, maka evaluasinya haruslah komparatif – karena dapat membantu pelanggan mempelajari alternatif yang ada serta membandingkan kriteria yang penting. Tetapi jika pelanggan adalah mereka yang sudah terdaftar pada suatu program tertentu, maka evaluasi sebaiknya difokuskan kepada pelaksanaan program yang dapat memberikan arah pada penyempurnaan program.

Stufflebeam & Shinkfield (1988) menyatakan bahwa evaluasi harus komparatif sebelum pengembangan dimulai atau sebelum pelanggan terikat pada satu program tertentu, nonkomparatif diperlukan pada saat pengembangan, dan periodik-komparatif diperlukan setelah pengembangan selesai dilakukan.

Di samping pentahapan itu, perlu tidaknya evaluasi komparatif dilakukan tergantung kepada tujuan evaluasi, apakah evaluasi bertujuan untuk perbaikan, akuntabilitas, atau pengayaan. Evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan meliputi penyediaan informasi untuk menjamin kualitas pelayanan. Untuk itu, perhatian harus ditujukan kepada karakteristik dan kebutuhan pelanggan serta kaitan proses dengan keluaran. Rencana evaluasi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Jika perbaikan adalah tujuan utama evaluasi, maka evaluasi lebih baik dilakukan dalam bentuk studi kasus daripada eksperimen komparatif.

Evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan akuntabilitas atau laporan sumatif membutuhkan informasi tentang efektifitas biaya dan perbandingan kinerja institusi dengan kinerja pesaing. Informasi yang didapat dari gabungan studi kasus mendalam serta studi lapangan komparatif dibutuhkan untuk situasi ini.

Sementara itu, meskipun institusi melakukan evaluasi untuk menyempurnakan kinerja, tidak berarti pengayaan (ilmu) tidak dapat diperoleh dari evaluasi. Untuk kepentingan yang lebih luas, evaluasi institusi PTJJ dapat dan perlu dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru, yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang PTJJ. Jenis evaluasi yang sesuai untuk ini adalah studi kasus.

Di samping aspek-aspek tersebut, ada empat kondisi evaluasi yang harus dipenuhi agar evaluasi efektif ( The Joint Committee Standards, 1986):

1. *Bermanfaat.* Evaluasi harus ditujukan pada orang atau kelompok orang yang terlibat atau bertanggung jawab terhadap penerapan materi yang dievaluasi. Evaluasi harus membantu mereka di dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan objek, menghasilkan arah perbaikan, dan menghasilkan laporan dalam waktu yang pantas.
2. *Layak.* Evaluasi harus menggunakan prosedur yang mampu diterapkan tanpa kendala yang berarti, dengan memperhatikan aspek politis yang dapat mempengaruhi evaluasi, dan dilakukan dengan efisien.
3. *Etis.* Evaluasi harus dilakukan berdasarkan persetujuan eksplisit yang menjamin kerjasama, menjamin hak siapapun yang terlibat, dan bahwa hasil yang didapat tidak dapat dikompromikan. Di samping itu, evaluasi juga harus mencantumkan laporan yang seimbang antara kelebihan dan kekurangan objek.
4. *Akurat.* Evaluasi harus dengan jelas menerangkan objek, yang mencerminkan kelemahan dan kekuatan rencana, prosedur, dan kesimpulan evaluasi. Kontrol terhadap bias perlu dilakukan, dan evaluasi harus menghasilkan informasi yang valid dan hasil yang dapat dipercaya (*reliable*).

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan yang timbul pada saat institusi PTJJ mengadakan evaluasi adalah:

1. Nilai siapa yang akan digunakan dalam menilai hasil?
2. Kriteria apa yang akan digunakan dan bagaimana susunan prioritas dari kriteria ini?

3. Apakah evaluasi perlu dilakukan secara komparatif?
4. Apakah evaluasi perlu dilakukan untuk membantu pengembangan, memperlihatkan akuntabilitas, menyusun pilihan, atau memunculkan pandangan baru tentang PTJJ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat apa yang dimaksud dengan PTJJ. Pannen (1999) menyimpulkan bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam praktik PTJJ di berbagai negara bermuara kepada:

1. tujuan PTJJ tidak hanya untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam kurikulum, tetapi diperluas menjadi peningkatan akses terhadap pendidikan.
2. konsep kemandirian peserta ajar dan interaksi peserta ajar-pengajar. Hubungan yang interaktif difasilitasi oleh media yang terstruktur dan dikembangkan dengan sistematis.
3. sistem perencanaan yang berfokus kepada siswa yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
4. mensyaratkan keterampilan berkomunikasi yang efektif bagi semua yang berpartisipasi.

Berdasarkan ke empat karakteristik tersebut, maka institusi penyelenggara PTJJ perlu menempatkan nilai peserta ajar sebagai acuan nilai, terus-menerus mengembangkan dan menyempurnakan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta ajar, serta memperkaya pengetahuan tentang PTJJ yang selain akan menyempurnakan program yang ditawarkan, juga akan memperluas wawasan masyarakat tentang PTJJ. Berdasarkan alasan ini, maka jenis evaluasi yang cocok untuk dilaksanakan pada institusi penyelenggara PTJJ adalah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

### **Evaluasi CIPP**

Evaluasi CIPP sesuai dengan bidang pendidikan karena tidak terlalu memfokuskan diri pada studi-studi individu tetapi lebih ditekankan kepada evaluasi yang terus-menerus dalam satu institusi. Hal ini terjadi karena evaluasi CIPP menganggap bahwa tujuan utama evaluasi bukanlah untuk membuktikan sesuatu tetapi

untuk meningkatkan kinerja. Evaluasi CIPP tidak melihat evaluasi semata-mata sebagai alat untuk melihat akuntabilitas, evaluasi CIPP lebih difokuskan kepada penyempurnaan mekanisme untuk membantu program agar mampu bekerja lebih baik bagi pelanggan. Pada dasarnya evaluasi CIPP ditujukan untuk menumbuhkan dan membantu semua yang terlibat, baik pimpinan maupun staf, untuk mendapatkan dan memanfaatkan umpan balik secara sistematis. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan.

Evaluasi CIPP mempunyai enam karakteristik, sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah bagian integral dari program regular institusi, bukan semata-mata kegiatan khusus yang dilakukan dalam proyek inovatif,
2. Evaluasi berperan penting dalam menstimulir dan merencanakan perubahan,
3. Penerapan masing-masing jenis evaluasi pada model CIPP hanya dilakukan jika informasi yang dibutuhkan belum tersedia,
4. Setiap pengembangan program baru perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi,
5. Informasi evaluasi tidak hanya menyediakan pedoman bagi pemecahan masalah, tetapi jika informasi dicatat dan dibuka untuk publik, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar bagi masyarakat luas untuk melihat apakah keputusan untuk membatalkan atau meneruskan proyek mempunyai dasar yang kuat, dan
6. Keputusan untuk memulai, menunda, atau membatalkan program hampir selalu melibatkan macam-macam upaya – baik rasional maupun irasional – yang berada jauh di luar kekuasaan evaluator.

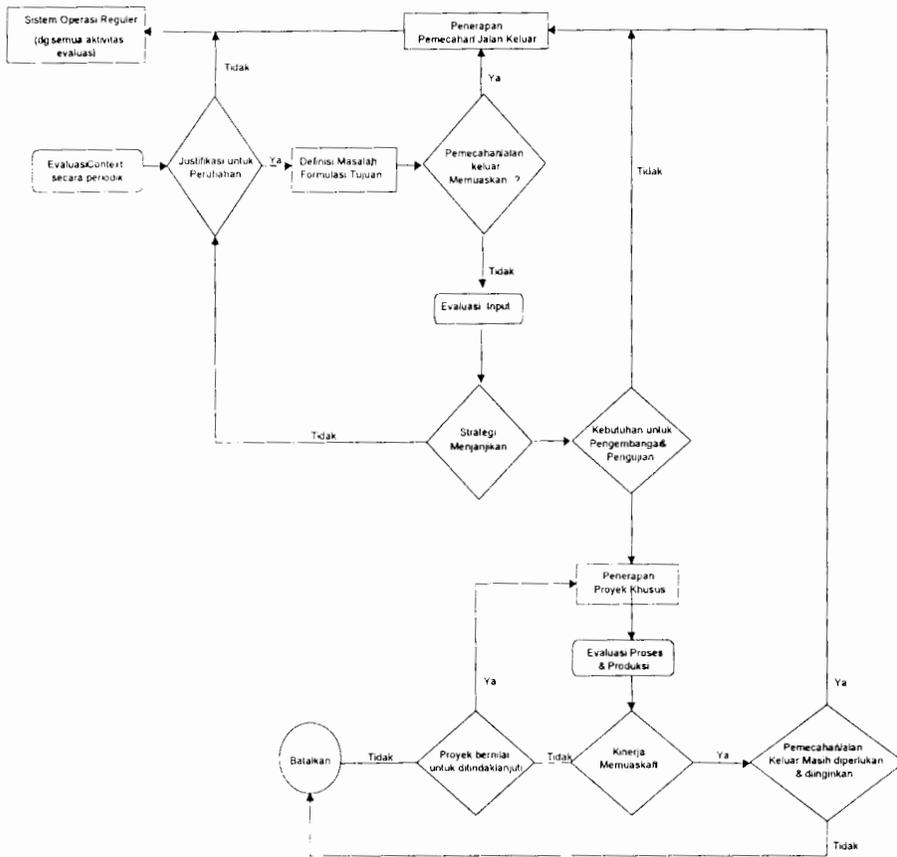
Bagan 1 berikut ini memperlihatkan peran evaluasi *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Bagan 1. Peran Evaluasi CIPP dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas

Variabel	Context	Input	Proces	Product
Pengambilan Keputusan	Pedoman pilihan untuk menentukan prioritas tujuan dan penugasan	Pedoman untuk memilih strategi program yang akan diterapkan	Pedoman untuk menerapkan strategi program yang telah dipilih	Pedoman untuk menghentikan, meneruskan, memodifikasi, atau memulai suatu program
Akuntabilitas	Catatan tujuan dan dasar pemilihan program, disertai catatan kesempatan, dan masalah	Catatan strategi dan desain yang dipilih, serta alasan pemilihannya	Catatan tentang proses aktual yang terjadi dalam penerapan program	Catatan pencapaian dan macam keputusan

Evaluasi CIPP dapat digambarkan sebagai sebuah kesatuan evaluasi yang didahului dengan aktivitas evaluasi reguler, diikuti oleh evaluasi konteks yang memberikan informasi tentang perlu tidaknya diadakan perubahan terhadap konteks program, yang meliputi pendefinisian masalah dan penentuan tujuan yang ditujukan untuk menemukan (dan menerapkan) pemecahan masalah. Jika pemecahan masalah tidak berhasil memuaskan, dilakukan evaluasi input untuk mendapatkan strategi yang diharapkan mampu memperbaiki input. Setelah strategi yang ditentukan diterapkan, dilakukan evaluasi proses dan produk untuk melihat kinerja strategi. Proses ini terus berlangsung secara berkesinambungan untuk mendapatkan kinerja yang diinginkan. Diagram 2 memperlihatkan alur evaluasi CIPP ini.

Diagram 2 : Alur CIPP



Untuk lebih jelasnya, Bagan 3 memperlihatkan tujuan, metode yang dapat digunakan, dan kaitan antara pengambilan keputusan dengan evaluasi CIPP.

Bagan 3. Tujuan, metode, dan hubungan antara pengambilan keputusan dengan evaluasi CIPP

Aspek	Context Evaluation	Input Evaluation	Process Evaluation	Product Evaluation
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>menjelaskan konteks institusional,</li> <li>mengidentifikasi populasi target dan menentukan kebutuhannya,</li> <li>identifikasi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan</li> <li>mendiagnosis masalah yang menyebabkan timbulnya kebutuhan,</li> <li>menilai apakah tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem,</li> <li>strategi alternatif program,</li> <li>desain prosedur untuk menerapkan strategi, anggaran, dan jadwal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi &amp; memperkirakan proses,</li> <li>mengidentifikasi kekurangan pada desain prosedur dan penerapannya</li> <li>menyediakan informasi untuk program yang direncanakan,</li> <li>mencatat dan menilai prosedur kejadian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengumpulkan deskripsi dan penilaian hasil &amp; mengkaitkannya dengan tujuan dan konteks, input, &amp; proses informasi</li> <li>menginterpretasikan kebaikan dan manfaat</li> </ul>
Metode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisa sistem</li> <li>Survey</li> <li>Telaah dokumen</li> <li>Hearings</li> <li>Interview</li> <li>Tes diagnostik</li> <li>Delphy technique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi &amp; analisis sumber daya yang dimiliki, strategi penyelesaian masalah, relevansi, kelayakan, dan ekonomis desain prosedural</li> <li>Literatur</li> <li>Kunjungan</li> <li>Advocate teams</li> <li>Uji coba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring kendala potensial yang mungkin timbul &amp; tetap hati-hati terhadap kendala yang belum dapat diantisipasi</li> <li>Mendapatkan informasi khusus untuk keputusan terprogram</li> <li>Menjelaskan proses yang terjadi</li> <li>Secara terus-menerus berinteraksi dengan &amp; melakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendefinisikan kriteria keluaran</li> <li>Mengumpulkan penilaian tentang keluaran dari mereka yang terlibat</li> <li>melakukan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif</li> </ul>

			observasi terhadap staf proyek	
Hubungan dengan pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutuskan setting pelayanan</li> <li>• tujuan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyeleksi sumber bantuan, strategi jalan keluar, desain prosedural</li> <li>• Memenuhi dasar untuk menilai implementasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengimplementasi &amp; menghaluskan desain program dan prosedur</li> <li>• Menyediakan log proses yang berjalan untuk digunakan dlm menginterpretasikan keluaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutuskan untuk meneruskan, menghentikan, memodifikasi, atau memfokuskan perubahan kegiatan.</li> <li>• menyajikan catatan yang jelas tentang akibat</li> </ul>

**Penutup**

Evaluasi bukan sesuatu yang mudah dilakukan, meskipun demikian evaluasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Kita tidak akan dapat memperbaiki program tanpa mengetahui kekuatan dan kelemahan program tersebut dan menyadari ada cara-cara baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki program. Kita tidak akan pernah tahu apakah program yang diterapkan bermanfaat bagi target sasaran program. Kita tidak akan pernah tahu apakah rencana yang dikembangkan berhasil diterapkan dengan benar. Kita tidak akan berhasil meyakinkan pihak terkait bahwa hasil kerja kita bermanfaat dan sesuai tujuan, bahwa institusi PTJJ kita berhasil membuka kesempatan pendidikan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan umur, gender, status sosial, lokasi tinggal, dan unsur demografi lainnya.

Evaluasi CIPP dapat membantu manajemen institusi PTJJ untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja institusi dengan tetap memperhatikan aspek keragaman karakteristik peserta ajar dan teknologi yang digunakan, dalam satu sistem evaluasi yang sistematis.

## Daftar Pustaka

- Cronbach, L.J. (1980). *Toward Reform of Program Evaluation*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (1981). *Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects, and Materials*. New York: McGraw-Hill.
- Scriven, M.S. (1975). Evaluation bias and its control. *Occasional Paper Series*. No. 4. Western Michigan University, Evaluation Centre.
- Stake, R.E. (1981). *Setting Standards for Educational Evaluators*. Evaluation News No. 2, 2, 148-152.
- Stufflebeam D.L. & Shinkfield, A.J. (1988). *Systematic Evaluation*. Norwell: Kluwer Academic Publishers.
- Pannen, P. (1999). Pengertian Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh dalam T. belawati (ed). *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, hal. 11-29. Jakarta: Universitas Terbuka

## 21. EVALUASI DIRI DAN DAMPAKNYA BAGI MAHASISWA

---

Toeti Soekamto

### **Pengantar**

Akhir-akhir ini sering terdengar istilah "evaluasi diri" di lingkungan pendidikan tinggi. Semua perguruan tinggi diminta untuk mengadakan evaluasi diri, dan hasil yang diperoleh kemudian dipakai oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebagai salah satu landasan dalam menentukan peringkat perguruan tinggi yang bersangkutan di dalam sistem akreditasi yang berlaku di Indonesia.

Sebenarnya evaluasi diri diperlukan tidak hanya untuk suatu lembaga saja, tetapi sebagai calon profesional mahasiswa pun harus diajari untuk menilai dirinya sendiri. Bahkan dosen pun perlu juga mengevaluasi diri untuk menilai sejauh mana kinerja mereka, dan bagian-bagian mana dari kinerja tersebut yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi diri tidak hanya berlaku bagi civitas academica perguruan tinggi tetapi juga bagi semua yang berkecimpung di dunia pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Dengan menerapkan kebiasaan untuk menilai diri sendiri dapat dipupuk banyak sekali hal-hal yang positif bagi proses belajar-mengajar.

### **Pengertian Evaluasi Diri**

Berbicara mengenai "evaluasi", pikiran orang tentu diasosiasikan dengan penilaian siswa/mahasiswa di sekolah, yang selama ini dilaksanakan oleh pihak guru/dosen untuk menentukan keberhasilan anak didik di dalam proses belajarnya. Dapat dikatakan tidak pernah siswa atau mahasiswa diajar untuk menilai dirinya sendiri.

### **Apakah pengertian evaluasi diri itu?**

Evaluasi diri merupakan suatu proses yang berorientasi ke masa depan, dan memberikan informasi terperinci mengenai kemajuan-kemajuan serta keberhasilan mahasiswa ke arah pembentukan kompetensi yang diinginkan. Evaluasi diri mengacu pada keikutsertaan mahasiswa dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan mengenai proses belajar mahasiswa, khususnya yang menyangkut prestasi dan hasil belajar (Boud & Falchikov, 1989a). Evaluasi diri dapat bersifat formatif dalam arti mendukung proses belajar serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan keberhasilannya, dapat juga bersifat sumatif dengan jalan menentukan sendiri apa yang akan dipelajari, dan sejauh mana ia akan mempelajarinya.

Istilah evaluasi diri mencakup dua unsur pokok di dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu (1) identifikasi kriteria serta patokan yang akan ditentukan di dalam pekerjaan dan (2) pengambilan keputusan untuk menentukan sejauh mana pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan telah memenuhi kriteria dan patokan tersebut.

Menurut Worell & Stilwell (1981) evaluasi diri berhubungan dengan dua faktor utama, yaitu (1) pengalaman keberhasilan di masa lalu, dan (2) perbandingan dengan keberhasilan orang-orang lain. Apabila seseorang mempunyai pengalaman keberhasilan yang terus menerus, dan keberhasilan tersebut lebih tinggi dibanding dengan orang-orang di sekitarnya, maka ia akan menilai dirinya sendiri tinggi pula.

### **Evaluasi Diri Pada Mahasiswa**

Boud & Falchinov (1989a) mengatakan bahwa ada dua motif yang mendorong usaha evaluasi diri pada mahasiswa, yaitu: (1) keinginan dosen untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa berpartisipasi secara aktif didalam proses belajarnya, dan dengan demikian memberi lebih banyak tanggung jawab kepada mahasiswa, serta (2) kebutuhan untuk mengembangkan prosedur penilaian yang lebih mengikutsertakan mahasiswa.

Menurut Sommervell (1993) mahasiswa perlu dipacu untuk mampu menilai dirinya sendiri serta menentukan kriteria yang perlu dipakai untuk menilai pekerjaan/prestasinya dengan tidak tergantung pada dosen. Selanjutnya Sommervell menyatakan adanya dua bentuk evaluasi diri, yaitu: (1) penilaian diri: mahasiswa dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dan penilaian mengenai pekerjaannya sendiri, dan (2) pengukuran-pengukuran yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa: ia telah menentukan sebelumnya bentuk informasi yang akan diperoleh mengenai pekerjaannya, macam pertanyaan yang ingin dijawab, dan orang-orang yang akan dapat memberi informasi tersebut.

Magin & Churches (1988) menyatakan bahwa mahasiswa perlu sejak dini diberi kesempatan untuk secara kritis menilai hasil pekerjaan/tugasnya, dengan mula-mula memakai kriteria penilaian yang dipakai oleh dosennya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan jalan memberikan kepada mahasiswa di samping tugas-tugas yang harus dilakukan juga lembaran-lembaran penilaian yang memuat faktor-faktor (dengan bobotnya) yang dipakai sebagai kriteria dalam pemberian nilai tugas-tugas tersebut. Dengan cara demikian lama kelamaan mahasiswa akan dapat memperkirakan sendiri sejauh mana tugas-tugas yang diberikan kepadanya telah memenuhi kriteria tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan yang cukup signifikan ( $r = 0,79$ ) antara skor yang diberikan oleh dosen dengan skor yang dibuat mahasiswa sendiri.

Selanjutnya Magin & Churches juga mengutip beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang berkemampuan rendah pada umumnya menilai prestasinya lebih tinggi daripada penilaian yang diberikan oleh dosennya. Sebaliknya, mahasiswa yang mempunyai kemampuan tinggi lebih berhati-hati dalam mengevaluasi dirinya sendiri, dan cenderung untuk memberi nilai yang lebih rendah daripada penilaian dosen terhadapnya. Di samping itu Magin & Churches menunjuk hasil angket yang menyatakan bahwa mahasiswa menganggap kemampuan untuk menilai diri sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan. Mereka merasakan adanya evaluasi diri dapat meningkatkan keberhasilan mereka dalam ujian-

ujian atau melaksanakan keberhasilan mereka dalam ujian-ujian atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, karena mereka menjadi tahu akan kriteria yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Karenanya mereka (mahasiswa) menginginkan adanya lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan evaluasi diri.

Hasil meta-analisis yang dilaksanakan oleh Boud & Falchikov (1989b) menunjukkan adanya besar pengaruh (*effect size*) = 0,47, yang dapat ditafsirkan bahwa nilai yang diperoleh pada evaluasi diri sendiri oleh mahasiswa memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding dengan hasil penilaian yang diberikan oleh dosen. Di samping itu ditemukan juga bahwa mahasiswa tingkat-tingkat atas, mahasiswa yang mempunyai kemampuan tinggi, serta mahasiswa pasca sarjana cenderung lebih akurat dalam menilai dirinya sendiri. Mahasiswa dengan pengalaman banyak cenderung untuk menilai dirinya lebih rendah daripada seharusnya.

### **Dampak Evaluasi Diri Terhadap Keberhasilan Mahasiswa**

Beberapa hal positif yang dapat diperoleh dengan mengajar mahasiswa untuk mengevaluasi dirinya sendiri antara lain adalah bahwa evaluasi diri dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk secara realistis mengadakan penilaian mengenai kinerjanya, serta kemampuan untuk memonitor proses belajarnya sendiri (Boud & Dublin, 1983). Lama kelamaan mahasiswa akan mampu menentukan sendiri tujuan-tujuan belajar serta tugas-tugas yang memberikannya harapan akan keberhasilan. Harapan akan keberhasilan ini merupakan faktor yang memberinya daya tahan untuk mengerjakan suatu tugas sampai selesai dengan baik (Worell & Stilwell, 1981). Keberhasilan ini akan memberikan rasa bangga pada mahasiswa sehingga ia akan termotivasi untuk bekerja dan belajar lebih giat lagi.

Pada mahasiswa akan timbul konsep diri positif bahwa ia mampu mengerjakan tugas dengan baik. Seperti dikatakan oleh Worell & Stilwell, konsep diri pada mahasiswa juga terbentuk sebagai akibat adanya interaksi dengan lingkungan, khususnya interaksi evaluasional dengan orang lain.

Menurut Carlson (1987) evaluasi diri merupakan penguatan yang terkondisi dan yang dapat meningkatkan keberhasilan akademik maupun pengembangan tingkah laku yang diharapkan.

### **Evaluasi Diri Bagi Mahasiswa Universitas Terbuka**

Pendidikan jarak jauh seperti yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka mempunyai ciri khas yaitu bahwa interaksi fisik antara dosen dan mahasiswa sangat kecil dibanding dengan mahasiswa biasa. Proses belajar dapat dikatakan sepenuhnya mengenai proses belajar mereka sendiri. Karenanya, menurut Amundsen (1993) mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri (*self directedness*).

Untuk membantu mahasiswa di dalam proses belajarnya, mereka perlu diajari agar dapat mengukur kebiasaan dan keberhasilan belajar sendiri dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu cara yang telah diterapkan di UT selama ini adalah diberikannya latihan-latihan dan pertanyaan/soal yang terdapat pada setiap akhir Kegiatan Belajar di dalam modul. Mahasiswa diminta untuk memberikan respons dan mereka akan memperoleh umpan balik segera dengan mencocokkan jawabannya dengan kunci yang terdapat di setiap akhir modul. Latihan-latihan dan soal-soal tersebut berfungsi sebagai alat diagnosis dan remedial dalam mendeteksi masalah-masalah serta kesulitan belajar (Gale, 1984).

Mahasiswa dapat mengukur sendiri keunggulan/kelemahan mereka, menilai pekerjaan sendiri, serta menentukan kriteria yang penting baginya. Dengan demikian mahasiswa dapat meningkatkan proses belajar mereka secara aktif, yang pada akhirnya akan mempunyai pengaruh pada konsep diri dan motivasi mereka, mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kemampuan diri sendiri.

Selanjutnya Gale mengutip beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa adanya latihan dan soal-soal tersebut oleh sebagian mahasiswa Universitas Terbuka dianggap sebagai penting dan berguna serta dapat memperlancar studi mereka. Apakah hal tersebut juga perlu berlaku di Indonesia perlu diteliti.

Perlu diingat bahwa pada umumnya mahasiswa Universitas Terbuka adalah orang-orang yang telah dewasa. Kedewasaan ini menyebabkan mereka telah mempunyai motivasi internal yang stabil dan tinggi, serta kemampuan untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi (Holmberg, 1992). Dengan demikian evaluasi diri secara umum tidak akan banyak membawa kesulitan bagi mereka. (Piper, 1976; Dressel & Marcus, 1982).

## **Penutup**

Dari apa yang telah dibicarakan di muka terlihat bahwa evaluasi diri merupakan sesuatu yang perlu diajarkan kepada mahasiswa karena hal tersebut akan dapat: (1) membantu mahasiswa menentukan tujuan-tujuan yang bersifat realistik yang dapat tercapai, (2) membantu mahasiswa untuk memilih aktivitas-aktivitas yang dapat dilaksanakan dengan berhasil baik, (3) mahasiswa mempunyai harapan-harapan akan keberhasilan, (4) mahasiswa mempunyai tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dilaksanakannya, dan (5) mahasiswa mempunyai kemampuan untuk bekerja secara mandiri.

Menurut Worell & Stilwell (1981) dan Feldman (1986) untuk memungkinkan mahasiswa mengadakan evaluasi diri sehingga mereka mampu meningkatkan kinerjanya, dosen perlu membuat program pengajaran yang mencakup hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Menyesuaikan tingkat kesulitan tugas-tugas dan tujuan belajar dengan kemampuan mahasiswa agar mereka mempunyai harapan untuk berhasil;
2. mengatur strategi pengajaran sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat memperoleh keberhasilan;
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengobservasi dirinya sendiri (mula-mula dengan bantuan dosen), dan mengadakan penilaian;
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai tinggi dan membangkitkan minat mahasiswa;

5. .Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penguatan diri terhadap usaha-usaha serta daya tahan yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas;
6. Mendorong mahasiswa untuk mengantisipasi konsekuensi tingkah laku mereka, baik untuk mereka sendiri maupun untuk orang lain, dan;
7. Membantu mahasiswa untuk menghadapi kegagalan secara konstruktif.

Semua hal tersebut di atas akan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kepribadiannya sebagai seorang terpelajar dan profesional yang mampu bekerja secara mandiri, berpikir, dan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pertimbangan dan penilaian yang dibuatnya, mampu secara kritis menilai dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas, serta mampu mengembangkan diri lebih lanjut di masa yang akan datang.

### Referensi

- Amundsen, C. (1993). The Evaluation Of Theory In Distance Education. Dalam Desmond Keegan (ed). *Theoretical Principles Of Distance Edacation*. (hal 61-79). London: Routledge.
- Boud, D. & Falchikov, N. (1989a). Quantitative Studies of Students Self Assessment In Higher Education. *Higer Education*. 18.p.529 - 549.
- \_\_\_\_\_,(1989b). Student Self Assessment In Higher Education. A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*. 59 (4). p. 395 - 430.
- Boud, D. & Lublin, J. (1983). *Self Assessment In Professional Education: A Report To The Commonwealth Research and Development Committee*. Sydney: Tertiary Educational Research Centre, UNSW.
- Carlson, N.R. (1987). *Psychology: The Science Of Behavior*. 2nd ed. Boston: Allyn & Bacon, Inc.

- Dressel, P.L. & Marcus, D. (1982). *On Teaching and Learning In College*. San Francisco: Jossey-Bass Publ.
- Feldman, R.S. (1986). *Essentials Of Understanding Psychology*. New York: Mc-Graw Hill Inc.
- Gale, J. (1984). Self-Assessment and Self Remediation Strategies. Dalam Henderson, Euan S. & Nathenson, Michael B. *Independent Learning In Higher Education* (h. 99-117). Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publication.
- Holmberg, B. (1989). *Theory and Practive Of Distance Education*. London: Routledge.
- Magin, D.J. & Churches, A.E. (1988, September). What Do Students Learn From Self Assessment and Peer Assessment? *Proceedings 1988 Conference Of The Australian Society For Educational Technology*. Canberra.p. 224 - 233.
- Piper, W.D. (1976). The Longer Reach. *Issues In Staff Development*. p. 1 - 19. London: UTMU.
- Sommervell, H. (1993). Issues In Self Assessment, Interprize, and Higher Education. The Case Of Self, Peer, and Collaborative Assessment. *Assessment And Evaluation In Higher Education*. 18 (3) p.227 - 233.
- Worell, J. & Stilwell, W.E. (1981). *Psychology For Teachers And Students*. New York: Mc. Graw Hill Book Co., Inc.

## ***BAB V***

### ***PENDIDIKAN BIDANG ILMU***

## **22. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEBAGAI PROGRAM KURIKULER**

---

Udin S. Winataputra

### **Pendahuluan**

Kenyataan menunjukkan bahwa program (pendidikan) Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), dan Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial (PDIPS) telah menjadi bagian dari wacana dan tataran kurikuler sistem pendidikan Indonesia.

Secara kelembagaan, IIS dikelola dan dibina di fakultas-fakultas keilmuan sosial atau humaniora murni, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Fakultas Geografi (FG), Fakultas Psikologi (FP), dan Fakultas Sastra (FS). IIS yang dikelola dan dibina di semua fakultas tersebut mencakup pendidikan ilmu geografi, ilmu sejarah, antropologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan psikologi. Masing-masing program pendidikan ini bertujuan menghasilkan ilmuwan sosial dalam berbagai tingkat, yakni Sarjana, Magister, dan Doktor, dan atau praktisi atau profesional dalam lingkup bidang ilmunya, dalam berbagai tingkat seperti tenaga ahli madya (administrasi, komunikasi), Notaris, Akuntan, dan Jurnalis (UNPAD, 1998; UGM, 1998; UI, 1998).

Sedangkan PIPS merupakan program pendidikan sosial pada jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang mencakup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), IPS terpadu di Sekolah dasar (SD) dan Paket A Luar Sekolah; IPS terkorrelasi di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Paket

B Luar Sekolah, yang di dalamnya mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi, dan IPS terpisah di Sekolah Menengah Umum (SMU) yang terdiri atas mata pelajaran geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan tata negara. Tujuan utama program pendidikan tersebut adalah menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik dan memberi dasar pengetahuan dalam masing-masing bidangnya untuk kelanjutan pendidikan jenjang di atasnya (Depdikbud, 1994; 1984; 1975). Secara kelembagaan program pendidikan ini dikelola dan dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah beserta satuan pengelola pendidikan di bawahnya.

Sementara itu, PDIPS pada dasarnya merupakan program pendidikan guru IPS yang dikelola dan dibina di Fakultas Pendidikan IPS - Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), dan di Jurusan Pendidikan IPS-Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) suatu universitas. Tujuan utama program ini adalah menghasilkan guru IPS dan PPKN yang pada dasarnya menguasai konsep-konsep esensial ilmu-ilmu sosial dan materi disiplin ilmu lainnya yang terkait, dan mampu membelajarkan peserta didiknya secara bermakna. Oleh karena itu para mahasiswa program pendidikan ini antara lain dituntut untuk mempelajari tiga kelompok program kurikuler, yakni kelompok mata kuliah keilmuan sosial dalam rangka pembelajaran IPS, teknologi pembelajaran IPS, dan kurikulum serta pembelajaran IPS persekolahan.

### **Konsep "Social Studies" Secara Umum**

Untuk melihat bagaimana perkembangan konsep "social studies" secara umum, tampaknya perlu dikembalikan kepada perkembangan pemikiran dan praksis dalam bidang itu di Amerika Serikat (AS), yang penulis anggap sebagai salah satu negara yang telah menunjukkan reputasi akademis dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies (NCSS) sejak pertemuan organisasi tersebut pertama kalinya tanggal 28-30 Nopember 1935 sampai sekarang. Dalam pertemuan itu

disepakati bahwa "Social Science as the Core of the Curriculum", dengan kerangka pemikiran yang belum solid, yang oleh Longstreet (1985:356) digambarkan sebagai pertemuan yang penuh dengan "...quagmire of confusion - a murky reflection of unresolved intellectual struggles in the midst of major social, political and economic upheavals". Maksudnya, pertemuan tersebut penuh dengan kebingungan dan dengan refleksi pemikiran yang tidak jelas sebagai dampak dari perdebatan intelektual yang tak terselesaikan, di tengah-tengah situasi sosial, politik dan ekonomi yang penuh gejolak.

Namun demikian, terkuak harapan pada satu saat dapat dicapai suatu hasil yang gemilang di dalam "social studies". Hal tersebut dinyatakan oleh John L. Tildsley di dalam sajiannya selaku "District Superintendent of Schools New York City, yang oleh Sekretaris Jenderal NCSS pertama Wilbur Mura (1936 dalam Longstreet: 1985) ditegaskan bahwa "Social Science as yet has not produced a discipline comparable to the discipline of Cicero,... yet the discipline man is the only free man, he averred, expressing a hope that greater discipline would be attained in the social studies". Hal tersebut memberi tanda bahwa sejak awal pertumbuhannya bidang "social studies" dihadapkan kepada berbagai tantangan.

Pilar historis-epistemologis "social studies" yang pertama, berupa suatu definisi tentang "social studies", telah dipancarkan oleh Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937 (Barr, Barth, dan Shermis, 1977:1-2) yaitu "The Social Studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes". Maksudnya, bahwa "the social studies" adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian ini, kemudian dibakukan dalam "The United States of Education's Standard Terminology for Curriculum and Instruction" (Dalam Barr dkk, 1977:2) sebagai berikut: "The social studies comprised of those aspects of history, economics, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy which in practice are selected for instructional purposes in schools and colleges". Maksudnya, bahwa "social studies" berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi,

dan filsafat, yang dalam praktek dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi.

Dalam pengertian awal "social studies" tersebut di atas menyiratkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, "social studies" merupakan disiplin turunan dari ilmu-ilmu sosial atau menurut Welton dan Mallan (1988:14) sebagai "an offspring of the social sciences". Kedua, disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan/pembelajaran baik pada tingkat persekolahan maupun tingkat pendidikan tinggi. Ketiga, oleh karenanya aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut.

Walaupun telah ada definisi awal sebagai pilar pertama, di dalam perkembangan selanjutnya ternyata bidang "social studies" ini didera oleh berbagai ketidakmenentuan, yang oleh pionir "social studies" Edgar Bruce Wesley (Barr dkk,1978: iv) berdasarkan pengamatannya selama 40-an tahun dikemukakan bahwa "The field of the social studies has long suffered from conflicting definition, an overlapping functions, and a confusion of philosophies". Keadaan itu dinilai telah menimbulkan "uncertainties; ...perpetuated indecision; ...hindered unification; ...and delayed progress". Keadaan ketidakmenentuan, ketakberkeputusan, ketakbersatuan, dan ketakmajuan tersebut dirasakan terutama pada masa tahun 1940-1970-an.

Pada periode tersebut, seperti digambarkan oleh Barr, Barth, dan Shermis, (1977:35-46), "social studies" menjalani periode yang sangat sulit.

*Antara tahun 1940-1950-an* ia mendapat serangan hampir dari segala penjuru, yang pada dasarnya berkisar pada pertanyaan mesti atau tidaknya "social studies" menanamkan nilai dan sikap demokratis kepada para pemuda. Hal itu tumbuh sebagai salah satu dampak dari perang yang berkepanjangan, yang melahirkan tuntutan bagi sekolah untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Tuntutan tersebut telah mendorong munculnya upaya pemberian tekanan terhadap pentingnya pengajaran sejarah, berupa fakta-fakta sejarah yang perlu

mendapat perhatian; kelembagaan pemerintahan Amerika; dan analisis rinci mengenai Konstitusi Amerika. Situasi pembelajarannya kelihatan sangat kuat menekankan pada mata pelajaran sosial yang terpisah-pisah, memorisasi informasi faktual, dan transmisi secara tidak kritis dari nilai-nilai budaya terpilih.

*Pada tahun 1960-an*, timbul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu revolusi dalam "social studies", yang dipelopori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial. Kedua kelompok ilmuwan tersebut terpicat oleh "social studies", antara lain karena pada saat itu pemerintah Federal menyediakan dana yang sangat besar untuk pengembangan kurikulum. Dengan dukungan dana tersebut para ahli dari berbagai disiplin bekerjasama untuk mengembangkan proyek kurikulum dan memproduksi bahan belajar yang sangat inovatif dan menantang dalam skala besar. Gerakan akademis tersebut dikenal sebagai gerakan "the new social studies".

Namun demikian sampai tahun 1970-an ternyata gagasan untuk mendapatkan "the new social studies" ini belum menjadi kenyataan. Isu yang terus menerus "social studies" sampai pada saat itu adalah mengenai perlu-tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran.

Yang sangat menonjol terjadi pada tahun 1940-1960, demikian ditegaskan oleh Barr, dkk (1977:36) adalah terjadinya tarik-menarik antara dua visi "social studies" yakni gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan "citizenship education" yang terus bergulir sampai mencapai tahap yang lebih canggih, dan terus bergulirnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi "social studies education". Hal tersebut antara lain merupakan dampak dari berbagai penelitian yang dirancang untuk mempengaruhi kurikulum sekolah, terutama yang berkenaan dengan pengertian dan sikap siswa. Selain itu, hal tersebut juga merupakan dampak dari opini publik berkaitan dengan Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Perang Korea, serta kritik publik terhadap belum terwujudkannya gagasan John Dewey tentang

pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam praktek pendidikan persekolahan.

Sesungguhnya pada tahun 1955 terjadi terobosan yang besar, demikian diungkapkan oleh Barr, dkk (1977:37) berupa inovasi Maurice Hunt dan Lawrence Metcalf yang mencoba melihat cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan "citizenship education". Dikemukakan bahwa program "social studies" di sekolah seyogyanya diorganisasikan bukan dalam bentuk pembelajaran ilmu sosial yang terpisah-pisah, tetapi diorientasikan kepada "closed areas" atau masalah-masalah yang tabu dalam masyarakat, seperti isu tentang seks, patriotisme, ras dan lain-lain yang biasanya penuh dengan prasangka, ketidaktahuan, mitos, dan kontroversi, untuk diubah ke arah yang bersifat refleksi rasional. Dengan cara itu "social studies" mulai diarahkan kepada upaya guna melatih para siswa untuk dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik. Disiplin ilmu sosial diakui sangat berguna dalam memberikan fakta yang benar, dan teori serta prinsip yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kecenderungan "social studies" untuk melatih keterampilan "reflective thinking" ini, demikian ditekankan oleh Barr, dkk (1977:37) diperkuat oleh gagasan Shirley Engle yang pada tahun 1960 menerbitkan buku "Decision Making: The Heart of Social Sciences Instruction" yang secara mendasar dan tegas merefleksikan gagasan John Dewey tentang pendidikan berpikir kritis.

Tekanan perubahan lain yang juga cukup dahsyat muncul pada tahun 1957 dalam bentuk upaya komprehensif untuk mereformasi "social studies". Yang menjadi pemicu dan pemacu perubahan tersebut adalah keberhasilan Rusia meluncurkan pesawat ruang angkasa "Sputnik" yang telah membuat Amerika menjadi panik dan merasa jauh tertinggal dari Rusia, dan dipublikasikannya hasil penelitian dua orang dosen Purdue University, H.H. Remmers dan D.H. Radler yang dikenal dengan Purdue Opinion Poll. Penelitian dengan sampel anak usia sekolah ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hanya 35% dari pemuda yang percaya bahwa surat kabar perlu diijinkan untuk menerbitkan apa saja yang

diinginkannya; kedua, sebesar 34% percaya bahwa pemerintah perlu melarang sebagian orang untuk berbicara; ketiga, sebesar 26% percaya bahwa polisi perlu diijinkan untuk menggeledah rumah seseorang tanpa jaminan; keempat, sebesar 25% merasakan bahwa beberapa kelompok tidak perlu diijinkan mengadakan pertemuan. Hasil penelitian ini dinilai merupakan salah satu petunjuk kegagalan "social studies" yang pada saat itu memang masih bersifat "content-centered" dan dengan dominasi pendekatan "expository", dan sekaligus memberi indikasi perlunya perubahan pembelajaran "social studies" menjadi pembelajaran yang berorientasi kepada "the integrated, reflective inquiry, and problem-centered"(Barr, dkk;41-42). Kesemua itu telah memperkuat munculnya gerakan "the new social studies".

Gerakan "the new social studies" yang menjadi pilar dari perkembangan "social studies" pada tahun 1960-an, bertolak dari kesimpulan bahwa "social studies" sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dalam mengajarkan substansi dan mempengaruhi perubahan sikap siswa. Oleh karena itu para ilmuwan, dalam hal ini sejarawan dan ahli ilmu-ilmu sosial bersatu padu untuk bergerak meningkatkan "social studies" kepada tarap "higher level of intellectual pursuit" (Barr, dkk,1977:42) yakni mempelajari ilmu sosial secara mendasar. Dengan orientasi baru tersebut maka dimulailah era modus pembelajaran "social science education".

Gerakan tersebut dipacu lebih kuat oleh pemikiran Jerome Bruner dalam bukunya "The Process of Education" yang dengan tegas berargumentasi bahwa "any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development" (Barr, dkk,1977:43). Pandangan ini sangat mempengaruhi pikiran dan sikap para sejarawan dan ahli ilmu sosial, dan mereka berargumentasi, mengapa harus bersusah payah mengembangkan "social studies", toh konsep, generalisasi, teori, dan prosedur, serta model disiplin akademik dapat diajarkan kepada anak dari berbagai tingkat usia sekolah.

Atas dasar postulat tersebut, pada akhirnya para sejarawan, ahli ilmu sosial, dan pendidik sepakat untuk melakukan reformasi "social studies" dengan menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pendekatan tersebut adalah dengan melalui proses

pengembangan kurikulum. Sekelompok pendidik, ahli psikologi, dan ahli ilmu sosial secara bersama-sama mengembangkan bahan belajar berdasarkan temuan penelitian dan teori belajar, kemudian diujicobakan di lapangan, selanjutnya direvisi, dan pada akhirnya disebarluaskan untuk digunakan secara meluas dalam dunia persekolahan. Pada era itu tercatat lebih dari 50 proyek pengembangan kurikulum dan bahan belajar "social studies", termasuk di dalamnya proyek yang mencoba merintis pengintegrasian "social studies" untuk tujuan "citizenship education".

Dari berbagai penelitian itu, (Barr, dkk, 1977:43-44) para ahli menemukan ternyata betapa sukarnya mengoperasionalkan teori Bruner tersebut. Berkaitan dengan hal itu, dalam tulisannya "The Concept of the Structure of a Discipline", Joseph J.Schwab menegaskan bahwa " ...there are real and genuine difference among difference phenomena". Oleh karena itu setiap disiplin adalah unik dan karenanya seyogyanya diajarkan secara terpisah. Pandangan ini terus bergulir dan seterusnya mendorong timbulnya upaya mentransformasikan "social studies" ke dalam "social science" dan mengajarkannya sebagai disiplin akademik yang terpisah. Gerakan inilah yang mendorong berdirinya "The Social Science Education Consortium (SSEC)", yang kemudian menerbitkan bukunya yang pertama "Concepts and Structures in the New Social Studies Curriculum". Para pakar SSEC sepakat bahan struktur disiplin akademik memiliki dua komponen, yakni "...the fundamental concepts and generalizations of a discipline, and the methods, procedures, and models necessary to develop and or revise these fundamentals". Hal ini mengimplikasi pada bahan belajar "the New Social Studies" yang harus dirancang untuk membelajarkan siswa guna menguasai "concepts and the methods of inquiry used by historians and social scientists to generate knowledge" (Barr, dkk,1977:45).

Pada akhir dasawarsa 1960-an tercatat (Barr, dkk, 1977:45) adanya perubahan dari orientasi pada disiplin akademik yang terpisah-pisah ke suatu upaya untuk mencari hubungan interdisipliner. Untuk ini "The Social Studies Curriculum Center at Syracuse" mengidentifikasi 34 konsep dasar yang digali dari

sejumlah ilmu sosial yang dinilai perlu untuk diajarkan di sekolah. Hal ini memberi petunjuk terjadinya rekonsiliasi para ahli ilmu sosial dengan kelompok yang menekankan "social studies" pada "citizenship education". Pada masa itu Paul R Hanna merintis pengembangan kurikulum yang bertolak dari "basic human activities" dan berhasil menghimpun lebih dari 3000 generalisasai yang relevan, yang digali dari berbagai disiplin ilmu sosial.

Pada dasawarsa 1970-an (Barr, dkk 1977:46) terjadi pertumbuhan "social studies" yang serupa dengan perkembangan sebelumnya dengan hasilnya hampir semua proyek kurikulum menitikberatkan pada "inquiry process, decision making, value questions, and student-oriented problems". Namun demikian hasil studi mengenai kurikulum dan pembelajaran "social studies" tersebut ternyata sangat mengejutkan. Para ahli ternyata mendapatkan kesimpulan yang sama yakni, terlepas dari upaya terbaik dari para pendidik dan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah, "... the schools had not been improved" - ternyata belum banyak terjadi perubahan di sekolah (Barr, dkk,1977:48).

Perkembangan selanjutnya, yakni antara tahun 1976-1983, seperti dilaporkan oleh Stanley (1985:310) "...social education was a field of numerous competing definitions and rationales". Hal tersebut memang sejalan dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh Wesley ( Barr, dkk,1978:iv) yang telah mencatat penggunaan istilah "social studies" sebagai "social sciences, social service, socialism,radical left-wing thinking, social reform, anti history, a unification of social subjects, a field, a federation, an integrated curriculum, a pro-child reform, and curriculum innovation". Terlepas dari adanya aneka penggunaan pengertian tersebut, ditegaskan bahwa "The heart of the social studies is relationships-relationships primarily between and among human beings". Sedangkan jika dilihat dari visi, misi dan strateginya, Barr, dkk (1978:17-19) "social studies" telah dan dapat dikembangkan dalam tiga tradisi, yakni "Social Studies Taught as Citizenship Transmission, Social Studies Taught as Social Science, and Social Studies Taught as Reflective Inquiry". Sedangkan definisi yang diajukannya adalah sebagai berikut.

"Social Studies is an integration of social sciences and humanities for the purposes of instruction in citizenship education. We emphasize 'integration', for social studies is the only field which deliberately attempts to draw upon, in an integrated fashion, the data of the social sciences and the insights of humanities. We emphasize 'citizenship', for social studies, despite the different in orientation, outlook, purpose, and methods of teachers, is almost universally perceived as preparation for citizenship in a democracy". (Barr, dkk,1978:18)

Definisi "social studies" dan pengidentifikasian "social studies" atas tiga tradisi pedagogis tersebut di atas dapat dianggap sebagai pilar utama dari "social studies" pada dasawarsa 1970-an. Dalam definisi tersebut tersirat dan tersurat beberapa hal. Pertama, "social studies" merupakan suatu sistim pengetahuan terpadu; kedua, misi utama "social studies" adalah pendidikan warga negaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis; ketiga, sumber utama konten "social studies" adalah "social sciences" dan "humanities"; keempat, dalam upaya penyiapan warga negara yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, visi, tujuan, dan metode pembelajaran.

Jika dilihat dari adanya variasi tiga tradisi "social studies" menyiratkan bahwa terbuka kemungkinan untuk mengembangkan "social studies" atas dasar salah satu tradisi atau kombinasi dua atau semua tradisi. Masing-masing tradisi tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Tradisi "citizenship transmission" merujuk pada suatu modus pembelajaran social yang bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang baik yang ditandai oleh "...conforms to certain accepted practices, hold particular beliefs, is loyal to certain values, participates in certain activities, and conforms to norms which are often local in character" (Barr, dkk,1978:22). Tujuan dari tradisi ini adalah mengembangkan "a reasoned patriotism; a basic understanding and appreciation of (American) values, institution, and practices; personal identity and integrity and responsible citizenship; understanding and

appreciation of the (American) heritage; active democratic participation; an awareness of social problems, and desirable ideals, attitudes, and behavioral skills" (Barr, dkk,1978:47). Dalam ungkapan lain tradisi ini bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang baik sesuai dengan norma yang telah diterima secara baku dalam negaranya.

Sedangkan, tradisi "Social Science" merupakan modus pembelajaran sosial yang juga mengembangkan karakter warganegara yang baik, yang ditandai oleh penguasaan "mode of thinking from social science disciplines; that this mode of thinking is generalizable; and having learned it, he will understand properly, appreciate deeply, infer carefully, and conclude logically" (Barr, dkk,1978:23-24). Hal tersebut dilandasai oleh kepercayaan bahwa "... if a student acquires the habit of mind and the thinking patterns associated with a particular social science discipline, he will become more discriminating, make better personal as well as social policy decisions, and ultimately understand the structure and the process of our society"(Barr, dkk,1978:71). Dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada upaya pengembangan karakter warganegara yang baik, yang ditandai oleh kemampuannya dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial dan personal dengan menggunakan visi dan cara kerja ilmuwan sosial.

Di lain pihak, tradisi "Reflective Inquiry", merupakan modus pembelajaran sosial yang menekankan pada hal yang sama, yakni pengembangan warganegara yang baik dengan kriteria yang berbeda yaitu dilihat dari kemampuannya "... to engage in a continual process of clarifying their own value structure".(Barr, dkk,1978:27). Karena itu tujuan utama dari tradisi ini adalah "... the enhancement of students' decision making abilities, for decision-making is the most important requirement of citizenship in a political democracy" (Barr, dkk,1978:111). Dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada pengembangan karakter warga negara yang baik dengan ciri pokoknya mampu mengambil keputusan.

Pada dasawarsa 1980-an perkembangan "social studies" ditandai oleh lahirnya dua pilar akademis, yakni "Report of the National

Council for the Social Studies Task Force on Scope and Sequence" berjudul "In Search of A Scope and Sequence for Social Studies"(NCSS:1983), dan "A Report of the Curriculum Task Force of the National Commission on Social Studies in the Schools" yang berjudul "Charting A Course: Social Studies for the 21st Century" (NCSS:1989). Laporan pertama menghasilkan definisi, tujuan, lingkup dan urutan materi mulai dari "Kindergarten" sampai dengan kelas XII (High School), rincian "democratic beliefs and values", dan rincian "Skills in the Social Studies Curriculum".

Definisi "Social Studies" yang diajukan adalah sebagai berikut.

"Social studies is a basic subject of the K-12 curriculum that (1) derives its goals from the nature of citizenship in a democratic society that is closely linked to other nations and peoples of the world; (2) draw its content primarily from history, the social sciences, and, in some respects from the humanities and science; and (3) is taught in ways that reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and developmental level of learners" (NCSS,1983:251)

Sedangkan tujuannya dirumuskan sebagai berikut.

"Social Studies programs have a responsibility to prepare young people to identify, understand, and work to solve problems that face our increasingly diverse nation and interdependence world. Over the past several decades, the professional consensus has been that such programs ought to include goals in the broad areas of knowledge, democratic values, and skills. Program that combine the acquisition of knowledge and skills with the application of democratic values to life through social participation present an ideal balance in social studies. It is essential that these major goals be viewed as equally important. The relationship among knowledge, values, and skills is one of mutual support" (NCSS,1983:251).

Jika dilihat dari definisi dan tujuannya, "social studies" menurut laporan tersebut menyiratkan dan menyuratkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, "social studies" merupakan mata pelajaran dasar di seluruh jenjang pendidikan persekolahan; kedua, tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi; ketiga, konten pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial, serta dalam banyak hal dari humaniora dan sains; dan keempat, pembelajarannya menggunakan cara-cara yang mencerminkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan perkembangan pribadi siswa. Kesemua itu mencerminkan visi, misi, dan strategi yang senapas dengan apa yang telah diajukan oleh Barr, dkk.(1978). Hal tersebut sekaligus mencerminkan bahwa pada dasawarsa 1980-an telah terjadi kristalisasi pemikiran "social studies" yang lebih solid dan telah mencairnya masalah ketakmenentuan, ketak berkeputusan, ketakbersatuan, dan ketakmajuan yang menandai perkembangan "social studies" pada 4-5 dasawarsa sebelumnya.

Tentu saja kemajuan tersebut tidak bebas dari kritik. Berbagai kritik dikemukakan secara tegas (NCSS,1983:263-273). Dalam hal ini R. Freeman Butts menilai tujuan "social studies" itu sebagai "It does more than pay lip service to the citizenship goals". Sedangkan, James P. Shaver mengingatkan bahwa "the difficulties in preparing an adequate scope and sequence statement are great", untuk itu ia katakan," diperlukan "sufficient funding to do the job properly". Ronald G. Helms, di lain pihak, melihat bahwa lingkup dan urutan bahan tersebut hanya diperlukan oleh School District yang "... have neither time nor the resources to develop good alternatives". Sementara itu, Geraldine Hellman-Rosenthal mengingatkan betapa telah berkembangnya penelitian psikologi tentang perkembangan anak. Karena itu ia mengatakan: "It would seem that any attempt to provide guidance on social studies scope and sequence should reflect these developments". Di lain pihak Jesus Garcia, menilai laporan tersebut sebagai " ... document appears to be a reaction rather than a statement on the social studies". Ia lebih lanjut menilai bahwa laporan tersebut sebagai " ...an important and timely document". Namun demikian dokumen

tersebut seyogyanya, "... not be labelled as the final, fixed word on social studies curriculum", demikian dipertegas oleh Louis Grigar.

Di dalam Laporan NCSS yang kedua, "Charting A Course" nampak jelas upaya untuk mempertegas visi, misi dan strategi "social studies" dalam Laporan NCSS yang pertama "Scope and Sequence". Menurut Laporan tersebut, untuk abad ke 21, "social studies curriculum" seyogyanya memiliki ciri-ciri menitikberatkan pada "roles of citizen in a democracy"; memberikan "consistent and cumulative learning from kindergarten through 12th grade"; menuntut "history and geography should provide matrix or framework for social studies"; memusatkan kurikulum bukan hanya pada "major civilization and societies"; mengembangkan jaringan keterkaitan ilmu sosial dengan "the humanities and the natural and physical sciences"; menempatkan konten untuk tidak diperlakukan sebagai hal yang harus diterima dan diingat; menuntut penerapan proses pembelajaran interaktif, seperti "reading, writing, observing, debating, role-play or simulation, working with statistical data and using critical thinking skills"; memanfaatkan aneka media dan sumber belajar; pemberian dukungan dari seluruh jajaran pengelola pendidikan; dan menempatkan "essential knowledge" dalam pembelajaran di setiap jenjang pendidikan persekolahan.

Sedangkan yang seyogyanya menjadi tujuan dari "Social Studies Education" adalah mengembangkan:

- (1) Civic responsibility and active civic participation.
- (2) Perspective on their own life experiences so they see themselves as part of the larger human adventure in time and place.
- (3) A critical understanding of the history, geography, economic, political, and social institutions, traditions, and values of the United States as expressed in both their unity and diversity.
- (4) An understanding of other peoples and the unity and diversity of world history, geography, institutions, traditions and values.
- (5) Critical attitudes and analytical perspectives appropriate to analysis of the human condition" (NCSS, 1989:6).

Jika dilihat dari karakteristik dan tujuannya, "social studies education" atau "social studies" yang dipikirkan untuk abad ke 21 masih tetap menempatkan pendidikan kewarganegaraan, yakni pengembangan "civic responsibility and active civic participation" sebagai salah satu esensinya selain esensi pengembangan kemampuan sosial yang berkenaan dengan visi tentang pengalaman hidupnya, pemahaman kritis terhadap ilmu-ilmu sosial, pemahaman tentang manusia dalam konteks persatuan di dalam perbedaan, dan analisis kritis terhadap keadaan kehidupan manusia. Hal ini mengandung arti lebih memantapkan pemikiran yang telah mengkristal sebelumnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam dokumen NCSS mengenai "Scope and Sequence for the Social Studies"(NCSS:1983)

Bagaimanakah perkembangan pemikiran mengenai "social studies" selanjutnya? Pada tahun 1992, "the Board of Directors of the National Council for the Social Studies" mengadopsi visi terbaru mengenai "social studies", yang kemudian diterbitkan dalam dokumen resmi NCSS pada tahun 1994 dengan judul "Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies". Dokumen ini nampaknya yang sedang mewarnai pemikiran dan praksis "social studies" di Amerika Serikat sampai dengan saat ini.

Di dalam dokumen tersebut (NCSS,1994:3) diadopsi pengertian "social studies" sebagai berikut.

"Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provide coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world".

Pengertian di atas secara esensial mengandung visi, misi dan strategi pendidikan "social studies" yang mengokohkan kristalisasi pemikiran yang lebih solid dan kohesif dari para pakar dan praktisi yang tergabung dalam NCSS, yang secara sosial akademik sangat berpengaruh di Amerika Serikat, yang juga biasanya memberi dampak yang signifikan terhadap pemikiran dan praksis dalam bidang itu di negara lain. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, 1980 dan 1990-an, pemikiran mengenai "social studies" yang sebelumnya dilanda penyakit ketakmenentuan, ketakberkeputusan, ketakbersatuan, dan ketakmajuan, seperti telah dibahas pada awal tulisan ini, paling tidak secara konseptual telah dapat diatasi. Hal ini, penulis pikir, merupakan suatu kemajuan besar dalam epistemologi disiplin pendidikan "social studies". Dengan demikian pula, dapat diperkirakan bahwa pemikiran tersebut akan banyak mewarnai pemikiran dan praksis pendidikan "social studies" di Amerika Serikat dan negara lainnya pada dasawarsa awal abad ke 21 yang akan segera kita masuki itu.

Sebagai rambu-rambu dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi baru "social studies" tersebut, NCSS (1994) menggariskan hal-hal sebagai berikut.

*Pertama*, program "social studies" mempunyai tujuan pokok "...the promotion of civic competence-which is the knowledge, skills, and attitudes required of students to be able to assume 'the office of citizen' (as Thomas Jefferson called it) in our democratic republic"(NCSS,1994:3). Di sini, kembali ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan, yang secara tersurat dikatakan sebagai pengembangan "civic competence" atau kemampuan sebagai warganegara yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat berperanserta dalam kehidupan demokrasi. Walaupun demikian ditegaskan bahwa pengembangan "civic competence" itu bukanlah hanya menjadi tanggungjawab dari "social studies". Yang dimaksudkan adalah, bahwa esensi tujuan tersebut lebih diutamakan dalam "social studies" daripada dalam bidang lain.

*Kedua*, program "social studies" dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai

dengan pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan "...knowledge, skills, and attitudes within and across disciplines"(NCSS,1994:3). Hal ini memberi dasar bahwa pendidikan "social studies" memiliki dua alternatif, yakni yang bersifat monodisipliner dan multidisipliner. Pada kelas-kelas rendah ditekankan pada "social studies" yang mengintegrasikan beberapa disiplin yang bertolak dari suatu tema tertentu, misalnya tema "time, continuity, and change" yang memungkinkan guru mengembangkan pengalaman belajar siswa yang melibatkan disiplin sejarah, sains, dan bahasa. Pada kelas-kelas lanjutan dan menengah, program "social studies" dapat diteruskan dengan pengintegrasian secara interdisipliner atau sering disebut secara "interdisciplinary" yang lebih luas; atau dengan menempatkan suatu disiplin sebagai titik tolak, kemudian dikaitkan dengan atau diperkaya dari materi disiplin lainnya, yang sering disebut secara "cross-disciplinary" atau lintas disiplin. Karena itu pendekatan monodisipliner yang dimungkinkan, bukanlah dalam arti pembelajaran suatu disiplin sosial secara soliter, misalnya hanya sejarah atau geografi saja. Hal itu dapat dipahami karena fenomena dan masalah sosial dalam kenyataannya tidak bisa dipisahkan, misalnya antara pemanasan global, timbulnya el nino dan la nina, perubahan musim (dimensi geografi), produktivitas pertanian, tingkat pendapatan petani, dan tingkat kesejahteraan (dimensi ekonomi), serta perlindungan hukum (dimensi politik).

*Ketiga*, program "social studies" dititikberatkan pada upaya membantu siswa dalam "...construct a knowledge base and attitudes drawn from academic disciplines as specialized ways of viewing reality"(NCSS,1994:4). Di sini siswa diperankan bukan sebagai penerima pengetahuan yang pasif, tetapi sebagai pembangun pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita. Nampaknya pandangan konstruktivisme yang menitikberatkan pada "process of knowing" akan menjadi salah satu pilar dari "social studies" pada abad ke 21 tersebut, menggeser pandangan behaviorisme yang mengasumsikan pengetahuan ada di luar diri manusia dan menempatkan siswa sebagai "recipient" dari pengetahuan.

*Keempat*, program "social studies" mencerminkan "...the changing nature of knowledge, fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of significance to humanity" (NCSS,1994:5). Dengan begitu hakikat pengetahuan yang semula dilihat secara terkotak-kotak, kini harus dilihat secara terpadu yang menuntut perlibatan berbagai disiplin.

Untuk dapat mencapai semua yang digagaskan mengenai "social studies" tersebut, dikemukakan adanya tiga strategi dasar yakni "supporting the common good,...adopting common and multiple perspectives, and ... applying knowledge, skills, and values to civic action". Hal tersebut menyangkut pada pengembangan "democratic ideals, principles, and practices"; pengembangan kemampuan siswa untuk dapat melihat masalah dari berbagai perspektif yaitu "personal perspective, academic perspective, pluralist perspective, and global perspective"; dan perwujudan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam perilaku sebagai warganegara (NCSS,1994:5-7).

Demikianlah secara umum perkembangan "social studies" sebagai suatu bidang kajian telah dibahas. Perkembangan tersebut melukiskan bagaimana "social studies" pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistim pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologis telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. Pemikiran tersebut secara tersurat dan tersirat merentang dalam suatu kontinum gagasan "social studies" Edgar Bruce Wesley (1935) sampai ke gagasan "social studies" terbaru dari NCSS (1994).

### **Konsep Pendidikan IPS di Indonesia**

Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena dua alasan. Pertama di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat NCSS pengaruhnya. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISPIPSI (Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia) usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih sangat terbatas, sebatas pertemuan tahunan dan komunikasi antar

anggotanya secara insidental. Kedua, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana (Puskur). Pengaruh akademis dari HISPISI secara institusional terhadap pengembangan IPS tersebut sangatlah terbatas, sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut. Jadi sangat jauh berbeda dengan peranan dan kontribusi "Social Studies Curriculum Task Force"-nya NCSS di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan, dikaitkan dengan beberapa konten pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan dalam bidang itu, yang secara sporadis dapat dijangkau oleh penulis.

Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), sejauh yang dapat penulis telusuri, untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawang Manggu Solo. Menurut Laporan Seminar tersebut (Panitia Seminar Nasional Civic Education, 1972: 2, dalam Winataputra, 1978:42) ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar-pakai yakni "pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial" yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Dengan demikian para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam Seminar tersebut. Kemunculan istilah tersebut bersamaan dengan munculnya istilah IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dalam wacana akademis pendidikan Sains. Pengertian IPS yang disepakati dalam Seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS. Berbeda dengan pemunculan pengertian "social studies" dari Edgar Bruce Wesley dalam pertemuan pertama NCSS tahun 1937 yang segera

mendapat respon akademis secara meluas dan melahirkan kontroversi akademik, pemunculan pengertian IPS dengan mudah diterima dengan sedikit komentar.

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena, barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar Civic Education di Tawang Manggu itu, seperti Achmad Sanusi, Noeman Somantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal dari IKIP Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP IKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah "Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial" sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam Kurikulum SD tahun 1968. Dalam Kurikulum tersebut digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan Civics yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Oleh karena itu, dalam Kurikulum SD PPSP tersebut konsep IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Penggunaan istilah Studi Sosial nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran atau penapsiran Achmad Sanusi yang pada tahun 1972 menerbitkan sebuah manuskrip berjudul "Studi Sosial: Pengantar menuju Sekolah Komprehensif" yang isinya diwarnai oleh pemikiran Kenworthy (1970) dengan bukunya "Teaching Social Studies".

Sedangkan dalam Kurikulum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan tiga istilah yakni (1) "Studi Sosial" sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran sosial yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS; (2) "Pendidikan Kewargaan Negara" sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan; dan (3) "Civics dan Hukum" sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung, 1973a, 1973b).

Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam tiga bentuk yakni, (1) pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial, (2) pendidikan IPS terpisah, dimana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi; dan (3) pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus, yang dalam konsep tradisi "social studies" termasuk tradisi "citizenship transmission"(Barr, dkk: 1978).

Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap Kurikulum 1975, yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui Kurikulum PPSP. Di dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil yakni: (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi "citizenship transmission"; (2) pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah dasar; (3) pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep.P dan K,1975a;1975b;1975c; dan 1976). Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam Kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai materi pokok Pendidikan Moral Pancasila. Sedang konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS muncul dua bahan kajian kurikuler pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ketika ditetapkannya Kurikulum

1994 menggantikan Kurikulum 1984, kedua bahan kajian tersebut dilembagakan menjadi satu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara konseptual mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadahi tradisi "citizenship transmission" dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila yang diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan "spiral of concept development" (Taba:1967) dan "expanding environment approach" (Dufty:1970) dengan bertitiktolak dari masing-masing sila Pancasila.

Di dalam Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa dalam setiap jenjang pendidikan (SD,SLTP,dan SMU). Sedang mata pelajaran IPS diwujudkan dalam; (1) pendidikan IPS terpadu di SD kelas III s/d VI; (2) pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (3) pendidikan IPS terpisah, yang mirip dengan tradisi "social studies taught as social science menurut Barr,dkk:1978). Di SMU ini bidang pendidikan IPS terpisah terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonomi,Sosiologi, Tata Negara, dan Antropologi di Kelas III Program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran sosial memiliki tujuan yang bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan untuk "... menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini,menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia" (Depdikbud,1993:23-24). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan kewarganegaraan atau tradisi "citizenship transmission"(Barr, dkk: 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk "...memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan obyektif" (Depdikbud,1993:29). Sedang untuk Program IPS mata pelajaran Ekonomi ini bertujuan untuk "... memberikan

bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi"(Depdikbud,1993:29). Dari rumusan tujuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan Ekonomi di SMU baik untuk program umum maupun untuk program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi "social studies taught as social science"(Barr, dkk:1978).

Tradisi ini nampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Sejarah Budaya, dan Antropologi sebagaimana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran Sosiologi memiliki tujuan "... untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat" (Depdikbud,1993:30). Sementara itu mata pelajaran Geografi memusatkan perhatian pada upaya "... untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya" (Depdikbud,1993:30). Sedangkan mata pelajaran Tata Negara menggariskan tujuan "...untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistim pemerintahan Negara RI maupun negara lain" (Depdikbud,1993:31).

Hal yang juga nampak sejalan terdapat dalam rumusan tujuan mata pelajaran Sejarah Budaya yang menggariskan tujuannya untuk "... menanamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang sehingga siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masa kini" (Depdikbud,1993:31). Demikian juga dalam tujuan mata pelajaran Antropologi yang dengan tegas diorientasikan pada upaya untuk "... memberikan pengetahuan mengenai proses

terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari; menanamkan kesadaran perlunya menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri," dan pada akhirnya dimaksudkan juga untuk "...menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat" (Depdikbud,1993:33).

Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujudkan dalam Kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep yakni: pertama, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi "citizenship transmission" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi "social science" dalam bentuk pendidikan IPS terpisah di SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Selanjutnya perlu dikaji lebih jauh bagaimana perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS ini, bila dilihat dari kajian konseptual para pakar Indonesia. Dalam pembahasannya tentang "Perspektif Pendidikan Ilmu (Pengetahuan) Sosial", Sanusi (1998) dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Sanusi (1998:222-227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kesal yang membosankan siswa; ketidaklebihunggulan guru dari sumber lain; ketidakmutahiran sumber belajar yang ada; sistim ujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang 'mengulit-bawang'; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berpikir tarap rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu Sanusi (1998) merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu SDM, dalam

hal ini guru agar lebih mampu mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu pula diperlukan upaya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta insentif yang fair. Dalam dimensi konseptual, Sanusi (1998:242-247) menyarankan perlunya batasan yang jelas mengenai tujuan dan konten pendidikan ilmu sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengorganisasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS nampaknya telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah yakni Pertemuan HISPIPSI pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan adalah mengenai konsep PIPS. Dalam Pertemuan Ujung Pandang tahun 1993. Numan Somantri selaku pakar dan Ketua HISPIPSI (Somantri:1993) kembali menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam Pertemuan Yogyakarta tahun 1991, sebagai berikut.

"Versi PIPS Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah:

PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

Versi PIPS Untuk FPIPS dan Jurusan Pendidikan IPS-IKIP:

PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan"

Kelihatannya HISPIPSI ingin mencoba menjernihkan pengertian PIPS dengan cara menggunakan label yang sama yakni PIPS tetapi dengan dua versi pengertian, yakni pengertian PIPS untuk

pendidikan persekolahan dan untuk pendidikan tinggi untuk guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP. Dari dua versi pengertian itu, yang membedakannya penulis pikir, dalam format sistim pengetahuannya. Untuk dunia persekolahan merupakan penyederhanaan, atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep "social sciences simplified ...", sedang untuk pendidikan guru IPS berupa seleksi. Namun rasanya perbedaannya tidak begitu jelas, kecuali seperti dikatakan oleh Somantri (1993:8) dalam tingkat kesukarannya sesuai dengan jenjang pendidikan itu, yakni di dunia persekolahan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sedang di perguruan tinggi disesuaikan dengan taraf pendidikan tinggi. Penjelasan ini menurut penulis terkesan bersifat tautologis. Kedua versi pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dengan Pertemuan Terbatas HISPIPSI di Universitas Terbuka Jakarta tahun 1998 (Somantri,1998:5-6), dan disepakati akan menjadi salah satu esensi dari "position paper" HISPIPSI tentang Disiplin PIPS yang akan diajukan kepada LIPI.

Jika dilihat dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Numan Somantri selaku Ketua HISPIPSI (Somantri:1998) "Position Paper" itu akan menyajikan penegasan mengenai kedudukan PIPS sebagai "synthetic discipline" atau menurut Hartoonian (1992) sebagai "integrated system of knowledge". Oleh karena itu, PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS, direkonseptualisasi sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat menjadi PDIPS. Dengan demikian kelihatannya HISPIPSI akan memegang dua konsep yakni konsep PIPS untuk dunia persekolahan, dan konsep PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS. Yang masih perlu dikembangkan adalah logika internal atau struktur dari kedua sistim pengetahuan tersebut. Dengan demikian masing-masing memiliki jatidiri konseptual yang unik dan dapat dipahami lebih jernih.

Tentang kedudukan PIPS/PDIPS dalam konteks yang lebih luas tampaknya cukup prospektif. Misalnya, Dahlan (1997) melihat PIPS sebagai upaya strategis pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi. Sementara itu Tsauri (1997:1)

yang mengutip pemikiran Alfian ketika mengenang tokoh LIPI Profesor Sarwono Prawirohardjo, melihat peranan PIPS dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang seyogyanya memusatkan perhatian pada upaya pengembangan disiplin yang kuat, ketekunan yang luar biasa, integritas diri yang kukuh, wibawa yang mantap, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan pengabdian yang dalam.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni: Pertama, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora dan disiplin lain yang relevan, untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu konten dalam PDIPS.

PIPS untuk dunia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik-pedagogis yakni: pertama, PIPS dalam tradisi "citizenship transmission" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; dan kedua PIPS dalam tradisi "social science" dalam bentuk mata pelajaran IPS Terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS Terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS Terpisah-pisah untuk SMU P. Kedua tradisi PIPS tersebut terikat oleh suatu visi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana digariskan dalam GBHN dan UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perkembangan pemikiran mengenai PIPS ini amat berpengaruh pada pemikiran mengenai PDIPS di IKIP/FKIP/STKIP.

## Daftar Pustaka

- Allen, J. (1960). The Role of Ninth Grade Civics in Citizenship Education, *The High School Journal* 44, 3; 106 - 111.
- Banks, J. A. (1977), *Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision Making*, Reading: Addison-Wesley Publishing Co.
- Barr, R.D, Bart, J.L. dan Shermis, S.S(1977). *Defining the Social Studies*, Arlington: National Council for the Social Studies (NCSS).
- \_\_\_\_\_ (1978) *The Nature of the Social Studies*, Palm Spring: An ETC Publication.
- Dahlan, M.A. (1997). *Pendidikan IPS sebagai Upaya Strategis Pembangunan Manusia Seutuhnya Untuk Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta; Panitia Sarasehan dan Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS-JPIPS se Indonesia VIII.
- Dept. P dan K (1968a). *Kurikulum Sekolah Dasar*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1968b), *Rencana Pendidikan SMP*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1968c), *Rencana Pendidikan SMA*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1969), *Pedoman Kerja Sekolah Pendidikan Guru*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1976a), *Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975: Buku I Ketentuan Studi Pendidikan Moral Pancasila*, Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_ (1976b), *Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975: Buku IIB Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djahiri, A.K. (1998), *Analisis Sementara Temuan Penelitian dan Pandangan guru PPKN SLTP-SMU Negeri Jawa Barat serta Implementasinya terhadap Pembaharuan Kurikulum PPKN 1994*, Bandung: Lab. PMPKN IKIP Bandung.
- \_\_\_\_\_ (1998), *Analisis Kurikulum Tata Negara SMU 1994*, Bandung: Lab. PMPKN IKIP Bandung.

- \_\_\_\_\_ (1998), *Kurikulum dan GBPP PKN 1999 Sekolah Dasar*, Bandung: Lab. PPKN IKIP Bandung.
- \_\_\_\_\_ (1998), *Kurikulum dan GBPP PKN 1999 Sekolah Dasar*, Bandung: Lab. PPKN IKIP Bandung.
- \_\_\_\_\_ (1998), *Revitalisasi Program dan Pengajaran PPKN SMU 1994/1998*, Bandung: Lab. PPKN IKIP Bandung.
- Depdikbud (1993), *Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, Jakarta.
- Duffy, D. G. (1970). *Designing Integrated Course*, dalam *Teaching About Society*, Sydney: Rigby.
- Estvant, F. J. (1968). *Social Studies in Changing World: Curriculum and Instruction*, New York: Harcourt, Brace and World.
- Hartoonian, H.M. (1992). *The Social Studies and Project 2061: An Oppprtunities for Harmony*, dalam *The Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Kuhn, T.S. (1970), *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach respect and responsibility*, New York: Bantam Books.
- Newmann, F.M. (1977). *Building Rationales for Civic Education*, dalam *Building Rationales for Citizenship Education*, (Ed. Shaver, J.P).
- NCSS (1994). *Curriculum Standards for Social Studies: Expectation Of Excellence*, Washington.
- \_\_\_\_\_ (1989). *Charting A Course: Social Studies for the 21<sup>st</sup> Century*, Washington: National Commission on Social Studies in the Schools.
- \_\_\_\_\_ (1992). In Search of a Scope and Sequence for Social Studies dalam *Social Education*, 48, 4, 249 - 264.
- \_\_\_\_\_ (1994). *Curriculum Standards for Social Studies*, Washington.

- Panitia Seminar Nasional Civic Education (1972). *Laporan Hasil-Hasil Seminar Nasional Pendidikan dan Pengajaran Civics*, Tawangmangu Sukarta.
- PPSP IKIP Bandung, (1973a). *Program Kurikulum Studi Sosial Sekolah Dasar Pembangunan*, Bandung.
- \_\_\_\_\_ (1978b). *Program Kurikulum Studi Sosial Sekolah Menengah Pembangunan*, Bandung.
- Republik Indonesia (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1973). *Ketetapan MPR No II/MPR/1973 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1973). *Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1989). *Undang-Undang No 2/1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1990). *Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1990). *Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Pendidikan Menengah*, Jakarta.
- Sanusi, A, (1998). *Pendidikan Alternatif*, Bandung: Grafindo Media Pratama.
- \_\_\_\_\_ (1998). *Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10- Pilar Demokrasi*, Bandung: Panitia Semlok PPKN IKIP Bandung (Makalah).
- \_\_\_\_\_ (1998). *Filsafah Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian*, Bandung: IKIP Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Somantri, N. (1969). *Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah*, Bandung: IKIP Bandung.
- \_\_\_\_\_ (1973). *Metode Pengajaran Civics*, Bandung: IKIP Bandung.

- \_\_\_\_\_ (1993). *Beberapa pokok pikiran Tentang: Penelusuran Filsafat ilmu Tentang Pendidikan IPS dan Kaitan Struktural-Fungsionalnya dengan Disiplin Ilmu-Ilmu Sosial*, Ujung Pandang: Panitia Forum Komunikasi IV Pimpinan FPIPS-IKIP dan JPIPS-FKIP Universitas.
- \_\_\_\_\_ (1998). *Masalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) FPIPS-Pascasarjana IKIP sebagai "Synthetic Discipline"*, Bandung: Lembaga Penelitian IKIP Bandung.
- Shaver, J.P. (1977). *Building rationales for Citizenship Education*, Washington: NCSS.
- \_\_\_\_\_ (1991). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*, New York: Macmillan Publishing Co.
- Supriadi, D. (1998). *Kebenaran Ilmiah, Metode Ilmiah, dan Paradigma Riset Kependidikan*, Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Suriasimantri, J.S. (1984). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_ (1986). *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Stanley, W.B. (1983). *Review of Research in Social Studies Education: 1976-1983*, Washington: NCSS.
- Stenhouse, L. (1975). *Introduction to Curriculum Research and Development*, London OU Publication.
- Tsauri, H.S. (1997). *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Manusia Indonesia Seutuhnya dalam Perspektif Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia*, Jakarta: Panitia Seminar dan Forum Komunikasi VIII Pimpinan FPIPS-IKIP dan JPIPS-FKIP se Indonesia.
- Universitas Gajah Mada (1998). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- Universitas Indonesia (1998). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Indonesia*, Jakarta.

Universitas Pajajaran (1998). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Pajajaran*, Bandung.

Universitas Terbuka (1997). *Katalog Universitas Terbuka*, Jakarta.

Welton, D.A. dan Mallan, J.T. (1998). *Children and Their World: Strategies for Teaching Social Studies*, Boston: Houghton Mifflin Co.

Winataputra, U.S. (1998). *Catatan Kecil Mengenai Pembelajaran PPKN di SLTP dan SMU: Reinterpretasi Hasil Studi Kelayakan*, Bandung: Panitia Semlok PPKN IKIP Bandung (Makalah).

\_\_\_\_\_ (1998). *Alternatif Arah Baru Dalam Rangka Rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Universitas Terbuka (Makalah).

\_\_\_\_\_ (1998). *Strategi Penyempurnaan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Makalah).

\_\_\_\_\_ (1990). *Konsep dan Masalah Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah*, Jakarta: Ditjen Dikti.

\_\_\_\_\_ (1978). *A Pilot Study on The Implementation of The SMA-PMP Curriculum in Bandung Area*, Sydney: Macquarie University (MA Thesis).

## **23. PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA**

---

Nuril Huda

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah pada masa 50 tahun yang lalu yang menetapkan bahasa Inggris dan bukan bahasa Belanda untuk diajarkan di sekolah merupakan suatu keputusan yang tepat dan bijaksana. Dalam kurun waktu 50 tahun tampak kedudukan dan peranan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk komunikasi internasional semakin jelas. Bahkan dapat diramalkan bahasa Inggris akan menjadi wahana komunikasi global dalam semua aspek kehidupan di masa depan. Oleh karena itu pengajaran bahasa Inggris perlu diberi perhatian tinggi. Namun dalam kurun waktu 50 tahun itu juga kelihatan bahwa sejauh ini hasil pembelajaran bahasa Inggris belum memuaskan. Oleh karena itu perlu dicari langkah strategis untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris guna menghadapi persaingan bangsa yang semakin ketat di era globalisasi sekarang ini.

Dalam tulisan ini akan dibahas perkembangan pengajaran bahasa Inggris selama 50 tahun terakhir, permasalahannya, dan upaya-upaya yang perlu dilakukan. Berturut-turut akan disajikan sejarah perkembangan pengajaran bahasa Inggris, prospek pengajaran bahasa Inggris, dan upaya peningkatan penguasaan bahasa Inggris.

## **Sejarah Perkembangan Bahasa Inggris**

### ***Masa Penjajahan***

Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia telah diselenggarakan sejak jaman penjajahan Belanda. Sejauh ini belum ditemukan data yang dapat menunjukkan kapan pembelajaran bahasa Inggris dimulai di Indonesia. Walaupun Indonesia pernah dijajah oleh Inggris selama 5 tahun, pada jaman Raffles pada tahun 1811—1816, namun tidak ada keterangan apakah bahasa Inggris diajarkan pada jaman itu. Bisa jadi bahasa Inggris mulai diajarkan pada tahun 1867 bersamaan dengan dibukanya HBS (*Hogere Burger School*), sekolah setingkat dengan SMP dan SMA untuk anak Belanda. Dalam kurikulum HBS tercantum matapelajaran wajib bahasa Belanda, Perancis, Jerman, dan Inggris. MULO (*Meer Utgebreid Lager Onderwijs*), sekolah setingkat SMP, dibuka pada tahun 1903 yang juga mencantumkan matapelajaran bahasa Inggris, dan terakhir AMS (*Algemene Middelbare School*), sekolah setingkat SMU didirikan tahun 1919, juga mencantumkan matapelajaran bahasa Inggris (Nasution, 1994).

Siswa HBS adalah anak Belanda. Walaupun di MULO dan AMS ada anak-anak Indonesia asli, tetapi mereka telah dipilih sangat selektif. Kebanyakan mereka adalah anak golongan menengah ke atas, yaitu anak-anak pangrehpraja dan guru. Bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Belanda, yang serumpun dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, tidak mengherankan lulusan MULO dan AMS dapat berbahasa Inggris relatif baik (Sadtono, 1997a).

Pada jaman Jepang bahasa Belanda dilarang sama sekali. Demikian pula bahasa Inggris dilarang diajarkan. Buku-buku bahasa Belanda dan bahasa Inggris dibakar. Sebagai gantinya diajarkan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.

### ***Masa Revolusi (1945 - 1950)***

Antara tahun 1945 -1950 penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak tertib karena keadaan serba sulit. Secara umum dapat dikatakan tidak ada yang dijadikan pegangan yang mantap untuk menyelenggarakan pelajaran bahasa Inggris (Tan, 1962). Buku sulit didapat. Para guru menggunakan buku-buku yang tersisa dan

tidak dibakar pada jaman Jepang. Siswa mengutip pelajaran dari papan tulis (Sadtono, 1997b). Tetapi justru pada tahun inilah diambil keputusan penting. Bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa asing diajarkan di sekolah-sekolah, dan bukan bahasa Belanda. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah menengah (SMP dan SMA) sebagai matapelajaran wajib rata-rata 5 jam seminggu. Tujuan umum pelajaran ini ialah menanamkan kemampuan memahami bahasa Inggris lisan dan tulis, dan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulis. Sedangkan target pokok pelajaran bahasa Inggris adalah memberikan *working knowledge of the language* (Tan, 1962:4).

### **Tahun 1950 - 1955**

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris pada masa ini dikoordinasikan dan diawasi oleh Inspektorat Pusat Pengajaran Bahasa Inggris. Para guru bahasa Inggris adalah (1) sejumlah orang Belanda yang masih mau bergabung dengan Republik yang sebelumnya pernah mengajar bahasa Inggris, kebanyakan di sekolah swasta dan sekolah agama, dan (2) orang-orang Indonesia yang pada jaman Belanda mendapat pendidikan di sekolah menengah (Belanda) dan di jaman revolusi di daerah yang dikuasai oleh Belanda. Kualitas guru sangat bervariasi, mulai yang sangat menguasai bidangnya sampai dengan guru dengan kemampuan bahasa Inggris seadanya (Thomas, 1968).

Pendekatan pengajaran bahasa Inggris di sekolah pada umumnya mirip dengan pengajaran pada masa penjajahan Belanda. Kegiatan di kelas ditekankan pada pengajaran tatabahasa formal dan latihan menterjemahkan bacaan bahasa Inggris (*grammar-translation method*). Buku-buku yang digunakan diambil dari karangan orang Belanda dan sedikit sekali buku-buku yang didatangkan dari Inggris.

Pada masa ini dua keputusan penting diambil. Pertama adalah penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama untuk diajarkan di sekolah; dan kedua pemilihan dialek bahasa Inggris yang diajarkan (*British* atau *American English*). Pada masa sebelumnya para guru pada umumnya mengajarkan bahasa Inggris dialek British. Dengan masuknya bantuan Amerika (Ford

Foundation) untuk mengembangkan pengajaran bahasa Inggris pada tahun 1952, diputuskan bahwa British dan American English sama-sama diajarkan di sekolah (Thomas, 1968).

### **Tahun 1955 - 1975 dan 1975 - 1984**

Pada masa ini terjadi perubahan besar dalam penggunaan metode pembelajaran bahasa Inggris baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi, yaitu digunakannya pendekatan *audio-lingual*. Penyebaran pendekatan di sekolah di dimulai pada program pendidikan guru dan kemudian diinstruksikan penggunaannya melalui kurikulum resmi pemerintah untuk sekolah menengah.

Sebelum tahun 1950-an, semua guru sekolah menengah atas, termasuk guru bahasa Inggris, dididik pada kursus B-1 dan B-2. Pada 1954 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan *Standard Training Course* (STC) di Yogyakarta dan Bukittinggi. Program ini adalah B-1 gaya baru untuk mendidik guru bahasa Inggris yang dosennya berasal dari Amerika dan sejumlah orang Indonesia. Metode pengajaran yang dipakai adalah *audio-lingual*. Dalam program ini selama 3 bulan pesertanya didril secara intensif sampai mampu menguasai semua ketrampilan bahasa Inggris. Kemudian mereka diberi pelajaran linguistik, teori pengajaran bahasa Inggris, sastra Inggris, dan teori-teori pendidikan (Sadtono, 1997b).

Pada tahun 1958 Inspektorat Pusat Pengajaran Bahasa Inggris membentuk Proyek Pengembangan Materi Bahasa Inggris yang kemudian pada tahun 1962 dipecah menjadi 3 proyek, yaitu Badan Pengembangan Materi, Pusat Ujian Bahasa Inggris, dan Proyek Pilot Bahasa Inggris. Salah satu hasil dari proyek ini adalah materi pelajaran bahasa Inggris untuk SMP yang kemudian disebut *Salatiga Material*. Materi ini disusun berdasarkan pendekatan *audio-lingual*.

Pada tahun 1968 didirikan Proyek Bahasa Inggris yang memiliki dua sub-proyek, yaitu Proyek Upgrading Bahasa Inggris dan Proyek Pengembangan Materi Bahasa Inggris. Proyek Upgrading Bahasa Inggris menyelenggarakan penataran guru-guru bahasa Inggris SLTP di seluruh Indonesia dengan menggunakan

pendekatan *audio-lingual*. Tim proyek ini keliling ke beberapa lokasi di Indonesia.<sup>1</sup> Materi bahasa Inggris yang dihasilkan proyek ini dan *Salatiga Material* kemudian dikembangkan menjadi dasar Kurikulum 1975 yang sepenuhnya menggunakan pendekatan *audio-lingual*. Kurikulum 1975 ini dilaksanakannya sampai dengan diberlakukan Kurikulum 1984.

Seperti dikemukakan di muka, penggunaan pendekatan *audio-lingual* juga ditopang oleh persiapan gurunya. Pada tahun 1954 didirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Malang, Bandung, dan Batusangkar. Lulusan STC sebagian menjadi dosen di jurusan bahasa Inggris di PTPG. Metode pengajaran bahasa Inggris yang mereka terima di STC kemudian mereka terapkan dalam mendidik para calon guru bahasa Inggris di PTPG ini.

Salah satu PTPG, yaitu PTPG Malang, kemudian menjadi FKIP Universitas Airlangga, dan pada tahun 1963 berubah menjadi IKIP MALANG.<sup>2</sup> Pada tahun 1962 didirikan *English Language Teacher Training Project* (ELTTP) di IKIP MALANG dengan bantuan *The Ford Foundation* dengan tujuan mendidik guru inti bahasa Inggris. Sebelum tahun 1965, proyek ini mendapat skala prioritas rendah dan bahkan dihentikan sementara waktu sesuai dengan situasi politis saat itu dan merenggangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat. Pada masa orde baru, sejak tahun 1966 proyek ini dihidupkan kembali dan kemudian dilanjutkan dengan dana dari Pemerintah. Program ELTTP sekarang telah menghasilkan guru dan dosen bahasa Inggris yang tersebar ke seluruh Indonesia. Sebagian dari lulusan program ini menjadi menduduki jabatan strategis dalam bidang pendidikan.<sup>3</sup>

### **Tahun 1984 - 1994**

Pendekatan *audio-lingual* seiring dengan perkembangan ilmu banyak mendapat kritik di mana-mana dan menjelang akhir tahun 1970-an mulai ditinggalkan orang, walaupun sampai sekarang beberapa prinsip dasar pendekatan ini masih ada yang dipakai. Dengan terbitkan Kurikulum 1984, maka secara resmi pendekatan *audio-lingual* tidak digunakan lagi di sekolah menengah, dan diganti dengan pendekatan komunikatif.

Upaya peningkatan mutu pengajaran bahasa Inggris terus dilakukan. Pada tahun 1985 di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah didirikan Proyek Pemantapan Kerja Guru (PKG) dengan bantuan biaya dari Bank Dunia dan UNDP. Kelompok guru-guru dengan bantuan konsultan asing (dari Inggris) yang terlibat dalam proyek ini kemudian mengembangkan metode pengajaran yang dikenal dengan nama PKG Approach. Pendekatan ini sebenarnya kombinasi dari *Total Physical Response*, *Krashen's Monitor Model*, dan *Communicative Approach*. Sesuai dengan sistem pembinaan guru yang diterapkan di lingkungan Ditjen Dikdasmen, penyebaran pendekatan ini dilakukan melalui sejumlah forum pelatihan lokal, regional, dan nasional yang dikenal dengan nama Latihan Kerja Instruktur (LKI), Latihan Kerja Guru Inti (LKGI), Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG), dan Musyawarah Guru Matapelajaran (MGMP). Selain itu masih ada penataran-penataran yang diselenggarakan pada tingkat nasional pada Pusat Pengembangan dan Penataran Guru Bahasa (PPPG, di Jakarta), dan di Balai Penataran Guru (BPG) di semua ibu kota propinsi.

Pendekatan komunikatif telah menimbulkan kontroversi di kalangan guru-guru SLTP dan SLTA. Terutama istilah "komunikatif". Sebagian dari guru, terutama konsultan asing, mengartikannya sebagai kemampuan berkomunikasi lisan, atau berbicara. Sementara itu, penyelenggaraan pengajaran bahasa Inggris, walaupun sudah ada keputusan Mendikbud yang melandasi setiap kurikulum baru, tetap mengacu pada Keputusan Mendikbud nomor 96/1967, yang pada dasarnya menekankan penguasaan membaca bahasa Inggris ketimbang penguasaan bahasa lisan.

Pada tahun 1989-1990 dilaksanakan survai pengajaran bahasa Inggris yang melibatkan beberapa unsur secara luas. Survai pertama mencakup 8 propinsi yang melibatkan siswa, guru SLTP dan SLTA serta orang tua murid, dan survai kedua meliputi wilayah seluruh Indonesia (26 propinsi). Hasil survai tersebut antar lain menunjukkan bahwa baik siswa, guru, maupun orang tua siswa menghendaki agar para siswa dapat berbicara selain membaca bahasa Inggris. Namun dari sisi pengajaran banyak masalah-masalah penyelenggaraan yang dihadapi, antara lain kualitas guru

dan ketersediaan sarana serta prasarana (Huda, 1990, 1999a, 1999c).

### ***Tahun 1994 - sekarang***

Hasil survai tahun 1989 - 1990 tersebut menjadi salah satu acuan penyusunan Kurikulum 1994. Pendekatan pengajaran yang digunakan pada dasarnya tetap pendekatan komunikatif (*communicative approach*), tetapi untuk menghindari kesalahpahaman yang berkelanjutan, maka pendekatan itu diberi nama baru yaitu Pendekatan Kebermaknaan (*Meaningfulness Approach*). Atas dasar berbagai pertimbangan, terutama jumlah guru yang berkualitas, sarana, dan prasarana yang tersedia, maka secara umum tujuan pengajaran bahasa Inggris di sekolah masih dibatasi pada kemampuan membaca. Tetapi untuk menampung kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap pengembangan kemampuan berbicara, maka bahasa Inggris juga dimungkinkan menjadi muatan lokal di SD dan SLTP. Selain itu, di sekolah menengah, bahasa Inggris juga masih dapat diberikan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Pada periode sesudah tahun 1994, dorongan dan harapan masyarakat untuk belajar bahasa Inggris meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan nasional dan perkembangan global. Pada masa ini juga muncul isu sekolah unggulan yang menawarkan program bahasa Inggris yang lebih banyak bahkan sejumlah sekolah dikabarkan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Pemerintah juga telah menyempurnakan peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran terhadap pelaksanaan pengajaran bahasa Inggris. Pada tahun 1998 terbit Peraturan Pemerintah No. 55, 56, dan 57 Tahun 1998 yang mengubah sebagian dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 28, 29, dan 30 Tahun 1990 antara lain ketentuan yang berkaitan dengan pemakaian bahasa pengantar di sekolah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1998 tentang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi kemudian dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan itu, Mendikbud mengeluarkan keputusan tentang kerjasama perguruan tinggi yang

memungkinkan penyelenggaraan program bersama dengan perguruan tinggi asing dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris (Keputusan Mendikbud Nomor 223/U/1998).

### **Kesimpulan**

Dari kajian tentang perkembangan pengajaran bahasa Inggris tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

- 1) Telah dilakukan banyak usaha dan upaya untuk meningkatkan pengajaran bahasa Inggris sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Guru bahasa Inggris telah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai taraf yang ideal: guru Belanda yang digunakan pada masa revolusi telah diganti orang Indonesia, guru yang tidak atau kurang memiliki latar pendidikan bahasa Inggris telah dididik dalam berbagai program pelatihan: STC, IKIP/FKIP, PKG, PPPG, dan BPG.
- 3) Telah terjadi pergantian pendekatan dan metode pengajaran seiring dengan pergantian kurikulum: metode grammar-translation diganti *audio-lingual*, kemudian pendekatan komunikatif, PKG Approach, dan pendekatan kebermaknaan.
- 4) Pada tataran pendidikan tinggi telah ada program pendidikan guru bahasa Inggris jenjang sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3).
- 5) Makin banyak orang bisa berbahasa Inggris: banyak lulusan pendidikan di luar negeri (sekolah menengah dan perguruan tinggi). Namun demikian kebutuhan terhadap kemampuan berbahasa Inggris terus meningkat, dan diharapkan lebih banyak lagi orang Indonesia mampu berbahasa Inggris.

### **Prospek Pengajaran Bahasa Inggris**

Perkembangan internasional di berbagai bidang telah berpengaruh banyak terhadap pola hubungan antarbangsa, dan pada gilirannya, berpengaruh terhadap kebutuhan kemampuan berbahasa Inggris. Runtuhnya pemerintah totaliter komunis dan bubarnya negara Sovyet Rusia pada tahun 1980-an telah berpengaruh kuat terhadap perubahan tatanan masyarakat internasional. Perang dingin antara blok Barat dan blok Timur telah berakhir. Isu perang

dingin telah berganti dengan isu pasar bebas. Maka lahirlah paradigma baru yang dikenal dengan istilah globalisasi.

Gerakan globalisasi dalam hubungan ekonomi internasional didukung oleh revolusi teknologi informasi yang pada tahap berikutnya merambah ke bidang-bidang lain: sosial, budaya, dan politik. Kemajuan teknologi informasi seperti facsimile, parabola, cetak jarak jauh, telepon celluler, CD-ROM, dan internet, serta kemajuan di bidang transportasi, telah memfasilitasi interaksi global. Batas-batas fisik antarnegara kurang berfungsi lagi, dan bangsa-bangsa di dunia telah berubah menjadi suatu masyarakat global.

Globalisasi tersebut telah memberikan dua implikasi pokok (lihat Huda, 1999b dan 1999d). *Pertama*, telah terjadi persaingan antarbangsa yang semakin ketat. Bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif, terutama penguasaan iptek tinggi, memiliki peluang besar untuk memenangkan persaingan tersebut. *Kedua*, peningkatan interaksi global memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Penguasaan bahasa asing menjadi lebih penting. Secara individual, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu modal utama keunggulan kompetitif, dan oleh karena itu penguasaan bahasa asing menjadi salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sisi lain telah terjadi persaingan antarbahasa untuk menjadi wahana komunikasi global (*language for wider communication*). Bahasa yang dimiliki oleh bangsa unggul dalam bidang ekonomi, politik, dan iptek memiliki peluang menjadi wahana komunikasi global. Bahasa Inggris tampaknya akan keluar sebagai "pemenang" dalam persaingan ini.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung bahasa Inggris menempati peran baru tersebut, antara lain bobot internal, jumlah pemakai, sebaran geografis, pemakaian dalam iptek, dan dominasi sosial-politik (cf. Graddol, 1997 dan lihat Huda, 1999b).

- 1) Bahasa Inggris memiliki bobot internal yang kuat. Jumlah kosakata yang dimiliki mungkin terbesar di antara bahasa-bahasa di dunia. Data pada tahun 1983 menunjukkan bahwa bahasa Inggris memiliki kurang-lebih 450.000 kata, bahasa Perancis 150.000 kata, bahasa Rusia 130.000 kata, dan

bahasa Indonesia 72.000 kata (Dardjowidjojo, 1998). Dari sudut tatabahasa, bahasa Inggris memungkinkan terbentuknya frasa dan kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran secara efisien dan memiliki keakuratan yang tinggi, dengan adanya konstruksi modifikasi frasa dan konstruksi kalimat rekursif (cf. Gunarwan, 1998).

- 2) Jumlah pemakai bahasa Inggris baik sebagai bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa asing, besar sekali, kurang-lebih 2 milyar orang, atau seperempat dari jumlah penduduk dunia. Sebagai bahasa pertama, bahasa Inggris memiliki penutur antara 320 - 372 juta orang, dan sebagai bahasa kedua sebanyak 235 - 370 juta orang (British Council, 1998).
- 3) Secara geografis, Bahasa Inggris tersebar secara luas. Bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa resmi atau dengan peran khusus di 75 negara. Bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa ibu di 5 negara, yaitu Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Beberapa negara menggunakan bahasa Inggris sebagai setengah bahasa ibu (Dardjowidjojo, 1998; British Council, 1998).
- 4) Bahasa Inggris dipakai secara luas dalam berbagai bidang. Bahasa Inggris adalah bahasa utama untuk buku, koran, kontrol lalu-lintas udara di bandara, perdagangan, seminar ilmiah, komunikasi ilmu, teknologi, diplomasi, olahraga, musik pop, adpertensi, komputer, dan internet. Lebih dari 2/3 ilmuwan dunia dapat membaca bahasa Inggris, 75% surat-surat di dunia ditulis dalam bahasa Inggris, dan 80% informasi yang tersimpan secara elektronik ditulis dalam bahasa Inggris, 80% dari 40 juta pemakai internet menggunakan bahasa Inggris (British Council, 1998).
- 5) Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris baik sebagai bahasa pertama maupun sebagai bahasa kedua secara *de facto* telah mendominasi ekonomi, politik, dan budaya. Dari 7 anggota kelompok G-7 (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis), misalnya, 3 negara anggota berbahasa Inggris. Amerika Serikat boleh dikatakan telah mendominasi percaturan politik dunia.

### **Upaya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris**

Seiring dengan perkembangan pola hubungan internasional tersebut, kebutuhan nasional penguasaan bahasa Inggris di Indonesia semakin meningkat. Akan sangat ideal sendainya bahasa Inggris dapat dikuasai seperti penguasaan bahasa kedua. Tetapi hal ini akan bertabrakan dengan kepentingan nasional lainnya yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu mempertahankan kedudukan bahasa Indonesia nasional yang berfungsi sebagai alat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Telah dilakukan kajian antara lain untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah, tetapi tampaknya hal ini tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala yang amat sulit diatasi (Dardjowidjojo, 1998). Jangankan sebagai bahasa pengantar di sekolah, bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa asing tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan (lihat Huda, 1990 dan 1999c; Direktorat Dikmenum, 1990; Hamied, 1993; Depdikbud, 1997 dan 1998; dan Suprastowo, 1999).

Kendala utama ketidakberhasilan pengajaran bahasa asing di sekolah terutama karena faktor sumber daya manusia dan logistik. *Pertama*, kualitas guru bahasa Inggris relatif masih rendah. Tidak semua guru mampu berkomunikasi lisan yang baik dalam bahasa Inggris. *Kedua*, untuk membuat pelajaran bahasa Inggris di sekolah efektif, jumlah siswa dalam satu kelas harus kecil. Karena itu seharusnya kelas-kelas sekarang harus dipecah-pecah menjadi kelas-kelas kecil. Ini berarti perlu penambahan guru, ruang kelas, dan peralatan lainnya yang secara nasional tidak sedikit biayanya. *Ketiga*, pengajaran bahasa Inggris yang baik harus pula ditopang dengan buku yang memadai dari segi kualitas dan jumlahnya. Setiap anak harus mempunyai buku sendiri, baik buku pokok maupun buku pelengkap seperti kamus dan bacaan yang menarik. Jika siswa diharapkan mampu mendengarkan yang baik, tentu juga perlu latihan lisan. Maka diperlukan peralatan audio baik di sekolah maupun di rumah: lab bahasa, *tape-recorder*, video, televisi, radio, dll. Tidak semua siswa memiliki sarana ini di rumahnya. Dengan sigkat diperlukan anggaran yang besar untuk meningkatkan pengajaran bahasa Inggris agar dapat mencapai taraf yang ideal, terutama jika sasaran peningkatannya adalah siswa SLP dan

sekolah menengah, termasuk SD kelas 4 - 6. Jumlah di sekolah-sekolah ini secara nasional besar sekali dibandingkan jumlah mahasiswa diperguruan tinggi. Jika anggaran tambahan yang tersedia hanya sedikit, upaya peningkatan kurang bermakna untuk sasaran sebesar itu. Oleh karena itu perlu dicari langkah strategis jangka panjang.

Pada tahap sekarang, populasi sasaran upaya peningkatan penguasaan bahasa Inggris haruslah diperkecil, dan dibatasi pada orang-orang yang potensial akan memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan bangsa dan bersaing dengan bangsa lain di arena internasional. Kelompok tersebut adalah lulusan perguruan tinggi, walaupun lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga ada yang bersaing di tingkat internasional, tetapi jumlahnya relatif kecil. Oleh karena itu, dengan keterbatasan dana yang ada seyogyanya upaya peningkatan penguasaan bahasa Inggris diprioritaskan pada jenjang pendidikan tinggi. Secara umum, penyelenggaraan pengajaran bahasa Inggris pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tetap dipertahankan seperti sekarang ini (tidak dikurangi), tetapi tambahan anggaran yang ada dipakai untuk memdorong (*push-up*) pengajaran bahasa Inggris pada jenjang pendidikan tinggi (jenjang S1, S2, dan S3). Beberapa kebijaksanaan dasar yang perlu diambil sebagai berikut :

- 1) Menetapkan penguasaan bahasa Inggris sebagai kemampuan persyaratan lulus (*exit requirement competency*) pada semua jenjang pendidikan tinggi. Pada dasarnya sebelum seorang lulus suatu program pendidikan, seorang calon lulusan harus dapat menunjukkan tingkat kemampuan bahasa Inggris tertentu. Ini analog dengan persyaratan kemampuan berbahasa asing pada sejumlah program master dan doktor di Amerika Serikat (*foreign language requirement*).
- 2) Semua jenjang pendidikan tinggi menyediakan kuliah dan kursus bahasa Inggris dengan fasilitas yang memadai: lab bahasa, perangkat lunak (buku, kaset, film, dll.).
- 3) Dikembangkan sistem penghargaan untuk mendorong mahasiswa belajar bahasa Inggris, baik dalam kuliah formal maupun dengan usaha sendiri melalui kursus, klub, dll.

- 4) Di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu dibentuk komisi pengajaran bahasa Inggris yang bertugas mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan ini.
- 5) Kerjasama dengan perguruan tinggi asing dalam penyelenggaraan program pendidikan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris perlu ditingkatkan.

### **Penutup**

Dalam tulisan telah dikaji perkembangan pengajaran bahasa Inggris secara sepintas mulai jaman penjajahan Belanda sampai dengan masa sekarang. Dari paparan tersebut dapat diambil satu kesimpulan pokok yaitu bahwa sejak jaman Belanda, walaupun bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa asing, bahasa ini memiliki peranan yang besar dalam komunikasi internasional. Peranan ini pada abad globalisasi sekarang semakin besar dan menjadi salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional.

### **Catatan**

1. Penulis pernah menjadi asisten dalam penyelenggaraan penataran guru-guru bahasa Inggris SLTP untuk Propinsi Sumatra Barat, Jambi, dan Riau yang diselenggarakan oleh proyek ini di Padang pada tahun 1969.
2. Pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999, IKIP MALANG diubah menjadi Universitas Negeri Malang (UM).
3. Pada masa ini Prof. Dr. Setijadi telah berjasa dalam mengembangkan dan memajukan IKIP MALANG dalam kapasitasnya sebagai Pembantu Rektor I (tahun 1966 - 1969). Dalam laporan The Ford Foundation tahun 1968, program ELTTP IKIP MALANG dinyatakan sebagai program pendidikan calon guru bahasa Inggris terbaik di Asia Tenggara.

## **Daftar Pustaka**

- British Council. (1998). *English Language Teaching: Frequently Asked Questions*. <http://www.britcoun.org/english/engfaqs.htm>.
- Dardjowidjojo, S. (1997). English Policies and their Classroom Impact in Some Asian/ASEAN Countries. Dalam Jacobs, G. (Ed.), *Language Classroom of Tomorrow: Issues and Responses*. Singapura: SEAMEO Regional Language Centre.
- Dardjowidjojo, S. (1998). Bahasa Asing sebagai Bahasa Pengantar dalam Sistem Pendidikan. Makalah disajikan dalam *Kongres Bahasa Indonesia VII* di Jakarta, tgl. 26 - 30 Oktober 1998.
- Depdikbud. (1997). Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1996/1997, disampaikan dalam *Rakernas Depdikbud*, di Jakarta, tgl. 3 - 7 April 1997.
- Depdikbud. (1998). Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1994/1995 s.d. 1997/1998, disampaikan dalam *Rakernas Depdikbud*, di Jakarta, tgl. 2 - 4 Mei 1998.
- Direktorat Dikmenum. (1990). *Laporan Akhir Survei Pengajaran Bahasa Inggris di SMP dan SMA Seluruh Indonesia (Lanjutan)*. Jakarta: Depdikbud.
- Graddol, D. (1997). *The Future of English?* London: The British Council.
- Gunarwan, A. (1998). Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Global. Makalah disajikan dalam *Kongres Bahasa Indonesia VII* di Jakarta, tgl. 26 - 30 Oktober 1998.
- Hamied, F.A. (1993). EFL Program Surveys in Indonesian Schools: Towards EFL Curriculum Implementation for Tomorrow. Dalam Jacobs, G.E. (Ed.) *Language Classrooms of Tomorrow: Issues and Responses*. Singapura: SEAMEO RELC.

- Huda, N. (1990). A Survey of the Teaching of English in Secondary Schools in Eight Provinces. *TEFLIN Journal*, **3**, 1, 1990.
- Huda, N. (1997). A National Strategy in Achieving English Communicative Ability: Globalization Perspectives. *Jurnal Ilmu Pendidikan (The Journal of Education)*, Vol.4, Edisi Khusus, Desember 1997.
- Huda, N. (1999a). Peningkatan Penguasaan Bahasa Inggris untuk Menghadapi Globalisasi. *Bahasa dan Seni*, **27**, 1, Februari, 1 - 17.
- Huda, N. (1999b). *Strategi Pemantapan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Pengajaran Bahasa Asing (Inggris) dalam Menghadapi Globalisasi*. Makalah disampaikan dalam Seminar Kebahasaan dan Kesastraan Majelis Bahasa Brunei-Darussalam-Indonesia-Malaysia, Malang, 8 - 9 Maret 1999.
- Huda, N. (1999c). *Language Learning and Teaching: Issues and Trends*. Malang: IKIP MALANG Publisher.
- Huda, N. (1999d). *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing*. Makalah disajikan dalam Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Cisarua, Bogor, tanggal 9 - 12 Nopember 1999.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096/1967* tentang Fungsi dan Tujuan Pengajaran Bahasa Inggris pada Lembaga-lembaga Pendidikan Tingkat Lanjutan dalam Lingkungan Departemen P dan K.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 223/U/1998* tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi.
- Nasution, S. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Dokumen diambil dari situs internet Ditjen Dikti, Depdikbud: <http://www.dikti.org/pp55.html>.

*Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Dokumen diambil dari situs internet Ditjen Dikti, Depdikbud: <http://www.dikti.org/pp56.html>.

*Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Dokumen diambil dari situs internet Ditjen Dikti, Depdikbud: <http://www.dikti.org/pp57.html>.

*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999* tentang Pendidikan Tinggi.

Sadtono, E. (1997a). ELT Development in Indonesia: A Smorgasbord. Dalam Sadtono, E. (Ed.), *The Development of TEFL in Indonesia*. Malang: The English Department of IKIP MALANG and Bina Budaya Foundation.

Sadtono, E. (1997b). *Sejarah Singkat Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia*. (Diktat) Malang: Program Pasca Sarjana, IKIP MALANG.

Suprastowo, P. (1999). Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan Permasalahannya. *Teknodik*, IV, 6, April, 28 - 34.

Tan, J.C. (1962). *English Language Teacher Training in Indonesia*. Disertasi Doktor tidak dipublikasikan, The University of Michigan.

- Thomas, M.R., Sands, L.B., dan Brubaker, D. (1968). *Strategies for Curriculum Change: Cases from 13 Nations*. Scanton, Penn.: International Textbook Company.

---

## ***BIODATA SETIJADI***

---

## **BIODATA SETIJADI**

**Setijadi** dilahirkan di Kudus pada tanggal 18 April 1929. Memperoleh kandidat (sarjana muda) dari Fakultas Sastra, Pedagogik dan Filsafat, Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1954. Pada tahun 1957, sebelum lulus sarjana, mendapat tugas belajar di *University of Colorado* untuk menyelesaikan *Master of Arts* (1958). Tahun 1964 memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* dari Cornell University.

Keterlibatannya dalam dunia pendidikan tinggi dimulai pada saat bertugas sebagai Asisten Dosen di Universitas Gajah Mada, dan selanjutnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga. Kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar pada tahun 1974, setelah FKIP Universitas Airlangga menjadi IKIP Malang. Menikah dengan Sriati Supadio pada tanggal 26 Juli 1957. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai satu orang putri dan dua orang putra, Asandimitra, Sanjaya, dan Aryasangga. Saat ini beliau sudah pula dikaruniai dua orang cucu.

Aktivitas yang dilakukan dalam mengelola pendidikan tinggi sudah diawali sejak menjabat sebagai Pembantu Rektor I IKIP Malang pada tahun 1966 – 1969. Tahun 1983 merintis pendirian Universitas Terbuka, dan terpilih menjadi Rektor Universitas Terbuka sejak berdirinya Universitas Terbuka pada tanggal 4 September 1984 sampai dengan tahun 1992.

Kepiawaiannya dalam bidang Ilmu Pendidikan menuntutnya untuk berperan memimpin beberapa lembaga yang mengembangkan program-program pendidikan, antara lain beliau pernah menjadi Kepala Proyek Penelitian Nasional Pendidikan pada tahun 1969 – 1972. Sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang – Dikbud) pada tahun 1974 – 1980 dan sebelumnya sebagai Sekretaris Balitbang – Dikbud pada tahun 1970 – 1974.

---

Salah satu hal yang ditekuni oleh beliau adalah mencetuskan gagasan, mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan jarak jauh, yang diawali dengan mempersiapkan dan melaksanakan program SMP Terbuka, yaitu program pendidikan jarak jauh untuk tingkat pendidikan menengah.

Di dunia Internasional, beliau juga banyak memiliki keterlibatan. Pada umumnya beliau terlibat pada lembaga-lembaga seperti UNESCO, SEAMEO dan beberapa lembaga internasional lain yang menangani bidang pendidikan, antara lain *Ford Foundation*, USAID dan IDRC. Pernah pula menjadi anggota dewan *International Bureau of Education* dan anggota dewan konsultan SEAMEO-INNOTECH dan UNESCO-*International Institute of Educational Planning*. Salah satu penghargaan yang telah diterima beliau sebagai perintis, ahli dan tokoh pendidikan jarak jauh adalah gelar *Doctor of Laws, honoris causa*, dari *British Columbia Open University*, Kanada, pada tahun 1993.

Di bawah kepemimpinan beliau UT berkembang dengan pesat. Dari segi kuantitas UT dapat disebut sebagai salah satu universitas terbesar di dunia, karena jumlah mahasiswa UT saat itu mencapai lebih dari 400.000 orang. Meskipun kualitas dan pelayanan masih banyak yang perlu diperbaiki, namun dampak dari adanya pendidikan melalui program jarak jauh sudah mulai dirasakan terutama dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

---

***BIODATA PENULIS***

---

## **BIODATA PENULIS**

**Agus Joko Purwanto** adalah Staf FISIP-UT sejak tahun 1992. Alumni FISIP-UNS, program studi Administrasi Negara tahun 1990. Saat ini sedang mengambil S2 di Universitas Indonesia untuk program studi Administrasi Publik. Berminat menjadi pengamat masalah-masalah yang berkaitan dengan Analisis Manajemen Publik dan Kebijakan Publik.

**Aria Djalil** lahir di Sambas Kalimantan Barat pada tanggal 10 Oktober 1941. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1954, Sekolah Guru B (SGB) pada tahun 1957, Sekolah Guru A (SGA) pada tahun 1960. Sarjana Muda Pendidikan dan Pekerjaan Kemasyarakatan diselesaikan di IKIP Bandung pada tahun 1964. Melanjutkan kembali ke IKIP Bandung pada tahun 1969 hingga mendapatkan gelar Drs dalam Pendidikan Sosial pada tahun 1971.

**Aris Pongtuluran** adalah Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya sejak tahun 1997. Lahir di Rantepao, Tana Toraja, pada tanggal 22 Desember 1932. Aktif mengajar sebagai Guru Besar pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sejak 1992, sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Administrasi Pendidikan pada Program Pascasarjana sejak 1994. Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1964, gelar MPH dicapai dari University of Michigan – USA pada tahun 1972. Tahun 1977 – 1980 menyelesaikan Program Doktor pada International Development Education Program (IDEP), University of Pittsburgh – USA. Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Depdikbud, pada tahun 1981 – 1993.

**Arlinah Imam Rahardjo** adalah Staf Ahli Rektorat Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya bidang Layanan Informasi, Desainer Sistem Otomasi Perpustakaan UK Petra, dan Ketua Tim Perancang New SPEKTRA UK Petra. Lahir di Surabaya, pada 8 Mei 1954. Menyelesaikan program S1 jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1981 dan program S2

---

diselesaikan tahun 1988 pada School of Library and Information Studies, dari University of California at Berkeley.

**Atwi Suparman** adalah Guru Besar Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka, pengajar Pasca Sarjana IKIP Jakarta, dan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur – Lembaga Administrasi Negara (LAN). Aktif pula menjadi konsultan pendidikan di berbagai lembaga seperti Institute Bankir Indonesia, PT. Telkom, Departemen Penerangan, dan Bank BNI.

**Benny A. Pribadi** adalah staf akademik FKIP Universitas Terbuka dan Kepala Pusat Produksi Multi Media Universitas Terbuka. Pada tahun 1991, menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana dalam bidang Teknologi Pendidikan di *Concordia University*, Kanada. Aktif menulis artikel ilmiah tentang media dan pendidikan jarak jauh.

**Bambang Sutjiatmo** adalah Guru Besar Perancangan dan Konstruksi Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB). Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Terbuka sejak 1996. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Teknik Mesin di ITB pada tahun 1972. Kemudian meraih gelar. Diplom-Ingénieur pada *Technische Universitaet* Hannover tahun 1976 dan Doktor Ilmu Teknik diselesaikan di ITB pada tahun 1989. Aktif melakukan penelitian, antara lain bidang dinamika struktur melalui analisis mode getar, terutama analisis ciri getaran komponen mesin.

**Conny R. Semiawan** adalah Guru Besar Tetap pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dan Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Ketua Komisi Disiplin Ilmu Pendidikan DPT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), anggota Majelis Pengembangan Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti dan anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti serta anggota Dewan Riset Nasional

**Dewi Padmo Putri** adalah staf akademik FKIP Universitas Terbuka yang sejak awal karirnya memfokuskan diri pada bidang pengembangan dan produksi program audio-visual untuk program pendidikan jarak jauh. Pendidikan magister dalam bidang Teknologi

---

Pendidikan yang diselesaikan di *Concordia University*, Kanada, pada tahun 1991, juga dikonsentrasikannya dalam bidang yang sama. Demikian pula penelitian yang dilakukan banyak berkaitan dengan pemanfaatan media dalam pendidikan jarak jauh.

**Dina Mustafa** adalah staf akademik FMIPA Universitas Terbuka dan staf profesional di Pusat Antar Universitas-Universitas Terbuka. Ia memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Instructional Design, Development and Evaluation* dari *Syracuse University, Syracuse - New York - Amerika Serikat* pada tahun 1989. Bidang yang diminatinya adalah pengembangan *computer assisted Instruction*, motivasi, pengembangan sumber daya manusia dan pembelajaran MIPA.

**Durri Andriani** adalah Lektor pada FKIP Universitas Terbuka. Lulus dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984 dan *Simon Fraser University* pada tahun 1989. Tahun 1994, menyelesaikan program doktor pada *University of Victoria*, Kanada, dalam bidang *Administrasi Pendidikan*.

**Ida Malati Sadjati** adalah staf pengajar pada FMIPA Universitas Terbuka Jurusan Biologi dan diperbantukan pada Unit Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (PAU-PPAI) sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Menyelesaikan S1 dari FKH-IPB pada tahun 1984 dan memperoleh gelar M.Ed dari *Simon Fraser University, Vancouver, Canada* pada tahun 1989. Selama berkiprah di dunia pendidikan, banyak terlibat dalam berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, lokakarya, dan internship, khususnya dalam bidang Peningkatan Mutu Instruksional dan Pengembangan Sistem Belajar Jarak Jauh.

**I.G.A.K. Wardani** adalah Lektor Kepala pada FKIP Universitas Terbuka dan saat ini menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas Terbuka bidang Kemahasiswaan. Menyelesaikan *Doctor of Education* di *State University of New York* di Albany pada tahun 1988. Sejak awal meniti karir sebagai seorang guru, banyak berkecimpung dalam pengembangan pendidikan guru. Secara aktif

---

terlibat dalam berbagai program pengembangan kurikulum, pelatihan/penataran, penelitian, serta berbagai seminar dan diskusi ilmiah.

**Marisa** adalah staf akademik FKIP Universitas Terbuka, dan sebagai staf profesional pada Pusat Antar Universitas Universitas Terbuka. Lahir di Medan 28 Maret 1963. Saat ini sedang mengikuti program S2 Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta. S1 Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta diselesaikan pada tahun 1986. Berminat mengembangkan Bahan Ajar untuk Pendidikan Jarak Jauh (Cetak dan Audio Visual).

**Nuraini Soleiman** adalah Kepala Pusat Komputer Universitas Terbuka dan mewakili FMIPA UT sebagai anggota senat universitas. Program S1 diselesaikan pada tahun 1984 dalam bidang Matematika. Adapun program S2-nya dalam bidang Manajemen Pendidikan Jarak Jauh diselesaikan di Simon Fraser University Canada tahun 1990.

**Nuril Huda** adalah Rektor Universitas Negeri Malang yang lahir di Jombang pada tanggal 2 Maret 1944. Sebelumnya menjabat sebagai Dosen dan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, FPBS IKIP Malang. Gelar Ph.D (1984) dan Master of Art (1975) diselesaikan di University of Texas at Austin.

**Paulina Pannen** adalah staf akademik pada FKIP Universitas Terbuka dan Kepala Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (PAU-PPAI) Universitas Terbuka. Menyelesaikan program Doktor dalam bidang *Instructional Design, Development and Evaluation* di *Syracuse University*, pada tahun 1990. Aktif sebagai penatar dalam pelatihan-pelatihan AA & PEKERTI di berbagai PTN dan institusi pendidikan tinggi.

---

**Prayitno** Lahir pada tanggal 21 Desember 1940 di Cilacap, Jawa Tengah. Menyelesaikan S1 di IKIP Bandung jurusan Bimbingan dan Konseling (BK) pada tahun 1965, S2 (M.Sc.Ed.) di Indiana University, USA dalam bidang BK pada tahun 1978, dan S3 (Doktor) di Indiana University, USA pada tahun 1980 juga dalam bidang BK. Kini menjadi guru besar dalam bidang BK di IKIP Padang. Selain itu, ia menjadi Ketua Unit Pelayanan BK dan Ketua Program Studi BK Pasca Sarjana IKIP Padang. Aktif pula di berbagai lembaga sebagai ketua Tim Pengembangan Program Pelayanan Bantuan kepada Mahasiswa dan perencanaan Karir Mahasiswa, Proyek Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Menengah (PGSM). Banyak karya tulis yang telah dihasilkan. Salah satu diantaranya menulis buku "*Pelayanan Bimbingan dan Konseling*" yang terdiri dari empat buku, yaitu Buku I (SD), Buku II (SLTP), Buku III (SMU), dan Buku IV (SMK).

**Purwanto** adalah Staf Pustekkom Dikbud. Lahir di Kediri pada tahun 1959. Menyelesaikan S1-nya dari IKIP Surabaya dan S2 Jurusan Teknologi Pendidikan dari IKIP Malang. Saat ini sedang menempuh Program S3 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Selama ini, penulis banyak berkiprah dalam berbagai program diklat, khususnya dalam bidang Pengembangan Sistem Instruksional, Computer Assisted instruction, Difusi dan Inovasi Pendidikan, dll.

**Siti Julaeha** adalah staf akademik FKIP Universitas Terbuka dan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Terbuka. Ia menyelesaikan *Master of Arts* di *University of Victoria*, Kanada dalam bidang *Educational Psychology* pada tahun 1995.

**Siti Rasminah Chailani S.** adalah Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJ-UT) Malang dan Guru Besar pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Lahir di Banyuwangi, 24 September 1941. Ahli Fitopatologi (Ilmu Penyakit Tumbuhan) ini menyelesaikan program S3 Ilmu Pertanian di UGM pada tanggal 23 Februari 1989. Saat ini aktif terlibat sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional (BAN). Menikah dengan H.M. Syamsidi, Bc. Hk, dikaruniai tiga orang putra.

---

**Subagjo** adalah Lektor Kepala Madya pada Jurusan Teknik Kimia ITB dan saat ini menjabat sebagai Pembantu Rektor I Universitas Terbuka. Program doktor diselesaikan di *Universite de Poitiers*, Perancis, dalam bidang Kimia Organik-Katalisis. Selain mengajar, aktif di beberapa organisasi akademis seperti Dewan Penasehat *Research Grant* UI-Pertamina, dan Tim Penyusun Kurikulum Program Pasca Sarjana Teknis Gas dan Petrokimia UI. Banyak menulis dan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal di dalam maupun di luar negeri, serta pada seminar nasional maupun internasional.

**Suciati** adalah staf Akademik FKIP Universitas Terbuka yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Menyelesaikan program Doktor di Syracuse University, New York dalam bidang Teknologi Pendidikan pada Tahun 1990. Mengawali karir sebagai seorang guru SMA di Kediri (1980 – 1982). Saat ini aktif melakukan pelatihan untuk berbagai instansi dan institusi dalam bidang Pengembangan Program Instruksional dan Pengembangan Bahan Ajar.

**Tian Belawati** adalah Lektor pada FKIP Universitas Terbuka dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka. Program Doktor diselesaikan di *University of British Columbia*, Kanada, pada bidang Ilmu Kependidikan pada tahun 1996. Sejak awal karirnya, ia telah memfokuskan diri pada penelitian dan pengembangan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Topik penelitian yang banyak digelutinya terutama mengenai kontekstualisasi sistem, metode, dan media pelayanan bantuan belajar bagi mahasiswa jarak jauh.

**Tisnowati Tamat** adalah Asisten Pembantu Rektor IV bidang kerjasama dan monitoring UPBJJ sejak tahun 1995 sampai sekarang. Lahir di Malang, 2 Agustus 1935. Lulus Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Jakarta pada tahun 1965. Magister Pendidikan Olahraga diperoleh tahun 1982 dari Fakultas Pascasarjana (FPS) IKIP Jakarta. Tahun 1985 dari FPS IKIP Jakarta pula meraih gelar Doktor Pendidikan.

---

Banyak melakukan penelitian, menulis karya ilmiah, dan mengikuti workshop atau pelatihan, terutama untuk bidang-bidang keolahragaan dan pendidikan orang dewasa.

**Toeti Soekamto** adalah Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Lahir di Semarang, 12 Desember 1932. Lulus Sarjana Muda tahun 1956 dari Fakultas W & N (Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam) – UI di Bandung (sekarang ITB), menyelesaikan kesarjanaannya dari FKIP – UI jurusan Teknik Kimia pada tahun 1964. Tahun 1976 memperoleh kesempatan mengikuti program IULS di University of NSW, Australia. Meraih gelar Magister Pendidikan tahun 1979 dan Doktor dalam bidang pendidikan tahun 1982 pada Program Pascasarjana IKIP Jakarta. Tahun 1985 mengikuti program Past – Doctorate di Suny at Albany, USA. Menikah dengan Ir. Soekamto, dianugerahi tiga orang putra yang sudah dewasa semua. Pernah menjadi Pembantu Dekan I FKIT – IKIP Jakarta (1967 – 1969), Ketua Program Teknologi Pendidikan – FPS IKIP Jakarta (1984 – 1989), terakhir menjadi Pembantu Dekan/ASS. Dir I Program Pascasarjana IKIP Jakarta (1986 – 1996). Terlibat pula sebagai salah seorang penulis Materi tentang “Teori Belajar dan Pembelajaran” untuk program PEKERTI yang dikembangkan oleh PAU – PPAI Universitas Terbuka.

**Trini Prastati** adalah staf Akademik FKIP Universitas Terbuka. Sejak tahun 1985 membantu Pusat Antar Universitas – Universitas Terbuka sebagai staf edukatif. Lahir di Jakarta, 17 September 1960. Saat ini aktif sebagai pengelola dan anggota Tim Inti Program PEKERTI/AA. Lulus S1 (1984) dan S2 (1998) dalam bidang Teknologi Pendidikan dari IKIP Jakarta.

**Udin S. Winataputra** adalah Lektor Kepala dalam bidang pembelajaran dan pendidikan nilai, dan kini menjabat sebagai Dekan FKIP Universitas Terbuka. Menyelesaikan pendidikan magister di *Macquarie University*, Australia dalam bidang *Curriculum Development*. Ia juga aktif pada berbagai organisasi profesi, diantaranya menjadi sekretaris Jenderal pada *Center for*

---

*Indonesian Civic Education (CICED)* dan anggota *Civitas International* dan *National Council for the Social Studies*. Sejak memulai perkembangan dan permasalahan pendidikan kewarganegaraan.

**Winarno Surakhmad** adalah salah seorang tokoh pendidikan yang berlatar belakang bidang Pedagogik dan Psikologi yang diselesaikan di Universitas Gajah Mada (UGM), dilanjutkan di Amerika Serikat (SUNY dan Stanford). Selain menjadi dosen, pernah menjabat sebagai Dekan dan Rektor IKIP Jakarta. Kiprahnya di luar negeri dilakukan dengan keterlibatannya sebagai konsultan atau peneliti, baik di kawasan Asia, Eropa, Afrika, maupun Amerika, antara lain di beberapa lembaga seperti Asian Development Bank, Bank Dunia, SEAMEO, UNESCO. Selain itu menjadi Guru Besar Perguruan Tinggi di Jerman dan Negara Brunei Darussalam. Aktif pula di dalam organisasi profesional kependidikan, seperti WCOTP dan IFFTU, serta anggota seumur hidup ICET. Di dalam negeri, termasuk seorang pendiri, pengurus, dan anggota ISPI. Pada saat ini banyak bergerak di bidang pemberdayaan remaja dan keluarga (The Al-Ghazali Foundation).